



**DPMPTSP
JAWA TENGAH**

KAJIAN POTENSI INVESTASI DARI NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kajian berjudul **“Kajian Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah”** dapat disusun dengan baik. Kajian ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat posisi daerah sebagai tujuan investasi yang kompetitif, khususnya untuk menarik minat investor dari kawasan Timur Tengah sebagai pasar investasi non-tradisional.

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini memuat analisis kondisi dan tren investasi di Jawa Tengah, profil dan karakteristik investor Timur Tengah, identifikasi potensi serta sektor unggulan daerah, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Selain itu, dilakukan analisis kesesuaian antara preferensi investor Timur Tengah dengan potensi sektor unggulan Jawa Tengah, yang dilengkapi dengan analisis SWOT dan analisis risiko investasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif sebagai dasar dalam meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong peningkatan investasi asing, khususnya dari negara-negara Timur Tengah, guna memperkuat perekonomian Jawa Tengah.

Kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, instansi terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa data, informasi, dan masukan selama proses penyusunan kajian ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan kajian ini. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 27 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah



Ir. Sakina Rosellasari, M.Si, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Maksud dan Tujuan	15
1.2.1 Maksud.....	15
1.2.2 Tujuan	16
1.3 Sasaran.....	16
1.4 Dasar Hukum	17
1.4.1 Nasional	17
1.4.2 Provinsi / Kabupaten.....	18
1.5 Ruang Lingkup.....	18
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR.....	22
2.1 Tinjauan Teoritis	22
2.1.1 Teori Paradigma Elektik	22
2.1.2 Teori Keunggulan Komparatif	23
2.1.3 Teori Keunggulan Kompetitif	24
2.1.4 Teori Penanaman Modal	25
2.2 Tinjauan Empiris.....	27
2.2.1 Perbandingan Kondisi PMA di Jawa Tengah dengan Daerah Lain.....	27
2.2.2 Perbandingan Realisasi PMA Berdasarkan Negara di Jawa Tengah	29
2.3 Tinjauan Kebijakan.....	32
BAB 3 GAMBARAN UMUM DAERAH	39
3.1 Lokasi Penelitian dan Kondisi Geografis	39
3.2 Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan.....	40
3.3 Aspek Sosial dan Ekonomi	43
BAB 4 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN	47
4.1 Pendekatan Penelitian	47
4.1.1 Jenis Penelitian	47
4.1.2 Desain Penelitian.....	47
4.2 Pengambilan Data	48
4.3 Pengolahan dan Analisis Data.....	49
4.4 Kerangka Pikir	50
4.5 Definisi Operasional	53
4.6 Kebutuhan Data.....	54
4.7 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli serta Tanggung Jawabnya	55

4.8	Rencana Kerja dan Pentahapan Pelaksanaan Pembahasan dan Jadwal Kegiatan.....	58
4.8.1	Tahapan Pengadaan.....	59
4.8.2	Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Kajian.....	59
4.8.3	Mekanisme Pembahasan (<i>Focus Group Discussion</i>)	60
BAB 5	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	62
5.1	Analisis Tren dan Kinerja Investasi.....	62
5.1.1	Tren Realisasi PMA di Jawa Tengah.....	62
5.1.2	Tren PMA Negara-Negara Timur Tengah di Indonesia	63
5.1.3	Tren PMA Negara-Negara Timur Tengah di Jawa Tengah	64
5.1.4	Perbandingan Nilai dan Sektor Investasi Timur Tengah di Indonesia	65
5.1.5	Posisi Kompetitif Jawa Tengah dalam Menarik Investasi Timur Tengah.....	66
5.2	Profil dan Karakteristik Investor Timur Tengah.....	67
5.2.1	Profil Perusahaan PMA Timur Tengah di Jawa Tengah dan Indonesia	68
5.2.2	Preferensi Sektor Investasi	74
5.2.3	Skala Investasi.....	77
5.2.4	Skema Kerja Sama	80
5.2.5	Faktor-Faktor Empiris yang Mempengaruhi Keputusan Investasi	83
5.2.6	Pola Masuk dan Struktur Investasi.....	85
5.2.7	Studi Kasus PT ICCS Global Industries dan PT Taibah Dua Sahabat sebagai Representasi Investor Timur Tengah di Jawa Tengah.....	87
5.2.8	Sektor Komoditas yang Diminati Investor Timur Tengah	88
5.3	Potensi dan Sektor Unggulan Jawa Tengah	89
5.3.1	Sektor Unggulan Provinsi Jawa Tengah.....	90
5.3.2	Sektor Unggulan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	98
5.3.3	Kesiapan Infrastruktur Pendukung Investasi di Jawa Tengah.....	107
5.3.4	Kesiapan dan Kelayakan Ekonomi	113
5.3.5	Kesiapan Proyek Investasi.....	120
5.4	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi (PESTLE)	122
5.4.1	Faktor Politik.....	122
5.4.2	Faktor Ekonomi.....	124
5.4.3	Faktor Sosial.....	126
5.4.4	Faktor Teknologi	127
5.4.5	Faktor Hukum dan Regulasi	128
5.4.6	Faktor Lingkungan	130
5.5	Analisis Kesesuaian Investor Timur Tengah dengan Potensi Jawa Tengah	132
5.5.1	Kesesuaian Sektoral	132
5.5.2	Kesesuaian Karakteristik Investasi	139

5.5.3 Kesesuaian Sosial dan Budaya	143
5.5.4 Kesesuaian Lingkungan Strategis	145
5.6 Sektor Unggulan Sesuai dengan Minat Investor Timur Tengah.....	147
5.6.1 Sektor Industri Pengolahan.....	148
5.6.2 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	153
5.6.3 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	158
5.6.4 Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).....	164
5.6.5 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	167
5.6.6 Sektor Konstruksi.....	171
5.7 Analisis SWOT Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah	174
5.7.1 Kekuatan (Strength)	174
5.7.2 Kelemahan (Weaknesses).....	176
5.7.3 Peluang (Opportunities).....	177
5.7.4 Ancaman (Threats).....	178
5.7.5 Rumusan Strategi SWOT (SO, ST, WO, WT).....	179
5.8 Analisis Risiko Investasi	180
5.8.1 Risiko Ekonomi dan Nilai Tukar	181
5.8.2 Risiko Politik dan Geopolitik	182
5.8.3 Risiko Regulasi dan Kepastian Hukum	182
5.8.4 Risiko Lingkungan dan Infrastruktur	183
5.8.5 Risiko Sosial Budaya	183
5.8.6 Rekapitulasi Risiko Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah	184
5.8.7 Analisis Mitigasi Risiko Investasi.....	188
5.9 Analisis Regulasi, Kebijakan, dan Iklim Investasi	195
5.9.1 Kebijakan Nasional dan Daerah Terkait Penanaman Modal.....	195
5.9.2 Kemudahan Perizinan dan Kepastian Hukum.....	196
5.9.3 Fasilitas dan Insentif Investasi	197
5.9.4 Hambatan Regulasi dan Kelembagaan	198
5.10 Strategi Peningkatan Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah	199
5.10.1 Strategi dan Media Promosi Investasi	199
5.10.2 Penguatan Jejaring Diplomatik dan Kerja Sama Kelembagaan	200
5.10.3 Peningkatan Daya Saing Daerah: Regulasi, Perizinan, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia.....	201
5.10.4 Pengembangan Model Kemitraan dan Keselarasan dengan Standar Global .	202
5.10.5 Rekomendasi Promosi IPRO Berdasarkan Profil Investor Timur Tengah	202
5.10.6 Matriks Strategi Peningkatan PMA Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah	204

BAB 6 PENUTUP	213
6.1 Kesimpulan.....	213
6.2 Rekomendasi	215
GLOSARIUM	219
DAFTAR PUSTAKA	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi PMA 5 Negara Timur Tengah (USD Ribu)	13
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	39
Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah 2021-2025 (Jiwa).....	41
Gambar 3. 3 PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah)	44
Gambar 4. 1 Kerangka Pikir	51
Gambar 5. 1 Tren Realisasi PMA di Jawa Tengah (USD Ribu)	63
Gambar 5. 2 Matrix Tipologi Sektoral di Jawa Tengah	94
Gambar 5. 3 Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Sesuai dengan Minat Investor Timur Tengah 2025 (Miliar Rupiah)	148
Gambar 5. 4 PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah (Miliar Rupiah) ...	149
Gambar 5. 5 Persebaran Sektor Unggulan Industri Pengolahan di Jawa Tengah.....	150
Gambar 5. 6 PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)	153
Gambar 5. 7 Persebaran Sektor Unggulan Akomodasi & Makan Minum di Jawa Tengah...	154
Gambar 5. 8 Perkembangan Jumlah Restoran di Provinsi Jawa Tengah	155
Gambar 5. 9 PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)	158
Gambar 5. 10 Persebaran Sektor Pertanian, Perikanan, Perhutanan di Jawa Tengah	159
Gambar 5. 11 Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah (Ha)	160
Gambar 5. 12 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Tengah (KG)	162
Gambar 5. 13 PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)	165
Gambar 5. 14 PDRB Sektor Perdagangan Besar di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)	168
Gambar 5. 15 Persebaran Sektor Perdagangan di Jawa Tengah	169
Gambar 5. 16 PDRB ADHK Sektor Konstruksi di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)	171
Gambar 5. 17 Persebaran Sektor Konstruksi di Jawa Tengah	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Investasi di Jawa Tengah PMA & PMDN Tahun 2021-2025	11
Tabel 1. 2 Negara Asal Investasi PMA di Jawa Tengah Tahun 2025	12
Tabel 2. 1 Realisasi PMA 2021-2025 di Indonesia (USD Ribu)	27
Tabel 2. 2 Realisasi PMA Berdasarkan Negara di Jawa Tengah (USD Ribu)	29
Tabel 2. 3 Tinjauan Kebijakan Penanaman Modal	32
Tabel 3. 1 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021-2025 Per Agustus (Jiwa)	42
Tabel 3. 2 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)	42
Tabel 3. 3 PDRB ADHK Sektoral di Jawa Tengah (Milyar Rupiah)	45
Tabel 4. 1 Definisi Operasional	53
Tabel 4. 2 Kebutuhan Data	54
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Kebutuhan Personil Tim Kajian	55
Tabel 4. 4 Jadwal Penugasan Personil Tim Kajian	56
Tabel 4. 5 Tugas dan Tanggung Jawab Personil Tim Kajian	56
Tabel 4. 6 Timeline Pengadaan Penyusunan Kajian	59
Tabel 4. 7 Timeline Pelaksanaan Penyusunan Kajian	60
Tabel 5. 1 Tren Realisasi Investasi 5 Negara Timur Tengah di Indonesia (USD Ribu)	63
Tabel 5. 2 Tren Realisasi Investasi 5 Negara Timur Tengah di Jawa Tengah (USD Ribu)	64
Tabel 5. 3 Perbandingan Nilai dan Sektor Investasi Negara Timur Tengah di Indonesia 2025 (USD Ribu)	65
Tabel 5. 4 Posisi Kompetitif Jawa Tengah dalam Penyerapan Investasi Timur Tengah	66
Tabel 5. 5 Perusahaan PMA Timur Tengah di Jawa Tengah 2025	68
Tabel 5. 6 Realisasi Investasi dari Timur Tengah di Indonesia Tahun 2025 (USD Ribu)	70
Tabel 5. 7 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) di Jawa Tengah	91
Tabel 5. 8 Hasil Analisis <i>Shift Share</i> di Jawa Tengah	93
Tabel 5. 9 Analisis Tipologi Klassen Jawa Tengah	95
Tabel 5. 10 Rekapitulasi Sektor Unggulan di Jawa Tengah	96
Tabel 5. 11 Hasil Analisis Static <i>Location Quotient</i> (LQ) di Kabupaten/Kota Jawa Tengah .	99
Tabel 5. 12 Hasil Analisis <i>Shift Share</i> di Jawa Tengah	100
Tabel 5. 13 Analisis Tipologi Klassen di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	102
Tabel 5. 14 Analisis LQ, SS, dan Tipologi Klassen di Kabupaten Kota Jawa Tengah	103
Tabel 5. 15 Rekapitulasi Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten/Kota	105
Tabel 5. 16 Peruntukan Kawasan Industri	107
Tabel 5. 17 Infrastruktur Penunjang	110
Tabel 5. 18 Proyek Siap di Tawarkan di Jawa Tengah	120
Tabel 5. 19 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Sektoral	138
Tabel 5. 20 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Karakteristik	142
Tabel 5. 21 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Sosial dan Budaya	144
Tabel 5. 22 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Lingkungan Strategis	147
Tabel 5. 23 Peranan NTB Subkategori Industri Pengolahan Terhadap NTB Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah (Persen)	150
Tabel 5. 24 Minat Investor Timur Tengah pada Subsektor Industri Pengolahan di Indonesia	151

Tabel 5. 25 Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya di Provinsi Jawa Tengah	154
Tabel 5. 26 Klaster Destinasi Wisata Potensial di Provinsi Jawa Tengah	155
Tabel 5. 27 Daftar Perusahaan Timur Tengah di Bidang Pariwisata, Akomodasi, dan Restoran	156
Tabel 5. 28 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Tengah (Ton).....	160
Tabel 5. 29 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	161
Tabel 5. 30 Minat Investasi Timur Tengah di Sektor Pertanian & Kehutanan.....	162
Tabel 5. 31 Potensi dan Sebaran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Tengah.....	165
Tabel 5. 32 Daftar Perusahaan Timur Tengah di Bidang Energi Terbarukan	166
Tabel 5. 33 Sepuluh Komoditas Ekspor Unggulan Jawa Tengah Menurut Sektor dan Nilai Ekspor (FOB) Tahun 2025.....	169
Tabel 5. 34 Komoditas Impor dan Negara Asal Impor Utama Negara-Negara Timur Tengah	170
Tabel 5. 35 Daftar Perusahaan dan Lembaga Timur Tengah di Bidang Konstruksi dan Infrastruktur.....	173
Tabel 5. 36 Rumusan Strategi SWOT Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah	179
Tabel 5. 37 Rekapitulasi Risiko Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah	186
Tabel 5. 38 Matriks Mitigasi Risiko Investasi Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah	192
Tabel 5. 39 Pemetaan Penawaran IPRO Berdasarkan Negara Target dan Entitas Timur Tengah	202
Tabel 5. 40 Matriks Roadmap Strategi Peningkatan PMA Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045.....	205

DAFTAR SINGKATAN

DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	: Badan Pusat Statistik
PBBR	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
RUPM	: Rencana Umum Penanaman Modal
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
PESTLE	: <i>Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental</i>
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
IPRO	: <i>Investment Project Ready to Offer</i>
LQ	: <i>Location Quotient</i>
SS	: <i>Shift Share</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
ESG	: <i>Environmental, Social, and Governance</i>
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan dalam perekonomian suatu negara atau daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup aspek pemerataan distribusi pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf kesejahteraan, dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif teori Harrod-Domar, penanaman modal memegang peranan penting sebagai faktor utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya berfungsi sebagai komponen permintaan agregat, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi melalui akumulasi modal. Semakin tinggi realisasi investasi, maka semakin besar potensi peningkatan output atau Produk Domestik Bruto (PDB), dengan asumsi tingkat tabungan memadai dan penggunaan modal dilakukan secara efisien. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional secara komprehensif, yaitu melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penanaman modal bertujuan untuk memperkuat daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas serta kemampuan teknologi dalam negeri, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut, penanaman modal juga berperan dalam mengolah potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Untuk menilai keberhasilan penyerapan investasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dilihat dari besarnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah tersebut. PMA merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing baik individu, badan usaha, maupun pemerintah asing untuk

menjalankan usaha di Indonesia, dengan sumber modal yang dapat sepenuhnya berasal dari luar negeri atau bekerja sama dengan investor domestik. Sementara itu, PMDN adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri, seperti warga negara Indonesia, badan usaha nasional, atau pemerintah, dengan menggunakan sumber pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri tanpa keterlibatan modal asing.

Tabel 1. 1 Realisasi Investasi di Jawa Tengah PMA & PMDN Tahun 2021-2025

Tahun	PMA (USD Ribu)	PMDN (Rp. Juta)
2021	1.465.939,30	31.311.180,80
2022	2.362.039,00	24.992.291,60
2023	1.563.663,60	32.987.199,80
2024	2.358.035	33.298.702,94
2025	3.178.822,84	37.639.129,94

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi investasi di Jawa Tengah selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, terutama pada PMA. Nilai PMA sempat meningkat tajam dari tahun 2021 ke 2022, kemudian menurun pada 2023, sebelum kembali meningkat signifikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 3.178.822,84 ribu USD. Sementara itu, PMDN cenderung lebih stabil meskipun sempat mengalami penurunan pada 2022, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp37.639.129,94 juta. Secara umum, tren ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di Jawa Tengah semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia terutama Jawa Tengah, meskipun masih diwarnai oleh dinamika ekonomi global.

PMA merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan penyerapan investasi di Indonesia. Melalui PMA, pemerintah membuka peluang bagi pihak asing untuk berinvestasi, baik dalam bentuk penanaman modal maupun pembangunan usaha di berbagai sektor. Investasi ini berasal dari berbagai negara yang tersebar di berbagai kawasan dunia, sehingga mencerminkan adanya keterlibatan global dalam perekonomian nasional. Dengan adanya PMA, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri.

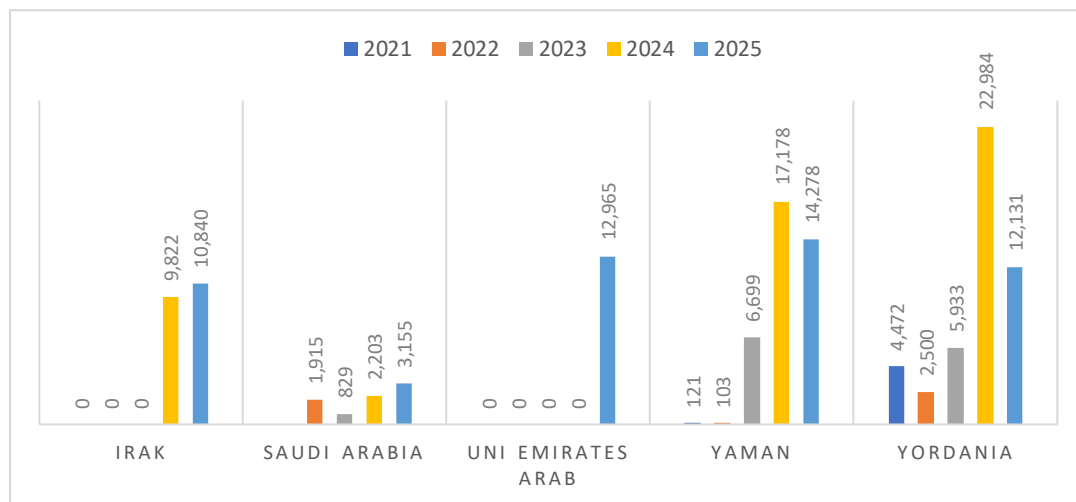
Tabel 1. 2 Negara Asal Investasi PMA di Jawa Tengah Tahun 2025

Peringkat	Negara Asal	Nilai Investasi (USD)	Persentase Kontribusi
1	Hong Kong	12.925.701,97	25.41%
2	Singapura	11.431.622,89	22.47%
3	Tiongkok	10.127.248,01	19.91%
4	Korea Selatan	4.960.461,69	9.75%
5	Samoa Barat	2.956.269,62	5.81%
...	...	...	...
26	Yaman	14.278,23	0.03%
28	Uni Emirat Arab	12.965,13	0.03%
29	Yordania	12.130,50	0.02%
31	Irak	10.840,00	0.02%
40	Saudi Arabia	3.154,90	0.01%
43	Lebanon	2.229,34	0.00%
46	Suriah	888,73	0.00%
49	Iran	225,81	0.00%

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Tabel 1.2 menunjukkan adanya dominasi yang sangat timpang dalam realisasi PMA di Jawa Tengah pada tahun 2025, di mana konsentrasi modal masih terpusat pada lima negara mitra utama di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang secara akumulatif menguasai lebih dari 83% total investasi. Peringkat teratas diduduki oleh Hong Kong dengan kontribusi sebesar 25,41%, disusul oleh Singapura (22,47%) dan Tiongkok (19,91%). Sebaliknya, kontribusi negara-negara dari kawasan Timur Tengah menunjukkan angka yang sangat kontras dan berada jauh di peringkat bawah, seperti Yaman (0,03%), Uni Emirat Arab (0,03%), Yordania (0,02%), Irak (0,02%), hingga Saudi Arabia yang hanya menyumbang 0,01% dari total realisasi PMA.

Kesenjangan penyerapan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian strategis, mengingat negara-negara Timur Tengah sebenarnya memiliki kapasitas modal global yang besar dan profil investor dengan karakteristik jangka panjang yang sangat kuat namun belum mampu untuk menarik modal hingga 1% di Jawa Tengah. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mendasar mengenai belum efektifnya pemetaan preferensi investor spesifik dan strategi promosi daerah dalam menjangkau pasar non-tradisional ini. Hal inilah menjadi pentingnya dilakukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan strategi pendekatan yang lebih tepat guna menarik minat para pemilik modal dari Timur Tengah ke Jawa Tengah.



Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi PMA 5 Negara Timur Tengah (USD Ribu)

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026 (diolah).

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan realisasi investasi dari lima negara Timur Tengah di Jawa Tengah selama periode 2021-2025 cenderung berfluktuasi dan relatif kecil. Tidak semua negara berkontribusi secara konsisten setiap tahunnya, bahkan beberapa seperti Irak dan Uni Emirat Arab tidak menunjukkan realisasi pada tahun-tahun awal. Saudi Arabia mengalami peningkatan secara bertahap, namun nilainya masih terbatas. Sementara itu, Yaman dan Yordania menjadi negara dengan kontribusi yang relatif lebih besar dibandingkan lainnya, di mana Yaman mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 sebelum menurun kembali, sedangkan Yordania menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dan mencapai puncaknya pada tahun 2024. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa investasi dari kawasan Timur Tengah masih belum stabil dan belum optimal, meskipun terdapat potensi peningkatan pada beberapa negara.

Investor Timur Tengah dikenal memiliki karakteristik investasi yang spesifik, antara lain kecenderungan memilih investasi berjangka panjang, perhatian pada kepastian hukum dan

regulasi, serta fokus pada sektor-sektor yang menawarkan pengembalian stabil dan prospektif. Kawasan ini juga cenderung melakukan diversifikasi portofolio investasi internasional melalui kemitraan strategis di sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, pariwisata, properti, dan sektor halal yang tumbuh cepat sejalan dengan dinamika global. Perubahan tren global, termasuk pergeseran fokus investasi pasca-pandemi dan dinamika geopolitik, menunjukkan bahwa Indonesia perlu memetakan dengan cermat preferensi investor dari Timur Tengah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki serangkaian keunggulan komparatif yang dapat menjadi daya tarik bagi investor asing, termasuk yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Keunggulan ini antara lain: letak geografis strategis di tengah Pulau Jawa, infrastruktur yang terus berkembang, stabilitas sosial dan politik yang kondusif, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif. Beragam potensi sektor unggulan seperti industri manufaktur, pariwisata, agribisnis, dan energi terbarukan juga dapat menjadi basis penawaran investasi yang menarik.

Meskipun demikian, potensi tersebut perlu dikemas dan disajikan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan karakteristik calon investor. Pemetaan khusus mengenai potensi investasi Jawa Tengah yang dikaitkan secara langsung dengan preferensi dan kebutuhan investor dari wilayah Timur Tengah masih relatif terbatas. Kondisi ini dapat menjadi kendala dalam upaya promosi investasi yang lebih efektif dan terfokus. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah, yang mencakup analisis karakteristik investor, sektor prioritas yang diminati, harapan dan kebutuhan investor, serta kesesuaian potensi unggulan Jawa Tengah untuk ditawarkan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan realisasi PMA sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mendorong kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pemberian fasilitas, dan kemudahan berusaha. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator dengan mendorong pemerataan investasi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mempercepat realisasi penanaman modal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui penyusunan

kajian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat posisi daerah sebagai tujuan investasi yang kompetitif, meningkatkan realisasi penanaman modal asing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Kajian Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah adalah sebagai dasar analitis dan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan daya tarik dan realisasi investasi yang bersumber dari negara-negara Timur Tengah. Kajian ini dimaksudkan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan berbasis data mengenai karakteristik investor, potensi sektor unggulan, serta kesesuaian antara kebutuhan investor Timur Tengah dengan peluang investasi yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Secara lebih khusus, kajian ini dimaksudkan untuk :

1. Mengidentifikasi dan memetakan karakteristik investor dari negara-negara Timur Tengah, termasuk pola pengambilan keputusan, preferensi sektor investasi, skema kemitraan, serta ekspektasi terhadap tingkat pengembalian dan kepastian usaha;
2. Mengidentifikasi profil investor strategis dari negara-negara Timur Tengah yang berpotensi untuk mengembangkan kegiatan usahanya di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah;
3. Menggali dan menganalisis potensi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah yang memiliki daya tarik dan relevansi tinggi bagi investor Timur Tengah;
4. Menyediakan informasi investasi yang terarah, akurat, dan mudah dipahami, sebagai bahan promosi investasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan calon investor dari kawasan Timur Tengah;
5. Menjadi dasar penyusunan dan penguatan proyek investasi siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO) yang memiliki nilai tambah, kelayakan ekonomi, dan kesesuaian dengan minat investor dari Timur Tengah;
6. Mendukung perumusan strategi promosi investasi daerah yang lebih fokus dan efektif, khususnya dalam memperluas sumber Penanaman Modal Asing (PMA) non-tradisional serta memperkuat kemitraan investasi jangka panjang.

Melalui penyusunan kajian ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rujukan strategis yang kuat dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan promosi penanaman modal yang lebih terarah, sehingga mampu meningkatkan realisasi penanaman

modal, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

1. Menganalisis karakteristik dan pola investasi investor dari negara-negara Timur Tengah, termasuk preferensi sektor, skala investasi, skema kerja sama, serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi;
2. Menganalisis profil investor strategis dari negara-negara Timur Tengah yang berpotensi mengembangkan kegiatan usahanya di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah;
3. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan proyek potensial di Jawa Tengah yang memiliki daya tarik tinggi dan kesesuaian dengan minat serta kebutuhan investor dari kawasan Timur Tengah;
4. Menilai tingkat kesiapan Jawa Tengah sebagai tujuan investasi, ditinjau dari aspek regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, kemudahan perizinan, serta dukungan kebijakan daerah;
5. Menyusun rekomendasi strategis dalam rangka peningkatan promosi investasi daerah, khususnya untuk menarik investasi yang bersumber dari negara-negara Timur Tengah secara lebih terarah dan efektif;
6. Menjadi dasar dalam penyusunan dan penguatan proyek investasi siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO) yang layak secara teknis, ekonomi, dan regulasi, serta sesuai dengan karakteristik investor dari Timur Tengah;
7. Mendukung upaya diversifikasi sumber Penanaman Modal Asing (PMA) dan peningkatan kualitas investasi yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kajian potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi dan tren PMA di Jawa Tengah, khususnya dari kawasan Timur Tengah
2. Mengidentifikasi profil, karakteristik, dan preferensi investor dari negara-negara Timur Tengah
3. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di Jawa Tengah
4. Mengidentifikasi potensi sektor unggulan dan proyek investasi di Jawa Tengah

5. Menganalisis kesesuaian antara karakteristik & preferensi investor Timur Tengah dengan potensi investasi Jawa Tengah
6. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penanaman investasi di Jawa Tengah
7. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam pelaksanaan investasi.
8. Merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk meningkatkan daya tarik dan penyerapan investasi asing dari negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah.

1.4 Dasar Hukum

Untuk memastikan bahwa arah kajian ini memiliki landasan yang kuat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan dasar hukum yang jelas sebagai landasan pada kajian ini. Dasar hukum tersebut berperan sebagai pijakan normatif sekaligus pedoman dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan rekomendasi yang dihasilkan. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Nasional

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

1.4.2 Provinsi / Kabupaten

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 Dengan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah mencakup seluruh rangkaian kegiatan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan merumuskan potensi serta strategi menarik investasi yang bersumber dari negara-negara Timur Tengah bagi Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup kajian ini meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup pada kajian difokuskan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan:

1. Potensi investasi kabupaten/kota;

2. Kawasan strategis termasuk kawasan peruntukan industri, kawasan budidaya, dan kawasan lain yang selaras dengan investasi;
3. Wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif bagi investor Timur Tengah.

1.5.2 Ruang Lingkup Subjek Investor

Kajian mencakup analisis terhadap investor yang berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, antara lain:

1. Yaman;
2. Uni Emirat Arab;
3. Yordania;
4. Irak;
5. Saudi Arabia.

1.5.3 Ruang Lingkup Aspek Kajian

Ruang lingkup kajian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terstruktur dalam menganalisis potensi investasi negara-negara Timur Tengah, antara lain

1. Analisis Karakteristik Investor Timur Tengah Mencakup identifikasi pola perilaku investasi, preferensi sektor, skala modal, skema pembiayaan, tingkat toleransi risiko, serta faktor non-ekonomi seperti budaya dan kepercayaan.
2. Analisis Tren dan Kinerja Investasi Meliputi peninjauan tren PMA dari Timur Tengah ke Indonesia dan Jawa Tengah, perbandingan nilai dan sektor, posisi kompetitif daerah, serta identifikasi peluang dan tantangan pasar.
3. Analisis Calon Investor Potensial dengan menyusun profil perusahaan strategis yang mencakup nama entitas, bidang usaha, negara asal, sinyal investasi, dan pemantauan tren global.
4. Analisis Potensi dan Sektor Unggulan Jawa Tengah dengan mengidentifikasi sektor yang memiliki daya saing komparatif dan kompetitif, ketersediaan lahan, infrastruktur, sumber daya, serta kesesuaian potensi daerah dengan pasar global.
5. Analisis Regulasi, Kebijakan, dan Iklim Investasi dengan menganalisis kebijakan penanaman modal nasional dan daerah, kemudahan perizinan, fasilitas insentif, serta hambatan regulasi atau kelembagaan.
6. Analisis Proyek Investasi Unggulan dengan melakukan analisis Kesesuaian untuk menentukan proyek yang sesuai dengan karakter investor, menilai kesiapan lahan dan perizinan, serta kelayakan ekonomi teknis awal.

7. Analisis Strategi Promosi dan Kerja Sama Investasi dengan merumuskan metode promosi yang efektif, pola komunikasi kepada investor, model kemitraan, dan strategi peningkatan daya tarik investasi daerah.
8. Analisis Risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko politik, ekonomi, dan geopolitik serta merumuskan rekomendasi mitigasi terhadap potensi ancaman tersebut.
9. Perumusan Rekomendasi Strategis dengan menyusun rencana aksi yang terarah dan aplikatif untuk menarik investasi Timur Tengah, yang mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Pendahuluan untuk kegiatan Kajian Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah, secara berturut-turut yakni sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang kajian mengenai potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, bab ini memuat maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan. Bab I berfungsi sebagai landasan konseptual dan yuridis dalam upaya peningkatan Pertumbuhan PMA dari negara-negara Timur Tengah & Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

b. Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini menyusun kerangka teoretis sebagai dasar analisis melalui empat teori utama, yaitu Teori Paradigma Elektik (Dunning), Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo), Teori Keunggulan Kompetitif (Porter), serta Teori Penanaman Modal yang relevan dengan pengambilan keputusan multikriteria. Selanjutnya, disajikan tinjauan empiris sebagai referensi untuk menggambarkan fenomena dan permasalahan yang terkait dengan kajian ini, serta pada bagian akhir dilengkapi dengan tinjauan kebijakan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kerangka regulasi, kewajiban pelaku usaha, dan jaminan kepastian hukum oleh instansi serta lembaga terkait

c. Bab III Gambaran Umum

Bab ini menyajikan gambaran umum Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian yang mencakup aspek geografis, demografis, ketenagakerjaan, serta kondisi sosial ekonomi sebagai dasar dalam analisis potensi investasi.

d. Bab IV Metodologi Pelaksanaan Kajian

Bab ini menguraikan metodologi pelaksanaan kajian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Selain itu, disajikan kerangka pikir, definisi operasional, serta kebutuhan data yang digunakan sebagai dasar dalam mendukung proses analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan investasi.

e. Bab V Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Analisis dilakukan terhadap karakteristik dan preferensi investor Timur Tengah, tren investasi, profil calon investor potensial, serta sektor-sektor unggulan yang memiliki daya tarik investasi. Selain itu, bab ini juga mengkaji tingkat kesiapan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang ditinjau dari aspek regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, kemudahan perizinan, dan dukungan kebijakan daerah. Hasil kajian tersebut selanjutnya dirangkum sebagai dasar analisis kesesuaian untuk menilai tingkat kecocokan antara preferensi investor Timur Tengah dengan potensi investasi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan strategi dan rekomendasi pengembangan promosi investasi daerah yang lebih terarah, efektif, dan selaras dengan karakteristik serta kebutuhan investor dari kawasan Timur Tengah.

f. Bab VI Penutup

Memuat kesimpulan dari pelaksanaan kajian yang dilakukan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan penerimaan penanaman modal asing, khususnya dari negara-negara Timur Tengah.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Paradigma Elektik

Paradigma elektik memberikan suatu kerangka umum untuk menjelaskan tingkat serta pola produksi yang dimiliki oleh perusahaan domestik di luar negeri maupun produksi dalam negeri yang dikendalikan oleh perusahaan asing. Pendekatan ini berangkat dari teori perdagangan tradisional, khususnya Heckscher-Ohlin-Samuelson, dalam menerangkan distribusi spasial beberapa jenis output. Namun, untuk memahami kepemilikan dan persebaran jenis output lainnya, paradigma ini menekankan pentingnya faktor sumber daya, kapabilitas, dan institusi yang tidak dapat diakses secara merata oleh semua perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan ketidaksempurnaan pasar menjadi kunci, yaitu berupa kegagalan pasar struktural yang membatasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan hak kepemilikan serta mengelola aktivitas bernilai tambah yang tersebar secara geografis, serta kegagalan intrinsik pasar produk dalam melakukan transaksi barang dan jasa secara lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme yang diatur secara internal oleh perusahaan (Dunning & Lundan, 2008).

Aktivitas ekonomi internasional suatu perusahaan ditentukan oleh terpenuhinya tiga jenis keunggulan utama. Diantaranya yaitu:

1. Keunggulan Kepemilikan (O)

Keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*), yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki atau mengakses aset tertentu yang tidak mudah diperoleh oleh pesaing di negara lain. Aset tersebut meliputi aset berwujud seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal, serta aset tidak berwujud seperti teknologi, kemampuan manajerial, keahlian pemasaran, dan akses terhadap pasar.

2. Keunggulan Lokasi (L)

Keunggulan lokasi (*location advantages*), yaitu daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi dibandingkan negara lain. Keunggulan ini dapat berupa faktor ekonomi, sosial, maupun politik, serta perbedaan *endowment* antarnegara seperti biaya tenaga kerja yang lebih rendah, biaya transportasi, tingkat risiko pasar, dan potensi permintaan. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kapabilitas, dan institusi antarwilayah menjadi faktor yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi negara tertentu.

3. Keunggulan Internalisasi (I)

Keunggulan internalisasi (*internalization advantages*), yaitu manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengelola sendiri aktivitas usahanya dibandingkan menyerahkan kepada pihak lain melalui lisensi atau kerja sama. Keunggulan ini muncul karena perusahaan dapat menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dengan menginternalisasi proses produksi maupun distribusi. Dengan demikian, perusahaan cenderung memilih investasi langsung (FDI) apabila dinilai memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan alternatif lain seperti lisensi atau kemitraan dengan perusahaan asing.

Dengan demikian, paradigma elektik (OLI) digunakan dalam kajian potensi investasi asing mampu menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Keunggulan kepemilikan (O) berkaitan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki investor Timur Tengah, keunggulan lokasi (L) menyoroti daya tarik Jawa Tengah sebagai tujuan investasi melalui ketersediaan sumber daya, infrastruktur, serta iklim usaha, sedangkan keunggulan internalisasi (I) menjelaskan kecenderungan investor untuk memilih investasi langsung guna memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. Oleh karena itu, melalui pendekatan OLI, analisis potensi investasi tidak hanya melihat ketersediaan sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian karakteristik wilayah dengan kebutuhan investor, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam menarik investasi asing ke Jawa Tengah.

2.1.2 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo sebagai penyempurna dari teori keunggulan absolut Adam Smith, yang belum mempertimbangkan kondisi ketika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tertentu dibandingkan negara lain, seperti yang sering terjadi pada negara berkembang. Ricardo menjelaskan bahwa keunggulan komparatif merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya relatif yang lebih rendah dibandingkan negara lain, sehingga negara tersebut memperoleh keuntungan dari spesialisasi produksi (Mahri *et al.*, 2021).

Dalam hal ini, suatu negara akan cenderung mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif lebih rendah. Perdagangan internasional pun terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif antarnegara, yang mendorong masing-masing negara untuk fokus pada sektor yang

paling efisien. Dengan demikian, keunggulan komparatif tercapai ketika suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah lebih besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain (Maulana *et al.*, 2024).

David Ricardo mengemukakan teori keunggulan komparatif yang menekankan bahwa suatu negara atau wilayah sebaiknya memfokuskan diri pada produksi barang dan jasa yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Dengan melakukan spesialisasi pada sektor yang relatif lebih efisien, suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional melalui ekspor, sekaligus mengimpor komoditas yang lebih efisien diproduksi oleh pihak lain.

Dalam penerapannya teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki efisiensi relatif tinggi, seperti industri padat karya, manufaktur, atau sektor berbasis sumber daya lokal. Keunggulan komparatif tersebut menjadi dasar penting bagi investor asing dalam menentukan lokasi investasi, karena investor cenderung memilih wilayah yang mampu memberikan biaya produksi lebih rendah dan potensi keuntungan yang lebih besar.

2.1.3 Teori Keunggulan Kompetitif

Teori keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Michael E. Porter menjelaskan bahwa keberhasilan suatu perusahaan atau wilayah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan harga atau kualitas produk, tetapi juga kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar dan dinamika persaingan global. Dalam konteks investasi asing, wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif akan lebih menarik bagi investor karena dinilai mampu memberikan prospek keuntungan yang berkelanjutan serta risiko usaha yang lebih rendah.

Dalam perspektif teori, keunggulan kompetitif menurut Michael E. Porter adalah kemampuan untuk menciptakan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing. Keunggulan ini dapat dicapai melalui strategi biaya rendah atau diferensiasi produk, serta pengelolaan aktivitas dalam rantai nilai. Konsep ini tidak hanya berlaku pada perusahaan, tetapi juga pada tingkat wilayah. Pada tingkat daerah, keunggulan kompetitif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kualitas infrastruktur, kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya, dan dinamika pasar (Malhotra & Hinings, 2015).

Di sisi lain, analisis lingkungan eksternal melalui model *Five Forces* juga memengaruhi keputusan investasi asing. Faktor seperti tingkat persaingan industri, ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok dan konsumen, serta keberadaan produk substitusi akan menentukan daya tarik suatu wilayah bagi investor. Oleh karena itu, daerah yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, regulasi yang stabil, serta keterbukaan terhadap investasi akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin kuat keunggulan kompetitif suatu wilayah, semakin besar pula peluangnya dalam menarik investasi asing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (Maulana *et al.*, 2024)

Keunggulan kompetitif merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal maupun mengembangkan usahanya di suatu daerah. Keunggulan ini tidak hanya tercermin dari aspek biaya atau sumber daya, tetapi juga dari kualitas infrastruktur, kemudahan perizinan, stabilitas kebijakan, serta dukungan lingkungan usaha yang kondusif. Selain itu, adanya kesamaan karakteristik ekonomi, kesesuaian visi pembangunan, serta kecocokan sektor unggulan antara daerah tujuan dan negara asal investor turut menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, daerah yang mampu membangun dan memperkuat keunggulan kompetitifnya akan memiliki daya tarik lebih tinggi bagi investor asing, karena dinilai mampu memberikan peluang keuntungan yang optimal sekaligus meminimalkan risiko usaha.

2.1.4 Teori Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan bentuk investasi yang ditanamkan dalam berbagai sektor ekonomi, terutama sektor industri yang memiliki tingkat fluktuasi tinggi namun juga didukung oleh permintaan yang besar, sehingga menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Melalui penanaman modal, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, lapangan kerja dapat tercipta, serta pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara berkelanjutan. Secara umum, penanaman modal terbagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bersumber dari pelaku ekonomi domestik, serta penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari investor luar negeri. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi, di mana PMDN memperkuat struktur ekonomi nasional, sementara PMA memberikan tambahan modal, teknologi, dan pengetahuan, sehingga secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Putri *et al.*, 2022).

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penanaman modal dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal

dalam negeri maupun asing, untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Penanaman modal terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang menggunakan sumber modal domestik, serta penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari pihak luar negeri, baik sepenuhnya maupun melalui kerja sama dengan pihak dalam negeri. Pelaku penanaman modal dapat berupa individu maupun badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan modal berupa aset bernilai ekonomis dalam bentuk uang atau non-uang. Selain itu, regulasi ini juga mengatur aspek pendukung seperti pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan, serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Penanaman modal memegang peranan krusial dalam perekonomian makro karena menjadi salah satu komponen utama pembentukan modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 3, tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak asing dengan tujuan menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia. Investasi ini dapat berbentuk kepemilikan modal sepenuhnya oleh pihak asing atau melalui kerja sama dengan modal domestik. PMA menjadi salah satu sarana bagi investor luar negeri untuk menanamkan modalnya, baik melalui pendirian perusahaan baru, pembelian seluruh saham, maupun akuisisi perusahaan yang sudah ada. Secara umum, PMA dapat dipahami sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dari negara asal investor atau oleh suatu negara ke negara lain atas nama pemerintahnya (Putri *et al.*, 2022).

Mekanisme perizinan penanaman modal di atur oleh Pergub No. 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana pada pasal 4 menjelaskan bahwa

Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi. Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, penanaman modal tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang didukung oleh kerangka regulasi dan kelembagaan yang terintegrasi dalam mendorong iklim investasi yang kondusif. Kejelasan mekanisme perizinan serta pendelegasian kewenangan menjadi faktor penting dalam menciptakan efisiensi pelayanan dan kepastian hukum bagi investor. Oleh karena itu, penanaman modal diharapkan mampu meningkatkan arus investasi, memperkuat struktur perekonomian daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Perbandingan Kondisi PMA di Jawa Tengah dengan Daerah Lain

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021, nilai PMA tercatat sebesar 1.465,9 juta USD dan meningkat signifikan pada 2022 menjadi 2.362 juta USD, kemudian mengalami penurunan pada 2023 menjadi 1.563,7 juta USD. Selanjutnya, PMA kembali naik pada 2024 sebesar 2.358 juta USD dan mencapai titik tertinggi pada 2025 sebesar 3.178,8 juta USD. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat dinamika dan ketidakstabilan dalam jangka pendek, secara keseluruhan Jawa Tengah menunjukkan daya tarik investasi yang semakin menguat, terutama pada akhir periode pengamatan, yang dapat mencerminkan perbaikan iklim investasi, infrastruktur, serta meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap potensi ekonomi daerah.

Tabel 2. 1 Realisasi PMA 2021-2025 di Indonesia (USD Ribu)

No	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jawa Barat	5.217.691	6.534.450	8.283.746	9.972.328	9.186.517
2	Sulawesi Tengah	2.718.102	7.485.988	7.244.082	9.019.288	7.449.252
3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.330.568	3.744.070	4.830.022	7.563.412	5.978.174
4	Maluku Utara	2.819.935	4.487.465	4.998.246	4.392.409	5.180.250

No	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
5	Banten	2.189.967	3.410.682	4.451.587	3.868.168	3.560.112
6	Jawa Timur	1.849.173	3.134.043	4.740.978	3.661.077	2.709.701
7	Jawa Tengah	1.465.939	2.362.039	1.563.664	2.358.035	3.178.823
8	Riau	1.921.413	2.748.701	2.042.272	1.813.344	927.731
9	Kepulauan Riau	1.043.686	934.041	764.071	2.482.964	2.714.694
10	Sumatera Selatan	1.259.743	1.226.254	1.478.551	2.283.263	967.145
11	Sumatera Utara	580.422	1.316.127	1.181.284	1.721.735	1.848.392
12	Kalimantan Timur	745.190	1.266.222	1.332.711	1.417.074	1.053.806
13	Bali	451.967	449.536	808.486	1.613.674	1.600.282
14	Sulawesi Tenggara	1.616.455	877.936	448.308	369.084	1.391.801
15	Kalimantan Barat	463.414	745.467	490.469	615.984	2.123.411
16	Papua Tengah	0	0	968.043	1.496.839	1.754.320
17	Kalimantan Utara	133.460	430.529	1.272.127	1.347.688	991.856
18	Papua	1.489.074	1.260.531	8.299	8.709	9.918
19	Nusa Tenggara Barat	244.173	704.560	468.449	651.014	620.934
20	Kalimantan Tengah	162.488	548.318	697.637	419.126	464.524
21	Sulawesi Selatan	309.955	469.003	336.712	374.930	501.013
22	Kalimantan Selatan	117.243	208.064	327.898	551.424	580.203
23	Papua Barat	32.502	71.831	28.775	777.269	404.671
24	Lampung	173.797	247.826	220.554	162.856	153.244
25	Sulawesi Utara	169.080	105.131	203.660	112.351	251.289
26	Aceh	203.284	127.634	248.634	76.718	33.738
27	Sumatera Barat	66.949	95.625	120.659	115.865	128.527
28	Kepulauan Bangka Belitung	44.725	129.697	72.452	102.307	136.991
29	Nusa Tenggara Timur	79.041	73.319	124.292	106.148	72.248
30	Daerah Istimewa Yogyakarta	21.814	113.893	46.008	35.443	104.191
31	Jambi	50.858	39.203	45.081	105.634	77.877
32	Maluku	13.319	73.444	106.309	120.728	2.289
33	Gorontalo	78.008	102.898	33.841	34.922	16.704
34	Bengkulu	23.717	52.152	76.090	86.735	16.619
35	Papua Barat Daya	0	0	92.971	82.941	54.983
36	Papua Selatan	0	0	86.275	90.347	46.939
37	Sulawesi Barat	5.921	28.286	24.274	2.186	10.027
38	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Secara perbandingan antar provinsi di Indonesia, penyerapan PMA di Jawa Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat

pada akhir periode dimana pada tahun 2025 nilai PMA mengalami peningkatan tertinggi dengan nilai 3178,8 Juta USD. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun terakhir, posisi Jawa Tengah masih berada di kelompok menengah jika dibandingkan dengan provinsi lain, terutama di bawah provinsi dengan penyerapan PMA terbesar seperti Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta.

Jika dibandingkan lebih luas, Jawa Tengah memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lain seperti Riau, Sumatera Selatan, dan sebagian wilayah di Kalimantan yang justru menunjukkan tren menurun atau stagnan. Namun demikian, Jawa Tengah masih tertinggal dari provinsi-provinsi dengan daya tarik investasi tinggi yang didukung oleh sektor unggulan berbasis sumber daya alam besar atau kawasan industri yang telah maju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah memiliki potensi investasi yang berkembang, masih diperlukan penguatan daya saing daerah agar mampu bersaing lebih optimal dalam menarik investasi asing di tingkat nasional.

2.2.2 Perbandingan Realisasi PMA Berdasarkan Negara di Jawa Tengah

Berdasarkan data BKPM, Jawa Tengah menunjukkan tingkat keterbukaan investasi yang cukup tinggi dengan beragamnya negara asal investor yang menanamkan modalnya di wilayah ini. Selama periode 2021–2025, tercatat sebanyak 61 negara telah merealisasikan investasi PMA di Jawa Tengah, yang mencerminkan luasnya jangkauan kerja sama internasional yang dimiliki daerah ini. Keberagaman sumber negara investor tersebut tidak hanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan global terhadap iklim investasi di Jawa Tengah, tetapi juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki daya tarik yang kompetitif dari berbagai aspek, serta sektor.

Tabel 2. 2 Realisasi PMA Berdasarkan Negara di Jawa Tengah (USD Ribu)

No	Negara	2021	2022	2023	2024	2025
1	Hongkong, RRT	97.211	200.900	386.125	535.991	807.856
2	Singapura	135.578	286.334	311.693	578.088	714.476
3	Jepang	600.801	797.150	134.688	70.807	53.789
4	Korea Selatan	180.539	349.656	294.509	361.845	310.029
5	R.R. Tiongkok	60.930	137.757	107.572	284.387	632.953
6	Malaysia	84.296	212.420	35.191	48.107	77.584
7	Samoa Barat	2.125	29.794	45.505	81.923	184.767
8	Kepulauan Virgin Inggris	85.034	30.610	45.125	73.038	101.994
9	Taiwan	76.900	65.240	9.283	29.096	34.052
10	Belanda	43.597	22.164	25.693	51.281	63.386

No	Negara	2021	2022	2023	2024	2025
11	Thailand	0	4.957	1.148	120.337	77.870
12	Amerika Serikat	18.217	59.366	8.349	27.017	26.918
13	Swiss	44.771	64.044	18.593	4.649	726
14	Samoa Amerika	12.497	44.430	2.583	8.809	16.062
15	Luxembourg	4.206	2.718	37.170	1.790	223
16	India	6.574	13.690	13.410	6.757	3.391
17	Jerman	1.782	12.963	8.227	11.222	7.665
18	Swedia	0	6	18.395	14.617	8.306
19	Inggris	247	12.890	6.973	8.916	7.885
20	Mauritius	3	0	13.668	14.408	223
21	Belgia	310	7.205	13.795	1.668	3.467
22	Perancis	1.299	3.231	6.365	3.963	5.849
23	Seychelles	0	0	0	870	17.260
24	Anguilla	6.312	104	349	6.883	313
25	Denmark	1.217	1.130	3.571	3.086	2.516
26	Rumania	0	0	0	0	6.878
27	Kepulauan Cayman	0	28	2.795	1.726	0
28	Bahama	0	0	4.392	0	0
29	Kepulauan Marshall	0	0	2.537	20	1.038
30	Australia	450	54	460	561	1.706
31	Yordania	306	174	401	1.532	758
32	Vietnam	0	0	0	0	2.683
33	Yaman	8	7	453	1.145	892
34	Spanyol	5	818	171	579	525
35	Libya	0	0	1.850	110	106
36	Suriah	517	232	79	505	56
37	Irak	0	0	0	655	678
38	Lebanon	66	38	870	129	139
39	Dominika	0	0	263	124	843
40	Philipina	0	173	402	456	118
41	Italia	69	240	442	264	35
42	Liberia	0	1.011	6	2	1
43	Uni Emirat Arab	0	0	0	0	810
44	Turki	7	215	18	194	356
45	Belize	0	0	0	1	625
46	Saudi Arabia	0	133	56	147	197
47	Brunei Darussalam	0	0	200	16	218
48	Kanada	20	0	7	108	146

No	Negara	2021	2022	2023	2024	2025
49	Panama	0	0	22	55	197
50	Bulgaria	0	0	245	0	0
51	Pakistan	5	0	1	1	182
52	Siera Leone	0	61	7	51	6
53	Hungaria	0	91	0	0	0
54	Iran	23	7	10	7	14
55	Malta	0	0	0	0	46
56	Eswatini	0	0	0	46	0
57	Albania	0	0	0	40	0
58	Bangladesh	17	0	0	0	0
59	Irlandia	0	0	1	3	6
60	Siprus	0	0	0	3	4
61	Swaziland	0	0	0,1	0	0

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Realisasi PMA di Jawa Tengah berdasarkan negara asal menunjukkan bahwa investasi didominasi oleh beberapa negara utama dengan tren yang cukup dinamis selama periode 2021–2025. Hongkong (RRT) dan Singapura secara konsisten menjadi dua investor terbesar dengan tren yang terus meningkat. Hongkong mengalami kenaikan signifikan dari 97.211 ribu USD pada 2021 menjadi 807.856 ribu USD pada 2025, sementara Singapura juga meningkat dari 135.578 ribu USD menjadi 714.476 ribu USD. Selain itu, R.R. Tiongkok juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat terutama setelah 2023, menandakan semakin kuatnya peran investor dari kawasan Asia dalam mendorong investasi di Jawa Tengah.

Di sisi lain, beberapa negara yang sebelumnya menjadi investor besar justru mengalami penurunan dari pada periode sebelumnya. Jepang, misalnya, yang pada 2021 dan 2022 mencatat nilai investasi sangat tinggi (600.801 dan 797.150 ribu USD), mengalami penurunan secara besaran, sehingga memiliki jumlah realisasi PMA sebesar 53.789 ribu USD pada 2025. Hal serupa juga terjadi pada Korea Selatan yang meskipun relatif stabil, cenderung mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan di akhir periode. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi investasi global atau kemungkinan relokasi investasi ke wilayah lain.

Sementara itu, kontribusi negara-negara Timur Tengah dalam PMA di Jawa Tengah masih relatif kecil dibandingkan negara Asia lainnya, meskipun mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan pada beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Yaman. Nilai investasi dari negara-negara tersebut masih berada pada skala yang jauh lebih rendah, namun keberadaannya menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan di masa mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk menarik investasi dari kawasan Timur Tengah, guna memperluas sumber investasi asing di Jawa Tengah.

2.3 Tinjauan Kebijakan

Tinjauan kebijakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mengevaluasi landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan kajian potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah. Analisis ini mencakup berbagai regulasi yang berlaku baik pada tingkat nasional maupun daerah, seperti kebijakan penanaman modal, perizinan berusaha, kemudahan investasi, serta regulasi sektoral yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan di Jawa Tengah. Selain itu, tinjauan ini juga mempertimbangkan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah guna memastikan tidak adanya tumpang tindih maupun hambatan regulatif yang dapat mengurangi daya tarik investasi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, implementatif, serta memiliki legitimasi yang kuat karena sejalan dengan arah pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2. 3 Tinjauan Kebijakan Penanaman Modal

No	Regulasi	Aspek	Materi Muatan	Keterangan
1	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan	Pasal 3 (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Menjelaskan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
2	Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029	Prioritas Nasional	Pasal 2 (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. Pasal 2 (2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas	Menjelaskan arah kebijakan pembangunan termasuk investasi sebagai prioritas nasional.

No	Regulasi	Aspek	Materi Muatan	Keterangan
			kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikat	
3	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No. 1 Tahun 2026	Kewenangan Daerah	Pasal 12 (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.	Penanaman Modal merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Penanaman Modal	Pasal 3 (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan	Tujuan penyelenggaraan penanaman modal; Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

No	Regulasi	Aspek	Materi Muatan	Keterangan
			dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasal 4 (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal.	
5	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU	Peningkatan Ekosistem Investasi	Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.	Memperkuat ekosistem penyerapan investasi
6	Perda Jateng No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Penanaman Modal Daerah	Pasal 3 Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun	Menjelaskan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di tingkat daerah.

No	Regulasi	Aspek	Materi Muatan	Keterangan
			dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
7	Perpres No. 10 Tahun 2021 jo. Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	Bidang Usaha	Pasal 2 (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat	Pengaturan bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor.
8	Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP	Pelayanan Investasi	Pasal 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pasal 4 Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.	Konsep pelayanan perizinan terpadu dalam satu pintu.
9	Pergub No 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Perizinan Daerah	Pasal 4 (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi. Pasal 4 (3) Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada	Pemerintah daerah melalui DPMPTSP memiliki kewenangan mengurus perizinan berusaha.

No	Regulasi	Aspek	Materi Muatan	Keterangan
			gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	
10	PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berbasis Risiko	Pasal 2 (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan dasar; b. PB; C. PB UMKU; d. norma, standar, prosedur, dan kriteria; e. layanan Sistem OSS; f. Pengawasan; g. evaluasi dan reformasi kebijakan; h. pendanaan; i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan j. sanksi.	Menjelaskan sistem perizinan berbasis risiko sebagai dasar pemberian izin usaha.
11	Perka BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha	Prosedur Perizinan	Pasal 2 Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi: a. Lembaga OSS; b. kementerian/lembaga; c. DPMPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi; d. DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota; e. administrator KEK; f. badan perusahaan KPBPB; dan/atau g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.	Menjelaskan tata cara pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas investasi
12	Perda Jateng No. 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	Perencanaan Daerah	Pasal 2 (1) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029, yang memuat	Menjelaskan arah pembangunan daerah termasuk kebijakan investasi daerah.

No	Regulasi	Aspek	Materi Muatan	Keterangan
			Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Program Perangkat Daerah.	
13	Perda Jateng No 8 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044	Tata Ruang Wilayah	Pasal 2 Ruang lingkup Wilayah meliputi: a. lingkup Wilayah Perencanaan; dan b. lingkup muatan RTRW Provinsi.	Menjelaskan pedoman pemanfaatan ruang wilayah.
14	Pergub Jateng No. 13 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	Perencanaan Industri Daerah	Pasal 2 Maksud dibentuk Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis kerja sama dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP 2017-2037 Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Kerja sama; dan b. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	Menjelaskan pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan industri daerah.

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan bagaimana tinjauan kebijakan yang menjadi landasan pada kajian ini. Tinjauan kebijakan penanaman modal menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia disusun secara sistematis dengan diawali dari aspek perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang memberikan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, investasi ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang terencana, tidak berdiri sendiri, dan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Selanjutnya, dari sisi kewenangan dan kebijakan investasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penanaman modal merupakan urusan wajib pemerintah daerah, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui

penyederhanaan regulasi dan peningkatan ekosistem berusaha. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh pengaturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme perizinan berusaha, pelayanan terpadu satu pintu, dan sistem perizinan berbasis risiko guna memberikan kepastian, kemudahan, dan efisiensi bagi investor.

Pada tingkat daerah, kebijakan penanaman modal semakin dipertegas melalui regulasi spesifik seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022, serta didukung oleh dokumen perencanaan daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 yang mengatur arah pembangunan, tata ruang, dan prioritas penanaman modal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga diimplementasikan secara kontekstual sesuai potensi dan karakteristik wilayah. Dengan demikian, tinjauan kebijakan ini berfungsi sebagai landasan analitis untuk memahami keterpaduan regulasi, arah kebijakan investasi, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran.

BAB 3

GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1 Lokasi Penelitian dan Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. Secara astronomis, Jawa Tengah berada di antara 108°30' – 111°30' Bujur Timur dan 6°30' – 8°30' Lintang Selatan. Sehingga menempatkan Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 32.800,69 km², atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Jawa Tengah berbatasan dengan beberapa wilayah, di sebelah timur berbatasan dengan Jawa Timur, di sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat, di utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Petatematikindo, 2026

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pembagian wilayah administratif yang cukup luas dan beragam, terdiri atas 35 kabupaten/kota yang mencakup 29 kabupaten dan 6 kota. Secara spasial, setiap wilayah memiliki karakteristik luasan yang berbeda-beda, yang mencerminkan keragaman kondisi geografis di dalam provinsi ini. Kabupaten Cilacap tercatat sebagai wilayah dengan luas terbesar, yaitu mencapai 2.124,47 km² atau sekitar 6,47% dari total luas Provinsi Jawa Tengah, sehingga memiliki cakupan wilayah yang sangat dominan dibandingkan daerah lainnya. Sebaliknya, Kota Magelang merupakan wilayah dengan luas terkecil, yakni hanya sebesar 16,06 km² atau sekitar 0,05%

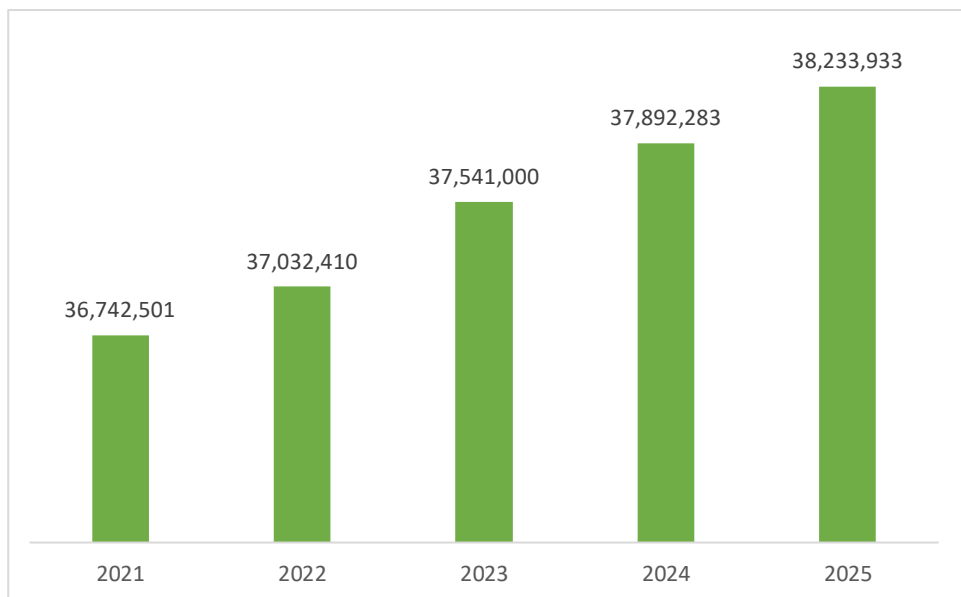
dari total luas provinsi. Perbedaan luasan wilayah ini menunjukkan adanya variasi skala administratif antar daerah, yang menggambarkan struktur kewilayahan Jawa Tengah yang heterogen dan tersebar dalam berbagai ukuran wilayah.

Secara geografis, posisi Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian tengah Pulau Jawa menjadikannya sebagai wilayah yang sangat strategis dalam sistem jaringan transportasi nasional. Letak ini menempatkan Jawa Tengah sebagai jalur penghubung utama arus logistik antarwilayah, baik melalui jalur Pantai Utara (Pantura) maupun jalur Pantai Selatan (Pansela) yang menjadi koridor distribusi penting di Pulau Jawa. Peran strategis tersebut semakin diperkuat dengan dukungan infrastruktur transportasi darat yang terus berkembang, seperti keberadaan jalan penghubung Semarang-Magelang yang mengintegrasikan wilayah tengah dengan kawasan lainnya. Selain itu, pembangunan dan pengoperasian ruas tol seperti Bawen-Prambanan serta pengembangan jalan tol Bawen-Yogyakarta turut meningkatkan konektivitas antarwilayah secara signifikan. Keberadaan infrastruktur ini memberikan kemudahan akses serta mempercepat mobilitas barang dan jasa, sehingga distribusi logistik dari wilayah utara ke selatan maupun sebaliknya dapat berlangsung lebih efisien dan terintegrasi.

3.2 Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan

Secara demografis, Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan menempati urutan ketiga secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai 38.233.933 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 1.113 jiwa per km². Besarnya jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan. Di sisi lain, tingginya kepadatan penduduk juga mencerminkan adanya konsentrasi penduduk yang cukup tinggi di sejumlah wilayah, terutama pada kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah yang strategis, baik dalam penyediaan tenaga kerja, pengembangan kegiatan ekonomi, maupun peningkatan pasar konsumsi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang luas di berbagai kabupaten/kota, Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional.

.



Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah 2021-2025 (Jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Berdasarkan Gambar 3.2 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebesar 36.742.501 jiwa, kemudian meningkat menjadi 37.032.410 jiwa pada tahun 2022 dan kembali bertambah menjadi 37.541.000 jiwa pada tahun 2023. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk mencapai 37.892.283 jiwa, hingga pada tahun 2025 tercatat sebesar 38.233.933 jiwa. Secara keseluruhan, terjadi penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun tersebut, yang menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dan berkelanjutan. Peningkatan ini juga mencerminkan dinamika demografis yang terus berkembang, dengan laju pertumbuhan yang cenderung terjaga setiap tahunnya, sehingga memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk setiap tahun umumnya diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah akibat bertambahnya penduduk usia produktif. Angkatan kerja mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk juga menunjukkan bertambahnya potensi tenaga kerja yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Jawa Tengah.

Tabel 3. 1 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021-2025 Per Agustus (Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Bekerja	Jumlah Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
1	2021	17.835.770	1.128.223	18.963.993
2	2022	18.390.459	1.084.475	19.474.934
3	2023	19.988.875	1.080.260	21.069.135
4	2024	20.861.393	1.047.451	21.908.844
5	2025	21.295.797	1.040.401	22.336.198

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 3.1 kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten baik pada jumlah penduduk bekerja maupun total angkatan kerja. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari sekitar 17,8 juta jiwa pada 2021 menjadi lebih dari 21,2 juta jiwa pada 2025, yang diikuti dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Sementara itu, jumlah pengangguran cenderung mengalami penurunan secara bertahap, dari sekitar 1,12 juta jiwa pada 2021 menjadi sekitar 1,04 juta jiwa pada 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang kerja, meskipun jumlah angkatan kerja yang terus bertambah tetap menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja.

Selain dari sisi pertumbuhan jumlah angkatan kerja, kualitas sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Kualitas tersebut salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja, karena pendidikan menjadi indikator utama dalam mencerminkan kemampuan, keterampilan, serta produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin besar pula peluang individu untuk terserap dalam dunia kerja, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan keahlian dan kompetensi tertentu. Dengan demikian, peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja tidak hanya mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Tabel 3. 2 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

No	Tingkat Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1	≤ Sekolah Dasar	7.979.995	8.772.198	8.764.743	8.889.942	8.759.217
2	Sekolah Menengah Pertama	3.788.731	3.902.524	4.334.847	4.411.948	4.461.084
3	Sekolah Menengah Atas	5.400.620	5.147.693	6.059.738	6.559.084	6.972.066
4	Perguruan Tinggi	1.794.647	1.652.519	1.909.807	2.047.870	2.143.831

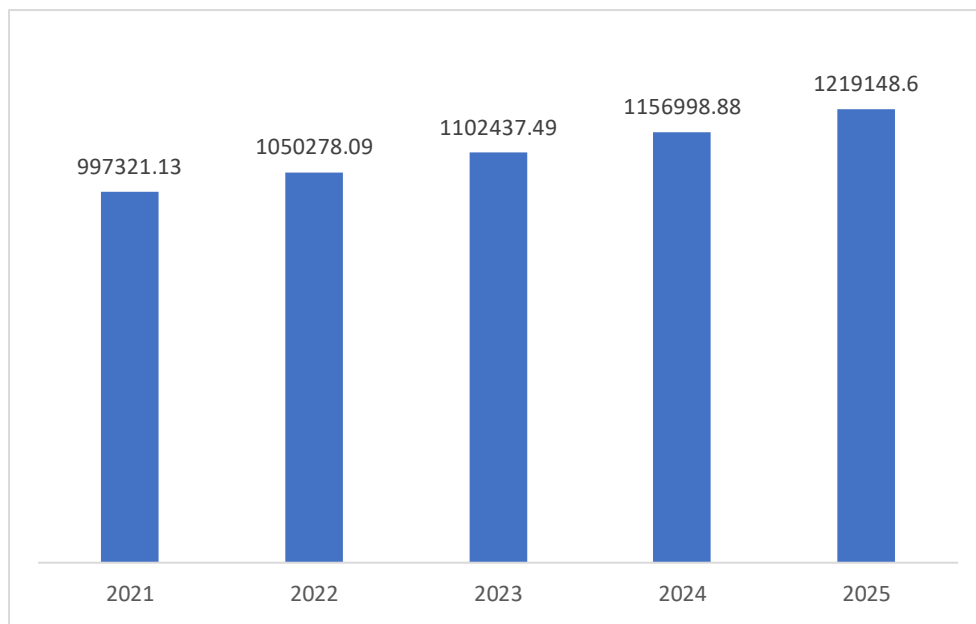
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kelompok dengan pendidikan $\leq$ Sekolah Dasar masih mendominasi selama periode 2021-2025, dengan jumlah yang relatif besar dan stabil pada kisaran 7,9 juta hingga 8,7 juta jiwa. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur tenaga kerja di Jawa Tengah masih didominasi oleh pendidikan dasar, yang pada satu sisi menunjukkan ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar, namun di sisi lain juga menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap.

Di sisi lain, terjadi peningkatan pada kelompok pendidikan menengah dan tinggi, terutama pada lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. Lulusan SMA mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai hampir 7 juta jiwa pada 2025, sementara lulusan Perguruan Tinggi juga meningkat meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, dari sekitar 1,7 juta menjadi lebih dari 2,1 juta jiwa. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan tenaga kerja, yang berpotensi mendukung pengembangan sektor industri dan jasa serta meningkatkan daya tarik investasi, meskipun secara keseluruhan struktur tenaga kerja masih didominasi oleh pendidikan rendah hingga menengah.

3.3 Aspek Sosial dan Ekonomi

Secara ekonomi, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang relatif terjaga dalam kurun waktu lima tahun terakhir, meskipun pergerakannya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,33% yang mencerminkan fase pemulihan setelah tekanan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat cukup signifikan menjadi 5,31%, menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,97%, dan kembali mengalami penurunan tipis pada tahun 2024 menjadi 4,95%. Meskipun demikian, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan penguatan dengan mencapai 5,37%. Secara keseluruhan, dinamika ini menggambarkan bahwa perekonomian Jawa Tengah berada dalam tren pertumbuhan yang stabil, dengan fluktuasi yang mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu.



Gambar 3. 3 PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Berdasarkan Gambar 3.3 menunjukkan PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB tercatat sebesar 997.321,13 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 1.050.278,09 miliar rupiah pada tahun 2022. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 1.102.437,49 miliar rupiah, serta meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 1.156.998,88 miliar rupiah. Pada tahun 2025, PDRB Jawa Tengah mencapai 1.219.148,6 miliar rupiah, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, peningkatan PDRB ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam pembentukan PDRB, pendapatan suatu daerah merupakan hasil akumulasi nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Secara umum, struktur perekonomian daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer yang meliputi pertanian, perikanan, dan pertambangan/penggalan; sektor sekunder yang mencakup industri manufaktur dan pengolahan; serta sektor tersier yang terdiri dari berbagai kegiatan jasa, termasuk perdagangan, transportasi, pariwisata, dan layanan lainnya. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama membentuk fondasi perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB yang dihasilkan.

Tabel 3.3 PDRB ADHK Sektoral di Jawa Tengah (Milyar Rupiah)

No	Nama Sektor	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127.065,8	130.762,5	131.330,5	133.162,5	139.530,4
2	B. Pertambangan dan Penggalan	22.326,16	20.942,66	21.232,09	21.833,06	22.315,21
3	C. Industri Pengolahan	333.239,6	346.169,7	361.111	373.837,7	389.026,5
4	D. Pengadaan Listrik, Gas	1.170,51	1.214,86	1.297,42	1.387,68	1.448,95
5	E. Pengadaan Air	744,86	752,41	783,02	800,9	811,85
6	F. Konstruksi	106.701,2	108.657,6	115.250,9	124.441,8	132.673,9
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147.313,4	153.670,4	161.240,4	167.931,2	175.700,4
8	H. Transportasi dan Pergudangan	24.335,82	42.103,03	45.523,39	48.052,76	51.285,06
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.595,12	38.132,45	42.417,2	46.670,27	51.617,3
10	J. Informasi dan Komunikasi	62.288,94	63.846,51	70.658,78	77.416,08	84.182,23
11	K. Jasa Keuangan	27.545,69	27.690,76	28.289,1	28.899,58	30.519,47
12	L. Real Estate	19.133,49	20.107,1	21.494,52	22.764,06	24.042,7
13	M, N Jasa Perusahaan	3.816,62	4.051,19	4344,41	4.741,92	5.114,67
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.528,68	24.915,02	25.944,09	27.897,21	28.525,56
15	P. Jasa Pendidikan	38.974,99	39.589,05	41.951,57	45.530,22	48.491,96
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.471,68	9.709,66	10.274,55	11.022,21	11.573,88
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	16.068,57	17.963,16	19.294,49	20.609,68	22.288,53
PDRB		997.321,1	1.050.278	1.102.437	1.156.999	1.219.149

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 3.3, struktur PDRB ADHK sektoral Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan pada seluruh sektor ekonomi, sejalan dengan kenaikan total PDRB dari 997.321,1 miliar rupiah menjadi 1.219.149 miliar rupiah. Sektor industri pengolahan (C) menjadi kontributor terbesar dengan nilai meningkat dari 333.239,6 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 389.026,5 miliar rupiah pada tahun 2025. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran (G) juga memberikan kontribusi besar dengan tren yang terus meningkat, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) tetap menjadi sektor utama dengan kontribusi yang relatif stabil.

Lebih lanjut, perkembangan sektor-sektor tumpuan di Jawa Tengah menunjukkan adanya penguatan pada sektor sekunder dan tersier sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan sebagai tulang punggung ekonomi terus mengalami ekspansi, diikuti oleh sektor perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi yang juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Selain itu, sektor jasa seperti transportasi dan perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum turut mengalami peningkatan signifikan, yang mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas distribusi dan layanan di wilayah ini. Di sisi lain, sektor primer seperti pertanian tetap berperan penting sebagai penopang dasar perekonomian, meskipun kontribusinya cenderung lebih stabil dibandingkan sektor lainnya.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Jawa Tengah relatif seimbang dengan kecenderungan penguatan pada sektor industri dan jasa sebagai sektor unggulan. Dominasi sektor industri pengolahan serta peran sektor konstruksi dalam pembentukan PDRB mencerminkan adanya ekosistem ekonomi yang semakin berkembang. Hal ini memberikan indikasi positif terhadap daya tarik investasi di Jawa Tengah, baik dari investor domestik maupun luar negeri, terutama pada sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB 4

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.1 Pendekatan Penelitian

4.1.1 Jenis Penelitian

Kajian mengenai potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan campuran (*mixed methods*). Pendekatan ini menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat mengenai kondisi, karakteristik, serta dinamika investasi antara Jawa Tengah dan negara-negara Timur Tengah. Analisis kuantitatif dalam kajian ini digunakan untuk memetakan performa data makro melalui metode Analisis Tren, serta identifikasi sektor basis dan kompetitif menggunakan teknik *Location Quotient* (LQ) dan Shift Share. Data ini bersumber dari data sekunder seperti PDRB dan realisasi investasi dari DPMPTSP, BPS, dan BKPM. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menghasilkan landasan empiris yang objektif mengenai sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah.

Selanjutnya, pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam yang tidak dapat dijangkau oleh angka, terutama dalam mengungkap profil, persepsi, preferensi, serta pertimbangan strategis investor Timur Tengah melalui analisis PESTLE dan SWOT. Dalam bagian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Penggabungan kedua pendekatan ini dilakukan melalui teknik triangulasi metode, di mana hasil analisis kuantitatif (potensi sektor) akan diuji kesesuaiannya menggunakan analisis kesesuaian dengan hasil analisis kualitatif (preferensi investor). Menurut Azhari *et al.*, (2023) penggunaan pendekatan *mixed method* nantinya mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan investasi yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berbasis pada kondisi riil di lapangan.

4.1.2 Desain Penelitian

Kajian ini menggunakan desain penelitian studi kasus, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu fenomena di lokasi tertentu dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melingkupinya (Yin, 2018). Desain ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terkait upaya optimalisasi penyerapan investasi, khususnya dari negara-negara Timur Tengah, dengan

melihat keterkaitan antar faktor yang memengaruhi secara nyata di lapangan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika yang terjadi dalam proses penanaman modal di daerah.

Objek studi dalam kajian ini adalah optimalisasi penyerapan investor dari kawasan Timur Tengah untuk berinvestasi di Jawa Tengah, dengan fokus pada lima negara utama, yaitu Yaman, Yordania, Irak, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Pemilihan negara tersebut didasarkan pada potensi kerja sama investasi serta keterkaitannya dengan arus penanaman modal yang memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Analisis dilakukan dengan analisis tren investasi negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah dan Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan analisis profil dan karakteristik investor Timur Tengah untuk memahami karakteristik investor, preferensi sektor, serta peluang kerja sama yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis sektor unggulan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah guna mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki daya tarik investasi tinggi dan keunggulan komparatif maupun kompetitif. Selanjutnya akan dilakukan analisis faktor faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah, serta analisis secara mendalam.

Nantinya akan dilakukan analisis berupa pencocokan antara preferensi dan keinginan investor dari Timur Tengah dengan potensi unggulan yang dimiliki Jawa Tengah, dan akan dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan investasi. Selanjutnya ditahap akhir akan dilakukan analisis risiko untuk menilai risiko dari keberlangsungan kerjasama investasi ini. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek tersebut, desain studi kasus ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesiapan Jawa Tengah serta merumuskan strategi yang tepat dalam menarik dan mengoptimalkan investasi dari negara-negara Timur Tengah.

4.2 Pengambilan Data

Pada kajian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Penggunaan berbagai sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan relevan guna mendukung kebutuhan analisis potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan mampu menggambarkan kondisi secara menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, kondisi aktual, maupun perspektif pelaku terkait.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. FGD dilakukan untuk menghimpun masukan, pandangan, serta klarifikasi dari para pemangku kepentingan mengenai kondisi, peluang, dan tantangan investasi, sekaligus memungkinkan pertukaran perspektif secara interaktif. Sementara itu, wawancara mendalam dilaksanakan dengan pemangku kepentingan, serta pengelola kawasan industri di Jawa Tengah guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan kontekstual terkait dinamika investasi.

Selanjutnya untuk data sekunder, diperoleh dari instansi pemerintah dan lembaga terkait, antara lain DPMPTSP, Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga, serta sumber resmi lainnya. Data yang digunakan meliputi realisasi investasi, kondisi ekonomi makro, kebijakan dan regulasi, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RPJPD, dan RUPM. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperkuat analisis melalui jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lain yang relevan dengan topik kajian.

Seluruh data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis berlapis yang meliputi analisis tren, analisis profil karakteristik investor, analisis potensi dan sektor unggulan, analisis PESTLE, analisis kesesuaian, dan analisis risiko. Untuk menjamin keabsahan dan konsistensi data, dilakukan validasi melalui triangulasi sumber serta pembahasan bersama pemangku kepentingan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam kajian ini diharapkan memiliki tingkat keandalan yang baik dan dapat mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat dan aplikatif.

4.3 Pengolahan dan Analisis Data

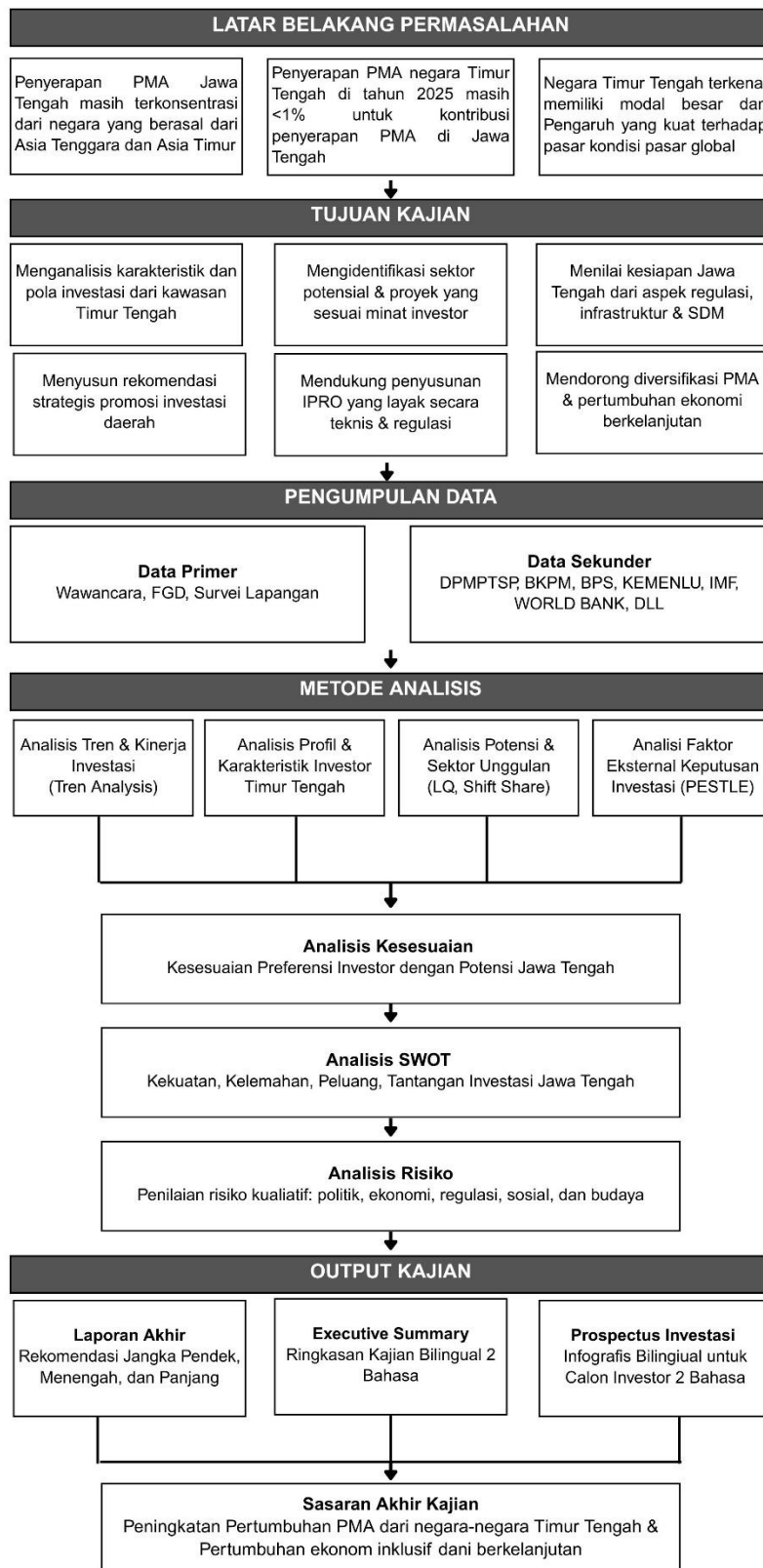
Pengolahan dan analisis data dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed methods* (metode campuran), melalui tahapan analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Proses analisis mengacu pada tahapan yang saling berkaitan, secara bertahap dan sistematis. Tahap awal dimulai dengan analisis tren dan kinerja investasi untuk memahami perkembangan investasi, khususnya dari kawasan Timur Tengah baik di Indonesia maupun Jawa Tengah. Selanjutnya akan dilakukan analisis profil dan karakteristik investor Timur Tengah. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan analisis potensi dan sektor unggulan di Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan analisis faktor eksternal yang memengaruhi keputusan investasi menggunakan pendekatan PESTLE, yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan.

Hasil dari analisis tersebut digunakan dalam proses analisis kesesuaian untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan investor dengan potensi investasi yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebutuhan dan preferensi investor Timur Tengah dengan potensi serta proyek unggulan yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Proses ini menjadi bagian krusial dalam menentukan sektor dan proyek yang paling relevan dan layak untuk ditawarkan kepada investor, terutama investor dari Timur Tengah.

Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan investasi. Pada tahap akhir, dilakukan analisis risiko (*risk assessment*) sebagai pendalaman terhadap aspek ancaman yang telah diidentifikasi dalam analisis SWOT. Analisis ini mencakup risiko dari aspek politik, ekonomi, regulasi, sosial, dan budaya. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen akhir yang meliputi rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, hasil kajian juga akan dilengkapi dengan *executive summary* dalam dua bahasa serta prospektus potensi investasi yang disesuaikan dengan karakteristik investor Timur Tengah.

4.4 Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran alur berpikir yang sistematis dalam kajian ini, disusun suatu kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara permasalahan, tujuan kajian, serta metode analisis yang digunakan. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan tahapan kajian secara terstruktur, mulai dari identifikasi kondisi eksisting investasi dan potensi kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, analisis peluang dan tantangan investasi, hingga penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan. Selain itu, kerangka berpikir juga menggambarkan alur analisis yang digunakan dalam mengkaji faktor internal dan eksternal, termasuk identifikasi risiko yang dapat memengaruhi pengembangan investasi di Jawa Tengah. Dengan adanya kerangka berpikir ini, proses kajian diharapkan menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kerangka berpikir kajian ini disajikan sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Kerangka Pikir

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Gambar 4.1 menunjukkan kerangka pikir kajian potensi investasi negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah yang disusun secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga output kajian. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi penyerapan Penanaman Modal Asing (PMA) Jawa Tengah yang masih didominasi oleh negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, sementara kontribusi investasi dari kawasan Timur Tengah pada tahun 2025 masih kurang dari 1 persen terhadap total PMA Jawa Tengah. Padahal, negara-negara Timur Tengah dikenal memiliki kapasitas modal yang besar dan pengaruh yang cukup kuat terhadap dinamika pasar global. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi investasi Timur Tengah dengan daya tarik dan kesiapan investasi Jawa Tengah, sehingga diperlukan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan peluang masuknya investasi dari kawasan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan pola investasi investor dari kawasan Timur Tengah, mengidentifikasi sektor potensial serta proyek investasi yang sesuai dengan preferensi investor, dan menilai kesiapan Jawa Tengah dari aspek regulasi, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk menyusun rekomendasi strategi promosi investasi daerah serta mendorong diversifikasi sumber Penanaman Modal Asing (PMA) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara, FGD, dan survei lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari DPMPTSP, BKPM, BPS, Kementerian Luar Negeri, IMF, World Bank, dan berbagai sumber relevan lainnya.

Tahapan analisis dalam kajian ini dilakukan secara terintegrasi melalui analisis tren dan kinerja investasi, analisis profil dan karakteristik investor Timur Tengah, analisis sektor unggulan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*, serta analisis faktor eksternal melalui pendekatan PESTLE. Seluruh hasil analisis kemudian disintesis dalam analisis kesesuaian untuk menilai kecocokan antara preferensi investor dengan potensi Jawa Tengah, yang selanjutnya diperdalam melalui analisis SWOT dan analisis risiko investasi dari aspek politik, ekonomi, regulasi, sosial, dan budaya. Rangkaian analisis tersebut menghasilkan beberapa output utama berupa laporan akhir yang memuat rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang, executive summary bilingual, serta prospectus investasi bilingual sebagai instrumen promosi investasi bagi calon investor Timur Tengah, dengan sasaran akhir berupa peningkatan PMA dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.

4.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam kajian ini disusun untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai tujuan penelitian, variabel yang digunakan, serta pendekatan analisis yang menjadi dasar dalam mengkaji potensi investasi negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Melalui definisi operasional, setiap variabel yang dianalisis dapat dipahami secara jelas, terarah, dan sesuai dengan konteks kajian, sehingga memudahkan dalam proses pengukuran dan interpretasi hasil analisis.

Tabel 4. 1 Definisi Operasional

No	Tujuan Kajian	Variabel	Dasar Analisis	Instrumen
1	Menganalisis tren investasi dari negara-negara Timur Tengah ke Indonesia dan Jawa Tengah dalam 5–10 tahun terakhir, termasuk negara dominan dan sektor dominan investasi	Tren Investasi PMA Timur Tengah	Trend Analysis	Studi Dokumen
2	Mengidentifikasi dan menganalisis profil dan karakteristik serta preferensi investor dari negara-negara Timur Tengah, termasuk karakteristik risiko, preferensi sektor, dan skema pembiayaan	Profil, karakteristik dan Preferensi Investor Timur Tengah	Analisis Profil & Karakteristik Investor	Studi Dokumen, Wawancara, FGD
3	Menganalisis potensi dan sektor unggulan Jawa Tengah termasuk sektor basis dan distribusi per kabupaten/kota	Potensi Sektor Unggulan Jawa Tengah	Analisis LQ, <i>Shift Share</i>	Studi Dokumen
4	Menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan investasi negara Timur Tengah mencakup dimensi Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Teknologi, Regulasi, dan Lingkungan	Faktor eksternal makro keputusan investasi	PESTLE	Studi Dokumen
5	Menganalisis kesesuaian antara preferensi sektor investor Timur Tengah dengan potensi sektor dan wilayah di Jawa Tengah guna menentukan prioritas proyek investasi	Kesesuaian Preferensi Investor dengan Potensi Jawa Tengah	Analisis Kesesuaian	Studi Dokumen
6	Menganalisis potensi dan kesiapan Jawa Tengah sebagai tujuan investasi melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT)	Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) Jawa Tengah	Analisis SWOT	Studi Dokumen, FGD
7	Mengidentifikasi dan menganalisis risiko investasi dari aspek politik, ekonomi, regulasi, dan sosial-budaya.	Risiko Investasi	Analisis Risiko	Studi Dokumen

No	Tujuan Kajian	Variabel	Dasar Analisis	Instrumen
8	Merumuskan implikasi kebijakan dan strategi promosi investasi daerah yang terarah untuk menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, mencakup strategi jangka pendek, menengah, dan panjang	Strategi dan Kebijakan Promosi Investasi	Analisis Kebijakan & RPJMD	FGD dan Studi Dokumen

Sumber: Tim Penyusun, 2026

4.6 Kebutuhan Data

Dalam rangka menyusun kajian yang komprehensif, objektif, dan berbasis bukti diperlukan dukungan data yang memadai, akurat, dan relevan sesuai dengan ruang lingkup analisis. Ketersediaan data menjadi landasan utama dalam menggambarkan kondisi, karakteristik, serta potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, data juga berperan penting dalam mengidentifikasi peluang, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan investasi di daerah. Melalui data yang valid dan terintegrasi, proses analisis dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan investasi di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari berbagai instansi pemerintah, lembaga internasional, serta hasil pengumpulan data primer melalui wawancara, FGD, dan survei lapangan. Adapun rincian kebutuhan data beserta wali data disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Data

No	Tujuan Kajian	Kebutuhan Data	Wali Data
1	Analisis Tren dan Kinerja Investasi	1. Data realisasi PMA negara Timur Tengah di Jawa Tengah 2021-2025 (mencakup nilai, sektor, sebaran lokasi, jumlah proyek, serapan tenaga kerja) 2. Data realisasi PMA negara Timur Tengah di Indonesia 2021-2025 (mencakup nilai, sektor, sebaran lokasi, jumlah proyek, serapan tenaga kerja)	DPMPSTP, BKPM, BPS
2	Analisis Profil dan Karakteristik Investor Timur Tengah	1. Data Perusahaan PMA di Indonesia/ Jawa Tengah tahun 2021-2025 2. Data skema kerja sama perusahaan PMA, portofolio investasi global, preferensi sektor	DPMPSTP
3	Analisis Potensi dan Sektor Unggulan di Jawa Tengah	1. Data PDRB ADHK Sekotoral 2021-2025 di Kab/Kota di Jawa Tengah	DPMPSTP, BPS Jawa Tengah,

No	Tujuan Kajian	Kebutuhan Data	Wali Data
		2. Data Infrastruktur (jalan, kpi, stasiun, pelabuhan, bandara, kawasan industri) di kab/kota di Jawa Tengah 3. Data Sumber Daya Manusia (tenaga kerja, tingkat pendidikan, angkatan kerja)	Disnakertrans, PUPR
4	Analisis Faktor Eksternal (PESTLE)	1. Data hubungan diplomatik 2. Indikator ekonomi makro (PDB, pertumbuhan, devisa), tren harga minyak, aspek sosial budaya, regulasi investasi, kondisi geopolitik, serta kebijakan ESG/lingkungan	Kemenlu, IMF, World Bank, BKPM, OPEC
5	Analisis Kesesuaian Investasi	1. Data daftar proyek investasi siap ditawarkan (IPRO), 2. Status kesiapan proyek (lahan, izin, infrastruktur).	DPMPTSP, Dinas terkait
6	Analisis Risiko Investasi	1. Data indeks risiko negara (country risk) 2. Data inflasi, nilai tukar, risiko regulasi daerah, persepsi risiko investor, serta skema mitigasi risiko investasi	Moody's, BI, OJK, Kemenlu

Sumber: Tim Penyusun, 2026

4.7 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli serta Tanggung Jawabnya

Pelaksanaan Penyusunan Kajian Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah didukung oleh tim yang terdiri atas tenaga ahli dan tenaga penunjang dengan kompetensi yang saling melengkapi. Komposisi tim dirancang untuk memastikan kajian dapat dilaksanakan secara komprehensif, multidisiplin, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun teknis. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tim pelaksana terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga penunjang, dengan total kebutuhan 14 orang-bulan. Rekapitulasi kebutuhan personil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Kebutuhan Personil Tim Kajian

No.	Jabatan/Posisi	Jumlah (Orang)	Durasi (Bulan)
A	Tenaga Ahli		
1	Team Leader (Ahli Utama)	1	3
2	Tenaga Ahli Ekonomi (Ahli Madya)	1	3
3	Tenaga Ahli Politik/Hubungan Internasional (Ahli Madya)	1	3
B	Tenaga Penunjang		
1	Asisten Tenaga Ahli	1	3
2	Surveyor	1	1
3	Translator Bahasa	1	1
	TOTAL	6	

Sumber: KAK DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026

Adapun terdapat jadwal untuk penugasan masing-masing personil selama periode pelaksanaan pekerjaan (Mei–Juli 2026) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4 Jadwal Penugasan Personil Tim Kajian

No.	Jabatan/Posisi	Mei 2026				Juni 2026				Juli 2026			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A	Tenaga Ahli												
1	Team Leader (Ahli Utama)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tenaga Ahli Ekonomi (Ahli Madya)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tenaga Ahli Politik/Hub. Internasional (Ahli Madya)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	Tenaga Penunjang												
1	Asisten Tenaga Ahli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Surveyor	✓	✓										
3	Translator Bahasa									✓	✓		

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Keterangan: Team Leader, Tenaga Ahli Ekonomi, dan Tenaga Ahli Politik/Hubungan Internasional ditugaskan penuh selama 3 (tiga) bulan pelaksanaan. Surveyor ditugaskan selama 1 (satu) bulan pada tahap pengumpulan data lapangan di bulan pertama, sedangkan Translator Bahasa ditugaskan selama 1 (satu) bulan pada tahap penerjemahan dokumen menjelang finalisasi kajian. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Tugas dan Tanggung Jawab Personil Tim Kajian

No.	Jabatan/Posisi	Kualifikasi Minimal	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Team Leader (Ahli Utama)	S2 Ekonomi/Manajemen/ Bisnis, pengalaman min. 3 tahun	• Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan tim kajian • Bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kelengkapan seluruh produk kajian • Mempresentasikan seluruh tahapan pelaporan (FGD I, II, dan III) secara langsung • Menyusun kerangka analisis dan memastikan konsistensi metodologi kajian • Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan terkait

No.	Jabatan/Posisi	Kualifikasi Minimal	Tugas dan Tanggung Jawab
			Memimpin proses finalisasi laporan berdasarkan masukan dari setiap tahapan pembahasan
2	Tenaga Ahli Ekonomi (Ahli Madya)	S2 Ekonomi/Manajemen/ Keuangan/Investasi, pengalaman min. 1 tahun	- Menganalisis tren realisasi investasi dari negara-negara Timur Tengah ke Indonesia dan Jawa Tengah - Menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi - Menyusun analisis potensi dan sektor unggulan Jawa Tengah yang relevan bagi investor Timur Tengah - Memberikan rekomendasi skema kerja sama dan pembiayaan yang feasible - Menyusun analisis kelayakan awal proyek investasi unggulan secara ekonomi - Mendampingi Team Leader pada setiap tahapan pelaporan dan acara ekspos
3	Tenaga Ahli Politik/Hubungan Internasional (Ahli Madya)	S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional, pengalaman min. 1 tahun	- Menganalisis hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah - Menganalisis dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah dan dampaknya terhadap keputusan investasi global - Mengkaji kebijakan investasi luar negeri (outward investment policy) termasuk peran Sovereign Wealth Fund (SWF) - Mengidentifikasi aktor kunci (key players) yang berpotensi menjadi mitra strategis investasi bagi Jawa Tengah - Melakukan analisis risiko negara (country risk) yang mempengaruhi preferensi investasi - Memberikan rekomendasi strategi pendekatan diplomasi ekonomi
4	Asisten Tenaga Ahli	D3/S1 semua jurusan, pengalaman min. 1 tahun	- Melakukan pengolahan dan tabulasi data pendukung penelitian - Melakukan koordinasi teknis dengan para tenaga ahli terkait kajian - Menyiapkan dan menyusun dokumen administrasi terkait pelaksanaan kajian

No.	Jabatan/Posisi	Kualifikasi Minimal	Tugas dan Tanggung Jawab
			Membantu penyusunan laporan pada setiap tahapan pelaporan
5	Surveyor	D4/S1 semua jurusan, pengalaman min. 1 tahun	- Melakukan survei lapangan dalam rangka pengumpulan data primer - Mendokumentasikan hasil survei lapangan secara lengkap dan akurat - Membantu penyelesaian administrasi terkait kegiatan survei
6	Translator Bahasa	D3/S1 Bahasa/Sastra Inggris, pengalaman min. 1 tahun	- Melakukan alih bahasa dokumen dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan sebaliknya secara benar dan akurat - Melakukan penyuntingan dan revisi hasil terjemahan agar sesuai kaidah bahasa sasaran - Menerjemahkan Executive Summary dan Prospektus Potensi Investasi ke dalam Bahasa Inggris

Sumber: KAK DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026

Seluruh personil tim kajian berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, independen, dan objektif sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja. Koordinasi internal tim akan dilaksanakan secara berkala guna memastikan keterpaduan analisis dan konsistensi hasil kajian pada setiap tahapan pelaporan.

4.8 Rencana Kerja dan Pentahapan Pelaksanaan Pembahasan dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Penyusunan Kajian Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. Seluruh tahapan pekerjaan disusun secara sistematis dan terstruktur guna memastikan proses pelaksanaan berjalan sesuai target waktu, ruang lingkup pekerjaan, dan standar kualitas yang ditetapkan. Secara umum, rangkaian kegiatan dalam kajian ini terdiri atas dua tahapan utama, yaitu tahapan pengadaan yang mencakup proses administratif sebelum pekerjaan dimulai serta tahapan pelaksanaan penyusunan kajian yang meliputi pengumpulan data, analisis, penyusunan dokumen, hingga finalisasi hasil kajian. Kedua tahapan tersebut saling berkaitan dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sehingga output kajian yang dihasilkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah.

4.8.1 Tahapan Pengadaan

Tahapan pengadaan merupakan proses administratif yang dilaksanakan sebelum pekerjaan penyusunan kajian dimulai guna memastikan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi penyiapan dokumen pengadaan, penginputan dokumen ke dalam sistem SPSE, pelaksanaan proses seleksi oleh Pejabat Pengadaan, klarifikasi dan negosiasi, hingga penandatanganan kontrak kerja sama. Seluruh tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan prosedur pengadaan jasa yang transparan, tertib, dan akuntabel. Adapun rincian tahapan pengadaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Timeline Pengadaan Penyusunan Kajian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembuatan KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak	2 – 31 Maret 2026
2	Input KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak ke Sistem SPSE	1 – 16 April 2026
3	Proses Pengadaan oleh Pejabat Pengadaan dari Biro APBJ melalui Sistem SPSE	17 – 27 April 2026
4	Proses Penandatanganan Kontrak (SPPBJ, SPK, dan SPMK)	28 April – 1 Mei 2026
5	Upload Dokumen Kontrak pada Sistem SPSE	29 April 2026
6	Mulai Pekerjaan Penyusunan Kajian	4 Mei 2026

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026

4.8.2 Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Kajian

Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak ditandatangani, pekerjaan penyusunan kajian dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan saling berkaitan. Tahapan pelaksanaan dimulai dari rapat persiapan untuk menyamakan pemahaman terkait ruang lingkup pekerjaan, metodologi, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi antar pihak yang terlibat. Selanjutnya dilakukan proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan secara bertahap yang terdiri atas Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir. Dalam setiap tahapan tersebut juga dilakukan pendalaman materi melalui wawancara, survei lapangan, serta koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan hasil kajian tersusun secara komprehensif.

Sebagai bagian dari proses penyusunan kajian, dilaksanakan tiga kali *Focus Group Discussion* (FGD) yang masing-masing berkaitan dengan pembahasan Laporan Pendahuluan,

Laporan Antara, dan Laporan Akhir. Ketiga FGD tersebut wajib dipresentasikan secara langsung oleh Ketua Tim (*Team Leader*) dan tidak dapat diwakilkan. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk memperoleh masukan, evaluasi, serta penyempurnaan substansi kajian dari para pemangku kepentingan sebelum laporan difinalisasi. Dengan adanya tahapan diskusi dan evaluasi tersebut, diharapkan hasil kajian yang disusun menjadi lebih terarah, akurat, dan implementatif dalam mendukung pengembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Adapun jadwal lengkap pelaksanaan pekerjaan penyusunan kajian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Timeline Pelaksanaan Penyusunan Kajian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Proses kontrak melalui sistem SPSE	1 – 29 April 2026
2	Rapat Awal Persiapan (Pembentukan Tim dan Penyusunan Jadwal)	30 April 2026
3	Pelaksanaan Penyusunan Kajian	1 Mei 2026 s.d. awal Juli 2026
4	FGD I – Paparan Laporan Pendahuluan	13 Mei 2026
5	Penyerahan Laporan Pendahuluan	14 Mei 2026
6	FGD II – Paparan Laporan Antara	18 Juni 2026
7	Penyerahan Laporan Antara	28 Juni 2026
8	FGD III – Ekspos Hasil dan Finalisasi	14 Juli 2026
9	Penyerahan Laporan Akhir	27 Juli 2026
10	Proses Selesai Kontrak melalui Sistem SPSE	27 Juli 2026

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026

4.8.3 Mekanisme Pembahasan (*Focus Group Discussion*)

Pelaksanaan pembahasan dilakukan melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang periode pekerjaan. Setiap FGD diselenggarakan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan progres kajian pada masing-masing tahapan pelaporan. Adapun rincian pelaksanaan FGD adalah sebagai berikut:

1. **FGD I - Laporan Pendahuluan**, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026. FGD ini membahas hasil identifikasi awal, metodologi kajian, rencana kerja, serta inventarisasi data awal terkait potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah.
2. **FGD II - Laporan Antara**, dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. FGD ini membahas hasil analisis data sementara yang mencakup analisis karakteristik investor Timur Tengah,

tren dan kinerja investasi, profil calon investor potensial, serta potensi sektor unggulan Jawa Tengah.

3. **FGD III - Ekspos Hasil dan Finalisasi**, dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2026. FGD ini mempresentasikan hasil keseluruhan kajian beserta rekomendasi strategis final yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dari FGD I dan FGD II.

Seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan akan dipantau secara berkala oleh Tim DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran. Penyedia jasa konsultansi wajib melakukan penyempurnaan dan perbaikan hasil kajian berdasarkan masukan yang diperoleh pada setiap tahapan pembahasan, guna memastikan kualitas dan relevansi dokumen kajian yang dihasilkan.

BAB 5

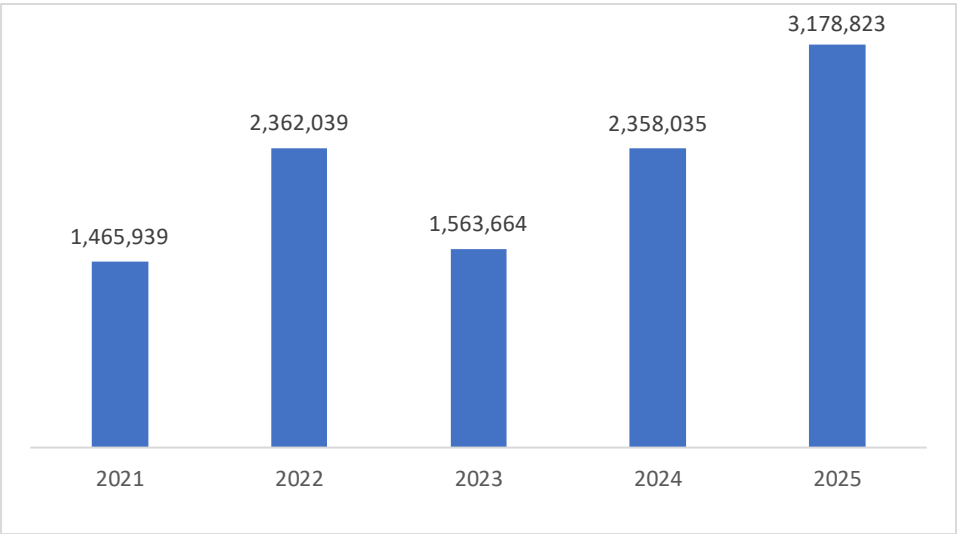
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Tren dan Kinerja Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur aktivitas ekonomi dan daya tarik suatu daerah karena mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi, iklim usaha, dan prospek pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, analisis terhadap tren dan kinerja investasi perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi peluang peningkatan investasi pada periode mendatang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3, penyelenggaraan penanaman modal bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat daya saing nasional. Dalam konteks tersebut, perkembangan investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas iklim investasi dan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menarik investor. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan analisis mengenai perkembangan realisasi investasi PMA di Jawa Tengah, baik dari aspek tren, sebaran sektoral, maupun distribusi wilayah, sebagai landasan dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial serta merumuskan strategi peningkatan investasi, khususnya yang berasal dari negara-negara Timur Tengah.

5.1.1 Tren Realisasi PMA di Jawa Tengah

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan realisasi PMA dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian, iklim usaha, serta berbagai faktor pendukung investasi di suatu wilayah. Oleh karena itu, analisis terhadap tren realisasi PMA di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan untuk mengetahui dinamika investasi asing selama periode pengamatan serta melihat posisi perkembangan investasi daerah dalam beberapa tahun terakhir. Tren realisasi PMA di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021–2025 disajikan pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5. 1 Tren Realisasi PMA di Jawa Tengah (USD Ribu)
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah selama periode 2021-2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Jawa Tengah semakin berkembang dan mampu menarik minat investor asing. Peningkatan investasi pada tahun 2024-2025 juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek investasi di Jawa Tengah yang didukung oleh letak geografis strategis, ketersediaan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan industri yang terus berkembang.

5.1.2 Tren PMA Negara-Negara Timur Tengah di Indonesia

Setelah mengkaji perkembangan PMA di Jawa Tengah, analisis dilanjutkan dengan melihat tren investasi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika realisasi investasi, kontribusi masing-masing negara, serta kecenderungan investasi yang dapat menjadi dasar dalam menilai peluang peningkatan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah.

Tabel 5. 1 Tren Realisasi Investasi 5 Negara Timur Tengah di Indonesia (USD Ribu)

No	Negara	2021	2022	2023	2024	2025
1	Uni Emirat Arab	16.149	22.883	68.858	32.735	169.689
2	Saudi Arabia	3.640	1.743	7.148	3.175	103.638
3	Yordania	313	603	2.553	6.605	48.459
4	Yaman	356	3.310	17.138	18.685	12.022
5	Irak	0	383	451	1.435	2.361

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Tren Realisasi Investasi 5 Negara Timur Tengah di Indonesia Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa investasi dari kawasan Timur Tengah cenderung meningkat meskipun masih berfluktuasi pada beberapa negara. Uni Emirat Arab menjadi negara dengan realisasi investasi terbesar, diikuti Saudi Arabia yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025. Yordania juga menunjukkan tren pertumbuhan investasi yang cukup konsisten, sedangkan Yaman dan Irak masih memiliki kontribusi yang relatif kecil namun mulai menunjukkan perkembangan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang semakin besar dalam menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, terutama didukung oleh peluang pasar yang luas, stabilitas ekonomi, serta pengembangan berbagai sektor strategis, sehingga diperlukan strategi promosi investasi yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik investor kawasan tersebut.

5.1.3 Tren PMA Negara-Negara Timur Tengah di Jawa Tengah

Setelah mengkaji perkembangan PMA di Jawa Tengah, analisis dilanjutkan dengan melihat tren investasi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika realisasi investasi, kontribusi masing-masing negara, serta kecenderungan investasi yang dapat menjadi dasar dalam menilai peluang peningkatan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah.

Tabel 5. 2 Tren Realisasi Investasi 5 Negara Timur Tengah di Jawa Tengah (USD Ribuan)

No	Negara	2021	2022	2023	2024	2025
1	Yaman	8	7	453	1.145	892
2	Uni Emirat Arab	0	0	0	0	810
3	Yordania	306	174	401	1.532	758
4	Irak	0	0	0	655	678
5	Saudi Arabia	0	133	56	147	197

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026

Tabel Tren Realisasi Investasi 5 Negara Timur Tengah di Jawa Tengah Tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa realisasi investasi dari kawasan Timur Tengah di Jawa Tengah masih relatif kecil dan cenderung fluktuatif. Yordania dan Yaman menjadi negara dengan kontribusi investasi terbesar selama periode pengamatan, di mana Yordania mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 1.532 ribu USD pada tahun 2024 sebelum menurun pada tahun 2025, sedangkan Yaman menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2023 meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Uni Emirat Arab mulai menunjukkan realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar 810 ribu USD setelah sebelumnya belum terdapat investasi,

sementara Irak juga mulai berinvestasi sejak tahun 2024 dengan tren meningkat pada tahun 2025. Saudi Arabia menunjukkan kontribusi investasi yang relatif kecil namun cenderung meningkat secara bertahap. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah masih terbuka untuk dikembangkan, namun diperlukan strategi promosi investasi yang lebih spesifik dan terarah guna meningkatkan minat serta realisasi investasi dari kawasan tersebut.

5.1.4 Perbandingan Nilai dan Sektor Investasi Timur Tengah di Indonesia

Selain melihat perkembangan investasi dari waktu ke waktu, penting untuk memahami karakteristik investasi masing-masing negara Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan perbandingan nilai investasi dan sektor usaha yang menjadi tujuan investasi utama pada tahun 2025, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai preferensi investasi serta peluang sektor yang berpotensi dikembangkan di Jawa Tengah.

Tabel 5. 3 Perbandingan Nilai dan Sektor Investasi Negara Timur Tengah di Indonesia 2025 (USD Ribu)

No	Sektor	UEA	Saudi Arabia	Yordania	Yaman	Irak	Total
1	Listrik, gas dan air	89.244	0	0	6	0	89.250
2	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	5.834	81.145	597	651	471	88.698
3	Industri kimia dan farmasi	18.175	14.297	20.792	741	721	54.725
4	Jasa lainnya	14.442	1.069	5.652	1.165	0	22.328
5	Industri mineral non logam	0	0	19.819	0	0	19.819
6	Hotel dan restoran	11.525	4.866	371	86	85	16.934
7	Industri karet dan plastik	11.347	0	0	102	0	11.448
8	Perdagangan dan reparasi	965	493	437	5.731	389	8.016
9	Pertambangan	7.266	0	0	0	0	7.266
10	Konstruksi	6.229	0	0	3	0	6.232
11	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	2.406	186	0	297	0	2.888
12	Perikanan	0	0	0	2.538	0	2.538
13	Transportasi, gudang dan telekomunikasi	876	32	384	3	617	1.912
14	Industri makanan	398	953	322	39	0	1.712
15	Industri mesin, elektronik, dan peralatan presisi	677	0	0	0	0	677
16	Kehutanan	0	0	1	658	0	659
17	Industri tekstil	0	540	0	0	0	540
18	Industri kertas dan percetakan	306	0	0	0	0	306
19	Industri logam dasar dan barang logam	0	58	69	0	0	127
20	Industri lainnya	0	0	15	0	78	93
21	Industri kayu	0	0	0	3	0	3

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel Perbandingan Nilai dan Sektor Investasi Negara Timur Tengah di Indonesia Tahun 2025, investasi dari negara-negara Timur Tengah terkonsentrasi pada beberapa sektor utama dengan total nilai terbesar berada pada sektor listrik, gas, dan air sebesar 89.250 ribu USD serta sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 88.698 ribu USD. Investasi pada sektor listrik, gas, dan air hampir seluruhnya berasal dari Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai 89.244 ribu USD, menunjukkan tingginya minat negara tersebut terhadap pengembangan infrastruktur utilitas di Indonesia. Sementara itu, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran didominasi oleh investasi dari Saudi Arabia sebesar 81.145 ribu USD. Pada sektor industri pengolahan, investasi terbesar tercatat pada industri kimia dan farmasi dengan nilai 54.725 ribu USD yang didukung terutama oleh investasi dari Yordania, UEA, dan Saudi Arabia. Selain itu, sektor jasa lainnya, hotel dan restoran, serta industri mineral non-logam juga menjadi tujuan investasi yang cukup signifikan. Secara umum, pola investasi negara-negara Timur Tengah pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan untuk menanamkan modal pada sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur, kawasan industri, industri manufaktur, serta sektor jasa yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang di Indonesia.

5.1.5 Posisi Kompetitif Jawa Tengah dalam Menarik Investasi Timur Tengah

Untuk menilai daya saing Jawa Tengah dalam menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, diperlukan perbandingan dengan provinsi lain yang menjadi tujuan investasi utama. Analisis ini memberikan gambaran mengenai posisi kompetitif Jawa Tengah dalam penyerapan investasi Timur Tengah serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi pada masa mendatang.

Tabel 5. 4 Posisi Kompetitif Jawa Tengah dalam Penyerapan Investasi Timur Tengah

Peringkat	Provinsi	Total Investasi 2021-2025 (ribu USD)	Pangsa (%)
1	Jawa Barat	212.019	39.06
2	Jawa Timur	148.833	27.42
3	DKI Jakarta	86.269	15.89
4	Bali	38.681	7.13
5	Sumatera Selatan	23.162	4.27
6	Kalimantan Timur	10.369	1.91
7	Jawa Tengah	8.353	1.54
8	Papua	3.851	0.71
9	Papua Selatan	3.326	0.61
10	Nusa Tenggara Barat	2.921	0.54
11	Sumatera Utara	2.324	0.43
12	Banten	1.060	0.20
13	Jambi	580	0.11

Peringkat	Provinsi	Total Investasi 2021-2025 (ribu USD)	Pangsa (%)
14	Nusa Tenggara Timur	551	0.10
15	Sulawesi Utara	526	0.10
	Total	542.825	100.00

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026 (diolah).

Berdasarkan total realisasi investasi negara-negara Timur Tengah di Indonesia periode 2021-2025, Jawa Barat menempati posisi sebagai provinsi penerima investasi terbesar dengan nilai mencapai 212.019 ribu USD atau 39,06% dari total investasi Timur Tengah di Indonesia. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur sebesar 148.833 ribu USD (27,42%) dan DKI Jakarta sebesar 86.269 ribu USD (15,89%). Ketiga provinsi tersebut secara kumulatif menyerap lebih dari 82% total investasi Timur Tengah, menunjukkan tingginya konsentrasi investasi pada wilayah yang memiliki basis industri, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang kuat. Sementara itu, Jawa Tengah berada pada peringkat ketujuh dengan total investasi sebesar 8.353 ribu USD atau 1,54% dari total investasi Timur Tengah di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah telah berhasil menarik investasi dari kawasan Timur Tengah, namun daya saingnya masih relatif lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi tujuan utama investasi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Jawa Tengah untuk meningkatkan daya tarik investasinya melalui penguatan promosi investasi, pengembangan kawasan industri, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta penyediaan proyek-proyek investasi yang sesuai dengan preferensi investor Timur Tengah. Selain itu, posisi Jawa Tengah yang masih berada di atas beberapa provinsi lain seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Banten menunjukkan bahwa provinsi ini telah memiliki tingkat kompetitivitas yang cukup baik dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi salah satu tujuan utama investasi Timur Tengah di Indonesia pada masa mendatang.

5.2 Profil dan Karakteristik Investor Timur Tengah

Profil dan karakteristik investor merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan strategi promosi investasi karena memberikan gambaran mengenai preferensi, pola investasi, serta kecenderungan sektor yang diminati oleh calon investor. Dalam kajian ini, analisis dilakukan terhadap investor asal negara-negara Timur Tengah melalui identifikasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah, didukung dengan data realisasi investasi nasional, hasil *Focus Group Discussion* (FGD), serta wawancara dengan pelaku usaha. Analisis mencakup profil perusahaan, persebaran investasi, sektor dan komoditas yang menjadi fokus investasi, karakteristik investasi, pola masuk investasi, hingga

faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik investor Timur Tengah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi promosi investasi dan penawaran proyek investasi yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi investor sasaran.

5.2.1 Profil Perusahaan PMA Timur Tengah di Jawa Tengah dan Indonesia

Analisis profil perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal negara-negara Timur Tengah dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik investasi yang telah berkembang di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan negara asal, sektor usaha, komoditas, lokasi, dan nilai investasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola dan kecenderungan investasi yang telah terealisasi sebagai dasar dalam memahami karakteristik investasi Timur Tengah di Jawa Tengah sebelum dilakukan analisis yang lebih luas pada tingkat nasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, yang mengatur klasifikasi bidang usaha serta memberikan kepastian mengenai bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun yang diprioritaskan bagi penanaman modal. Kerangka kebijakan tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi sekaligus menilai kesesuaian investasi yang telah masuk dengan arah kebijakan pengembangan investasi nasional dan daerah. Berdasarkan kerangka tersebut, data perusahaan PMA asal negara-negara Timur Tengah yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Perusahaan PMA Timur Tengah di Jawa Tengah 2025

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	SektorUsaha	Komoditas Utama	Lokasi	Besaran Investasi (Rp Juta)
1	Taibah Dua Sahabat	Yaman	Perdagangan Besar Pakaian	Sarung Tenun Goyor	Pemalang	10.492.588.500,00
2	Alyafei Creativity International	Yaman	Perdagangan Besar Tekstil	Tekstil	Pemalang	2.600.000.000,00
3	Alofoq International Trading	Yaman	Industri kimia hasil pertanian (Arang Briket)	Arang Briket	Kota Semarang	1.177.641.000,00
4	Azal International Group	Yaman	Industri kimia dasar organik hasil pertanian	Hasil Pertanian	Kota Semarang	8.000.000,00
5	ICCS Global Industries	UEA	Industri kimia dasar organik hasil pertanian (Arang Briket Kelapa)	Arang Briket	Kota Semarang	11.224.415.856,00
6	Java Raya International	Yordania	Perdagangan besar peralatan rumah tangga, Industri	Olahan Kelapa (Minyak, lemak nabati,	Pati	7.560.000.000,00

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Sektor Usaha	Komoditas Utama	Lokasi	Besaran Investasi (Rp Juta)
			pengolahan hasil kelapa	sabut, Arang Briket		
7	Taima International Factory	Yordania	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau, Penggilingan logam bukan besi, Industri rokok putih, Industri kimia dasar (Arang Briket)	Tembakau, Logam, Arang Briket	Pati	3.910.000.000,00
8	Charcoal Black Diamond International	Yordania	Perdagangan hasil pengolahan kelapa, Industri briket batubara	Kelapa, Briket Batu Bara	Pati	660.500.000,00
9	Ukiq Pro Group	Iraq	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Pupuk Pertanian	Jepara	10.840.000.000,00
10	Eka Timur Raya	Saudi Arabia	Pertanian Jamur, Industri pengolahan dan pengawetan sayur dalam kaleng, Perdagangan besar hasil pertanian	Jamur, Sayuran Kaleng	Brebes	3.150.000.000,00
11	Royal Alhumaid Internasional	Saudi Arabia	Perdagangan besar peralatan rumah tangga, perdagangan bahan konstruksi dari kayu	Kayu, Bahan Konstruksi	Jepara	4.900.000,00

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 5.5, hingga tahun 2025 tercatat terdapat sebelas perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal kawasan Timur Tengah yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik investasi yang beragam, baik dari sisi negara asal, sektor usaha, komoditas, maupun lokasi investasi. Investor berasal dari Yaman, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Irak, dan Arab Saudi, dengan dominasi kegiatan pada sektor perdagangan besar dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Komoditas yang menjadi fokus investasi meliputi arang briket, produk olahan kelapa, tekstil, sarung tenun goyor, pupuk pertanian, hasil pertanian, jamur, sayuran olahan, serta bahan konstruksi berbahan kayu. Secara spasial, investasi terkonsentrasi di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Brebes yang merupakan daerah dengan potensi komoditas unggulan masing-masing. Dari sisi nilai investasi, perusahaan dengan realisasi investasi terbesar adalah PT ICCS Global Industries asal Uni Emirat Arab dengan nilai investasi sebesar Rp11,22 miliar pada industri arang briket kelapa di Kota Semarang, diikuti PT Ukiq Pro Group asal Irak sebesar Rp10,84 miliar di Kabupaten Jepara dan PT Taibah Dua Sahabat asal Yaman sebesar Rp10,49 miliar di Kabupaten Pemalang.

Temuan ini menunjukkan bahwa investasi Timur Tengah di Jawa Tengah cenderung memanfaatkan potensi sumber daya lokal melalui pengembangan industri pengolahan dan perdagangan komoditas berorientasi ekspor.

Selanjutnya, analisis akan dilengkapi dengan data Realisasi PMA asal negara-negara Timur Tengah pada lingkup nasional. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi profil dan karakteristik PMA Timur Tengah yang telah berinvestasi di Indonesia, namun belum melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Melalui identifikasi tersebut, dapat diketahui kecenderungan preferensi investor Timur Tengah, terutama terkait sektor usaha, skala investasi, dan lokasi penanaman modal yang dipilih. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi peluang investasi potensial yang dapat ditawarkan kepada investor Timur Tengah guna mendorong perluasan investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 6 Realisasi Investasi dari Timur Tengah di Indonesia Tahun 2025 (USD Ribu)

No	Kab/Kota	Sektor (KBLI)	Negara Asal	Besaran Investasi
1	Bali	69 - Real Estat	UEA	5247,783
2	Bali	81 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	Yordania	5138,438
3	Bali	55 - Penyediaan Akomodasi	UEA	4350,406
4	Bali	58 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	UEA	1179,121
5	Bali	71 - Real Estat	Yordania	551,222
6	Bali	70 - Real Estat	Yaman	459,375
7	Bali	82 - Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	UEA	105,664
8	Bali	68 - Real Estat	Saudi Arabia	89,163
9	Bali	74 - Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	UEA	73,938
10	Bali	71 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	UEA	47,354
11	Bali	49 - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	Yordania	45,071
12	Bali	60 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	Yordania	12,500
13	Bali	72 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	Yaman	6,250
14	Bali	49 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yordania	2,000
15	Bali	73 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	Yordania	1,750
16	Bali	75 - Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	Yordania	1,716
17	Bali	48 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yaman	1,563
18	Bali	62 - Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	Saudi Arabia	0,938
19	Banten	49 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yaman	90,548
20	Banten	48 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	UEA	41,800

No	Kab/Kota	Sektor (KBLI)	Negara Asal	Besaran Investasi
21	DI Yogyakarta	46 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yaman	300,938
22	DI Yogyakarta	56 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	Irak	85,268
23	DI Yogyakarta	16 - Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	Yaman	3,125
24	DKI Jakarta	72 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	UEA	10080,544
25	DKI Jakarta	43 - Konstruksi Khusus	UEA	5957,374
26	DKI Jakarta	56 - Penyediaan Akomodasi	UEA	5823,463
27	DKI Jakarta	49 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yaman	4473,069
28	DKI Jakarta	79 - Aktivitas Ketenagakerjaan	UEA	1298,856
29	DKI Jakarta	63 - Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	UEA	1210,345
30	DKI Jakarta	69 - Real Estat	Saudi Arabia	1036,042
31	DKI Jakarta	65 - Aktivitas Jasa Informasi	UEA	970,234
32	DKI Jakarta	48 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	UEA	846,668
33	DKI Jakarta	76 - Periklanan Dan Penelitian Pasar	Yaman	659,375
34	DKI Jakarta	4 - Pengelolaan Kehutanan Dan Penebangan	Yaman	658,125
35	DKI Jakarta	22 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Yaman	625,000
36	DKI Jakarta	81 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	UEA	590,264
37	DKI Jakarta	21 - Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	Saudi Arabia	481,250
38	DKI Jakarta	63 - Telekomunikasi	Yordania	384,375
39	DKI Jakarta	68 - Real Estat	Irak	356,250
40	DKI Jakarta	47 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Saudi Arabia	278,763
41	DKI Jakarta	82 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	Yaman	201,875
42	DKI Jakarta	46 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Irak	201,531
43	DKI Jakarta	76 - Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	Yaman	125,000
44	DKI Jakarta	83 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	Yordania	113,156
45	DKI Jakarta	22 - Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	Yaman	101,563
46	DKI Jakarta	09 - Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan	UEA	86,455
47	DKI Jakarta	67 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	UEA	61,091
48	DKI Jakarta	07 - Pertambangan Bijih Logam	UEA	51,338
49	DKI Jakarta	86 - Pendidikan	Yaman	45,217
50	DKI Jakarta	60 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	Yordania	36,302
51	DKI Jakarta	59 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	Yaman	27,000
52	DKI Jakarta	50 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yordania	18,103

No	Kab/Kota	Sektor (KBLI)	Negara Asal	Besaran Investasi
53	DKI Jakarta	64 - Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	Yaman	13,007
54	DKI Jakarta	53 - Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	UEA	11,975
55	DKI Jakarta	73 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	Yaman	9,526
56	DKI Jakarta	86 - Aktivitas Kesehatan Manusia	Yaman	9,188
57	DKI Jakarta	49 - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	Yaman	6,250
58	DKI Jakarta	57 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	Saudi Arabia	6,250
59	DKI Jakarta	66 - Aktivitas Jasa Informasi	Yaman	5,174
60	DKI Jakarta	71 - Real Estat	Yaman	3,959
61	DKI Jakarta	11 - Industri Makanan	Yaman	3,125
62	DKI Jakarta	54 - Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	Yaman	3,125
63	DKI Jakarta	75 - Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	UEA	2,875
64	DKI Jakarta	43 - Konstruksi Bangunan Sipil	Yaman	2,685
65	DKI Jakarta	5 - Pengelolaan Kehutanan Dan Penebangan	Yordania	0,625
66	DKI Jakarta	66 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	Saudi Arabia	0,625
67	DKI Jakarta	72 - Real Estat	Yordania	0,063
68	Jambi	05 - Pertambangan Batu Bara Dan Lignit	UEA	357,246
69	Jawa Barat	35 - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	UEA	89213,649
70	Jawa Barat	21 - Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	UEA	17339,853
71	Jawa Barat	22 - Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	UEA	11346,642
72	Jawa Barat	55 - Penyediaan Akomodasi	Saudi Arabia	4860,000
73	Jawa Barat	69 - Real Estat	Saudi Arabia	1051,521
74	Jawa Barat	91 - Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	Saudi Arabia	1000,000
75	Jawa Barat	27 - Industri Peralatan Listrik	UEA	676,875
76	Jawa Barat	52 - Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	Irak	616,896
77	Jawa Barat	21 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Saudi Arabia	558,125
78	Jawa Barat	17 - Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	UEA	305,689
79	Jawa Barat	46 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Irak	187,637
80	Jawa Barat	71 - Real Estat	Yaman	187,626
81	Jawa Barat	50 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yordania	125,146
82	Jawa Barat	32 - Industri Pengolahan Lainnya	Irak	78,174
83	Jawa Barat	47 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Saudi Arabia	70,055
84	Jawa Barat	48 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	UEA	69,349
85	Jawa Barat	70 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	Saudi Arabia	67,188
86	Jawa Barat	71 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	Yaman	62,500
87	Jawa Barat	56 - Penyediaan Akomodasi	Yaman	46,656
88	Jawa Barat	20 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Irak	43,238
89	Jawa Barat	22 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Yaman	41,461

No	Kab/Kota	Sektor (KBLI)	Negara Asal	Besaran Investasi
90	Jawa Barat	49 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yaman	39,946
91	Jawa Barat	11 - Industri Makanan	Yaman	35,938
92	Jawa Barat	85 - Pendidikan	Yaman	19,628
93	Jawa Barat	10 - Industri Makanan	Saudi Arabia	12,980
94	Jawa Barat	58 - Penyediaan Makanan Dan Minuman	Yaman	12,500
95	Jawa Barat	41 - Konstruksi Gedung	UEA	11,167
96	Jawa Barat	80 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	Yaman	8,438
97	Jawa Barat	2 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi	Yaman	6,409
98	Jawa Barat	43 - Konstruksi Khusus	UEA	5,491
99	Jawa Barat	23 - Industri Barang Galian Bukan Logam	Yordania	5,156
100	Jawa Barat	42 - Konstruksi Bangunan Sipil	UEA	5,063
101	Jawa Barat	47 - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	Saudi Arabia	4,063
102	Jawa Barat	33 - Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan	UEA	2,656
103	Jawa Barat	78 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	UEA	0,969
104	Jawa Barat	01 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi	Saudi Arabia	0,625
105	Jawa Tengah	48 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yaman	818,287
106	Jawa Tengah	21 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	UEA	810,320
107	Jawa Tengah	20 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Irak	677,500
108	Jawa Tengah	23 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Yordania	218,594
109	Jawa Tengah	11 - Industri Makanan	Yordania	212,500
110	Jawa Tengah	49 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Yordania	146,875
111	Jawa Tengah	12 - Industri Pengolahan Tembakau	Yordania	90,625
112	Jawa Tengah	22 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Yaman	74,103
113	Jawa Tengah	01 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi	Saudi Arabia	71,875
114	Jawa Tengah	10 - Industri Makanan	Saudi Arabia	68,750
115	Jawa Tengah	24 - Industri Logam Dasar	Yordania	68,750
116	Jawa Tengah	47 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	Saudi Arabia	56,556
117	Jawa Tengah	32 - Industri Pengolahan Lainnya	Yordania	15,000
118	Jawa Tengah	19 - Industri Produk Dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi	Yordania	5,813
119	Jawa Timur	68 - Real Estat	Saudi Arabia	78925,625
120	Jawa Timur	22 - Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Yordania	20567,580
121	Jawa Timur	23 - Industri Barang Galian Bukan Logam	Yordania	19814,168
122	Jawa Timur	21 - Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	Saudi Arabia	13190,000

No	Kab/Kota	Sektor (KBLI)	Negara Asal	Besaran Investasi
123	Jawa Timur	03 - Perikanan	Yaman	2537,500
124	Jawa Timur	13 - Industri Tekstil	Saudi Arabia	539,539
125	Jawa Timur	10 - Industri Makanan	Saudi Arabia	417,813
126	Jawa Timur	12 - Industri Pengolahan Tembakau	UEA	398,386
127	Jawa Timur	2 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ybdi	Yaman	290,516
128	Jawa Timur	41 - Konstruksi Gedung	UEA	250,000

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5.6, realisasi PMA dari negara-negara Timur Tengah di Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa investasi didominasi oleh investor asal Uni Emirat Arab (UEA), diikuti Arab Saudi, Yordania, Yaman, dan Irak. Nilai investasi terbesar tercatat pada sektor listrik, gas dan air di Jawa Barat oleh investor UEA sebesar USD 89,21 juta, sedangkan investasi bernilai besar lainnya banyak terdapat pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta industri kimia dan farmasi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi Timur Tengah di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal dan sektor yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur maupun industri. Dari sisi wilayah, investasi Timur Tengah lebih banyak terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali. Keempat provinsi tersebut menerima investasi dengan nilai yang relatif lebih besar dan pada sektor yang lebih beragam dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, investasi di Jawa Tengah sudah mulai muncul, terutama pada sektor industri kimia dan farmasi, industri makanan, perdagangan dan reparasi, tanaman pangan, serta industri logam dasar, namun nilai investasinya masih relatif kecil dibandingkan provinsi tujuan utama lainnya.

Selain itu, data menunjukkan adanya variasi skala investasi yang cukup lebar, mulai dari investasi bernilai sangat kecil hingga mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Investasi berskala besar umumnya terdapat pada sektor utilitas, kawasan industri, dan industri manufaktur, sedangkan investasi berskala kecil hingga menengah lebih banyak ditemukan pada sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran, serta industri makanan. Secara keseluruhan, pola tersebut menggambarkan bahwa investor Timur Tengah memiliki preferensi investasi yang beragam baik dari sisi sektor usaha, lokasi penanaman modal, maupun besaran investasi yang ditanamkan.

5.2.2 Preferensi Sektor Investasi

Untuk mengidentifikasi preferensi sektor investasi investor asal negara-negara Timur Tengah, dilakukan pengumpulan dan analisis informasi melalui hasil *Focus Group Discussion*

(FGD), analisis data perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), data realisasi investasi BKPM/LKPM Tahun 2025, serta wawancara mendalam dengan perusahaan PMA asal Timur Tengah yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil FGD 1 serta wawancara dengan PT ICCS Global Industries dan PT Taibah Dua Sahabat, investasi dari negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam, kegiatan perdagangan berorientasi ekspor, serta produk yang telah memiliki pasar di kawasan Timur Tengah. Temuan tersebut sejalan dengan paparan BKPM dalam FGD 1 yang menyampaikan bahwa investor Timur Tengah pada umumnya mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, komoditas unggulan daerah, serta kepastian pasar sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi investasi.

Temuan tersebut diperkuat oleh data realisasi investasi BKPM/LKPM Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pola investasi Timur Tengah di Jawa Tengah masih didominasi sektor berbasis komoditas, industri pengolahan, dan perdagangan. Berdasarkan data BKPM/LKPM, sektor dengan nilai investasi terbesar di Jawa Tengah berasal dari perdagangan besar (bukan mobil dan sepeda motor) sebesar sekitar 818,29 ribu US\$, diikuti industri kimia dan barang dari bahan kimia yang secara kumulatif mencapai lebih dari 1,7 juta US\$, serta industri makanan sekitar 212,50 ribu US\$. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa investasi Timur Tengah di Jawa Tengah cenderung diarahkan pada sektor yang memanfaatkan sumber daya lokal, menghasilkan nilai tambah melalui proses pengolahan, dan memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan internasional, khususnya pasar Timur Tengah.

PT ICCS Global Industries merupakan salah satu contoh investasi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam. Perusahaan yang merupakan anak usaha Mats International Dubai bergerak pada industri produksi arang briket kelapa dengan bahan baku utama berupa batok kelapa berkualitas tinggi yang dipasok dari Sulawesi. Seluruh hasil produksinya diekspor ke negara-negara Timur Tengah dengan volume mencapai sekitar enam kontainer setiap bulan. Kasus ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pasokan bahan baku dan kepastian pasar ekspor menjadi pertimbangan utama investor dalam mengembangkan usahanya di Indonesia.

Di sisi lain, PT Taibah Dua Sahabat memperlihatkan karakteristik investasi yang berbeda. Perusahaan milik investor asal Yaman ini bergerak di bidang perdagangan besar sarung goyor khas Kabupaten Pemalang. Perusahaan berperan sebagai agregator produk tenun yang diproduksi oleh pelaku usaha rumahan, kemudian melakukan proses seleksi kualitas,

pengemasan, pemberian merek, hingga pemasaran ke Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah lainnya, dan sebagian negara di kawasan Afrika. Keberadaan PT Taibah Dua Sahabat menunjukkan bahwa investor Timur Tengah tidak hanya berminat pada sektor berbasis sumber daya alam, tetapi juga pada produk lokal yang memiliki nilai budaya, kualitas yang terjaga, serta jaringan pasar ekspor yang telah terbentuk.

Untuk memperkaya pemahaman mengenai preferensi sektor investasi investor Timur Tengah, dilakukan pula perbandingan data realisasi investasi BKPM/LKPM Tahun 2025 antarprovinsi. Secara nasional, total realisasi investasi dari kawasan Timur Tengah mencapai sekitar 336,17 juta US\$. Jawa Timur menjadi penerima investasi terbesar dengan pangsa sekitar 40,9%, diikuti Jawa Barat sebesar 38,1%, DKI Jakarta sebesar 11,0%, Bali sebesar 5,2%, Kalimantan Timur sekitar 2,0%, sedangkan Jawa Tengah masih berada pada kisaran kurang dari 1% dari total investasi Timur Tengah secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi Timur Tengah masih terkonsentrasi pada beberapa provinsi tertentu, sementara Jawa Tengah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan daya tarik investasinya.

Karakteristik sektor investasi juga menunjukkan perbedaan antardaerah. Di Jawa Barat, investasi didominasi **sektor pengadaan listrik, gas, uap, dan udara dingin** dengan nilai sekitar 89,21 juta US\$, yang menunjukkan adanya kecenderungan investasi pada proyek **infrastruktur energi berskala besar**. Jawa Timur didominasi **sektor real estat** sebesar sekitar 78,93 juta US\$, disusul **industri bahan kimia, industri farmasi, dan industri barang galian bukan logam**. Sementara itu, DKI Jakarta lebih terkonsentrasi pada **aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, konstruksi khusus, perdagangan, dan sektor jasa lainnya**. Di Bali, investasi lebih banyak mengarah pada **real estat, akomodasi, pariwisata, dan jasa perjalanan**. Kalimantan Timur didominasi oleh **sektor pertambangan batu bara dan lignit**, sedangkan Sumatera Selatan terkonsentrasi pada **sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan**.

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi tersebut, pola investasi Timur Tengah di Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda. Investasi tidak didominasi oleh satu proyek berskala besar (*mega-project*), melainkan tersebar pada beberapa sektor seperti industri kimia, perdagangan, dan industri makanan. Komposisi negara investornya juga menunjukkan karakteristik tersendiri. Berdasarkan data BKPM/LKPM Tahun 2025, kontribusi investasi terbesar di Jawa Tengah berasal dari Yaman sekitar 892,39 ribu US\$, diikuti Uni Emirat Arab

sebesar 810,32 ribu US\$, Yordania sebesar 758,16 ribu US\$, Irak sebesar 677,50 ribu US\$, serta Arab Saudi sebesar 197,18 ribu US\$. Komposisi tersebut berbeda dengan pola nasional yang cenderung didominasi oleh Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada proyek-proyek berskala besar di sektor energi dan properti. Temuan ini menunjukkan bahwa model investasi yang berkembang di Jawa Tengah lebih mengarah pada kemitraan berbasis rantai pasok, perdagangan, dan pasar ekspor dibandingkan investasi padat modal pada proyek infrastruktur berskala besar.

Selain sektor-sektor yang telah berkembang, FGD 1 juga mengidentifikasi sejumlah sektor potensial untuk pengembangan investasi di masa mendatang. Narasumber dari PT ICCS Global Industries menilai bahwa sektor energi baru terbarukan memiliki prospek yang sangat besar seiring transformasi energi yang sedang berlangsung di negara-negara Timur Tengah. Bappeda Provinsi Jawa Tengah turut mengidentifikasi potensi panas bumi sebagai sektor yang layak ditawarkan kepada investor, sedangkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah menyoroti peluang investasi pada sektor data center dan industri farmasi.

Di sisi lain, hasil FGD juga menunjukkan bahwa preferensi investor Timur Tengah tidak bersifat homogen. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) menyampaikan bahwa investor asal Qatar cenderung lebih tertarik pada investasi di sektor lahan, properti, dan kawasan wisata dibandingkan industri pengolahan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa preferensi investasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara asal investor, pengalaman bisnis, strategi perusahaan, serta tujuan investasi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, strategi promosi investasi Provinsi Jawa Tengah perlu disusun secara lebih spesifik sesuai karakteristik masing-masing negara di kawasan Timur Tengah agar peluang investasi yang ditawarkan dapat lebih tepat sasaran.

5.2.3 Skala Investasi

Skala investasi langsung dari negara-negara Timur Tengah di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar, bergantung pada karakteristik sektor, skema kerja sama, serta jenis proyek yang ditawarkan oleh daerah, khususnya melalui skema *Investment Project Ready to Offer* (IPRO). Variasi tersebut juga tercermin dalam data realisasi investasi BKPM/LKPM Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa besaran investasi sangat dipengaruhi oleh sifat proyek, kebutuhan modal, dan karakteristik sektor ekonomi pada masing-masing provinsi.

Pada proyek-proyek strategis nasional, nilai investasi dari investor Timur Tengah dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Salah satu contoh adalah

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Jawa Barat yang melibatkan Masdar (*Abu Dhabi Future Energy Company*) dari Uni Emirat Arab dengan nilai komitmen investasi sekitar USD101,20 juta. Besarnya nilai investasi tersebut sejalan dengan data realisasi BKPM/LKPM Tahun 2025 yang menunjukkan dominasi investasi Uni Emirat Arab pada sektor listrik, gas, dan air di Jawa Barat dengan nilai sekitar USD89,21 juta. Selisih antara nilai komitmen dan realisasi investasi merupakan kondisi yang umum terjadi karena proses realisasi investasi dilakukan secara bertahap mengikuti tahapan pembangunan proyek, pengadaan infrastruktur, serta pencairan modal sesuai perkembangan kegiatan investasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa investor Timur Tengah memiliki kapasitas finansial yang besar untuk mendanai proyek strategis berskala besar apabila proyek yang ditawarkan memiliki tingkat kelayakan yang baik, kepastian regulasi, serta prospek keuntungan yang menarik.

Berbeda dengan pola investasi di Jawa Barat maupun Jawa Timur, investasi Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh investasi berskala kecil hingga menengah. Berdasarkan data BKPM/LKPM Tahun 2025, tercatat sebanyak 12 transaksi investasi PMA asal negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah dengan total nilai investasi sekitar USD3,34 juta. Dengan demikian, rata-rata nilai investasi berada pada kisaran USD278 ribu per transaksi. Nilai investasi terbesar tercatat sekitar USD818 ribu pada sektor perdagangan dan reparasi yang berasal dari investor Yaman. Nilai tersebut relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata investasi per transaksi di provinsi tujuan utama investasi Timur Tengah lainnya, seperti Jawa Timur yang mencapai sekitar USD8,58 juta per transaksi, Jawa Barat sebesar USD4,58 juta, DKI Jakarta sebesar USD1,27 juta, Bali sebesar USD1,44 juta, dan Kalimantan Timur sebesar USD2,24 juta. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa skala investasi Timur Tengah di Jawa Tengah masih berada pada kategori relatif kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang menjadi tujuan utama investasi Timur Tengah di Indonesia.

Perbedaan skala investasi antardaerah tersebut menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik proyek yang ditawarkan dengan keputusan investasi investor. Provinsi yang menerima investasi dalam jumlah besar umumnya menawarkan proyek padat modal seperti energi, infrastruktur, kawasan industri, atau pengembangan properti skala besar. Sementara itu, investasi di Jawa Tengah lebih banyak diarahkan pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan aktivitas yang mendukung rantai pasok komoditas ekspor.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil FGD 1 bersama APINDO yang menyatakan bahwa investor Timur Tengah pada umumnya tidak langsung melakukan investasi dalam skala besar ketika memasuki suatu wilayah baru. Sebagian besar investor memilih memulai usaha dalam skala kecil hingga menengah untuk mendukung aktivitas perdagangan yang telah dimiliki di negara asal ataupun memperkuat rantai pasok komoditas yang telah berjalan. Strategi tersebut memungkinkan investor memperoleh kepastian pasokan bahan baku, memahami kondisi pasar lokal, membangun jaringan usaha, serta meminimalkan risiko investasi sebelum melakukan ekspansi usaha dalam skala yang lebih besar.

Karakteristik tersebut tercermin pada PT ICCS Global Industries. Perusahaan ini beroperasi pada lahan seluas kurang dari 2.000 meter persegi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 147 orang. Dari keseluruhan tenaga kerja tersebut, hanya satu orang yang merupakan tenaga kerja asing yang menjabat sebagai direktur sekaligus penghubung dengan pelanggan di kawasan Timur Tengah. Meskipun skala investasinya relatif terbatas, perusahaan mampu menjalankan kegiatan produksi secara berkelanjutan serta mengekspor seluruh hasil produksinya ke negara-negara Timur Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan investasi tidak semata ditentukan oleh besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga oleh efisiensi operasional, kepastian pasokan bahan baku, dan akses pasar yang jelas.

Pola investasi yang serupa juga terlihat pada PT Taibah Dua Sahabat. Perusahaan ini tidak mengembangkan fasilitas manufaktur berskala besar, melainkan menggunakan model bisnis sebagai agregator sarung tenun goyor yang diproduksi oleh pengrajin lokal di Kabupaten Pemalang. Perusahaan melakukan proses seleksi kualitas (*quality control*), pengemasan, pemberian merek, serta pemasaran sebelum produk diekspor ke Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah lainnya, dan sebagian negara di kawasan Afrika. Model bisnis tersebut menunjukkan bahwa investor Timur Tengah cenderung memilih investasi yang memperkuat rantai pasok dan jaringan perdagangan yang telah dimiliki dibandingkan investasi pada industri manufaktur padat modal yang memerlukan investasi awal dalam jumlah besar.

Di sisi lain, hasil FGD 1 bersama BKPM mengungkapkan bahwa tidak seluruh investasi Timur Tengah tercatat sebagai investasi langsung dari negara asal investor. Sebagai contoh, kepemilikan saham investor Qatar pada Indosat Ooredoo Hutchison tercatat melalui entitas investasi di Singapura sehingga dalam statistik BKPM investasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi asal Singapura. Fenomena serupa dapat pula menjelaskan perbedaan antara nilai komitmen investasi Masdar pada proyek PLTS Terapung dengan realisasi investasi yang

tercatat dalam LKPM. Dengan demikian, statistik investasi resmi belum sepenuhnya mencerminkan besarnya keterlibatan modal negara-negara Timur Tengah karena sebagian investasi dilakukan melalui *special purpose vehicle* (SPV), perusahaan afiliasi, maupun pusat keuangan internasional di negara ketiga.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa skala investasi investor Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh karakteristik proyek yang ditawarkan. Proyek strategis di sektor energi, kawasan industri, dan infrastruktur memiliki potensi untuk menarik investasi dengan nilai puluhan hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, pola investasi yang berkembang di Jawa Tengah saat ini masih didominasi oleh investasi berskala kecil hingga menengah yang berorientasi pada perdagangan, industri pengolahan berbasis komoditas, dan penguatan rantai pasok ekspor. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan skala investasi di Jawa Tengah memerlukan penyediaan proyek yang lebih siap investasi (*investment ready*), memiliki kepastian lahan, didukung infrastruktur yang memadai, serta menawarkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik investor Timur Tengah untuk melakukan investasi dalam skala yang lebih besar.

5.2.4 Skema Kerja Sama

Pola investasi investor asal negara-negara Timur Tengah menunjukkan karakteristik yang khas dalam hal struktur kepemilikan, sumber pembiayaan, dan model pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) 1 dan wawancara mendalam, investor Timur Tengah umumnya berperan sebagai pemilik utama usaha (*ultimate beneficial owner*), namun aliran investasinya tidak selalu berasal secara langsung dari negara asal investor. Dalam banyak kasus, investasi disalurkan melalui negara ketiga seperti Singapura maupun Uni Emirat Arab yang berfungsi sebagai pusat (*hub*) investasi regional sebelum masuk ke Indonesia.

Pola tersebut diperkuat oleh data BKPM/LKPM Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, Uni Emirat Arab merupakan negara Timur Tengah dengan jangkauan investasi paling luas di Indonesia, yaitu mencatat 38 transaksi PMA yang tersebar pada 15 provinsi dan mencakup 14 sektor usaha. Sebagai perbandingan, Arab Saudi mencatat 27 transaksi pada 7 provinsi dan 10 sektor usaha, Yordania sebanyak 26 transaksi pada 8 provinsi dan 11 sektor, Yaman sebanyak 28 transaksi pada 8 provinsi dan 14 sektor, sedangkan Irak hanya mencatat 9 transaksi pada 5 provinsi dan 6 sektor usaha. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa pola investasi masing-masing negara Timur Tengah memiliki tingkat diversifikasi yang berbeda, baik dari sisi wilayah maupun sektor tujuan investasi.

Karakter investasi Uni Emirat Arab juga menunjukkan pola yang relatif beragam. Di satu sisi terdapat investasi dengan skala yang sangat besar, seperti investasi sekitar USD89,21 juta pada sektor listrik, gas, dan air di Jawa Barat. Namun di sisi lain, sebagian besar transaksi investasi Uni Emirat Arab berada pada skala yang relatif kecil, di mana sekitar 37% transaksi memiliki nilai investasi di bawah USD100 ribu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab tidak hanya berfungsi sebagai sumber investasi langsung, tetapi juga berperan sebagai pusat penempatan modal (*investment hub*) yang menyalurkan berbagai bentuk investasi dengan karakteristik yang beragam. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian aliran modal yang tercatat berasal dari struktur investasi yang lebih kompleks, termasuk penggunaan perusahaan afiliasi, entitas investasi khusus (*special purpose vehicle/SPV*), maupun pusat keuangan internasional.

Karakteristik kerja sama investor Timur Tengah juga tercermin pada pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Jawa Barat melalui kemitraan antara Masdar (Uni Emirat Arab) dan PT PLN Nusantara Power. Pada proyek ini, investor berperan dalam penyediaan modal, teknologi, dan pengalaman pengembangan, sedangkan mitra lokal mendukung aspek regulasi, operasional, dan pelaksanaan proyek. Pola tersebut menunjukkan bahwa pada proyek berskala besar, padat modal, dan berteknologi tinggi, investor Timur Tengah cenderung memilih skema kemitraan strategis dengan mitra lokal dibandingkan mengelola investasi secara mandiri.

Karakteristik tersebut juga terlihat pada PT ICCS Global Industries. Meskipun perusahaan dimiliki oleh investor asal Kuwait melalui Mats International Dubai, seluruh kebutuhan investasi perusahaan dibiayai menggunakan modal sendiri (*equity financing*) tanpa memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan maupun dukungan pembiayaan pemerintah. Modal internal tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pengadaan mesin dan peralatan, operasional perusahaan, hingga pengembangan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa investor Timur Tengah cenderung mengandalkan kemampuan permodalan internal sehingga keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal. Penggunaan modal internal juga memungkinkan investor mempertahankan kontrol yang lebih besar terhadap arah pengembangan usaha dan pengambilan keputusan strategis.

Model investasi yang berbeda ditunjukkan oleh PT Taibah Dua Sahabat. Perusahaan ini dikelola menggunakan pola usaha keluarga (*family business*), di mana pemilik bersama

anggota keluarganya terlibat secara langsung dalam pengelolaan operasional, pemasaran, hingga pengambilan keputusan strategis. Dalam proses administrasi dan perizinan investasi di Indonesia, perusahaan memanfaatkan dukungan mitra lokal yang memahami regulasi dan prosedur investasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa hubungan personal, tingkat kepercayaan, dan jaringan bisnis yang telah terbentuk sebelumnya menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan investasi investor asal Timur Tengah.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil FGD yang menunjukkan bahwa aspek hubungan interpersonal (*relationship-based investment*) memiliki peran yang cukup dominan dalam proses investasi investor Timur Tengah. Berbeda dengan investor yang lebih menitikberatkan analisis finansial formal, investor Timur Tengah cenderung mempertimbangkan faktor kepercayaan, reputasi mitra usaha, dan hubungan bisnis jangka panjang sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, keberadaan mitra lokal yang memiliki kredibilitas dan pemahaman terhadap kondisi daerah menjadi faktor yang dapat meningkatkan keyakinan investor dalam menanamkan modalnya.

Dalam aspek ketenagakerjaan, kedua perusahaan menunjukkan pola yang relatif serupa. Investor Timur Tengah pada umumnya tidak membawa tenaga kerja dalam jumlah besar dari negara asalnya, melainkan lebih mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Hasil wawancara dengan BKPM menunjukkan bahwa investor biasanya hanya menempatkan sejumlah kecil tenaga ahli atau personel kunci untuk mendukung fungsi manajerial, komunikasi dengan kantor pusat, maupun hubungan bisnis dengan pasar Timur Tengah. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja teknis, profesional, maupun tenaga operasional dipenuhi melalui perekrutan tenaga kerja lokal di sekitar lokasi usaha. Pola tersebut menunjukkan bahwa investasi Timur Tengah memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa investor asal Timur Tengah tidak secara khusus menerapkan skema pembiayaan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia. Pemilihan mekanisme pendanaan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan efisiensi, kelayakan usaha, serta prospek keuntungan dibandingkan preferensi terhadap model pembiayaan tertentu. Dengan demikian, meskipun berasal dari negara-negara yang identik dengan sistem keuangan syariah, investor tetap menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan skema pembiayaan selama mekanisme tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mampu mendukung keberlanjutan kegiatan investasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa model investasi investor Timur Tengah di Jawa Tengah dicirikan oleh kepemilikan usaha yang terpusat pada investor utama, penggunaan modal internal sebagai sumber pembiayaan utama, pengelolaan perusahaan yang banyak mengandalkan hubungan personal dan jaringan bisnis, serta pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional. Di sisi lain, pada proyek-proyek berskala besar dan padat modal, investor Timur Tengah juga menunjukkan kecenderungan untuk membangun skema kemitraan strategis melalui *joint venture* dengan mitra lokal. Karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa faktor kepercayaan, kepastian regulasi, kemudahan membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal, serta kesiapan proyek memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan insentif fiskal dalam menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah.

5.2.5 Faktor-Faktor Empiris yang Mempengaruhi Keputusan Investasi

Keputusan investasi investor Timur Tengah di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang bersifat saling berinteraksi. Pemahaman atas kedua sisi faktor ini menjadi krusial dalam merancang kebijakan peningkatan daya tarik investasi. Faktor pendorong utama yang teridentifikasi adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya alam. Narasumber wawancara secara tegas menyatakan bahwa alasan utama investor memilih Indonesia adalah murni karena kekayaan SDA yang dimiliki. Dalam kasus ICCS, kualitas batok kelapa dari Sulawesi yang lebih unggul dibanding daerah lain di Indonesia menjadi faktor determinan dalam pemilihan bahan baku. Hal senada dikonfirmasi APINDO dalam FGD 1 yang menyebut bahwa pola investasi Timur Tengah umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha di negara asal.

Faktor kedua adalah posisi geografis strategis Jawa Tengah. Lokasi Jawa Tengah yang diapit oleh DKI Jakarta di barat dan Jawa Timur (Surabaya) di timur dinilai menguntungkan karena memberikan akses ke dua pelabuhan besar: Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Kedekatan dengan infrastruktur logistik ini sangat penting mengingat bahan baku tidak dapat dikirim langsung dari Sulawesi, melainkan melalui jalur distribusi yang memanfaatkan jaringan pelabuhan Pulau Jawa. Selain itu, keberadaan Tol Prambanan turut mempengaruhi pertimbangan relokasi pabrik ke wilayah Klaten.

Faktor ketiga adalah kondisi nilai tukar dan iklim makroekonomi. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS justru berdampak positif bagi perusahaan eksportir seperti ICCS, karena seluruh transaksi ekspor menggunakan dolar sehingga menghasilkan tambahan

profit dari selisih kurs. Dari sisi kepastian iklim usaha, narasumber menyebut tiga faktor yang menjadi batas toleransi bertahannya investor asing: perpajakan, bea cukai, dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dinilai masih wajar.

Faktor keempat yang bersifat unik adalah kondisi geopolitik kawasan Timur Tengah. BKPM dalam FGD 1 menilai bahwa konflik di Timur Tengah justru menjadi peluang bagi Indonesia, karena investor cenderung menyebarkan aset investasinya ke wilayah yang dinilai aman dari konflik. Dalam kasus ICCS, konflik di kawasan bahkan meningkatkan permintaan produk briket arang karena masyarakat di wilayah konflik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun konflik juga menimbulkan dampak negatif di sisi logistik: penutupan Selat Hormuz sempat memaksa pengiriman dialihkan melalui Arab Saudi baru kemudian ke Kuwait, menambah biaya dan waktu tempuh ekspor secara signifikan.

Di sisi penghambat, faktor yang paling sering dikeluhkan adalah kompleksitas birokrasi perizinan. Narasumber menggambarkan proses perizinan di Indonesia sebagai terlalu sentralistik, karena pengajuan harus melalui tahapan mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Pada tahun 2015, proses perizinan tersebut memerlukan waktu sekitar tiga hingga empat bulan. Sebagai perbandingan, narasumber menyebut bahwa proses perizinan di Vietnam hanya memerlukan sekitar dua hari, sedangkan di Tiongkok kewenangan perizinan telah didelegasikan hingga tingkat kota sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa kecepatan layanan dan penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan lokasi investasi. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, transparan, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing investasi Provinsi Jawa Tengah.

Hambatan berikutnya adalah ketidakkonsistenan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Narasumber mengungkapkan memiliki pengalaman konkret dimana suatu kawasan yang pada periode 2015 - 2019 ditetapkan sebagai kawasan industri, pada tahun 2023 berubah peruntukan menjadi kawasan perumahan. Inkonsistensi ini menyulitkan investor dalam merencanakan pembangunan pabrik dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas lahan yang sudah dimiliki atau diincar. Permasalahan serupa juga muncul dalam FGD 1, di mana KADIN Jawa Tengah menyebut kasus investor asal Kuwait yang terkendala permasalahan lahan pabrik, serta adanya isu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang mempersulit pengembangan kawasan industri baru.

Hambatan di bidang perpajakan juga menjadi keluhan yang menonjol. Sistem *tax holiday* dinilai kurang transparan karena tidak ada kesepakatan yang jelas di awal investasi. Terdapat pula mekanisme akun penampungan pajak yang tidak dapat ditarik secara tunai, serta subsidi pajak yang diberikan dalam bentuk kredit, bukan transfer langsung. Perusahaan yang 100% berorientasi ekspor berharap mendapat perlakuan pajak yang berbeda mengingat kontribusinya terhadap devisa negara, namun hingga saat ini belum ada perbedaan perlakuan yang signifikan.

5.2.6 Pola Masuk dan Struktur Investasi

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) 1, wawancara dengan perusahaan PMA asal Timur Tengah, serta analisis terhadap beberapa praktik investasi di Indonesia, pola masuk investasi investor Timur Tengah ke Jawa Tengah maupun Indonesia secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga karakteristik utama, yaitu investasi tidak langsung melalui negara ketiga, investasi berbasis jaringan perdagangan, dan investasi yang difasilitasi melalui forum investasi internasional.

1. Investasi Tidak Langsung Melalui Negara Ketiga (*Indirect Investment*).

Hasil FGD bersama BKPM menunjukkan bahwa investor Timur Tengah cukup sering menggunakan negara lain sebagai investment hub, terutama Singapura dan Uni Emirat Arab, sebelum menanamkan modal di Indonesia. Dalam pola ini, negara yang tercatat sebagai asal investasi pada data PMA belum tentu merupakan sumber modal yang sebenarnya (*ultimate beneficial owner*). Kondisi tersebut menyebabkan identitas investor asli tidak selalu tercermin dalam statistik investasi.

Pola tersebut terlihat pada PT ICCS Global Industries. Masuk dan berinvestasi melalui perusahaan induk yang berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab. Akibatnya, dalam data PMA investasi tersebut tercatat berasal dari Uni Emirat Arab meskipun sumber modal sesungguhnya berasal dari Kuwait. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan investment hub menjadi strategi yang umum digunakan investor Timur Tengah dalam mengelola investasi lintas negara.

2. Investasi Berbasis Jaringan Perdagangan (*Trade-Based Investment*).

Karakteristik kedua ditunjukkan oleh PT Taibah Dua Sahabat. Sebelum mendirikan perusahaan di Indonesia, investor telah menjalankan perdagangan sarung Indonesia selama bertahun-tahun melalui jaringan toko yang dimiliki di Arab Saudi. Investasi yang dilakukan bukan untuk membangun industri manufaktur baru, melainkan untuk

memperkuat rantai pasok produk yang telah diperdagangkan melalui kegiatan quality control, branding, packaging, dan ekspor.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan dagang yang telah terbangun dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi investasi langsung. Dengan kata lain, keberhasilan penetrasi pasar ekspor dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi investor Timur Tengah untuk membangun kegiatan usaha di daerah asal produk

3. Investasi yang Difasilitasi Melalui Forum Investasi Internasional

Selain dua pola yang ditemukan melalui FGD dan wawancara, hasil analisis sekunder menunjukkan bahwa forum investasi internasional juga menjadi salah satu jalur penting masuknya investasi Timur Tengah ke Indonesia. Pola ini terlihat pada kerja sama antara PLN Nusantara Power dan Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) dalam pengembangan PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat. Sejak penandatanganan awal perjanjian jual beli listrik pada tahun 2020 di Abu Dhabi, berbagai tahapan pengembangan proyek secara konsisten dilakukan bertepatan dengan forum internasional maupun kunjungan kenegaraan.

Perluasan kapasitas PLTS Terapung Cirata ditandatangani pada sela-sela *Conference of the Parties* (COP28) di Dubai pada tahun 2023. Selanjutnya, kerja sama studi lanjutan disepakati pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024, sedangkan nota kesepahaman pengembangan PLTS Terapung Waduk Jatigede ditandatangani di Abu Dhabi pada tahun 2025 bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, sejumlah pemerintah daerah juga memanfaatkan forum internasional sebagai media promosi investasi, seperti penyelenggaraan *Jakarta Business Forum* pada Expo 2020 Dubai serta forum bisnis yang diselenggarakan Dubai International Chamber bersama pemerintah Indonesia pada tahun 2024.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa forum investasi internasional, baik dalam bentuk forum bisnis bilateral, pameran investasi, maupun agenda diplomasi ekonomi, berperan sebagai sarana yang efektif dalam mempertemukan pemerintah daerah dengan calon investor Timur Tengah. Berbeda dengan investasi berbasis perdagangan yang berkembang secara bertahap melalui hubungan bisnis, pola ini lebih banyak dimanfaatkan untuk menawarkan proyek-proyek strategis berskala besar yang telah siap ditawarkan kepada investor.

Secara keseluruhan, ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa investor Timur Tengah cenderung memasuki pasar Indonesia melalui pendekatan yang fleksibel sesuai karakteristik proyek yang ditawarkan. Investasi dapat dilakukan melalui struktur kepemilikan lintas negara (*indirect investment*), berkembang dari hubungan perdagangan yang telah terjalin (*trade-based investment*), maupun difasilitasi melalui forum investasi internasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi promosi investasi Provinsi Jawa Tengah tidak hanya perlu berfokus pada penyediaan proyek yang siap ditawarkan, tetapi juga pada penguatan hubungan dagang internasional, pembangunan jejaring dengan pelaku usaha Timur Tengah, serta peningkatan partisipasi dalam forum investasi internasional sebagai sarana memperluas peluang kerja sama investasi.

5.2.7 Studi Kasus PT ICCS Global Industries dan PT Taibah Dua Sahabat sebagai Representasi Investor Timur Tengah di Jawa Tengah

PT ICCS Global Industries merepresentasikan investor Timur Tengah yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan ekspor. Perusahaan yang terafiliasi dengan investor asal Kuwait melalui entitas usaha di Dubai ini bergerak di bidang produksi arang briket kelapa untuk memenuhi kebutuhan pasar Timur Tengah. Faktor utama yang mendorong investasi adalah ketersediaan bahan baku berkualitas, akses logistik, serta efisiensi operasional. Karakteristik perusahaan menunjukkan tipologi investor yang berfokus pada pengamanan pasokan bahan baku dan pengembangan industri pengolahan berorientasi ekspor.

PT Taibah Dua Sahabat merepresentasikan investor Timur Tengah yang berorientasi pada perdagangan dan pengembangan rantai pasok produk lokal. Perusahaan didirikan oleh investor asal Yaman yang telah lama menjalankan usaha perdagangan sarung Indonesia di Arab Saudi sebelum melakukan investasi langsung di Pemalang. Aktivitas perusahaan berfokus pada quality control, branding, packaging, dan ekspor sarung tenun tradisional yang diproduksi oleh industri rumahan dan pengrajin lokal. Karakteristik ini menunjukkan bahwa investasi Timur Tengah tidak selalu berbentuk industri besar, melainkan dapat berkembang dari hubungan perdagangan yang telah terjalin dalam jangka panjang. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas produk, keberlanjutan pengrajin lokal, dan jaringan distribusi yang telah dibangun di pasar Timur Tengah dan Afrika.

Kedua studi kasus menunjukkan bahwa investor Timur Tengah di Jawa Tengah tidak bersifat homogen. PT ICCS Global Industries mewakili investor yang berorientasi pada sumber daya alam dan industri pengolahan, sedangkan PT Taibah mewakili investor yang berorientasi

pada perdagangan dan penguatan rantai pasok produk lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi promosi investasi Jawa Tengah kepada negara-negara Timur Tengah tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing tipologi investor.

5.2.8 Sektor Komoditas yang Diminati Investor Timur Tengah

Bagian sebelumnya telah memberikan gambaran umum mengenai persebaran lokasi, sektor usaha, dan skala investasi PMA Timur Tengah di Jawa Tengah. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, khususnya dari sisi komoditas, dilakukan identifikasi komoditas utama yang menjadi objek investasi berdasarkan data perusahaan PMA Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.5) maupun data realisasi investasi Timur Tengah secara nasional (Tabel 5.6). Identifikasi ini bertujuan untuk memetakan jenis komoditas yang secara konsisten diminati investor, baik dari sisi frekuensi maupun nilai investasinya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan proyek penawaran investasi yang lebih tepat sasaran.

1. Komoditas Unggulan Berdasarkan PMA Timur Tengah di Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 5.5, komoditas arang briket merupakan komoditas yang paling banyak menarik minat investor Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Dari sebelas perusahaan PMA yang beroperasi, lima perusahaan bergerak pada industri maupun perdagangan arang briket, yaitu Alofoq International Trading, ICCS Global Industries, Java Raya International, Taima International Factory, dan Charcoal Black Diamond International. Total nilai investasi pada komoditas tersebut, baik yang berbahan baku tempurung kelapa maupun batu bara, mencapai sekitar Rp26,27 miliar atau hampir separuh dari total nilai investasi PMA Timur Tengah di Jawa Tengah pada tahun 2025. Besarnya nilai investasi tersebut menunjukkan bahwa arang briket merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor Timur Tengah, sejalan dengan tingginya permintaan produk tersebut di kawasan Timur Tengah sebagai bahan bakar shisha, kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan industri.

Selain arang briket, investor Timur Tengah juga menunjukkan minat pada berbagai komoditas unggulan lainnya yang berbasis sumber daya lokal. Komoditas tekstil dan sarung tenun goyor mencatat nilai investasi kumulatif sekitar Rp13,09 miliar, yang mencerminkan tingginya apresiasi terhadap produk tekstil tradisional khas Kabupaten Pemasang. Di samping itu, komoditas olahan kelapa seperti minyak kelapa, lemak nabati, dan sabut kelapa turut menjadi perhatian investor karena memiliki keterkaitan dengan

industri arang briket berbahan baku tempurung kelapa. Investasi juga mengalir pada sektor pupuk pertanian melalui PT Ukiq Pro Group di Kabupaten Jepara dengan nilai sekitar Rp10,84 miliar, serta pada komoditas tembakau, hasil pertanian, jamur, sayuran olahan, logam, dan bahan konstruksi berbasis kayu. Keragaman komoditas tersebut menunjukkan bahwa preferensi investasi Timur Tengah di Jawa Tengah tidak hanya terkonsentrasi pada satu jenis komoditas, tetapi telah berkembang ke berbagai sektor yang memiliki nilai tambah, potensi ekspor, serta didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal

2. Komoditas Unggulan Berdasarkan Realisasi Investasi Nasional

Data realisasi investasi Timur Tengah secara nasional (Tabel 5.6) memperlihatkan pola yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Pada skala nasional, investor Timur Tengah, khususnya asal Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, cenderung mengarah pada sektor bernilai investasi besar seperti real estat, kawasan hunian dan perkantoran, penyediaan akomodasi (perhotelan), serta industri kimia dan farmasi, sebagaimana tercermin dari investasi UEA pada sektor pengadaan listrik dan gas di Jawa Barat (USD 89,21 juta) serta investasi Arab Saudi pada sektor real estat di Jawa Timur (USD 78,93 juta). Selain itu, sektor pariwisata dan jasa perjalanan (terutama di Bali), industri farmasi dan obat tradisional, industri tekstil, serta industri pengolahan tembakau juga menjadi sektor yang cukup diminati.

Jika dibandingkan dengan pola investasi di Jawa Tengah, terlihat bahwa investasi Timur Tengah pada tingkat nasional lebih berorientasi pada sektor jasa dan properti berskala besar, sementara di Jawa Tengah investasi lebih terfokus pada pengolahan komoditas berbasis sumber daya alam skala menengah. Kesenjangan pola ini membuka peluang bagi Jawa Tengah untuk tidak hanya mempertahankan basis komoditas yang telah berjalan (arang briket, tekstil, olahan kelapa), tetapi juga menawarkan peluang investasi pada sektor yang belum banyak digarap di Jawa Tengah namun terbukti diminati investor Timur Tengah secara nasional, seperti industri farmasi berbahan baku herbal, industri tekstil skala lebih besar, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, serta sektor akomodasi dan pariwisata berbasis alam maupun budaya

5.3 Potensi dan Sektor Unggulan Jawa Tengah

Analisis potensi dan sektor unggulan Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan serta prospek

pengembangan sebagai tujuan investasi. Identifikasi sektor unggulan menjadi penting untuk mengetahui sektor yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memiliki daya saing, serta berpotensi dikembangkan melalui peningkatan aktivitas investasi. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang menekankan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal. Dalam kajian ini, analisis dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi sektor unggulan berdasarkan kinerja ekonomi dan daya saing sektor, serta analisis deskriptif terhadap potensi investasi yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara potensi ekonomi Jawa Tengah dengan karakteristik dan preferensi investor asal Timur Tengah, sehingga dapat dirumuskan sektor prioritas dan peluang investasi yang memiliki prospek pengembangan serta mampu mendukung peningkatan realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah.

5.3.1 Sektor Unggulan Provinsi Jawa Tengah

Analisis potensi dan sektor unggulan merupakan salah satu pendekatan penting dalam mengidentifikasi serta mengkaji sektor-sektor yang menjadi penopang utama perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi daerah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dinamika pertumbuhan dan daya saing antar sektor. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, serta sektor yang berpotensi untuk terus berkembang dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa suatu wilayah akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar apabila memfokuskan sumber daya pada kegiatan atau sektor yang memiliki efisiensi relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, teori tersebut mengindikasikan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga sektor unggulan yang berkembang juga akan bervariasi sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kondisi geografis, kapasitas produksi, serta struktur ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, analisis sektor unggulan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berbasis potensi lokal, sekaligus mendukung penyusunan strategi pengembangan investasi pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan dan daya saing tinggi.

Dalam kajian ini, penentuan sektor unggulan dilakukan dengan mengombinasikan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*. Analisis LQ dilakukan melalui dua tahapan, yaitu *Static Location Quotient* (SLQ) untuk mengidentifikasi sektor basis pada satu periode waktu tertentu, serta *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk melihat perkembangan dan laju pertumbuhan sektor secara time series. Selanjutnya, analisis *Shift Share* digunakan untuk menguraikan sumber pertumbuhan ekonomi melalui komponen *Regional Share* (Nij), *Proportional Shift* (Mij), dan *Differential Shift* (Cij), yang masing-masing mencerminkan pengaruh pertumbuhan wilayah acuan, struktur sektor, dan keunggulan kompetitif daerah. Kombinasi kedua metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja dan potensi sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Perhitungan *Location Quotient* (LQ) dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) sektor, yaitu Pertanian; Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi; Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; dan Jasa Lainnya. Pengelompokan sektor dilakukan sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis di Provinsi Jawa Tengah melalui pendekatan *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Sektor dengan nilai SLQ lebih dari 1 ($SLQ > 1$) dikategorikan sebagai sektor basis yang menunjukkan keunggulan komparatif, sedangkan nilai DLQ digunakan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan sektor selama periode analisis.

Tabel 5. 7 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) di Jawa Tengah

No	Nama Sektor	PDRB Jateng 2025 (Milyar Rupiah)	PDB Nasional 2025 (Milyar Rupiah)	Nilai LQ	Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	139530.4	1542447	0,969537	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalan	22315.21	948947.8	0,262206	Non Basis
3	Industri Pengolahan	389026.5	2757586	1,532228	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1448.95	138767.8	0,110341	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	811.85	11012.8	0,792444	Non Basis
6	Konstruksi	132673.9	1310966	1,057428	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	175700.4	1775025	1,071222	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	51285.06	655996.7	0,776601	Non Basis

No	Nama Sektor	PDRB Jateng 2025 (Milyar Rupiah)	PDB Nasional 2025 (Milyar Rupiah)	Nilai LQ	Sektor
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51617.3	445770	1,187998	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	84182.23	940946.9	0,955837	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	30519.47	540301.8	0,611128	Non Basis
12	Real Estate	24042.7	365072.1	0,669893	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	5114.67	274407.6	0,202745	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	28525.56	419017.4	0,729488	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	48491.96	390904.5	1,274809	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11573.88	192883.5	0,644176	Non Basis
17	Jasa Lainnya	22288.53	293160.4	0,832103	Non Basis

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Jawa Tengah memiliki lima sektor basis, yaitu **Industri Pengolahan (1,53)**, **Jasa Pendidikan (1,27)**, **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,19)**, **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1,07)**, serta **Konstruksi (1,06)**. Di antara sektor tersebut, Industri Pengolahan memiliki nilai LQ tertinggi sehingga menjadi sektor unggulan yang paling dominan dalam struktur perekonomian Jawa Tengah. Sementara itu, sektor-sektor lainnya memiliki nilai LQ kurang dari satu sehingga tergolong sektor non-basis. Temuan ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif Jawa Tengah terutama ditopang oleh aktivitas manufaktur, perdagangan, konstruksi, jasa pendidikan, serta akomodasi dan makan minum yang berpotensi menjadi sektor prioritas dalam pengembangan investasi daerah.

b. Analisis *Shift Share* (SS)

Analisis *Shift Share* (SS) digunakan untuk mengetahui kinerja pertumbuhan dan daya saing sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan tingkat nasional. Analisis ini dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) sektor ekonomi untuk mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan wilayah acuan (*Regional Share*), pengaruh struktur sektoral (*Proportional Shift*), serta keunggulan kompetitif daerah (*Differential Shift*). Melalui analisis ini dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama pada tingkat nasional.

Tabel 5. 8 Hasil Analisis *Shift Share* di Jawa Tengah

Kategori Sektor	Nij (RS)	Mij (PS)	Cij (DS)	Dij	SNij	Klasifikasi
A	27793,5652	-15282,725	-46,240224	12464,6	-15328,9652	Kurang Kompetitif
B	4883,48229	-1438,60069	-3455,8316	-10,95	-4894,43229	Kurang Kompetitif
C	72890,7114	-3938,43137	-13165,38	55786,9	-17103,8114	Kurang Kompetitif
D	256,029915	-12,4049507	34,8150354	278,44	22,41008475	Kompetitif
E	162,925941	-80,8128469	-15,123094	66,99	-95,9359405	Kurang Kompetitif
F	23339,1421	-3165,63767	5799,19559	25972,7	2633,557923	Kompetitif
G	32222,3965	819,6848268	-4655,0813	28387	-3835,39649	Kurang Kompetitif
H	5323,06254	9645,460778	11980,7167	26949,24	21626,17746	Kompetitif
I	7129,64931	7034,704417	4857,82628	19022,18	11892,53069	Kompetitif
J	13624,6867	8235,794242	32,8090584	21893,29	8268,6033	Kompetitif
K	6025,16909	-1539,48091	-1511,9082	2973,78	-3051,38909	Kurang Kompetitif
L	4185,13795	-2360,14681	3084,21886	4909,21	724,0720489	Kompetitif
M,N	834,823193	661,9709852	-198,74418	1298,05	463,2268074	Kurang Kompetitif
O	5365,24751	-1676,93463	308,567119	3996,88	-1368,36751	Kompetitif
P	8525,14151	-4052,06507	5043,89356	9516,97	991,828492	Kompetitif
Q	2071,77506	86,71315404	-56,288216	2102,2	30,42493813	Kurang Kompetitif
R,S,T,U	3514,73684	3879,328657	-1174,1055	6219,96	2705,223163	Kurang Kompetitif

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* di Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan sektor ekonomi masih didominasi oleh pengaruh pertumbuhan wilayah acuan yang tercermin dari nilai Nij (RS) yang positif pada seluruh sektor, namun tidak semuanya diikuti oleh kinerja struktur sektor dan daya saing yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya sektor dengan nilai *Proportional Shift* (PS) negatif serta *Differential Shift* (DS) negatif yang mengindikasikan pertumbuhan yang lebih lambat dan daya saing yang relatif rendah, sehingga dikategorikan Kurang Kompetitif. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan daya saing tinggi (DS positif) seperti sektor D, F, H, I, J, L, O, dan P, yang berarti sektor-sektor tersebut mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah acuan dan memiliki keunggulan kompetitif daerah. Di antara sektor tersebut, sektor H, I, dan J bahkan menunjukkan kombinasi nilai PS dan DS yang tinggi sehingga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan total (Dij besar). Sementara itu, sektor lainnya yang masih Kurang Kompetitif menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi, inovasi, dan dukungan

kebijakan agar mampu meningkatkan daya saing. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup baik, namun masih terdapat ketimpangan daya saing antar sektor yang perlu dioptimalkan.

c. Matrix Sektor Unggulan

Analisis Matrix Sektor Unggulan digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat keunggulan komparatif dan pertumbuhannya. Pengelompokan dilakukan dengan mengombinasikan hasil *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), sehingga diperoleh klasifikasi sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, dan sektor kurang berkembang. Melalui analisis ini dapat diketahui posisi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah serta potensi pengembangannya pada masa mendatang.

	SLQ > 1	SLQ < 1
DLQ > 1	SEKTOR UNGGULAN • Konstruksi • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Jasa Pendidikan	SEKTOR ANDALAN • Pengadaan Listrik dan Gas • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
DLQ < 1	SEKTOR PROSPEKTIF • Industri Pengolahan • Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	SEKTOR KURANG BERKEMBANG • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya

Gambar 5. 2 Matrix Tipologi Sektoral di Jawa Tengah

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Gambar 5.2 hasil analisis matrix tipologi sektoral menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, dan sektor kurang berkembang. **Sektor unggulan terdiri dari Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Pendidikan** yang memiliki nilai SLQ lebih dari 1 dan DLQ lebih dari 1, sehingga menunjukkan keunggulan komparatif sekaligus pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada tingkat nasional. **Sektor andalan terdiri dari Pengadaan Listrik dan Gas, Real Estate, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

yang memiliki pertumbuhan positif namun belum menjadi sektor basis. Sementara itu, **Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor termasuk dalam kategori sektor prospektif** karena merupakan sektor basis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat. Adapun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya termasuk dalam kategori sektor kurang berkembang karena belum menunjukkan keunggulan komparatif maupun pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan wilayah acuan.

d. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pengelompokan dilakukan dengan memanfaatkan komponen *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) yang diperoleh dari hasil analisis *Shift Share*. Melalui analisis ini, sektor ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu sektor pertumbuhan pesat, sektor maju namun tertekan, sektor berkembang, dan sektor relatif tertinggal. Klasifikasi tersebut memberikan gambaran mengenai posisi dan kinerja masing-masing sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 9 Analisis Tipologi Klassen Jawa Tengah

Kategori	Nama Sektor	PS	DS	Klasifikasi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-15282,7	-46,240224	Terbelakang
B	Pertambangan dan Penggalian	-1438,6	-3455,8316	Terbelakang
C	Industri Pengolahan	-3938,43	-13165,38	Berpotensi
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,405	34,8150354	Terbelakang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-80,8128	-15,123094	Berpotensi
F	Konstruksi	-3165,64	5799,19559	Berkembang
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819,6848	-4655,0813	Pertumbuhan Pesat
H	Transportasi dan Pergudangan	9645,461	11980,7167	Pertumbuhan Pesat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7034,704	4857,82628	Pertumbuhan Pesat
J	Informasi dan Komunikasi	8235,794	32,8090584	Terbelakang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1539,48	-1511,9082	Berpotensi
L	Real Estate	-2360,15	3084,21886	Berkembang
M,N	Jasa Perusahaan	661,971	-198,74418	Berpotensi
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1676,93	308,567119	Berpotensi

P	Jasa Pendidikan	-4052,07	5043,89356	Berkembang
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,71315	-56,288216	Berkembang
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3879,329	-1174,1055	Terbelakang

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa hasil klasifikasi sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa struktur perekonomian daerah menunjukkan kecenderungan pergeseran ke sektor jasa dan perdagangan. Sektor dengan kategori pertumbuhan pesat meliputi perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, yang mencerminkan peranannya sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, sektor konstruksi, real estate, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tergolong sektor berkembang yang memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui dukungan investasi dan penguatan kapasitas. Di sisi lain, sektor industri pengolahan, jasa keuangan, jasa perusahaan, serta administrasi pemerintahan berada pada kategori Berpotensi, yang mengindikasikan adanya kontribusi yang cukup besar namun menghadapi tekanan dalam hal daya saing atau pertumbuhan. Adapun sektor pertanian, pertambangan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya termasuk dalam kategori Terbelakang, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

e. Rekapitulasi Hasil

Penentuan sektor unggulan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode analisis, yaitu *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), Tipologi Sektor, dan Tipologi Klassen. Penggunaan beberapa metode tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, pertumbuhan yang baik, serta daya saing yang tinggi. Hasil penggabungan dari seluruh metode analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan sektor-sektor yang layak ditetapkan sebagai sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 10 Rekapitulasi Sektor Unggulan di Jawa Tengah

Kategori	Sektor	SLQ	DLQ	DS	Klasifikasi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,969537	0,999569	-46,2402239	Tertinggal Kurang Kompetitif
B	Pertambangan dan Penggalan	0,262206	0,98197113	-3455,8316	Tertinggal Kurang Kompetitif
C	Industri Pengolahan	1,532228	0,995471	-13165,38	Prospektif Kurang Kompetitif

Kategori	Sektor	SLQ	DLQ	DS	Klasifikasi
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,110341	1,00267452	34,8150354	Andalan Kompetitif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,792444	0,99729532	-15,1230937	Tertinggal Kurang Kompetitif
F	Konstruksi	1,057428	1,00526631	5799,19559	Unggulan Kompetitif
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,071222	0,99635904	-4655,08132	Prospektif Kurang Kompetitif
H	Transportasi dan Pergudangan	0,776601	1,04522525	11980,7167	Andalan Kompetitif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,187998	1,01214068	4857,82628	Unggulan Kompetitif
J	Informasi dan Komunikasi	0,955837	0,99988886	32,8090584	Tertinggal Kompetitif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,611128	0,9936475	-1511,90819	Tertinggal Kurang Kompetitif
L	Real Estate	0,669893	1,01691708	3084,21886	Andalan Kompetitif
M,N	Jasa Perusahaan	0,202745	0,99489235	-198,744178	Tertinggal Kurang Kompetitif
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,729488	1,00102511	308,567119	Andalan Kompetitif
P	Jasa Pendidikan	1,274809	1,01351642	5043,89356	Unggulan Kompetitif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,644176	0,99899909	-56,2882159	Tertinggal Kurang Kompetitif
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,832103	0,99330235	-1174,10549	Tertinggal Kurang Kompetitif

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis, struktur perekonomian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda-beda ditinjau dari keunggulan komparatif, pertumbuhan, dan daya saing. Dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat tiga sektor yang tergolong **unggulan dan kompetitif**, yaitu Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Pendidikan. Selain itu, terdapat empat sektor yang termasuk kategori **andalan dan kompetitif**, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, Real Estate, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara itu, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada kategori **prospektif namun kurang kompetitif**,

sedangkan sektor-sektor lainnya masih tergolong tertinggal dengan tingkat daya saing yang relatif rendah.

Hasil identifikasi sektor unggulan di tingkat provinsi memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Tengah. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya, struktur ekonomi, serta keunggulan komparatif yang berbeda sehingga sektor unggulan yang berkembang juga dapat bervariasi antarwilayah. Oleh karena itu, analisis selanjutnya dilakukan pada tingkat kabupaten/kota untuk mengidentifikasi persebaran sektor unggulan secara spasial, sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi kekuatan ekonomi di setiap wilayah serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan ekonomi dan investasi yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah.

5.3.2 Sektor Unggulan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah, potensi sumber daya, dan struktur perekonomian yang beragam sehingga membentuk sektor unggulan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Identifikasi sektor unggulan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian di masing-masing wilayah. Analisis sektor unggulan kabupaten/kota dilakukan menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS) untuk mengidentifikasi sektor yang memiliki keunggulan komparatif, pertumbuhan yang baik, serta daya saing yang tinggi dibandingkan wilayah acuan

a. Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten/Kota

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan membandingkan proporsi kontribusi suatu sektor terhadap PDRB daerah dengan proporsi sektor yang sama di tingkat provinsi. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan relatif dan berpotensi menghasilkan surplus untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. Melalui analisis ini dapat diketahui kabupaten/kota yang memiliki spesialisasi pada sektor-sektor tertentu sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan wilayah prioritas pengembangan investasi. Hasil identifikasi sektor basis selanjutnya dipadukan dengan analisis *Shift Share* untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai daya saing dan dinamika pertumbuhan sektor ekonomi di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 5. 11 Hasil Analisis Static Location Quotient (LQ) di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Cilacap																	
Banyumas																	
Purbalingga																	
Banjarnegara																	
Kebumen																	
Purworejo																	
Wonosobo																	
Magelang																	
Boyolali																	
Klaten																	
Sukoharjo																	
Wonogiri																	
Karanganyar																	
Sragen																	
Grobogan																	
Blora																	
Rembang																	
Pati																	
Kudus																	
Jepara																	
Demak																	
Semarang																	
Temanggung																	
Kendal																	
Batang																	
Pekalongan																	
Pemalang																	
Tegal																	
Brebes																	
Kota Magelang																	
Kota Surakarta																	
Kota Salatiga																	
Kota Semarang																	
Kota Pekalongan																	
Kota Tegal																	

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Keterangan:

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

B Pertambangan dan Penggalan

C Industri Pengolahan

D Pengadaan Listrik dan Gas

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi

K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estate
M,N Jasa Perusahaan
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya

	Basis
	Non Basis

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor yang menjadi basis pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada 20 kabupaten/kota, sektor Pertambangan dan Penggalian pada 18 kabupaten/kota, sektor Industri Pengolahan pada 9 kabupaten/kota, sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada 15 kabupaten/kota, serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada 18 kabupaten/kota. Selanjutnya, sektor Konstruksi pada 9 kabupaten/kota, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada 22 kabupaten/kota, sektor Transportasi dan Pergudangan pada 17 kabupaten/kota, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada 22 kabupaten/kota, sektor Informasi dan Komunikasi pada 9 kabupaten/kota, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada 20 kabupaten/kota, sektor Real Estate pada 13 kabupaten/kota, sektor Jasa Perusahaan pada 12 kabupaten/kota, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada 21 kabupaten/kota, sektor Jasa Pendidikan pada 27 kabupaten/kota, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada 23 kabupaten/kota, serta Jasa Lainnya pada 26 kabupaten/kota.

b. Analisis Shift Share (SS) Kabupaten/Kota

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengidentifikasi daya saing sektor ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam analisis ini, komponen *Differential Shift* (DS) digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan sektor yang sama pada wilayah acuan. Nilai DS lebih dari nol ($DS > 0$) menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk sektor kompetitif, sedangkan nilai DS kurang dari nol ($DS < 0$) menunjukkan bahwa sektor tersebut tergolong non kompetitif.

Tabel 5. 12 Hasil Analisis Shift Share di Jawa Tengah

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Cilacap																	
Banyumas																	
Purbalingga																	
Banjarnegara																	
Kebumen																	
Purworejo																	

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Wonosobo																	
Magelang																	
Boyolali																	
Klaten																	
Sukoharjo																	
Wonogiri																	
Karanganyar																	
Sragen																	
Grobogan																	
Blora																	
Rembang																	
Pati																	
Kudus																	
Jepara																	
Demak																	
Semarang																	
Temanggung																	
Kendal																	
Batang																	
Pekalongan																	
Pemalang																	
Tegal																	
Brebes																	
Kota Magelang																	
Kota Surakarta																	
Kota Salatiga																	
Kota Semarang																	
Kota Pekalongan																	
Kota Tegal																	

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Keterangan :

	Kompetitif
	Kurang Kompetitif

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* (SS), jumlah kabupaten/kota yang **memiliki sektor kompetitif** pada masing-masing sektor adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada 17 kabupaten/kota, sektor Pertambangan dan Penggalan pada 25 kabupaten/kota, sektor Industri Pengolahan pada 27 kabupaten/kota, sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada 22 kabupaten/kota, serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada 20 kabupaten/kota. Selanjutnya, sektor Konstruksi pada 25 kabupaten/kota, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada 24 kabupaten/kota, sektor Transportasi dan Pergudangan pada 9 kabupaten/kota, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada 10 kabupaten/kota, sektor Informasi dan Komunikasi pada 10 kabupaten/kota, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada 19 kabupaten/kota, sektor Real Estate

pada 9 kabupaten/kota, sektor Jasa Perusahaan pada 8 kabupaten/kota, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada 19 kabupaten/kota, sektor Jasa Pendidikan pada 9 kabupaten/kota, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada 15 kabupaten/kota, serta Jasa Lainnya pada 12 kabupaten/kota

c. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam analisis ini, sektor ekonomi diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu sektor pertumbuhan pesat, sektor berpotensi, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Pengelompokan tersebut memberikan gambaran mengenai posisi dan karakteristik masing-masing sektor dalam mendukung perekonomian daerah.

Tabel 5. 13 Analisis Tipologi Klassen di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Cilacap																	
Banyumas																	
Purbalingga																	
Banjarnegara																	
Kebumen																	
Purworejo																	
Wonosobo																	
Magelang																	
Boyolali																	
Klaten																	
Sukoharjo																	
Wonogiri																	
Karanganyar																	
Sragen																	
Grobogan																	
Blora																	
Rembang																	
Pati																	
Kudus																	
Jepara																	
Demak																	
Semarang																	
Temanggung																	
Kendal																	
Batang																	
Pekalongan																	
Pemalang																	
Tegal																	
Brebes																	
Kota Magelang																	

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Kota Surakarta																	
Kota Salatiga																	
Kota Semarang																	
Kota Pekalongan																	
Kota Tegal																	

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Keterangan:

	Sektor Pertumbuhan Pesat
	Sektor Berpotensi
	Sektor Berkembang
	Sektor Terbelakang

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, sektor yang paling banyak termasuk dalam kategori **sektor pertumbuhan pesat** pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Konstruksi yang terdapat pada 25 kabupaten/kota, diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas pada 21 kabupaten/kota, Jasa Lainnya pada 12 kabupaten/kota, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada 11 kabupaten/kota, serta Informasi dan Komunikasi dan Jasa Pendidikan yang masing-masing terdapat pada 9 kabupaten/kota. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

d. Analisis LQ, SS, dan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota

Analisis Analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan **Tipologi Klassen** diintegrasikan untuk memperoleh klasifikasi akhir sektor ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penggabungan ketiga metode tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sektor ekonomi, karena tidak hanya mempertimbangkan keunggulan komparatif, tetapi juga daya saing dan pola pertumbuhannya. Berdasarkan hasil integrasi tersebut, sektor-sektor ekonomi dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu **sektor unggulan**, **sektor andalan**, **sektor prospektif**, dan **sektor kurang berkembang**.

Tabel 5. 14 Analisis LQ, SS, dan Tipologi Klassen di Kabupaten Kota Jawa Tengah

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Cilacap																	
Banyumas																	
Purbalingga																	
Banjarnegara																	

Kab/Kota	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
Kebumen																	
Purworejo																	
Wonosobo																	
Magelang																	
Boyolali																	
Klaten																	
Sukoharjo																	
Wonogiri																	
Karanganyar																	
Sragen																	
Grobogan																	
Blora																	
Rembang																	
Pati																	
Kudus																	
Jepara																	
Demak																	
Semarang																	
Temanggung																	
Kendal																	
Batang																	
Pekalongan																	
Pemalang																	
Tegal																	
Brebes																	
Kota Magelang																	
Kota Surakarta																	
Kota Salatiga																	
Kota Semarang																	
Kota Pekalongan																	
Kota Tegal																	

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Keterangan :

	Sektor Unggulan
	Sektor Andalan
	Sektor Prospektif
	Sektor Kurang Berkembang

Berdasarkan hasil rekapitulasi sektor unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sektor yang paling banyak termasuk dalam kategori **sektor unggulan** adalah Pertambangan dan Penggalian yang terdapat pada 13 kabupaten/kota, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada 11 kabupaten/kota. Selanjutnya, Jasa Keuangan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing termasuk sektor unggulan pada 8 kabupaten/kota. Adapun Industri

Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Jasa Pendidikan termasuk sektor unggulan pada masing-masing 7 kabupaten/kota. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tersebar pada berbagai sektor ekonomi, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

e. Rekapitulasi Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten/Kota

Rekapitulasi hasil analisis sektor unggulan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* (SS), dan Tipologi Klassen sehingga diperoleh klasifikasi akhir sektor unggulan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Integrasi ketiga metode tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sektor-sektor yang tidak hanya memiliki keunggulan komparatif, tetapi juga menunjukkan daya saing serta tingkat pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, diperoleh pemetaan sektor unggulan pada setiap kategori lapangan usaha di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 15 Rekapitulasi Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten/Kota

Kategori	Sektor	Kabupaten/Kota
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Purbalingga, Wonosobo, Blora, Rembang, Temanggung, Pemalang
B	Pertambangan dan Penggalian	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal
C	Industri Pengolahan	Cilacap, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, Batang
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Karanganyar, Sragen, Grobogan, Kendal, Kota Pekalongan, Kota Tegal
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Banyumas, Purbalingga, Magelang, Semarang, Kendal, Batang, Brebes
F	Konstruksi	Semarang
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Banjarnegara, Sukoharjo, Sragen, Blora, Pati, Jepara, Temanggung, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta
H	Transportasi dan Pergudangan	Banyumas, Boyolali, Kota Semarang
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Karanganyar, Blora, Kendal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Pekalongan
J	Informasi dan Komunikasi	Kota Surakarta
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Purworejo, Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Grobogan, Blora, Temanggung, Kota Salatiga
L	Real Estate	
M,N	Jasa Perusahaan	Boyolali
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Grobogan, Blora, Demak, Temanggung, Pekalongan
P	Jasa Pendidikan	Banjarnegara, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Pekalongan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Wonogiri, Grobogan, Blora, Jepara, Temanggung, Pekalongan

Kategori	Sektor	Kabupaten/Kota
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Wonosobo, Magelang, Karanganyar, Blora, Rembang, Temanggung

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 5.15, dapat diinterpretasikan bahwa sektor unggulan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan karakteristik yang beragam, mencerminkan adanya spesialisasi ekonomi sesuai dengan potensi sumber daya, struktur ekonomi, dan kebijakan pembangunan di masing-masing daerah. Tidak terdapat satu sektor yang menjadi unggulan di seluruh wilayah, sehingga pola pembangunan ekonomi di Jawa Tengah bersifat heterogen. Beberapa sektor primer seperti **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)** masih menjadi sektor unggulan di enam kabupaten, yaitu Purbalingga, Wonosobo, Blora, Rembang, Temanggung, dan Pemalang. Sementara itu, **Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)** menjadi sektor unggulan di 13 kabupaten, menjadikannya salah satu sektor yang paling banyak memiliki keunggulan komparatif di tingkat daerah.

Pada sektor sekunder, **Industri Pengolahan (Kategori C)** menjadi sektor unggulan di tujuh kabupaten yang dikenal sebagai kawasan industri maupun pusat manufaktur, seperti Cilacap, Klaten, Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kendal, Batang, dan Sragen. Di sisi lain, **sektor Konstruksi (Kategori F)** hanya menjadi sektor unggulan di Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa aktivitas konstruksi yang memiliki daya saing tinggi relatif masih terpusat di wilayah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur dan aktivitas pembangunan fisik yang mendorong nilai tambah ekonomi belum merata di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, sektor utilitas seperti **Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D)** serta **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E)** juga telah menjadi sektor unggulan di beberapa daerah, yang mencerminkan mulai berkembangnya infrastruktur dasar dan layanan publik sebagai penunjang aktivitas ekonomi.

Sementara itu, sektor tersier menunjukkan persebaran yang cukup luas dengan dominasi pada **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)** yang menjadi sektor unggulan di 11 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan penggerak utama perekonomian di banyak daerah. Beberapa sektor jasa lainnya juga berkembang secara lebih spesifik, seperti **Transportasi dan Pergudangan (Kategori H)** di Banyumas, Boyolali, dan Kota Semarang; **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)** di enam daerah yang memiliki aktivitas pariwisata atau perdagangan yang kuat; serta **Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)** yang menjadi unggulan di delapan kabupaten/kota. Adapun **Informasi dan Komunikasi (Kategori J)** hanya

menjadi sektor unggulan di Kota Surakarta, sedangkan **Jasa Perusahaan (Kategori M,N)** hanya unggul di Boyolali. Menariknya, **sektor Real Estate (Kategori L) tidak tercatat sebagai sektor unggulan di kabupaten/kota mana pun**, yang menunjukkan bahwa sektor ini belum memiliki keunggulan komparatif maupun daya saing yang cukup tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis potensi lokal, baik sumber daya alam, industri, maupun jasa. Daerah-daerah dengan karakteristik agraris cenderung memiliki keunggulan pada sektor pertanian, sedangkan kawasan yang berkembang sebagai pusat industri dan logistik menunjukkan keunggulan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi. Temuan ini menguatkan bahwa **arah kebijakan pembangunan daerah sebaiknya disusun secara spesifik sesuai potensi unggulan masing-masing wilayah** sehingga intervensi pemerintah dapat lebih efektif dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Tengah.

5.3.3 Kesiapan Infrastruktur Pendukung Investasi di Jawa Tengah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan investasi karena berperan dalam mendukung kelancaran operasional, efisiensi biaya, serta keberlanjutan kegiatan usaha. Oleh karena itu, bagian ini mengkaji kesiapan infrastruktur pendukung investasi di Provinsi Jawa Tengah, termasuk ketersediaan kawasan industri yang dapat menjadi lokasi strategis bagi pengembangan kegiatan usaha dan penanaman modal. Kesiapan infrastruktur tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang mengatur arahan pemanfaatan ruang, termasuk pengembangan kawasan peruntukan industri sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang investasi yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi wilayah. Pengaturan kawasan industri dalam RTRW menjadi landasan penting dalam memastikan ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, serta dukungan infrastruktur bagi pengembangan sektor-sektor prioritas investasi. Berikut merupakan data peruntukan kawasan industri di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 16 Peruntukan Kawasan Industri

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Industri/KPI	Lokasi	Keterangan
1	Cilacap	Kawasan Industri Cilacap (KIC) - eksisting; KPI besar & klaster tambahan (revisi 2021)	Karangkandri, Bunton, Kutawaru, Bulupayung, Cilacap Timur	Basis industri energi & petrokimia
2	Banyumas	KPI ±1.900 ha (revisi berjalan); Seti Madukoro (rencana)	Wangon, Lumbir	Potensi hub logistik selatan dan inkubasi UMKM
3	Purbalingga	KPI ±875 ha (Perda 10/2020); klaster wig/garmen	Wirasaba, Bobotsari, Kaligondang, Kota Purbalingga	Basis industri padat karya wig dan apparel
4	Banjarnegara	KPI Susukan ±77,5 ha; lokasi baru direncanakan (revisi 2023)	Susukan, Sigaluh, Banjarnegara	Potensi agro dan logam ringan
5	Kebumen	KPI ±3.310 ha (Perda 1/2024); KI Petanahan	Petanahan	Diarahkan jadi gerbang industri selatan
6	Purworejo	KPI ±1.250 ha (Perda 10/2021)	Grabag, Ngombol, Purwodadi	Dekat YIA; peluang logistik dan gudang berikat
7	Wonosobo	Zona industri koridor utama (Perda 4/2023)	Kertek, Selomerto, Sapuran	Sentra agro-hilirisasi hortikultura dan EBT skala kecil
8	Magelang	KPI di 5 kecamatan (RTRW lama; revisi bergulir)	Secang, Tempuran, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan	Manufaktur kecil dan logistik antarkota
9	Boyolali	KPI ±2.130 ha (Perda 8/2019); KI Teras-Mojosongo (rencana green park)	Teras, Mojosongo	Agro-manufaktur hijau; konektivitas Solo Raya
10	Klaten	KPI 1.690 ha (Pasal 39)	Ceper, Pedan, Delanggu, Prambanan	Penyangga Solo-Jogja; sektor kreatif dan otomotif
11	Sukoharjo	KPI (Perda 1/2018); KI Nguter (rencana)	Nguter	Klaster tekstil-otomotif; perlu ekspansi lahan
12	Wonogiri	KPI selatan (Perda 2/2020)	Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giriwoyo	Potensi agro dan material bangunan
13	Karanganyar	KPI Gondangrejo/Palur (Perda 1/2013; perubahan 2019)	Gondangrejo, Jaten/Palur	Cluster otomotif-tekstil; perlu formalisasi KPI
14	Sragen	KPI besar Sambungmacan (±780 ha)	Sambungmacan, Masaran	Koridor Solo-Ngawi; basis hulu manufaktur
15	Grobogan	KPI tersebar, 31 titik (Perda 12/2021)	Purwodadi, Geyer, Toroh (indikatif)	Agro-hilirisasi pangan dan pupuk
16	Blora	KPI khusus migas Cepu (Perda 5/2021)	Cepu, Kedewan	Hilirisasi migas Cepu Raya; bukan padat karya
17	Rembang	KPI (Perda 2/2023)	Sluke, Kragan, Gunem	Basis material/semen dan

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Industri/KPI	Lokasi	Keterangan
				industri energi non-PLTU
18	Pati	KPI ±5.650 ha (RTRW 2021)	Juwana, Batangan, Margorejo	Pabrik besar tersebar; perlu konsolidasi KPI
19	Kudus	KPI ±2.258 ha (RTRW 2022-2042)	Ring Road Selatan, koridor antarkota	Zona konsumsi (rokok) dan elektronik; pabrik tersebar
20	Jepara	KPI ±1.268 ha (RTRW 2023-2043); KIM klaster mebel	Jepara, Tahunan, Pecangaan	Mebel ukir padat karya; butuh estate formal
21	Demak	KPI ±1.800 ha (Sayung); KI Sayung (Jatengland, ±300 ha)	Sayung	Logistik pesisir dan hilir; mitigasi rob
22	Semarang	KPI ±2.348 ha (Perda 6/2023)	Bawen, Bergas, Tenganan, Pringapus, Susukan, dll.	Sabuk industri; basis tenaga kerja vokasi
23	Temanggung	KPI baru Kranggan-Pringsurat (Perda 1/2024)	Kraggan, Pringsurat	Agro-processing link; tembakau dan pangan olahan
24	Kendal	KPI besar di RTRW; KEK Kendal	Brangsong/Kaliwungu	Manufaktur ekspor; terintegrasi pelabuhan-KEK PSN
25	Batang	RTRW memasukkan KEK Industropolis Batang (PSN), BIP	Gringsing (Ketanggan)	Motor Pantura Tengah; basis manufaktur strategis
26	Pekalongan	KPI ±1.344 ha + zona ±204 ha	Siwalan, Wonokerto, Tirta	Estate direncanakan; basis tekstil pesisir
27	Pemalang	KPI ±664 ha (RTRW 2018-2038)	Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal	Rencana perluasan; node perdagangan-agro Pantura
28	Tegal	KPI Margasari & koridor pantura; klaster garmen	Margasari, Warureja	Garmen dan manufaktur ringan
29	Brebes	KPI koridor Pantura Barat, alokasi besar; KIB (perencanaan)	Tanjung, Losari, Bulakamba	Frontier baru; serapan tenaga kerja tinggi
30	Kota Magelang	Tidak ada KPI	-	Hub jasa kesehatan-pendidikan dan wisata Borobudur
31	Kota Surakarta	Tidak ada KPI	-	Sektor kreatif, MICE, dan garmen
32	Kota Salatiga	Tidak ada KPI	-	Penyangga pendidikan-startup; sektor jasa dan teknologi
33	Kota Semarang	Zona industri di RTRW; KIW (BUMN), Kawasan Industri Candi, BSB Industrial Park	Tugu/Ngaliyan (KIW), Ngaliyan (KIC), Mijen (BSB)	Pusat logistik-finansial-manufaktur Jateng

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Industri/KPI	Lokasi	Keterangan
34	Kota Pekalongan	Koridor strategis ekonomi (zona industri kota)	Utara/Barat (koridor pelabuhan)	Basis tekstil-perdagangan; batik dan garmen
35	Kota Tegal	KPI pada RTRW (Margadana, Tegal Barat)	Margadana, Tegal Barat	Maritim-perdagangan; galangan kecil dan komponen

Sumber : RUPM Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Berdasarkan peruntukan kawasan industri di 35 kabupaten/kota, Jawa Tengah menunjukkan kesiapan infrastruktur pendukung investasi yang relatif kuat dan tersebar merata di seluruh wilayah. Sebagian besar kabupaten telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun kawasan industri eksisting yang mendukung pengembangan sektor unggulan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Koridor Pantura menjadi pusat pertumbuhan industri manufaktur dan logistik yang ditopang oleh kawasan strategis seperti Kendal, Batang, Semarang, Demak, Pati, Kudus, hingga Brebes, sedangkan wilayah selatan seperti Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Banyumas diarahkan untuk memperkuat industri berbasis energi, petrokimia, logistik, serta agroindustri. Selain itu, beberapa kawasan strategis nasional seperti KEK Kendal dan KEK Industri Batang semakin memperkuat daya saing Jawa Tengah sebagai tujuan investasi nasional maupun internasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dasar, kebutuhan perluasan lahan industri, mitigasi risiko lingkungan seperti rob di Sayung-Demak, serta perlunya pengembangan kawasan industri formal pada sentra industri yang masih tersebar. Secara keseluruhan, keberadaan jaringan kawasan industri yang luas, dukungan konektivitas transportasi, serta spesialisasi sektor unggulan di berbagai daerah menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki fondasi infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan investasi dan pengembangan industri berkelanjutan.

Tabel 5. 17 Infrastruktur Penunjang

No	Kategori	Nama Infrastruktur	Lokasi	Keterangan
1	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Tanjung Emas	Kota Semarang	Pelabuhan utama Jawa Tengah; arus kontainer untuk industri garmen, furnitur, makanan, manufaktur
2	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Tanjung Intan	Kabupaten Cilacap	Satu-satunya pelabuhan di pantai selatan Jawa; melayani industri energi, migas, dan curah
3	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Tegal	Kota Tegal	Mendukung perikanan dan logistik Pantura Barat
4	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Jepara/Kartini	Kabupaten Jepara	Melayani angkutan penumpang dan barang ke Karimunjawa

No	Kategori	Nama Infrastruktur	Lokasi	Keterangan
5	Bandar Udara	Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani	Kota Semarang	Bandara internasional utama Jateng; logistik dan penumpang
6	Bandar Udara	Bandara Adi Soemarmo	Boyolali (Solo Raya)	Sedang diajukan kembali sebagai bandara internasional (haji & umrah)
7	Bandar Udara	Bandara Jenderal Besar Soedirman	Kabupaten Purbalingga	Melayani wilayah selatan-barat Jateng (Cilacap, Banyumas, Purbalingga)
8	Bandar Udara (luar provinsi, terkoneksi)	Yogyakarta International Airport (YIA)	Kulon Progo, DIY (berbatasan dengan Purworejo/Kebumen)	Hinterland logistik untuk WP Keburejo (Kebumen-Purworejo)
9	Jalan Tol	Tol Pejagan-Pemalang	Brebes - Pemalang	Bagian Trans Jawa; penghubung dari arah Jakarta (via Pejagan)
10	Jalan Tol	Tol Pemalang-Batang	Pemalang - Batang	Penghubung Tol Pejagan-Pemalang dengan Tol Batang-Semarang
11	Jalan Tol	Tol Batang-Semarang	Batang - Kendal - Kota Semarang	Koridor industri Pantura Tengah; akses KEK Industri Batang dan KEK Kendal
12	Jalan Tol	Tol Semarang-Solo	Kota Semarang - Salatiga - Boyolali - Surakarta	Menghubungkan koridor Kedungsepur dengan Subosukowonosraten
13	Jalan Tol	Tol Solo-Ngawi	Surakarta - Sragen (- Jawa Timur)	Penghubung Solo Raya ke Jawa Timur
14	Jalan Tol	Tol Solo-Yogyakarta-YIA (dalam pembangunan)	Klaten - Boyolali - DIY	Mendukung konektivitas Solo Raya ke YIA
15	Jalur Kereta Api	Jalur KA Lintas Utara (Cirebon-Semarang-Surabaya)	Pantura: Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang	Jalur utama angkutan barang dan penumpang Pantura
16	Jalur Kereta Api	Jalur KA Lintas Selatan (Kroya-Yogyakarta-Solo)	Cilacap, Kebumen, Purworejo, Kutoarjo, Solo	Jalur penumpang dan logistik selatan Jateng
17	Jalur Kereta Api	Stasiun Tawang & Poncol	Kota Semarang	Simpul utama KA Pantura dan distribusi logistik kota
18	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	KEK Kendal (Kawasan Industri Kendal/KIK)	Kabupaten Kendal	Terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Tol Batang-Semarang; manufaktur ekspor
19	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	KEK Industri Batang	Kabupaten Batang	PSN; basis manufaktur dan otomotif Pantura Tengah
20	Energi	PLTU Batang (Jawa-2)	Kabupaten Batang	Pembangkit listrik tenaga uap skala besar pendukung industri Pantura
21	Energi	Kilang Minyak Pertamina Cilacap (RU IV)	Kabupaten Cilacap	Kilang minyak terbesar di Indonesia; basis industri energi & petrokimia

No	Kategori	Nama Infrastruktur	Lokasi	Keterangan
22	Transportasi Massal Perkotaan	Trans Jateng	Lintas kabupaten/kota (Semarang Raya, Solo Raya, dll.)	Layanan BRT antarwilayah untuk integrasi transportasi publik
23	Transportasi Massal Perkotaan	Trans Semarang (BRT)	Kota Semarang	BRT dalam kota terintegrasi dengan bandara dan pelabuhan
24	Air Bersih/Bendungan	Bendungan Logung	Kabupaten Kudus	Penyediaan air baku dan irigasi untuk wilayah Jekuti (Kudus-Pati-Jepara)
25	Air Bersih/Bendungan	Bendungan Jlantah	Kabupaten Karanganyar	Penyediaan air baku untuk wilayah Subosukowonosraten
26	Air Bersih/Bendungan	Bendungan Bener	Kabupaten Purworejo	Mendukung irigasi dan air baku WP Keburejo, dekat YIA

Sumber : Dihimpun dari berbagai Sumber, 2026

Berdasarkan kondisi infrastruktur penunjang investasi, Jawa Tengah memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam mendukung aktivitas industri, perdagangan, dan investasi. Dukungan infrastruktur tersebut tercermin dari keberadaan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap yang melayani distribusi barang industri baik di wilayah Pantura maupun selatan Jawa. Konektivitas udara juga didukung oleh Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Bandara Adi Soemarmo, Bandara Jenderal Besar Soedirman, serta akses ke Yogyakarta International Airport (YIA) yang memperkuat jaringan logistik regional. Dari sisi transportasi darat, jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang membentang dari Brebes hingga Surakarta serta jalur kereta api lintas utara dan selatan memberikan kemudahan mobilitas barang dan manusia antarwilayah. Selain itu, keberadaan KEK Kendal dan KEK Industri Batang sebagai Proyek Strategis Nasional semakin meningkatkan daya tarik investasi melalui penyediaan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, jalan tol, dan sumber energi. Dukungan energi yang kuat juga ditunjukkan oleh keberadaan PLTU Batang dan Kilang Minyak Pertamina Cilacap yang menjadi tulang punggung pasokan energi industri. Sementara itu, infrastruktur pendukung lainnya seperti sistem transportasi massal Trans Jateng serta trans lokal di beberapa kota di Jawa Tengah yang dapat menjadi pendukung dalam konektivitas antar wi. Selain itu juga bendungan penyedia air baku di Kudus, Karanganyar, dan Purworejo turut memperkuat keberlanjutan kegiatan ekonomi dan industri. Secara keseluruhan, kombinasi infrastruktur transportasi, energi, kawasan industri, dan sumber daya air menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki ekosistem pendukung investasi yang relatif lengkap dan kompetitif dibandingkan banyak provinsi lain di Indonesia.

5.3.4 Kesiapan dan Kelayakan Ekonomi

Analisis kesiapan dan kelayakan ekonomi sektor/proyek unggulan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai prospek pengembangan investasi di Jawa Tengah berdasarkan kondisi ekonomi daerah, karakteristik sektor unggulan, serta tingkat dukungan lingkungan investasi yang tersedia. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi sekaligus didukung oleh faktor-faktor yang mampu mendorong keberhasilan investasi dalam jangka panjang.

Penilaian dilakukan secara kualitatif dengan memanfaatkan berbagai hasil analisis yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, meliputi kinerja sektor ekonomi daerah, kondisi ketenagakerjaan, perkembangan investasi, dukungan kebijakan, serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan tidak hanya potensi ekonomi masing-masing sektor, tetapi juga tingkat kesiapan daerah dalam mendukung realisasi investasi dari negara-negara Timur Tengah. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan sektor prioritas yang layak dipromosikan kepada calon investor sekaligus sebagai acuan penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan investasi di Provinsi Jawa Tengah.

a. Aspek Kesiapan Ekonomi

1. Momentum dan Skala Investasi Sektor

Tren realisasi investasi di Jawa Tengah selama periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menguat secara konsisten, terutama pada tahun 2025 yang mencatat nilai PMA tertinggi sebesar 3.178.822,84 ribu USD. Momentum positif ini mengindikasikan bahwa iklim investasi daerah sedang berada dalam fase akselerasi yang kondusif untuk dimanfaatkan.

Dilihat dari dimensi sektoral, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi investasi terbesar dan paling konsisten sepanjang periode pengamatan, didukung oleh nilai PDRB ADHK yang meningkat dari Rp333.239,6 miliar pada 2021 menjadi Rp389.026,5 miliar pada 2025. Momentum ini diperkuat oleh keberadaan kawasan industri yang telah beroperasi di berbagai kabupaten/kota, terutama di koridor Pantura seperti Kawasan Industri Kendal, KEK Industripolis Batang, dan Kawasan Industri Wijayakusuma di Kota Semarang, yang secara aktif menyerap investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri.

Sektor konstruksi dan perdagangan juga berada dalam tren yang menguat, sebagaimana tercermin dalam hasil analisis Tipologi Klassen yang menempatkan keduanya dalam kategori pertumbuhan pesat pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang berkaitan erat dengan industri pariwisata dan ekonomi halal, juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan mulai bergeraknya permintaan pasar domestik dan wisata berbasis religi yang relevan bagi investor Timur Tengah.

Sebaliknya, sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian, meskipun masih memiliki peran sebagai penyangga ekonomi dasar, menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan dan daya saing yang rendah berdasarkan hasil *Shift Share*. Sektor-sektor ini memerlukan perhatian lebih dalam hal transformasi nilai tambah agar dapat lebih menarik bagi investor asing berskala besar.

Di sisi lain, temuan FGD 1 mengidentifikasi sektor energi terbarukan dan data center sebagai sektor yang tengah dalam momentum pertumbuhan awal dengan prospek akselerasi tinggi. Narasumber dari PT ICCS Global Industries menyebutkan bahwa transformasi energi yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah menciptakan permintaan yang signifikan terhadap proyek energi baru terbarukan (EBT) di negara-negara mitra. Jawa Tengah, dengan potensi panas bumi yang diakui oleh Bappeda Jawa Tengah dalam FGD 1, memiliki peluang untuk masuk ke dalam rantai investasi energi ini.

2. Dukungan Kebijakan dan Insentif Fiskal

Kerangka regulasi penanaman modal di Jawa Tengah menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai dan terintegrasi secara vertikal dari level nasional hingga daerah. Di tingkat nasional, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi landasan utama yang memberikan kepastian hukum bagi investor asing, termasuk penyederhanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS. Lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur secara eksplisit keterbukaan sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh investor asing, sehingga memberikan kejelasan bagi calon investor dalam memilih sektor investasi.

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki ekosistem kebijakan yang cukup komprehensif. RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 (Perda No. 7 Tahun 2025) secara

eksplisit menempatkan investasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, sehingga sektor-sektor unggulan yang dikembangkan sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah. RTRW Jawa Tengah 2024–2044 (Perda No. 8 Tahun 2024) mengatur peruntukan kawasan industri dan ruang investasi yang memberikan kepastian tata ruang bagi investor. Sementara itu, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jawa Tengah 2023–2025 (Pergub No. 37 Tahun 2023) menjadi acuan bagi perencanaan dan prioritas pengembangan penanaman modal daerah, termasuk identifikasi sektor unggulan yang diprioritaskan untuk promosi investasi.

Ketersediaan insentif investasi seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan kemudahan berusaha melalui sistem OSS menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat daya tarik sektor-sektor unggulan. Namun demikian, temuan FGD 1 dan wawancara mendalam mengungkap bahwa mekanisme *tax holiday* yang berlaku saat ini dinilai kurang transparan oleh investor. Tidak adanya kesepakatan yang jelas di awal investasi mengenai skema insentif, serta adanya mekanisme akun penampungan pajak yang tidak dapat ditarik secara tunai, menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas insentif fiskal yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, implementasi di lapangan masih memerlukan penyempurnaan.

Secara sektoral, terdapat kesesuaian yang kuat antara sektor-sektor unggulan Jawa Tengah dengan prioritas kebijakan nasional dan daerah. Sektor industri pengolahan, khususnya industri berbasis ekspor seperti tekstil, garmen, arang briket, dan makanan olahan, memiliki dukungan kebijakan yang kuat melalui berbagai regulasi industri dan insentif ekspor. Sektor energi terbarukan didukung oleh kebijakan transisi energi nasional, sedangkan sektor pariwisata halal sejalan dengan arah pengembangan ekonomi syariah yang semakin mendapat perhatian dalam kebijakan nasional.

3. Kemudahan dan Iklim Investasi Daerah

Dari sisi kelembagaan, Jawa Tengah telah memiliki DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai penyelenggara utama pelayanan perizinan dan penanaman modal. Berdasarkan Pergub No. 13 Tahun 2025, Gubernur mendelegasikan kewenangan perizinan kepada kepala DPMPTSP, sehingga investor dapat mengurus perizinan pada satu institusi terpadu tanpa harus berhubungan langsung dengan berbagai instansi sektoral secara terpisah. Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang telah berjalan secara nasional memberikan kemudahan bagi investor untuk mengajukan perizinan

secara daring, meskipun dalam praktiknya masih terdapat proses yang membutuhkan koordinasi dengan instansi teknis.

Namun demikian, salah satu hambatan paling signifikan yang teridentifikasi dari FGD 1 dan wawancara adalah persepsi investor terhadap kompleksitas dan lamanya proses perizinan. Investor dari PT ICCS Global Industries membandingkan proses perizinan Indonesia yang memakan waktu tiga hingga empat bulan dengan Vietnam yang hanya memerlukan dua hari, dan China yang mendelegasikan kewenangan perizinan hingga tingkat kota. Persepsi ini mencerminkan tantangan daya saing kelembagaan yang perlu menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan investasi dari Timur Tengah.

Isu kepastian regulasi tata ruang juga menjadi perhatian penting bagi investor. Inkonsistensi perubahan peruntukan kawasan, seperti kawasan yang semula ditetapkan sebagai zona industri kemudian berubah menjadi kawasan perumahan dalam periode beberapa tahun, menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat perencanaan investasi jangka panjang. Selain itu, isu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang disinggung oleh KADIN Jawa Tengah dalam FGD 1 menunjukkan adanya keterbatasan lahan industri yang siap pakai di beberapa wilayah potensial.

Dari sisi kondisi makroekonomi pendukung, Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang relatif baik. PDRB ADHK terus meningkat dari Rp997.321,1 miliar (2021) menjadi Rp1.219.149 miliar (2025), dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,37% pada tahun 2025. Ketersediaan tenaga kerja yang besar, dengan total angkatan kerja mencapai 22,3 juta jiwa pada 2025 dan kecenderungan meningkatnya kualitas pendidikan tenaga kerja, menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang berorientasi pada produksi berbasis tenaga kerja. Nilai upah minimum yang dinilai masih wajar oleh investor eksisting juga memperkuat daya saing faktor produksi di Jawa Tengah

b. Aspek Kelayakan Ekonomi

1. Potensi Nilai Tambah Ekonomi (*Economic Value Added*)

Penilaian potensi nilai tambah ekonomi dilakukan berdasarkan kontribusi dan tren pertumbuhan sektor dalam PDRB ADHK Jawa Tengah, serta posisi sektor tersebut dalam rantai produksi regional dan nasional.

Sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan nilai tambah ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, dengan kontribusi mencapai Rp389.026,5 miliar pada tahun 2025 atau sekitar 31,9% dari total PDRB. Dengan nilai LQ sebesar 1,53, sektor ini merupakan

sektor basis yang menunjukkan keunggulan komparatif Jawa Tengah dibandingkan rata-rata nasional, artinya sektor ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal tetapi juga memiliki kapasitas ekspor ke wilayah lain. Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sektor ini dengan sektor pertanian, bahan baku, dan energi, serta keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dengan sektor perdagangan, transportasi, dan ekspor, menjadikannya sektor strategis dengan efek pengganda ekonomi yang besar.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dengan nilai LQ sebesar 1,07 dan nilai PDRB mencapai Rp175.700,4 miliar pada 2025, juga merupakan sektor basis yang mencerminkan kemampuan distribusi dan pemasaran produk Jawa Tengah ke pasar yang lebih luas. Sektor ini memiliki relevansi tinggi bagi investor Timur Tengah yang berkarakter *trade-based*, seperti yang ditunjukkan oleh PT Taibah Dua Sahabat yang mengintegrasikan kegiatan ekspor sarung tradisional ke Arab Saudi dan Afrika.

Sektor konstruksi, dengan nilai LQ sebesar 1,06 dan posisinya sebagai sektor unggulan kompetitif berdasarkan rekapitulasi analisis, mencerminkan dinamika pembangunan infrastruktur dan properti yang terus berkembang. Sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang tinggi mengingat masih luasnya kebutuhan pembangunan kawasan industri baru, perumahan, dan infrastruktur pendukung di berbagai kabupaten/kota.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan nilai LQ sebesar 1,19 dan pertumbuhan yang cukup pesat berdasarkan analisis *Shift Share*, menunjukkan prospek nilai tambah yang menarik khususnya dalam konteks pengembangan wisata halal dan ekonomi kreatif berbasis kuliner yang semakin relevan di pasar global, termasuk pasar Timur Tengah. Potensi ini semakin diperkuat oleh posisi Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi wisata religi dan budaya terkemuka di Indonesia.

2. Ketersediaan dan Daya Saing Faktor Produksi

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan faktor produksi utama Jawa Tengah. Dengan total angkatan kerja sebesar 22,3 juta jiwa pada tahun 2025 dan jumlah penduduk bekerja yang mencapai 21,3 juta jiwa, Jawa Tengah memiliki pasokan tenaga kerja yang sangat besar. Struktur tenaga kerja menunjukkan kecenderungan perbaikan kualitas, ditandai oleh peningkatan lulusan SMA hingga hampir 7 juta jiwa dan lulusan perguruan tinggi yang mencapai 2,1 juta jiwa pada 2025. Profil ini sangat relevan bagi kebutuhan industri pengolahan berorientasi ekspor yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat keterampilan menengah, sebagaimana tercermin

dalam operasional PT ICCS Global Industries yang mempekerjakan 147 tenaga kerja lokal.

Dari sisi ketersediaan lahan dan kawasan industri, Jawa Tengah memiliki jaringan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di seluruh 35 kabupaten/kota, dengan total luasan yang sangat besar dan beragam karakteristik. Beberapa kawasan industri unggulan seperti KEK Kendal, KEK Industripolis Batang (Proyek Strategis Nasional), dan Kawasan Industri Candi serta Wijayakusuma di Semarang telah memiliki fasilitas lengkap dan terintegrasi dengan infrastruktur logistik, memberikan opsi investasi yang matang bagi investor asing. Keberadaan kawasan strategis ini menjadi nilai jual penting dalam promosi investasi kepada calon investor dari Timur Tengah.

Infrastruktur konektivitas merupakan dimensi faktor produksi yang mendapat apresiasi positif dari investor eksisting. Posisi Jawa Tengah di antara DKI Jakarta dan Jawa Timur memberikan akses strategis ke dua pelabuhan besar nasional Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang diakui secara langsung oleh narasumber dari PT ICCS Global Industries sebagai faktor penentu pemilihan lokasi investasi. Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang terbentang dari Brebes hingga Surakarta, keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu ekspor utama, serta konektivitas udara melalui Bandara Internasional Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo membentuk ekosistem logistik yang kompetitif. Faktor ini sangat krusial bagi investor Timur Tengah yang berorientasi ekspor, karena kemampuan distribusi barang secara efisien dan biaya logistik yang terjangkau merupakan pertimbangan utama dalam keputusan investasi.

3. Potensi Pasar dan Permintaan, khususnya dari Investor Timur Tengah

Analisis data realisasi PMA negara-negara Timur Tengah ke Indonesia pada tahun 2025 mengungkap pola preferensi sektoral yang cukup jelas dan memiliki relevansi langsung dengan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah. Secara agregat, investasi Timur Tengah di Indonesia pada 2025 terkonsentrasi pada sektor listrik, gas, dan air (Rp89.250 ribu USD), perumahan dan kawasan industri (88.698 ribu USD), serta industri kimia dan farmasi (54.725 ribu USD). Ketiga sektor ini mencerminkan orientasi investor Timur Tengah pada proyek-proyek strategis yang bersifat jangka panjang dan memberikan imbal hasil yang relatif stabil.

Apabila data preferensi sektoral nasional tersebut dipadankan dengan potensi yang dimiliki Jawa Tengah, terdapat beberapa titik pertemuan yang menjanjikan. Pertama, sektor listrik dan gas yang menjadi prioritas utama investasi UEA di Indonesia memiliki

relevansi dengan potensi panas bumi dan energi terbarukan Jawa Tengah yang diidentifikasi oleh Bappeda Jawa Tengah dalam FGD 1. Kedua, sektor perumahan dan kawasan industri yang mendominasi investasi Saudi Arabia berkorelasi langsung dengan keberadaan kawasan industri yang luas dan belum sepenuhnya terisi di berbagai kabupaten/kota Jawa Tengah, membuka peluang bagi investasi pengembangan estate industri oleh investor Timur Tengah. Ketiga, sektor industri kimia dan farmasi yang didominasi oleh Yordania, UEA, dan Saudi Arabia menjadi peluang yang dapat dikembangkan mengingat ketersediaan kawasan industri dan tenaga kerja terampil yang mendukung industri pengolahan berbasis kimia.

Selain preferensi yang tercermin dari data kuantitatif, temuan FGD 1 memperkaya pemahaman tentang potensi pasar dari sisi kualitatif. Narasumber dari Kawasan Industri Wijayakusuma mengidentifikasi bahwa investor asal Qatar menunjukkan ketertarikan pada sektor lahan, properti, dan kawasan wisata. Temuan ini relevan dengan potensi pengembangan properti dan pariwisata di Jawa Tengah, khususnya di sekitar kawasan wisata budaya dan religi seperti Borobudur, Dieng, dan berbagai destinasi wisata berbasis sejarah Islam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan investor Timur Tengah.

Lebih lanjut, kedua studi kasus investor Timur Tengah di Jawa Tengah PT ICCS Global Industries dan PT Taibah Dua Sahabat menunjukkan bahwa potensi pasar dari investor Timur Tengah tidak bersifat homogen melainkan terbagi dalam dua tipologi yang berbeda. Tipologi pertama adalah investor berbasis sumber daya alam yang mencari keunggulan bahan baku lokal untuk mendukung rantai pasok usaha di negara asal, seperti yang dilakukan PT ICCS dengan arang briket kelapa dari Sulawesi yang diekspor ke Timur Tengah. Tipologi kedua adalah investor berbasis jaringan perdagangan yang memanfaatkan hubungan dagang jangka panjang sebagai pintu masuk investasi langsung, seperti PT Taibah yang mengakar dari perdagangan sarung tradisional Pemalang ke Arab Saudi. Kedua tipologi ini mengisyaratkan bahwa potensi pasar dari Timur Tengah sebenarnya telah ada dan dapat ditumbuhkan, namun memerlukan pendekatan promosi yang berbeda dan lebih personal agar dapat direalisasikan secara optimal.

Secara keseluruhan, analisis aspek kesiapan dan kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi tujuan investasi yang kompetitif bagi investor Timur Tengah. Momentum pertumbuhan investasi yang positif,

didukung oleh kerangka kebijakan yang tersistem, ketersediaan tenaga kerja yang besar, infrastruktur yang semakin lengkap, serta adanya kesesuaian antara preferensi investor Timur Tengah dan potensi sektor unggulan daerah, menciptakan kondisi yang kondusif untuk akselerasi investasi. Namun, beberapa hambatan struktural seperti kompleksitas perizinan, inkonsistensi tata ruang, dan kurang transparannya mekanisme insentif fiskal perlu segera ditangani agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.

5.3.5 Kesiapan Proyek Investasi

Salah satu faktor penting dalam menarik minat investor adalah ketersediaan proyek yang telah memiliki tingkat kesiapan investasi yang memadai. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan lokasi, status lahan, skema kerja sama, kebutuhan investasi, serta indikasi kelayakan finansial yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, berbagai proyek investasi telah dihimpun melalui Central Java Investment Platform (CJIP) dan dikategorikan sebagai proyek siap ditawarkan (*ready to offer*) kepada investor.

Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain energi terbarukan, agroindustri, perikanan, pariwisata, logistik, dan pengelolaan lingkungan. Keberagaman sektor tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah tidak hanya memiliki potensi sumber daya yang besar, tetapi juga telah menyiapkan sejumlah proyek yang dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja sama investasi. Tabel berikut menyajikan daftar proyek investasi siap ditawarkan di Jawa Tengah beserta lokasi, sektor usaha, komoditas utama, skema kerja sama, dan kebutuhan investasinya sebagai gambaran tingkat kesiapan proyek untuk menarik investasi, termasuk dari negara-negara Timur Tengah.

Tabel 5. 18 Proyek Siap di Tawarkan di Jawa Tengah

Nama Proyek	Lokasi	Sektor	Komoditas	Kebutuhan Investasi	Target COD	IRR
PLTM Logawa 3	Banyumas	Energi Terbarukan	Listrik Minihidro	Rp44,2 Miliar	—	22,82%
PLTP Candi Umbul Telomoyo	Kab. Semarang– Kab. Magelang	Energi Panas Bumi	Listrik Geothermal	USD245 Juta	2036	4,7%*
Ekstraksi Mineral Dieng	Banjarnegara	Pertambangan & Energi	Silika dan Litium	USD12 Juta (Silika) + USD123 Juta (Litium)	2027	17% (Litium)

Nama Proyek	Lokasi	Sektor	Komoditas	Kebutuhan Investasi	Target COD	IRR
Proyek Geothermal Lainnya (Geo Dipa)	Banjarnegara	Energi Panas Bumi	Listrik Geothermal	USD200–600 Juta	2031–2035	10–15% (Dieng Unit 3 & 4); 12–13% (Candradimuka)
Industri Tepung Singkong Modifikasi (MOCAF)	Banjarnegara	Agroindustri	Tepung MOCAF	Rp41,76 Miliar	–	15,71%
Industri Kelapa Terpadu	Cilacap	Agroindustri	Kelapa dan Produk Turunannya	Rp66,6 Miliar	–	21–34% (tergantung lini usaha)
Sistem Resi Gudang & Subterminal Agribisnis	Grobogan	Logistik Pertanian	Komoditas Pertanian	Rp140,70 Miliar	–	18,4%
Kawasan Khusus Perikanan Terpadu	Cilacap	Perikanan	Tuna, Udang, Pakan Ikan	±USD3,8 Juta	–	17–42% (tergantung komponen proyek)
Industri Udang Terpadu	Cilacap	Perikanan	Udang Vaname	Rp586,97 Miliar	–	12,22–13,00%
Sentra Industri Perikanan	Pati	Perikanan	Ikan Tangkap dan Produk Olahan	Rp188,38 Miliar	–	19,48–25,94%
Industri Garam	Jepara	Industri Pengolahan	Garam Industri	USD5,5 Juta	–	16,97%
Ecopark Taman Kyai Langgeng	Kota Magelang	Pariwisata	Wisata Terpadu	Rp180,42 Miliar	–	13,76–39,20%
Pengembangan Pulau Panjang	Jepara	Pariwisata	Wisata Bahari	Rp30,81 Miliar	–	19,93%
Energi Biomassa dari Limbah Pertanian	Grobogan	Energi Terbarukan	Biomassa, LBG, Briket	USD13,2 Juta	–	18,10%
RDF Demak	Demak	Waste to Energy	RDF dan Maggot	USD3,58 Juta	–	25,4% (integrated)
Pergudangan dan Pengolahan Garam Industri	Brebes	Logistik & Industri Garam	Garam Industri	USD3 Juta	–	35%
RDF Pati	Pati	Waste to Energy	RDF dan Maggot	USD4,2 Juta	–	15%

Sumber : Central Java Investment Platform(CJIP), 2026

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar proyek investasi yang siap ditawarkan di Provinsi Jawa Tengah berada pada sektor energi terbarukan, agroindustri, perikanan, dan pengelolaan lingkungan. Sektor-sektor tersebut memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan preferensi investasi negara-negara Timur Tengah, terutama pada bidang ketahanan

pangan (*food security*), energi berkelanjutan (*renewable energy*), serta pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki portofolio proyek investasi yang cukup kompetitif dan siap dipromosikan kepada calon investor Timur Tengah. Dengan dukungan potensi sumber daya, kebijakan investasi, serta kesiapan proyek yang telah teridentifikasi, peluang terwujudnya kerja sama investasi pada sektor-sektor tersebut menjadi semakin terbuka.

5.4 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi (PESTLE)

Analisis PESTLE digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan investasi negara-negara Timur Tengah di Jawa Tengah. Analisis ini mencakup enam aspek utama, yaitu politik (*Political*), ekonomi (*Economic*), sosial-budaya (*Social*), teknologi (*Technological*), hukum dan regulasi (*Legal*), serta lingkungan hidup (*Environmental*). Kajian terhadap faktor-faktor tersebut penting dilakukan karena minat investasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang dimiliki Jawa Tengah, tetapi juga oleh perkembangan kebijakan, kondisi ekonomi, serta dinamika global yang terjadi di negara asal investor. Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai faktor tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun kebijakan dan strategi promosi investasi yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan efektif dalam menarik investasi dari kawasan Timur Tengah.

5.4.1 Faktor Politik

1. Hubungan Diplomatik Indonesia-Timur Tengah

Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dan telah berlangsung lama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, yang tercermin melalui berbagai kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, dan ketenagakerjaan. Hubungan tersebut terus diperkuat melalui berbagai forum dan perjanjian bilateral, seperti Indonesia-Saudi Arabia Joint Commission dan *Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUEA-CEPA) yang mulai berlaku pada tahun 2023. Keberadaan kerja sama tersebut memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia, sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Tengah untuk menarik investasi pada sektor manufaktur, logistik, infrastruktur, ekonomi digital, dan sektor strategis lainnya. Dengan demikian, hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah menjadi faktor pendukung yang dapat meningkatkan daya tarik investasi Jawa Tengah di kawasan tersebut.

2. Peran Sovereign Wealth Fund (SWF) Timur Tengah

Salah satu faktor politik yang berpengaruh terhadap investasi dari Timur Tengah adalah peran besar Dana Kekayaan Negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan tersebut, seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, Qatar Investment Authority (QIA), dan Kuwait Investment Authority (KIA). Lembaga-lembaga investasi ini mengelola dana dalam jumlah sangat besar dan semakin aktif menanamkan modalnya di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari strategi diversifikasi investasi global. Kecenderungan tersebut menjadi peluang bagi Jawa Tengah untuk menarik investasi berskala besar, terutama pada sektor infrastruktur, energi terbarukan, industri manufaktur, dan ketahanan pangan yang sejalan dengan arah pengembangan investasi daerah. Dengan karakter investasi yang berjangka panjang dan didukung kapasitas pendanaan yang kuat, keberadaan SWF Timur Tengah dapat menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan investasi di Jawa Tengah pada masa mendatang.

3. Dinamika Geopolitik Kawasan Timur Tengah

Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat memengaruhi arus investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Ketidakstabilan politik dan konflik yang terjadi di beberapa negara mendorong sebagian investor Timur Tengah untuk mencari tujuan investasi yang lebih aman dan stabil, termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi peluang bagi Jawa Tengah untuk menarik investasi dari kawasan tersebut. Namun, di sisi lain, ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan investor menunda atau mengurangi ekspansi investasinya. Oleh karena itu, Jawa Tengah perlu memperkuat promosi investasi dengan menonjolkan stabilitas politik, kepastian usaha, dan prospek ekonomi jangka panjang, terutama kepada negara-negara Timur Tengah yang memiliki kondisi politik dan ekonomi relatif stabil seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait.

4. Stabilitas Politik Domestik Indonesia

Dari sisi domestik, stabilitas politik Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendukung minat investasi dari negara-negara Timur Tengah. Keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki iklim usaha yang kondusif dan prospek investasi jangka panjang yang baik. Di tingkat daerah, Jawa Tengah juga didukung oleh stabilitas pemerintahan serta komitmen dalam menciptakan iklim

investasi yang menarik melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung penanaman modal. Kondisi tersebut menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan investor Timur Tengah untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

5. Kewenangan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

Stabilitas politik dan hubungan diplomatik yang kondusif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor asing, termasuk investor dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi tersebut perlu didukung oleh kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola urusan penanaman modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, penanaman modal ditetapkan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun kebijakan, memberikan fasilitasi, melakukan promosi investasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya kepastian pembagian kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan strategi peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, termasuk dalam menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah melalui penguatan kerja sama, penyediaan layanan investasi yang berkualitas, dan pemberian kemudahan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4.2 Faktor Ekonomi

1. Harga Minyak dan Kapasitas Fiskal Negara Timur Tengah

Kapasitas investasi negara-negara Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia karena sebagian besar negara di kawasan tersebut merupakan produsen minyak utama. Ketika harga minyak berada pada tingkat yang relatif tinggi, pendapatan negara meningkat sehingga kemampuan untuk melakukan investasi di luar negeri juga semakin besar. Kondisi ini memberikan peluang bagi Jawa Tengah untuk menarik lebih banyak investasi dari negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Dengan prospek harga minyak yang masih cukup stabil dalam jangka menengah, potensi aliran investasi dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia, termasuk Jawa Tengah, diperkirakan akan tetap terjaga dalam beberapa tahun mendatang.

2. Program Diversifikasi Ekonomi Timur Tengah

Salah satu faktor ekonomi yang mendorong investasi Timur Tengah ke luar kawasan adalah upaya diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Teluk untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Melalui berbagai program pembangunan jangka panjang, seperti Saudi Vision 2030 dan UEA Centennial 2071, negara-negara tersebut semakin aktif mencari peluang investasi di berbagai sektor nonmigas di negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini menyebabkan minat investasi Timur Tengah berkembang ke berbagai bidang seperti manufaktur, agroindustri, pariwisata, teknologi digital, energi terbarukan, dan ketahanan pangan. Bagi Jawa Tengah, tren tersebut menjadi peluang yang besar karena sebagian besar sektor yang diminati investor Timur Tengah sejalan dengan prioritas pengembangan investasi daerah, terutama pada industri pengolahan, hilirisasi agroindustri, infrastruktur logistik, dan sektor berorientasi ekspor.

3. Kondisi Makroekonomi Indonesia dan Jawa Tengah

Dari sisi ekonomi, Indonesia memiliki kondisi makroekonomi yang cukup kuat dan stabil sehingga menjadi daya tarik bagi investor Timur Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta stabilitas nilai tukar memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi jangka panjang. Selain itu, besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi keunggulan tersendiri karena mendukung ketersediaan tenaga kerja dan pasar domestik yang luas. Di tingkat daerah, Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan investasi yang positif dengan tren peningkatan nilai investasi dan kontribusi penanaman modal asing yang terus bertambah dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah semakin menarik bagi investor internasional, termasuk dari kawasan Timur Tengah, terutama karena menawarkan potensi pasar, tenaga kerja yang kompetitif, serta biaya investasi yang relatif efisien.

4. Iklim Persaingan Investasi Regional

Dalam menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bersaing dengan provinsi lain di Indonesia, tetapi juga dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara yang secara aktif menawarkan peluang investasi kepada investor asing. Kondisi tersebut menuntut Jawa Tengah untuk terus meningkatkan daya saing daerah melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas layanan investasi, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kawasan industri yang terintegrasi. Selain itu, penguatan kebijakan insentif investasi juga perlu terus dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi daerah. Meskipun

kebijakan perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, besaran beban fiskal tetap menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan lokasi investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengoptimalkan berbagai insentif yang menjadi kewenangan daerah, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun nonfiskal, serta memperkuat kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya saing investasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Jawa Tengah sebagai destinasi investasi yang lebih kompetitif dan menarik dibandingkan berbagai alternatif lokasi investasi di tingkat nasional maupun regional.

5.4.3 Faktor Sosial

1. Kesamaan Agama dan Ikatan Budaya

Dari aspek sosial dan budaya, kedekatan antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah didukung oleh kesamaan nilai keagamaan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kesamaan tersebut dapat menjadi faktor yang mempermudah terbangunnya hubungan bisnis dan kepercayaan antara investor Timur Tengah dengan mitra usaha di Indonesia. Bagi Jawa Tengah, yang memiliki tradisi keislaman yang kuat serta masyarakat yang dikenal ramah dan toleran, kondisi ini menjadi nilai tambah dalam menarik investasi dari kawasan Timur Tengah. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan ekosistem produk halal juga dapat meningkatkan kenyamanan investor dalam menjalankan kegiatan usaha di Jawa Tengah.

2. Pasar Produk Halal dan Potensi Ekspor Jawa Tengah

Pertumbuhan industri halal global memberikan peluang yang besar bagi Jawa Tengah untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah. Tingginya permintaan produk halal, seperti makanan dan minuman olahan, tekstil, kosmetik, serta produk berbasis budaya, sejalan dengan sektor-sektor unggulan yang dimiliki Jawa Tengah. Kondisi ini membuka peluang tidak hanya untuk meningkatkan ekspor ke pasar Timur Tengah, tetapi juga untuk menarik investasi pada sektor industri halal. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari proses sertifikasi, produksi, hingga distribusi, perlu terus didorong agar dapat meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah.

3. Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah sebagai Jembatan Sosial

Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di berbagai negara Timur Tengah turut memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara Indonesia dengan kawasan tersebut. Selain memberikan kontribusi melalui remitansi, keberadaan para pekerja Indonesia juga menciptakan jaringan sosial yang dapat mendukung pengembangan kerja sama ekonomi dan investasi di masa depan. Bagi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia, jaringan tersebut dapat menjadi potensi yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan peluang investasi dan memperluas hubungan bisnis dengan negara-negara Timur Tengah. Dengan demikian, hubungan yang telah terjalin melalui mobilitas tenaga kerja dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menarik investasi dari kawasan tersebut.

4. Perbedaan Pola Bisnis dan Tantangan Komunikasi

Meskipun memiliki kedekatan budaya dan agama, terdapat beberapa karakteristik bisnis investor Timur Tengah yang perlu dipahami dalam upaya menarik investasi ke Jawa Tengah. Investor dari kawasan tersebut umumnya menempatkan hubungan personal dan tingkat kepercayaan sebagai pertimbangan utama sebelum melakukan kerja sama bisnis. Proses pengambilan keputusan investasi juga cenderung membutuhkan waktu lebih panjang karena melibatkan berbagai pihak dan pertimbangan yang matang. Selain itu, faktor komunikasi masih menjadi tantangan, terutama terkait keterbatasan penggunaan Bahasa Arab dalam materi promosi investasi maupun layanan pendukung investasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas promosi, peningkatan kualitas layanan investasi, serta penyediaan informasi yang lebih mudah diakses oleh investor Timur Tengah perlu menjadi perhatian dalam strategi pengembangan investasi Jawa Tengah.

5.4.4 Faktor Teknologi

1. Transformasi Digital Negara-Negara Timur Tengah

Transformasi digital yang sedang dilakukan oleh negara-negara Teluk menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan investasi di sektor teknologi dan ekonomi digital. Berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar saat ini aktif mengembangkan ekosistem digital melalui investasi pada pusat data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi finansial (*fintech*), kota pintar, dan infrastruktur digital sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi mereka. Perkembangan tersebut turut mengubah profil investor Timur Tengah yang kini tidak hanya berfokus pada sektor energi dan keuangan, tetapi juga semakin tertarik pada sektor teknologi dan inovasi. Bagi

Jawa Tengah, kondisi ini membuka peluang untuk menarik investasi pada bidang teknologi digital, pusat data, industri berbasis teknologi, serta penerapan Industri 4.0 yang sejalan dengan arah pengembangan investasi daerah. Selain meningkatkan nilai investasi, masuknya investasi digital juga berpotensi mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas industri, serta mendukung terciptanya lapangan kerja yang lebih berkualitas di Jawa Tengah.

2. Peluang Transfer Teknologi dan Inovasi

Investasi teknologi dari negara-negara Timur Tengah memiliki potensi yang besar untuk mendorong modernisasi sektor industri di Jawa Tengah. Selain memberikan tambahan modal, investasi tersebut juga dapat membawa transfer teknologi, pengetahuan, serta praktik bisnis yang lebih modern dan efisien. Kemitraan antara perusahaan teknologi Timur Tengah dengan pelaku usaha dan industri di Jawa Tengah berpotensi mempercepat penerapan teknologi pada berbagai sektor, seperti pertanian berbasis teknologi (*agritech*), otomatisasi manufaktur, sistem logistik cerdas, pengelolaan data, hingga energi terbarukan. Penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, kualitas produk, serta daya saing industri daerah di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, masuknya investasi teknologi juga dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, alih pengetahuan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, investasi teknologi dari Timur Tengah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui penambahan investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi industri dan penguatan daya saing Jawa Tengah dalam jangka panjang.

5.4.5 Faktor Hukum dan Regulasi

1. Kerangka Regulasi Investasi Nasional

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi landasan utama yang mengintegrasikan berbagai ketentuan investasi dalam satu kerangka regulasi. Selain itu, penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta pemberian insentif fiskal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 semakin memperkuat iklim investasi nasional. Berbagai kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi investor, termasuk investor Timur Tengah, dalam memperoleh perizinan dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

2. Regulasi Investasi Daerah Jawa Tengah

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan investasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang mengatur pelayanan, fasilitasi, pemberian kemudahan, insentif, dan promosi penanaman modal. Regulasi tersebut diperkuat oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 sebagai petunjuk pelaksanaan, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan berupa insentif daerah seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023, pemberian berbagai bentuk insentif penanaman modal, antara lain berupa pengurangan, pembebasan, dan penghapusan pajak atau retribusi daerah, serta pajak yang ditanggung pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk bantuan modal bagi UMKM dan koperasi, bantuan riset dan pengembangan, pelatihan vokasi, serta fasilitas bunga pinjaman rendah guna meningkatkan daya tarik investasi.

3. Isu Inkonsistensi Tata Ruang dan Lahan

Meskipun regulasi investasi semakin kuat, kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan investasi di Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Jawa Tengah Tahun 2024–2044 telah menetapkan arah pemanfaatan ruang wilayah, namun implementasinya masih memerlukan sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diatur dalam berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian turut membatasi konversi lahan untuk kebutuhan industri di beberapa wilayah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian agar penyediaan lahan investasi dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

4. Kemudahan Berusaha dan Perizinan

Kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal, termasuk investor dari negara-negara Timur Tengah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah menerapkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) yang

diselenggarakan secara terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian dalam proses perizinan berusaha. Kebijakan tersebut didukung oleh Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, yang mengatur mekanisme pemberian pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, pendampingan investor, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan investasi. Regulasi tersebut diperkuat oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai dasar pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya di tingkat daerah masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam mempercepat waktu pelayanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas pendampingan kepada investor, serta mengurangi berbagai hambatan administratif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan perizinan dan fasilitasi investasi menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan investasi yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

5.4.6 Faktor Lingkungan

1. Komitmen ESG dan *Net Zero* Negara Timur Tengah

Perhatian negara-negara Timur Tengah terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar telah menetapkan target pengurangan emisi karbon serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini turut memengaruhi arah investasi mereka, di mana investor semakin mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam menentukan lokasi investasi. Bagi Jawa Tengah, tren tersebut menjadi peluang untuk menarik investasi pada proyek-proyek yang mendukung ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

2. Potensi Energi Terbarukan Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya, biomassa, dan panas bumi yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan di masa depan. Pengembangan energi terbarukan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengatur arah kebijakan percepatan pemanfaatan sumber energi terbarukan melalui peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur energi bersih, serta dukungan terhadap pencapaian target bauran energi nasional. Kebijakan tersebut memberikan peluang bagi daerah dengan potensi energi terbarukan, termasuk Jawa Tengah, untuk mengembangkan proyek energi hijau yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung agenda transisi energi. Potensi tersebut dapat menjadi daya tarik bagi investor dari negara-negara Timur Tengah yang saat ini semakin aktif berinvestasi pada sektor energi bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan kawasan industri seperti KEK Industropolis Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal juga membuka peluang penerapan konsep kawasan industri hijau melalui pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan emisi industri. Kondisi ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang menetapkan energi baru terbarukan dan ekonomi hijau sebagai salah satu sektor prioritas investasi daerah.

3. Tuntutan Standar ESG dalam Investasi

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor internasional, termasuk investor dari negara-negara Timur Tengah, dalam menentukan lokasi dan kelayakan suatu investasi. Selain mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi, investor juga semakin memperhatikan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, serta kualitas tata kelola perusahaan dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, partisipatif, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks investasi, ketentuan tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha yang bertanggung jawab terhadap aspek

lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Tengah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola investasi agar mampu memenuhi standar ESG yang semakin menjadi acuan investor global. Penerapan prinsip ESG yang baik tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga memperluas peluang masuknya investasi berkualitas dari negara-negara Timur Tengah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

4. Risiko Perubahan Iklim terhadap Investasi

Perubahan iklim menjadi salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Jawa Tengah. Beberapa wilayah, terutama kawasan pesisir utara, menghadapi risiko banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi dan investasi. Kondisi tersebut memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang memadai untuk menjaga keberlanjutan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim juga membuka peluang investasi baru pada sektor pengelolaan sumber daya air, energi bersih, infrastruktur tahan iklim, dan pembangunan ramah lingkungan yang semakin diminati oleh investor internasional, termasuk dari Timur Tengah.

5.5 Analisis Kesesuaian Investor Timur Tengah dengan Potensi Jawa Tengah

Analisis kesesuaian dalam kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecocokan antara preferensi, karakteristik, dan kebutuhan investor dari kawasan Timur Tengah dengan potensi sektoral, infrastruktur, serta iklim investasi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui proses pencocokan (*matching analysis*) antara sisi permintaan (*demand side*), yaitu profil dan preferensi investor Timur Tengah, dengan sisi penawaran (*supply side*), yaitu potensi, keunggulan kompetitif, dan kesiapan Jawa Tengah sebagai tujuan investasi.

5.5.1 Kesesuaian Sektoral

Kesesuaian sektoral merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai tingkat kecocokan antara sektor-sektor unggulan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah dengan minat dan fokus investasi investor dari kawasan Timur Tengah. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi paling besar untuk menarik investasi berdasarkan keselarasan antara kebutuhan investor dan keunggulan ekonomi daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan sektor prioritas promosi investasi Jawa Tengah.

1. Sektor Industri Pengolahan

sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis tingkat provinsi, sektor ini tergolong prospektif namun kurang kompetitif, yang menunjukkan kontribusinya sebagai sektor basis masih cukup besar meskipun daya saing pertumbuhannya perlu ditingkatkan. Pada tingkat kabupaten/kota, sektor ini justru menjadi sektor unggulan di Kabupaten Cilacap, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang, yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, serta akses logistik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri pengolahan tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian sekaligus memiliki prospek yang baik dalam menarik investasi.

Potensi sektor ini didukung oleh komoditas manufaktur berorientasi ekspor, seperti produk turunan kelapa (arang briket, minyak kelapa, dan produk olahan lainnya), industri pengolahan tembakau, serta tekstil dan produk tekstil (TPT). Temuan penelitian menunjukkan adanya minat investor Timur Tengah pada subsektor tersebut, salah satunya melalui investasi PT Taima International Factory pada industri arang briket dan pengolahan tembakau. Selain itu, keberadaan kawasan industri strategis seperti KEK Industropolis Batang, Kawasan Industri Kendal (KIK), serta kawasan industri di Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten semakin memperkuat daya tarik investasi. Dengan basis industri yang kuat, dukungan infrastruktur, dan meningkatnya diversifikasi investasi Timur Tengah ke sektor nonmigas, sektor Industri Pengolahan layak menjadi salah satu prioritas promosi investasi Provinsi Jawa Tengah.

2. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan dan kompetitif di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif, pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tingkat nasional, serta daya saing positif. Pada tingkat kabupaten/kota, sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar, Blora, Kendal, Brebes, serta Kota Surakarta dan Kota Pekalongan. Potensi tersebut didukung oleh beragam destinasi wisata unggulan, seperti Candi Borobudur, Kepulauan Karimunjawa, Rawa Pening, Kopeng, Tawangmangu, serta Kota Surakarta sebagai pusat wisata budaya, yang mendorong perkembangan hotel, restoran, dan berbagai jasa pariwisata.

Prospek sektor ini semakin kuat seiring meningkatnya minat investasi Timur Tengah pada industri pariwisata dan pendukungnya. Berdasarkan data BKPM, pada tahun 2025 investor dari Uni Emirat Arab telah merealisasikan investasi pada sektor hotel dan restoran di Bali dan DKI Jakarta, yang menunjukkan adanya ketertarikan terhadap sektor akomodasi dan makan minum. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Jawa Tengah untuk menarik investasi serupa dengan memanfaatkan kekayaan destinasi wisata, pengembangan infrastruktur, serta tren *halal tourism* yang semakin berkembang. Oleh karena itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum layak menjadi salah satu prioritas dalam strategi promosi investasi Provinsi Jawa Tengah kepada negara-negara Timur Tengah.

3. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, dan sumber mata pencaharian masyarakat. Meskipun pada tingkat provinsi sektor ini belum menunjukkan keunggulan kompetitif, pada tingkat kabupaten/kota sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Blora, Rembang, Temanggung, dan Pemalang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi basis ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi komoditas, serta penguatan rantai nilai sehingga mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing.

Potensi tersebut mulai tercermin dari masuknya investasi asal Timur Tengah di Jawa Tengah. PT Ukiq Pro Group berinvestasi pada industri produksi pupuk pertanian, sedangkan PT Eka Timur Raya mengembangkan budidaya dan pengolahan jamur sebagai produk bernilai tambah. Temuan ini menunjukkan bahwa minat investor tidak hanya terbatas pada kegiatan budidaya, tetapi juga pada pengembangan agroindustri. Selain itu, subsektor perikanan juga memiliki prospek yang besar didukung oleh potensi perikanan tangkap, budidaya, dan industri pengolahan hasil laut. Komoditas seperti udang, bandeng, rumput laut, dan ikan air tawar membuka peluang investasi pada industri pengolahan, *cold storage*, serta sistem logistik rantai dingin (*cold chain*).

Prospek sektor pertanian dan perikanan semakin diperkuat oleh meningkatnya perhatian negara-negara Timur Tengah terhadap ketahanan pangan (*food security*). Realisasi investasi tahun 2025 menunjukkan investor Uni Emirat Arab telah berinvestasi pada

sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Sumatera Selatan, sementara investor asal Yaman berinvestasi pada sektor perikanan di Jawa Timur. Meskipun investasi tersebut belum banyak terealisasi di Jawa Tengah, keberadaan PT Ukiq Pro Group dan PT Eka Timur Raya menunjukkan adanya ketertarikan investor terhadap sektor pangan daerah. Dengan didukung lahan pertanian yang produktif, keragaman komoditas unggulan, potensi perikanan, serta peluang hilirisasi dan penguatan rantai pasok, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan layak menjadi salah satu prioritas promosi investasi Provinsi Jawa Tengah kepada negara-negara Timur Tengah.

4. Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis, sektor **Pengadaan Listrik dan Gas** termasuk dalam kategori **sektor andalan kompetitif**, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki pertumbuhan relatif lebih baik dibandingkan sektor sejenis di tingkat nasional serta didukung oleh daya saing yang positif. Pada tingkat kabupaten/kota, sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar, Sragen, Grobogan, Kendal, serta Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Potensi tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya energi baru dan terbarukan di Jawa Tengah, antara lain energi panas bumi di kawasan Dieng dan Gunung Telomoyo, pemanfaatan biomassa dari limbah pertanian, serta pengembangan *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang mengolah sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan investasi yang mendukung transisi menuju energi bersih dan rendah karbon.

Pengembangan energi baru dan terbarukan di Jawa Tengah juga sejalan dengan arah investasi negara-negara Timur Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir semakin berorientasi pada sektor energi bersih, teknologi rendah karbon, dan infrastruktur hijau sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi pasca ketergantungan terhadap minyak dan gas. Berdasarkan data BKPM Tahun 2025, investor asal Uni Emirat Arab (UEA) merealisasikan investasi pada sektor listrik, gas, dan air di Provinsi Jawa Barat dengan nilai mencapai **USD 89.213,6 ribu**. Selain itu, keterlibatan perusahaan asal UEA dalam pembangunan **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata** menunjukkan tingginya minat investor Timur Tengah terhadap pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia. Tren tersebut menjadi indikator bahwa sektor energi

bersih merupakan salah satu bidang yang berpotensi terus berkembang dan menarik investasi dari kawasan Timur Tengah.

Didukung oleh potensi energi baru dan terbarukan, ketersediaan sumber daya alam, serta meningkatnya minat investor Timur Tengah terhadap proyek energi hijau, Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan investasi pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Peluang tersebut meliputi pengembangan pembangkit listrik panas bumi, biomassa, energi surya, pengolahan limbah menjadi energi, serta infrastruktur pendukung transisi energi. Dengan kondisi tersebut, sektor EBT layak ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas promosi investasi Provinsi Jawa Tengah kepada negara-negara Timur Tengah karena memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan tren investasi global sekaligus mendukung pencapaian ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

5. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan investasi dan perdagangan internasional di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis, sektor ini termasuk dalam kategori **prospektif namun kurang kompetitif**, yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan telah menjadi sektor basis meskipun pertumbuhan dan daya saingnya masih perlu ditingkatkan. Pada tingkat kabupaten/kota, sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banjarnegara, Sukoharjo, Sragen, Blora, Pati, Jepara, Temanggung, Pemalang, Tegal, Brebes, serta Kota Surakarta. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi produk unggulan daerah sekaligus menjadi penghubung antara pelaku usaha lokal dengan pasar nasional maupun internasional.

Potensi sektor perdagangan juga tercermin dari realisasi investasi yang telah berlangsung di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu contohnya adalah **PT Taibah Dua Sahabat**, perusahaan dengan investor asal Yaman yang berdasarkan klasifikasi KBLI bergerak pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Perusahaan ini berfokus pada perdagangan sarung tenun goyor khas Kabupaten Pemalang dengan menghimpun produk dari para pengrajin lokal, melakukan pengendalian kualitas, pengemasan, hingga memasarkan

produk ke negara-negara Timur Tengah dan sebagian kawasan Afrika. Selain itu, terdapat pula investor asal Arab Saudi yang beroperasi di Kabupaten Jepara melalui perdagangan furnitur dan kerajinan ukir khas Jepara. Pola investasi tersebut menunjukkan bahwa investor Timur Tengah tidak hanya berperan sebagai pembeli produk, tetapi juga sebagai mitra perdagangan yang membuka akses pasar ekspor serta memperkuat rantai pemasaran produk unggulan daerah di pasar internasional.

Karakteristik investasi tersebut menunjukkan bahwa minat investor Timur Tengah pada sektor perdagangan cenderung berorientasi pada komoditas yang memiliki identitas lokal, kualitas yang kompetitif, serta nilai tambah yang tinggi. Produk seperti sarung tenun goyor dan furnitur ukir Jepara menjadi contoh bagaimana sektor perdagangan mampu meningkatkan nilai ekonomi produk lokal melalui jaringan distribusi dan pemasaran internasional yang dimiliki investor. Oleh karena itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas distribusi barang, tetapi juga menjadi jembatan bagi peningkatan ekspor, pengembangan UMKM, serta perluasan akses pasar global. Dengan dukungan komoditas unggulan yang beragam dan telah diminati oleh investor Timur Tengah, sektor ini layak diposisikan sebagai salah satu sektor prioritas dalam strategi promosi investasi Provinsi Jawa Tengah.

6. Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi merupakan salah satu **sektor unggulan dan kompetitif** di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif, pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tingkat nasional, serta daya saing yang positif. Pada tingkat kabupaten/kota, sektor konstruksi menjadi sektor unggulan di Kabupaten Semarang, yang mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan di wilayah tersebut. Perkembangan sektor ini turut didukung oleh keberadaan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kawasan Industri Kendal (KIK)**, kawasan industri di Kabupaten Semarang, serta pengembangan kawasan perkotaan di Solo Raya yang mendorong meningkatnya kebutuhan pembangunan kawasan industri, gedung komersial, pergudangan, kawasan hunian, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah.

Daya tarik sektor konstruksi di Jawa Tengah semakin diperkuat oleh ketersediaan infrastruktur strategis yang menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi, seperti jaringan Jalan Tol Trans Jawa, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Bandara Jenderal Ahmad Yani, serta berbagai simpul logistik yang mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas investasi. Kondisi ini sejalan dengan pola investasi negara-negara Timur Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir semakin berorientasi pada pengembangan kawasan industri, utilitas, dan infrastruktur sebagai bagian dari strategi diversifikasi investasi. Berdasarkan data BKPM Tahun 2025, investor asal Arab Saudi merealisasikan investasi pada sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di Provinsi Jawa Timur dengan nilai sekitar **USD 78.925,6 ribu**, sementara investor asal Uni Emirat Arab (UEA) menanamkan modal pada sektor Listrik, Gas, dan Air di Provinsi Jawa Barat dengan nilai sekitar **USD 89.213,6 ribu**. Realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan dan infrastruktur merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian dari investor Timur Tengah.

Dengan dukungan kawasan industri yang terus berkembang, infrastruktur yang semakin terintegrasi, serta meningkatnya kebutuhan pembangunan kawasan industri dan logistik, Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang yang besar untuk menarik investasi pada sektor Konstruksi. Peluang investasi tersebut mencakup pembangunan kawasan industri terpadu, kawasan pergudangan modern, pusat logistik, kawasan komersial, hingga infrastruktur pendukung kegiatan industri dan perdagangan. Oleh karena itu, sektor Konstruksi layak diposisikan sebagai salah satu sektor prioritas dalam strategi promosi investasi Provinsi Jawa Tengah kepada negara-negara Timur Tengah, sekaligus mendukung penguatan konektivitas wilayah, peningkatan daya saing investasi, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Kesesuaian sektoral merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai tingkat kecocokan antara sektor-sektor unggulan Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik dan preferensi investasi negara-negara Timur Tengah. Analisis ini disusun berdasarkan hasil identifikasi sektor unggulan Provinsi Jawa Tengah serta dikombinasikan dengan pola realisasi investasi Timur Tengah di Indonesia. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menentukan sektor prioritas yang layak dipromosikan kepada calon investor.

Tabel 5. 19 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Sektoral

No	Sektor	Indikator Keunggulan Daerah	Indikasi Minat Investor Timur Tengah
1	Industri Pengolahan	Sektor unggulan di beberapa kabupaten/kota dengan dukungan	Terdapat investasi Taima International Factory pada industri arang briket dan

No	Sektor	Indikator Keunggulan Daerah	Indikasi Minat Investor Timur Tengah
		kawasan industri (KEK Industri Batang, KIK, kawasan industri Semarang)	pengolahan tembakau. Investor Timur Tengah juga mulai melakukan diversifikasi investasi ke sektor manufaktur nonmigas.
2	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor unggulan dan kompetitif dengan banyak destinasi wisata unggulan	Data BKPM menunjukkan investor UEA telah berinvestasi pada sektor hotel dan restoran di Indonesia. Potensi wisata halal menjadi daya tarik tambahan.
3	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Basis ekonomi di sejumlah kabupaten dengan potensi hilirisasi agroindustri dan perikanan	Terdapat investasi PT Ukiq Pro Group dan PT Eka Timur Raya di Jawa Tengah. Data BKPM menunjukkan investasi UEA dan Yaman pada sektor pangan dan perikanan di Indonesia, didorong isu <i>food security</i> .
4	Energi Baru Terbarukan (EBT)	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas termasuk sektor andalan kompetitif	Investor UEA telah berinvestasi pada sektor listrik, gas, dan air serta terlibat dalam pengembangan PLTS Terapung Cirata.
5	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor basis yang mendukung distribusi dan ekspor produk unggulan daerah	PT Taibah Dua Sahabat dan investor Arab Saudi di Jepara menunjukkan minat sebagai mitra perdagangan dan eksportir produk unggulan Jawa Tengah.
6	Konstruksi	Sektor unggulan dengan dukungan kawasan industri dan infrastruktur strategis	Data BKPM menunjukkan investasi Arab Saudi pada kawasan industri dan perkantoran serta investasi UEA pada sektor utilitas yang mendukung pembangunan infrastruktur.

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis kesesuaian sektoral, terdapat enam sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai target promosi investasi Provinsi Jawa Tengah kepada negara-negara Timur Tengah, yaitu Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Energi Baru Terbarukan (EBT); perdagangan besar dan eceran; serta Konstruksi. Penetapan sektor-sektor tersebut didasarkan pada kesesuaian antara keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Jawa Tengah dengan karakteristik serta tren investasi investor Timur Tengah di Indonesia.

5.5.2 Kesesuaian Karakteristik Investasi

Kesesuaian karakteristik investasi merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai tingkat kecocokan antara pola investasi, orientasi bisnis, serta preferensi kemitraan investor Timur Tengah dengan kondisi iklim usaha dan peluang investasi yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah.

1. Orientasi Jangka Panjang dan Stabilitas Iklim Investasi

Investor Timur Tengah, khususnya yang berasal dari *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan perusahaan investasi besar, umumnya memiliki orientasi investasi jangka panjang yang mengutamakan stabilitas politik, kepastian regulasi, dan keberlanjutan kebijakan. Karakteristik tersebut relatif sesuai dengan kondisi Jawa Tengah yang didukung oleh

stabilitas pemerintahan daerah, adanya arah pengembangan investasi yang tertuang dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jawa Tengah 2025–2045, serta implementasi sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Selain itu, keberadaan kawasan industri seperti KEK Industripolis Batang dan KEK Kendal turut memberikan kepastian lokasi bagi pengembangan investasi jangka panjang. Selain itu juga didukung oleh beberapa daerah yang memiliki kawasan peruntukan industri di beberapa kabupaten/kota Jawa Tengah.

Pola orientasi jangka panjang ini tercermin dari sejumlah kerja sama investasi Timur Tengah yang telah terealisasi di provinsi lain di Indonesia, yang dapat menjadi rujukan model kemitraan bagi Jawa Tengah. Sebagai contoh, **Masdar** (perusahaan energi terbarukan Uni Emirat Arab yang dimiliki ADNOC, Mubadala Investment Company, dan TAQA) membangun PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat melalui skema kepemilikan saham jangka panjang bersama PT PLN Nusantara Power (PLN 51%, Masdar 49%), dengan masa konsesi proyek yang dirancang untuk puluhan tahun ke depan pola yang menunjukkan preferensi investor Timur Tengah terhadap kepastian jangka panjang dibandingkan investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif. Pola serupa juga tampak pada kerja sama **Mubadala Investment Company** dengan Pertamina dalam proyek RDMP RU V di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, yang melibatkan negosiasi kepemilikan saham jangka panjang hingga 49%, serta kerja sama **ADNOC** dengan Pertamina dalam proyek Crude to Petrochemical senilai USD10,1 miliar yang bersifat strategis dan multi-tahun.

Contoh-contoh tersebut memperkuat indikasi bahwa investor Timur Tengah cenderung memilih skema kemitraan berbasis penyertaan modal (*equity partnership*) dengan mitra lokal yang kredibel, bukan sekadar kontrak jual-beli jangka pendek. Kondisi ini relevan bagi Jawa Tengah, mengingat provinsi ini memiliki BUMD dan mitra usaha lokal potensial di kawasan industri Batang, Kendal, dan Semarang yang dapat diposisikan sebagai mitra penyertaan modal serupa PLN Nusantara Power maupun Pertamina. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan, terutama terkait sinkronisasi tata ruang dan ketersediaan lahan siap investasi di sejumlah daerah, mengingat proyek-proyek besar Timur Tengah di atas umumnya mensyaratkan kepastian lahan dan perizinan yang matang sejak tahap awal.

2. Preferensi Kemitraan Strategis dan Kapasitas Ekosistem Bisnis Lokal

Investor Timur Tengah umumnya tidak hanya mencari peluang investasi, tetapi juga kemitraan strategis yang dapat memberikan akses terhadap pasar, tenaga kerja, dan jaringan bisnis lokal. Dalam hal ini, Jawa Tengah memiliki ekosistem usaha yang cukup mendukung, ditandai dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif, keberadaan asosiasi bisnis dan industri, serta basis UMKM yang kuat di berbagai sektor. Kawasan industri di Batang, Kendal, Semarang, dan Solo Raya juga menyediakan peluang kolaborasi antara investor dengan pelaku usaha lokal.

Pola kemitraan semacam ini telah terjadi secara nyata melalui studi kasus **PT Taibah** dan beberapa perusahaan perdagangan besar dari Yaman, di mana investor Timur Tengah bermitra strategis dengan UMKM lokal dengan mengambil produk dari UMKM tersebut untuk dipasarkan ke pasar Timur Tengah pola kemitraan yang bersifat *off-taker/trading partnership*, bukan investasi padat modal langsung, namun tetap memberikan akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Pola serupa juga tercermin dari kerja sama **Royal Alhumaid International** (Arab Saudi) sebagai mitra pemasaran ekspor furnitur berbasis kayu asal Jepara, yang menunjukkan bahwa investor/mitra dagang Timur Tengah cenderung memilih klaster industri yang telah memiliki reputasi dan standar produk yang mapan sebagai pintu masuk kemitraan.

Model kemitraan yang lebih terintegrasi juga dapat dilihat dari kasus **PT Petro Jordan Abadi (PJA)** di Gresik, Jawa Timur perusahaan patungan antara Jordan Phosphate Mining Company (Yordania) dan PT Petrokimia Gresik yang telah beroperasi sejak 2015 dengan nilai investasi sekitar USD212 juta. Model ini menunjukkan bahwa investor Timur Tengah bersedia membangun fasilitas produksi terintegrasi jika tersedia mitra BUMN/BUMD lokal yang kuat dan pasokan bahan baku yang saling melengkapi — pola yang berpotensi direplikasi di Jawa Tengah pada sektor-sektor dengan basis BUMD atau industri strategis daerah yang setara.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam penguatan kapasitas pendampingan investasi internasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memahami karakteristik bisnis Timur Tengah, mengingat pasar bisnis Timur Tengah pada umumnya memiliki standarisasi produk yang cukup ketat (misalnya sertifikasi halal MUI untuk produk makanan-minuman, serta standar SFDA dan SASO untuk pasar Arab Saudi). Selain itu, perlunya pengembangan jejaring kerja sama yang lebih intensif dengan mitra bisnis dari kawasan tersebut, mengingat pengalaman UMKM

di provinsi lain menunjukkan bahwa akses pasar Timur Tengah baru terbuka signifikan setelah ada mitra dagang/investor yang secara aktif menjembatani standar produk dan preferensi pasar setempat

Analisis kesesuaian karakteristik dilakukan untuk menilai tingkat kecocokan antara potensi dan karakteristik sektor unggulan Provinsi Jawa Tengah dengan preferensi investasi negara-negara Timur Tengah. Analisis ini disusun berdasarkan hasil identifikasi sektor unggulan Provinsi Jawa Tengah yang dikombinasikan dengan pola realisasi investasi Timur Tengah di Indonesia. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan sektor-sektor prioritas yang layak dipromosikan kepada calon investor dari negara-negara Timur Tengah.

Tabel 5. 20 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Karakteristik

No	Aspek	Karakteristik Investor Timur Tengah	Kondisi/Dukungan di Jawa Tengah	Contoh/Indikasi Empiris
1	Orientasi Jangka Panjang dan Stabilitas Iklim Investasi	Mengutamakan stabilitas politik, kepastian regulasi, dan keberlanjutan kebijakan; lebih memilih skema kemitraan berbasis penyertaan modal (equity partnership) dibanding kontrak jangka pendek	Stabilitas pemerintahan daerah, arah kebijakan investasi melalui Kajian RUPM Jawa Tengah 2025–2045, sistem OSS, serta kepastian lokasi melalui KEK Industri Batang dan KEK Kendal	Masdar–PLN Nusantara Power pada PLTS Terapung Cirata (skema saham 51:49); Mubadala–Pertamina pada RDMP RU V; ADNOC–Pertamina pada proyek Crude to Petrochemical USD10,1 miliar
2	Preferensi Kemitraan Strategis dan Kapasitas Ekosistem Bisnis Lokal	Mencari kemitraan strategis dengan akses pasar, tenaga kerja, dan jaringan bisnis lokal; tertarik pada klaster industri yang telah memiliki reputasi dan standar produk mapan	Ketersediaan tenaga kerja kompetitif, asosiasi bisnis dan industri, basis UMKM kuat, serta kawasan industri Batang, Kendal, Semarang, dan Solo Raya	Pola kemitraan off-taker/trading PT Taibah (Yaman) dan Royal Alhumaid International (Arab Saudi) dengan UMKM furnitur Jepara; model joint venture PT Petro Jordan Abadi (Yordania–Petrokimia Gresik) senilai USD212 juta
3	Tantangan Pendukung Kemitraan	Mensyaratkan standar produk yang ketat (halal MUI, SFDA, SASO) dan komunikasi bisnis yang intensif berbasis kepercayaan personal	Masih terbatasnya kapasitas pendampingan investasi internasional dan SDM yang memahami karakter bisnis Timur Tengah	Pengalaman provinsi lain menunjukkan akses pasar Timur Tengah baru terbuka signifikan setelah ada mitra dagang/investor yang menjembatani standar dan preferensi pasar

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis kesesuaian karakteristik, Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik dengan karakteristik dan preferensi investor dari

negara-negara Timur Tengah. Ketersediaan kawasan industri, arah kebijakan investasi yang mendukung, tenaga kerja yang kompetitif, serta ekosistem bisnis yang terus berkembang menjadi faktor yang memperkuat daya tarik investasi. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas pendampingan investasi, pemenuhan standar produk internasional, serta penguatan kemitraan strategis agar mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik investor Timur Tengah. Dengan demikian, pengembangan iklim investasi di Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kualitas kelembagaan dan ekosistem bisnis yang mendukung investasi jangka panjang.

5.5.3 Kesesuaian Sosial dan Budaya

Kesesuaian faktor sosial dan budaya merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai tingkat kedekatan nilai, norma, budaya bisnis, serta kondisi sosial antara Provinsi Jawa Tengah dan investor dari kawasan Timur Tengah. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mendukung terciptanya hubungan investasi yang harmonis, meningkatkan kepercayaan antarpihak, serta memperkuat peluang terjalinnya kerja sama investasi jangka panjang.

1. Kedekatan Agama dan Nilai Sosial

Jawa Tengah memiliki kedekatan nilai sosial dan keagamaan dengan negara-negara Timur Tengah yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan hubungan investasi. Seperti contoh dalam kerjasama dengan pembangunan Masjid Sheikh Zayed Surakarta menggunakan dana hibah dari pemerintah UEA, dimana contoh kerjasama yang dilakukan atas kedekatan sosial dan keagamaan antara Jawa Tengah dengan negara Timur Tengah. Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Jawa Tengah memiliki ekosistem sosial yang didukung oleh keberadaan pesantren, lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, serta berbagai tradisi budaya yang berakar pada nilai-nilai Islam. Kesamaan nilai tersebut dapat membantu membangun rasa saling percaya dan kenyamanan dalam interaksi bisnis, mengingat aspek kepercayaan dan hubungan personal memiliki peran penting dalam budaya bisnis investor Timur Tengah.

2. Jaringan Tenaga Kerja Migran sebagai Penghubung Ekonomi

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia yang banyak bekerja di berbagai negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Menurut data BPS, pada tahun 2025 jumlah TKI di Timur Tengah pada mencapai 80.829 orang. Dimana negara Arab Saudi dan UEA menjadi tujuan TKI

terbesar. Pengalaman dan jaringan sosial yang terbentuk melalui mobilitas tenaga kerja tersebut berpotensi menjadi jembatan komunikasi dan hubungan ekonomi antara Jawa Tengah dan kawasan Timur Tengah. Selain dapat memperluas jejaring bisnis, keberadaan komunitas yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan budaya Timur Tengah juga dapat mendukung proses promosi investasi dan pengembangan kemitraan ekonomi di masa mendatang

3. Tantangan dalam Pola Komunikasi Bisnis

Meskipun memiliki kedekatan nilai dan budaya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjalin hubungan investasi dengan investor Timur Tengah. Karakteristik bisnis di kawasan tersebut umumnya menempatkan hubungan personal, kepercayaan, dan komunikasi yang intensif sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, keterbatasan penggunaan Bahasa Arab dalam materi promosi investasi maupun layanan pendukung investasi masih menjadi kendala yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi dengan calon investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas promosi investasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan informasi investasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan investor Timur Tengah.

Analisis kesesuaian faktor sosial dan budaya dilakukan untuk menilai tingkat kecocokan antara kondisi sosial dan budaya Provinsi Jawa Tengah dengan preferensi investasi negara-negara Timur Tengah. Analisis ini disusun berdasarkan hasil identifikasi karakteristik sosial dan budaya Provinsi Jawa Tengah yang dikombinasikan dengan pola realisasi investasi negara-negara Timur Tengah di Indonesia. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi peluang investasi serta menentukan sektor-sektor prioritas yang layak dipromosikan kepada calon investor dari negara-negara Timur Tengah.

Tabel 5. 21 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Sosial dan Budaya

No	Aspek	Kondisi Jawa Tengah	Relevansi terhadap Investor Timur Tengah
1	Kedekatan Agama dan Nilai Sosial	Mayoritas penduduk Muslim, didukung ekosistem pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi keagamaan	Membangun rasa saling percaya dan kenyamanan interaksi bisnis; dicontohkan melalui kerja sama pembangunan Masjid Sheikh Zayed Surakarta dengan UEA
2	Jaringan Tenaga Kerja Migran	Jawa Tengah sebagai salah satu daerah asal TKI ke Timur Tengah (dari total 80.829 TKI di Timur Tengah pada 2025, terbanyak ke Arab Saudi dan UEA)	Jaringan sosial TKI berpotensi menjadi jembatan komunikasi dan ekonomi serta mendukung promosi investasi dan kemitraan

No	Aspek	Kondisi Jawa Tengah	Relevansi terhadap Investor Timur Tengah
3	Tantangan Pola Komunikasi Bisnis	Keterbatasan penggunaan Bahasa Arab dalam materi dan layanan promosi investasi	Budaya bisnis Timur Tengah menekankan hubungan personal dan komunikasi intensif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas SDM dan materi promosi yang lebih adaptif

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis kesesuaian sosial dan budaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi yang relatif selaras dengan karakteristik sosial dan budaya negara-negara Timur Tengah. Kesamaan nilai keagamaan, keberadaan jaringan tenaga kerja migran, serta pengalaman kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah menjadi modal sosial yang dapat mendukung penguatan hubungan ekonomi dan investasi. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi bisnis, penyediaan materi promosi investasi yang lebih adaptif, serta penguatan pemahaman terhadap budaya bisnis Timur Tengah agar proses peninjauan dan pengembangan kerja sama investasi dapat berlangsung secara lebih efektif.

5.5.4 Kesesuaian Lingkungan Strategis

Kesesuaian lingkungan strategis merupakan analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan regulasi, infrastruktur pendukung, kelembagaan, serta berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keputusan investasi investor dari kawasan Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana lingkungan investasi yang tersedia mampu mendukung kebutuhan investor, menciptakan kepastian berusaha, serta meningkatkan daya tarik Jawa Tengah sebagai tujuan investasi yang kompetitif.

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Investasi

Dari sisi regulasi, Jawa Tengah didukung oleh berbagai kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investasi, seperti implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS), serta berbagai kerja sama ekonomi internasional yang memperkuat hubungan investasi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Di tingkat daerah, keberadaan hasil Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jawa Tengah 2025–2045 memberikan arah kebijakan investasi yang lebih jelas dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memberikan kepastian bagi investor dalam merencanakan investasi jangka panjang, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek penyederhanaan pengurusan perizinan dan sinkronisasi tata ruang dan percepatan penyediaan lahan siap investasi.

2. Kesiapan Infrastruktur Pendukung Investasi

Jawa Tengah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap untuk mendukung aktivitas investasi, baik pada sektor industri, logistik, maupun perdagangan. Infrastruktur tersebut antara lain Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang, Bandara Jenderal Ahmad Yani, jaringan Jalan Tol Trans Jawa, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, serta KEK Industri Batang. Keberadaan infrastruktur tersebut memberikan kemudahan akses distribusi barang dan mobilitas investasi yang menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor internasional. Selain itu, KEK Kendal dan KEK Industri Batang menawarkan kawasan industri terintegrasi yang dapat menjadi lokasi strategis bagi pengembangan investasi dari kawasan Timur Tengah. Namun perlu adanya perbaikan dan pengembangan pada aspek infrastruktur pendukung industri seperti agar mampu menunjang pengembangan industri dan penarikan minat investor.

3. Keselarasan dengan Tren Investasi Global

Perkembangan investasi global menunjukkan peningkatan perhatian terhadap aspek keberlanjutan, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG). Dalam konteks ini, Jawa Tengah telah menempatkan pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau sebagai salah satu arah prioritas investasi daerah. Potensi energi surya, biomassa, dan panas bumi yang dimiliki Jawa Tengah membuka peluang pengembangan proyek-proyek berkelanjutan yang sejalan dengan tren investasi global. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah juga tengah mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan melalui berbagai program diversifikasi ekonomi dan komitmen menuju target emisi rendah karbon. Kesamaan arah kebijakan tersebut menciptakan peluang kerja sama yang cukup besar dalam pengembangan investasi hijau di Jawa Tengah.

Analisis kesesuaian lingkungan strategis dilakukan untuk menilai tingkat kecocokan antara kondisi lingkungan strategis Provinsi Jawa Tengah dengan preferensi investasi negara-negara Timur Tengah. Analisis ini disusun berdasarkan hasil identifikasi karakteristik lingkungan strategis Provinsi Jawa Tengah yang dikombinasikan dengan pola realisasi investasi negara-negara Timur Tengah di Indonesia. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi peluang investasi serta menentukan sektor-sektor prioritas yang layak dipromosikan kepada calon investor dari negara-negara Timur Tengah.

Tabel 5. 22 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesesuaian Lingkungan Strategis

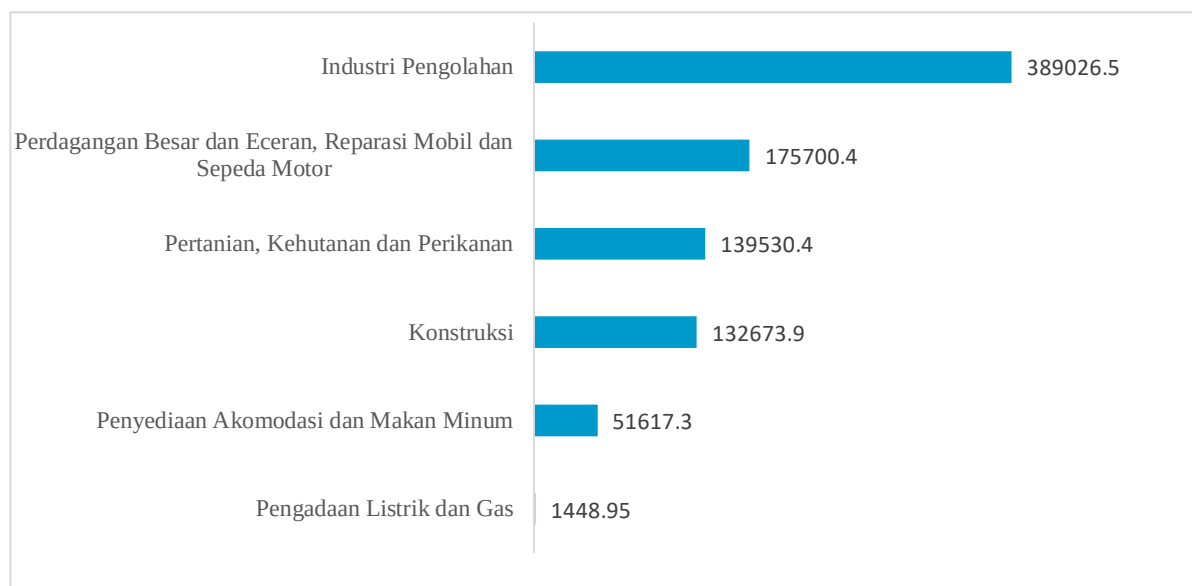
No	Aspek	Kondisi Pendukung di Jawa Tengah	Catatan/Tantangan
1	Dukungan Regulasi dan Kebijakan Investasi	UU Cipta Kerja, sistem OSS berbasis risiko, kerja sama ekonomi internasional.	Perlu penyederhanaan perizinan, sinkronisasi tata ruang, dan percepatan penyediaan lahan siap investasi
2	Kesiapan Infrastruktur Pendukung Investasi	Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Jalan Tol Trans Jawa, KEK Kendal, KEK Industri Batang	Masih diperlukan perbaikan infrastruktur pendukung industri agar lebih menunjang penarikan minat investor
3	Keselarasan dengan Tren Investasi Global (ESG)	Prioritas pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau (energi surya, biomassa, panas bumi)	Sejalan dengan agenda diversifikasi ekonomi dan target emisi rendah karbon negara-negara Timur Tengah, membuka peluang investasi hijau

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis kesesuaian lingkungan strategis, Provinsi Jawa Tengah memiliki lingkungan investasi yang relatif kondusif untuk menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah. Dukungan regulasi, pengembangan infrastruktur strategis, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi faktor yang memperkuat daya saing daerah dalam menarik investor. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek penyederhanaan perizinan, sinkronisasi tata ruang, penyediaan lahan siap investasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung agar iklim investasi di Jawa Tengah semakin kompetitif. Dengan berbagai dukungan tersebut, Jawa Tengah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan kerja sama investasi jangka panjang dengan negara-negara Timur Tengah, khususnya pada sektor-sektor yang sejalan dengan tren investasi global dan prinsip keberlanjutan.

5.6 Sektor Unggulan Sesuai dengan Minat Investor Timur Tengah

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian sektoral pada Subbab 5.5.1, teridentifikasi enam sektor yang memiliki tingkat keselarasan tinggi antara keunggulan komparatif dan kompetitif Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik serta tren investasi negara-negara Timur Tengah, yaitu: (1) Industri Pengolahan; (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (4) Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta (6) Konstruksi. Pada subbab ini, masing-masing sektor tersebut akan dianalisis secara lebih mendalam melalui beberapa aspek, meliputi kontribusinya terhadap perekonomian daerah, persebaran wilayah unggulan, komoditas atau produk yang memiliki potensi dan diminati oleh investor Timur Tengah, serta kondisi ketenagakerjaan yang mendukung pengembangan sektor sebagai dasar dalam mengidentifikasi peluang investasi di Provinsi Jawa Tengah.



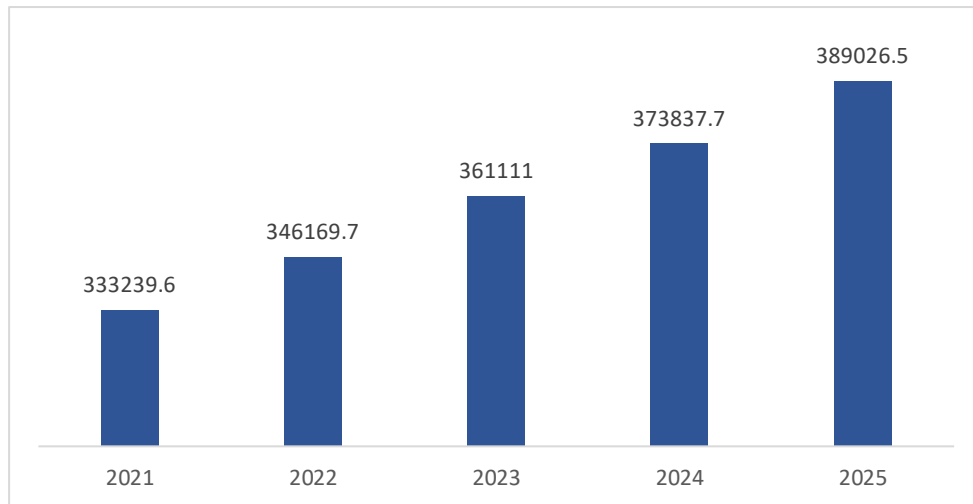
Gambar 5. 3 Kontribusi PDRB Sektor Unggulan Sesuai dengan Minat Investor Timur Tengah 2025 (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Gambar 5.3, terlihat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari enam sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kesesuaian dengan minat investor asal Timur Tengah. Di antara keenam sektor tersebut, industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB terbesar sehingga menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Sementara itu, dalam kajian ini sektor energi baru dan terbarukan (EBT) direpresentasikan melalui kategori Pengadaan Listrik dan Gas karena EBT merupakan salah satu subsektor yang termasuk di dalamnya. Meskipun menjadi salah satu sektor yang diminati investor Timur Tengah, kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Jawa Tengah masih merupakan yang terkecil dibandingkan lima sektor lainnya.

5.6.1 Sektor Industri Pengolahan

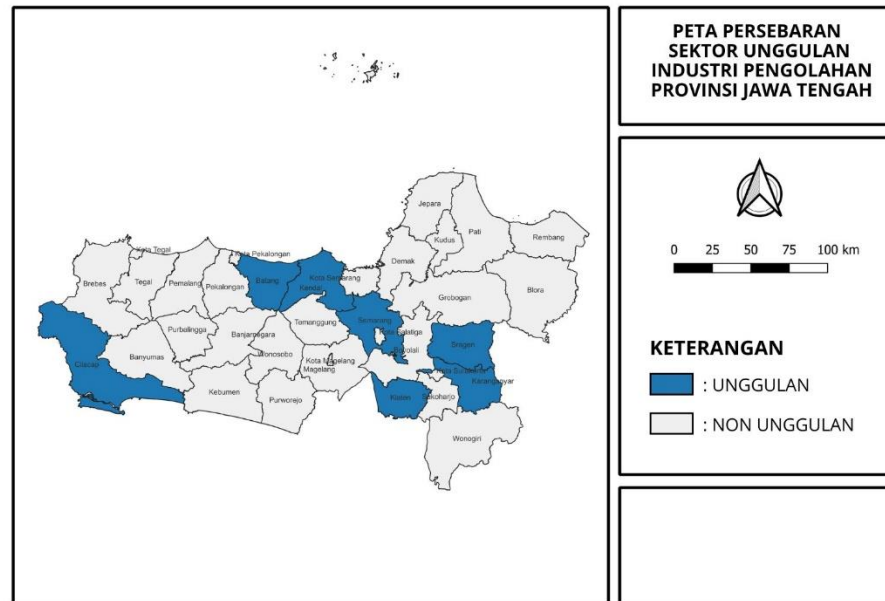
Sektor Industri Pengolahan memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, didukung oleh berkembangnya berbagai industri berbasis agro, tekstil, furnitur, makanan dan minuman, serta produk manufaktur lainnya.



Gambar 5. 4 PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Gambar 5.4, PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025, dari Rp333.239,6 miliar menjadi Rp389.026,5 miliar atau tumbuh sekitar 16,7%. Peningkatan ini menegaskan peran industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian daerah sekaligus menunjukkan prospek yang baik sebagai sektor prioritas investasi, terutama bagi investor Timur Tengah yang memiliki minat pada industri berbasis pengolahan hasil pertanian dan komoditas bernilai tambah. Pada tingkat kabupaten/kota, sektor Industri Pengolahan menjadi sektor unggulan ($LQ > 1$) di Kabupaten Cilacap, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang, dan tercatat sebagai sektor kompetitif berdasarkan analisis Shift Share di 27 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah cakupan kompetitif terluas di antara seluruh sektor ekonomi. Sebaran ini diperkuat oleh keberadaan kawasan industri strategis seperti KEK Industropolis Batang, KEK Kendal, serta kawasan industri di Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten.



Gambar 5. 5 Persebaran Sektor Unggulan Industri Pengolahan di Jawa Tengah

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Potensi sektor ini didukung oleh komoditas manufaktur berorientasi ekspor, seperti produk turunan kelapa (arang briket dan minyak kelapa), industri pengolahan tembakau, serta tekstil dan produk tekstil (TPT). Minat investor Timur Tengah pada subsektor ini juga tercermin dari realisasi investasi PT Taima International Factory pada industri arang briket dan pengolahan tembakau. Meskipun demikian, pengembangan industri arang briket di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pasokan bahan baku tempurung kelapa dari luar Pulau Jawa, terutama dari Sumatra dan Sulawesi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik serta menimbulkan risiko gangguan rantai pasok yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha. Dalam perspektif Teori Lokasi, perusahaan cenderung memilih lokasi investasi yang dekat dengan sumber bahan baku untuk meminimalkan biaya produksi dan distribusi. Oleh karena itu, apabila ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dari luar daerah tidak dapat dikelola dengan baik, terdapat potensi berkurangnya daya saing industri arang briket di Jawa Tengah dan meningkatnya risiko relokasi investasi ke wilayah yang lebih dekat dengan sumber bahan baku.

Tabel 5. 23 Peranan NTB Subkategori Industri Pengolahan Terhadap NTB Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah (Persen)

Sektor/Komoditas	2021	2022	2023	2024	2025
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	8,19	8,3	8,24	7,2	6,72
Industri Makanan dan Minuman	42,05	43,72	45,57	47,42	48,69
Industri Pengolahan Tembakau	19,97	18,99	18,47	18,44	17,64
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,46	7,62	7,06	6,82	6,7

Sektor/Komoditas	2021	2022	2023	2024	2025
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,04	1,08	1,05	1,04	1,06
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5,67	5,13	4,8	4,61	4,7
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,95	0,96	0,98	0,95	0,93
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,52	7,31	7,16	6,95	6,97
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,96	0,92	0,85	0,86	0,87
Industri Barang Galian bukan Logam	1,81	1,76	1,76	1,72	1,75
Industri Logam Dasar	0,7	0,7	0,67	0,68	0,69
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,21	1,19	1,16	1,13	1,16
Industri Mesin dan Perlengkapan	0,36	0,34	0,33	0,33	0,34
Industri Alat Angkutan	0,61	0,58	0,56	0,54	0,51
Industri Furnitur	1,17	1,09	1,02	1	0,97
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,33	0,33	0,31	0,29	0,3

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 5.23, struktur industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021-2025 didominasi oleh subsektor Industri Makanan dan Minuman, dengan kontribusi NTB yang terus meningkat dari 42,05% pada tahun 2021 menjadi 48,69% pada tahun 2025. Kontributor terbesar berikutnya adalah Industri Pengolahan Tembakau (17,64%), Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (6,97%), serta Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (6,70%). Dominasi subsektor tersebut menunjukkan bahwa industri pengolahan Jawa Tengah masih bertumpu pada agroindustri dan manufaktur, sehingga memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai sektor prioritas investasi, termasuk bagi investor asal Timur Tengah.

Tabel 5. 24 Minat Investor Timur Tengah pada Subsektor Industri Pengolahan di Indonesia

No	Subsektor Industri Pengolahan	Komoditas Unggulan	Bukti/Temuan
1	Industri Makanan	Makanan olahan, produk halal, kopi, gula kelapa, kelapa, rempah-rempah	Menjadi salah satu subsektor yang banyak menerima investasi dari Arab Saudi, Yordania, dan Yaman di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
2	Industri Bahan Kimia	Arang briket , pupuk tanaman (kimia anorganik)	Menjadi subsektor manufaktur yang paling banyak menerima investasi dari UEA, Arab Saudi, Yordania, Irak, dan Yaman, termasuk di Jawa Tengah.
3	Industri Farmasi	Obat-obatan, obat tradisional, produk farmasi	Terdapat investasi dari UEA dan Arab Saudi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
4	Industri Pengolahan Tembakau	Rokok kretek dan produk tembakau	Terdapat investasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

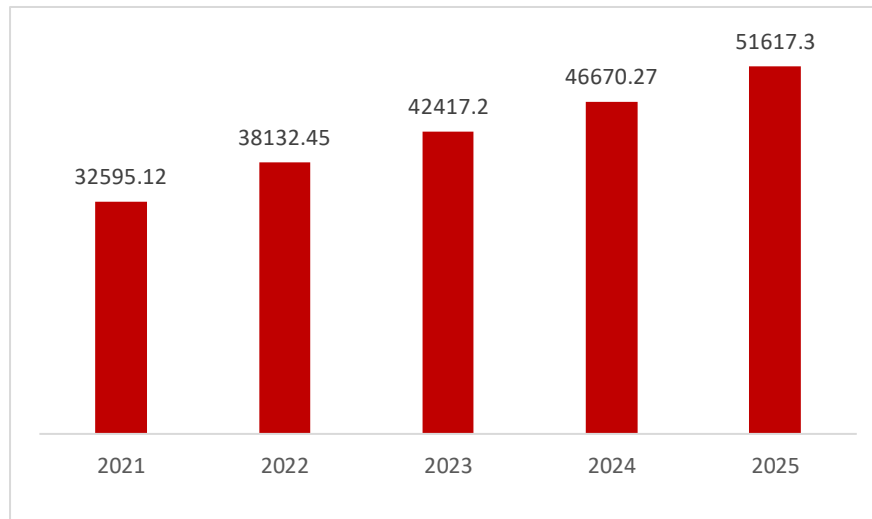
No	Subsektor Industri Pengolahan	Komoditas Unggulan	Bukti/Temuan
5	Industri Karet dan Plastik	Kemasan plastik, produk karet	Investasi tercatat di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
6	Industri Kertas	Kertas dan kemasan berbasis kertas	Terdapat investasi UEA di Jawa Barat.
7	Industri Peralatan Listrik	Kabel, panel listrik, komponen kelistrikan	Terdapat investasi UEA di Jawa Barat.
8	Industri Logam Dasar	Baja, besi, billet, logam dasar	Terdapat investasi Yordania di Jawa Tengah.
9	Industri Barang Galian Bukan Logam	Semen, keramik, kaca	Investasi ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
10	Industri Kayu	Kayu olahan, plywood, veneer	Terdapat investasi Yaman di DI Yogyakarta.
11	Industri Pengolahan Lainnya	Furnitur dan kerajinan	Investasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat menunjukkan adanya peluang pada industri manufaktur lainnya.
12	Industri Produk Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi	Produk hasil pengilangan minyak bumi	Terdapat investasi Yordania di Jawa Tengah, meskipun nilainya relatif kecil.

Sumber : Data Realisasi Investasi BKPM (2025), KBLI BPS/OSS, Wawancara, 2026 (diolah).

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 5.24, minat investor asal Timur Tengah terhadap sektor industri pengolahan di Indonesia terkonsentrasi pada beberapa subsektor utama, yaitu industri makanan, industri bahan kimia, industri farmasi, dan industri pengolahan tembakau. Komoditas yang menjadi perhatian investor meliputi produk pangan olahan dan halal, arang briket, pupuk tanaman, produk farmasi, serta produk tembakau. Selain itu, investor juga menunjukkan minat pada subsektor pendukung manufaktur, seperti industri karet dan plastik, kertas, peralatan listrik, logam dasar, barang galian bukan logam, serta industri kayu. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik investasi dari negara-negara Timur Tengah tidak hanya berfokus pada industri berbasis sumber daya alam, tetapi juga pada industri manufaktur yang memiliki nilai tambah, berorientasi ekspor, dan memiliki keterkaitan dengan rantai pasok global. Kondisi tersebut sejalan dengan struktur industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh keberadaan berbagai kawasan industri serta berkembangnya industri berbasis halal. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal yang direncanakan mulai diimplementasikan pada tahun 2027. Inisiatif tersebut berpotensi semakin meningkatkan daya tarik Jawa Tengah sebagai tujuan investasi bagi investor Timur Tengah, khususnya pada subsektor industri pengolahan yang memiliki keterkaitan dengan produk halal dan industri manufaktur bernilai tambah.

5.6.2 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan dan kompetitif di Provinsi Jawa Tengah, yang ditandai dengan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional serta memiliki daya saing yang positif. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, perjalanan, dan jasa pendukung yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

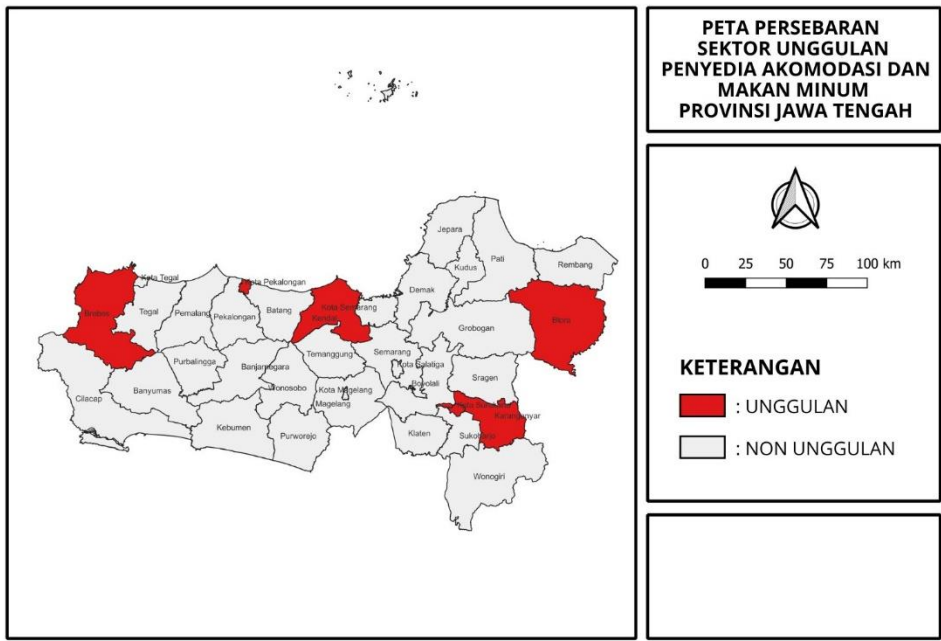


Gambar 5. 6 PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data PDRB tahun 2021-2025, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari **Rp32.595,12 miliar** pada tahun 2021 menjadi **Rp51.617,30 miliar** pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar **58,4%** dalam kurun waktu lima tahun. Kenaikan tersebut mencerminkan semakin pulih dan berkembangnya aktivitas pariwisata, perhotelan, restoran, dan jasa kuliner pascapandemi, yang turut mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan akomodasi dan konsumsi. Tren pertumbuhan yang positif ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki prospek yang semakin menjanjikan sebagai salah satu sektor potensial untuk dikembangkan dan dipromosikan kepada investor, termasuk investor asal Timur Tengah yang memiliki minat pada pengembangan hotel, resor, restoran, serta industri kuliner.

Pada tingkat kabupaten/kota Sektor ini menjadi sektor unggulan ($LQ > 1$) di Kabupaten Karanganyar, Blora, Kendal, Brebes, serta Kota Surakarta dan Kota Pekalongan, dan kompetitif ($DS > 0$) di 10 kabupaten/kota berdasarkan Shift Share.



Gambar 5. 7 Persebaran Sektor Unggulan Akomodasi & Makan Minum di Jawa Tengah

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Potensi sektor ini didukung oleh destinasi wisata unggulan seperti Candi Borobudur, Kepulauan Karimunjawa, Rawa Pening, Kopeng, Tawangmangu, serta Kota Surakarta sebagai pusat wisata budaya. Berdasarkan data BKPM, pada tahun 2025 investor Uni Emirat Arab telah merealisasikan investasi pada sektor hotel dan restoran, menunjukkan ketertarikan terhadap sektor akomodasi berbasis pariwisata, termasuk peluang pada segmen halal tourism yang terus berkembang.

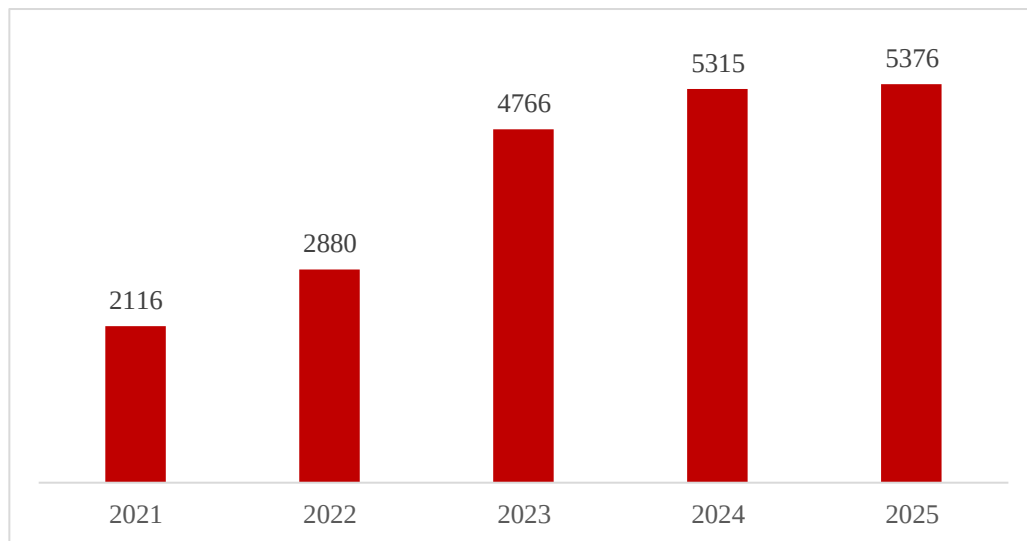
Tabel 5. 25 Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya di Provinsi Jawa Tengah

Klasifikasi	2021	2022	2023	2024	2025
Hotel Bintang 1	59	72	64	69	15
Hotel Bintang 2	89	88	96	104	76
Hotel Bintang 3	120	119	131	142	163
Hotel Bintang 4	55	52	54	64	107
Hotel Bintang 5	13	12	14	17	54
Akomodasi Lainnya	-	1704	1660	1892	2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 5.25, jumlah hotel dan akomodasi di Provinsi Jawa Tengah secara umum menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Pertumbuhan terutama terjadi pada hotel bintang 3, 4, dan 5 serta akomodasi lainnya, yang mengindikasikan berkembangnya kapasitas sektor pariwisata dan jasa perhotelan. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya kesiapan Jawa Tengah dalam mendukung aktivitas wisata maupun perjalanan

bisnis, sehingga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.



Gambar 5. 8 Perkembangan Jumlah Restoran di Provinsi Jawa Tengah

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Gambar 5.8 , Perkembangan jumlah restoran di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat selama periode 2021-2025, dari 2.116 unit menjadi 5.376 unit. Peningkatan ini menunjukkan berkembangnya sektor penyediaan makan minum seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pariwisata, dan permintaan masyarakat. Kondisi tersebut turut memperkuat potensi investasi di sektor jasa dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5. 26 Klaster Destinasi Wisata Potensial di Provinsi Jawa Tengah

No	Klaster Wisata	Destinasi Unggulan	Sebaran Wilayah
1	Wisata Budaya dan Heritage	Candi Borobudur, Borobudur Highland, Candi Gedong Songo, Candi Sukuh, Candi Cetho, Keraton Kasunanan Surakarta, Lawang Sewu, Kota Lama Semarang, De Tjolomadoe, Museum Sangiran, Benteng Vastenburg, Museum Kereta Api Ambarawa	Magelang, Semarang, Karanganyar, Sragen, Kota Surakarta, Kota Semarang
2	Wisata Religi	Masjid Agung Demak, Masjid Agung Jawa Tengah, Sam Poo Kong, Vihara Buddhagaya Watugong, Makam Sunan Kudus, Makam Sunan Muria	Demak, Kota Semarang, Kudus
3	Wisata Alam Pegunungan	Dataran Tinggi Dieng, Kawah Sikidang, Telaga Warna, Kopeng, Umbul Sidomukti, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Merapi (Selo Boyolali), Bukit Sikunir	Wonosobo, Banjarnegara, Semarang, Banyumas, Purbalingga
4	Wisata Danau, Air Panas dan Air Terjun	Rawa Pening, Baturraden, Guci, Curug Sewu, Umbul Ponggok,	Kabupaten Semarang, Banyumas, Tegal, Kendal, Klaten

No	Klaster Wisata	Destinasi Unggulan	Sebaran Wilayah
5	Wisata Bahari	Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang, Pantai Menganti, Pantai Ayah (Logending), Pantai Widuri, Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Pantai Karang Jahe	Jepara, Kebumen, Pemalang, Rembang
6	Wisata Buatan dan Tematik	Saloka Theme Park, Dusun Semilir, The Heritage Palace	Semarang, Sukoharjo

Sumber :RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Disbudparekraf Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5.27, Provinsi Jawa Tengah memiliki keragaman destinasi wisata yang tersebar pada enam klaster utama, yaitu wisata budaya dan heritage, wisata religi, wisata alam pegunungan, wisata danau, air panas dan air terjun, wisata bahari, serta wisata buatan dan tematik. Klaster wisata budaya dan heritage menjadi salah satu daya tarik utama dengan keberadaan destinasi berkelas nasional dan internasional seperti Candi Borobudur, Kota Lama Semarang, Keraton Kasunanan Surakarta, dan Museum Sangiran, yang didukung oleh klaster wisata religi, alam, dan bahari yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sebaran destinasi yang relatif merata tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor pariwisata di Jawa Tengah tidak terpusat pada satu wilayah, melainkan membentuk jaringan destinasi yang saling melengkapi. Kondisi ini menciptakan peluang investasi yang luas pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, termasuk pembangunan hotel, resort, restoran, pusat kuliner halal, serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing Jawa Tengah sebagai destinasi wisata sekaligus tujuan investasi, termasuk bagi investor asal Timur Tengah.

Tabel 5. 27 Daftar Perusahaan Timur Tengah di Bidang Pariwisata, Akomodasi, dan Restoran

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Sektor/Fokus Pariwisata	Tahun	Lokasi Negara Investasi
1	Murban Energy Limited (Mubadala Group)	UEA	Pengembangan resort, properti wisata, dan destinasi bahari	2021–2026	Indonesia (Pulau Banyak, Aceh Singkil melalui MoU tahun 2021; peninjauan pengembangan wisata bahari Sabang tahun 2026), serta portofolio investasi Mubadala di berbagai negara.
2	Haliburg Group	UEA	Hospitality, hotel, resort, dan pengembangan destinasi wisata	2024	Menjajaki peluang investasi di Indonesia melalui business matching dengan Kementerian Pariwisata di Abu Dhabi; memiliki portofolio bisnis di UEA dan kawasan Timur Tengah.
3	Nirvana Travel & Tourism	UEA	Travel agency, MICE, hospitality, dan pengembangan paket wisata	2024	Menjajaki peluang investasi dan kerja sama bisnis pariwisata di Indonesia melalui business matching dengan Kementerian Pariwisata; beroperasi di UEA dan melayani destinasi internasional.

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Sektor/Fokus Pariwisata	Tahun	Lokasi Negara Investasi
4	Eagle Hills	UEA	Pengembangan kawasan terpadu (<i>mixed-use</i>), hospitality, hotel, dan destinasi wisata	2024	Berinvestasi di berbagai negara (Bahrain, Yordania, Maroko, Serbia, Ethiopia, Oman, Kroasia, Latvia, UEA, dan lainnya); menjalin kerja sama pengembangan ekosistem pariwisata di Indonesia.

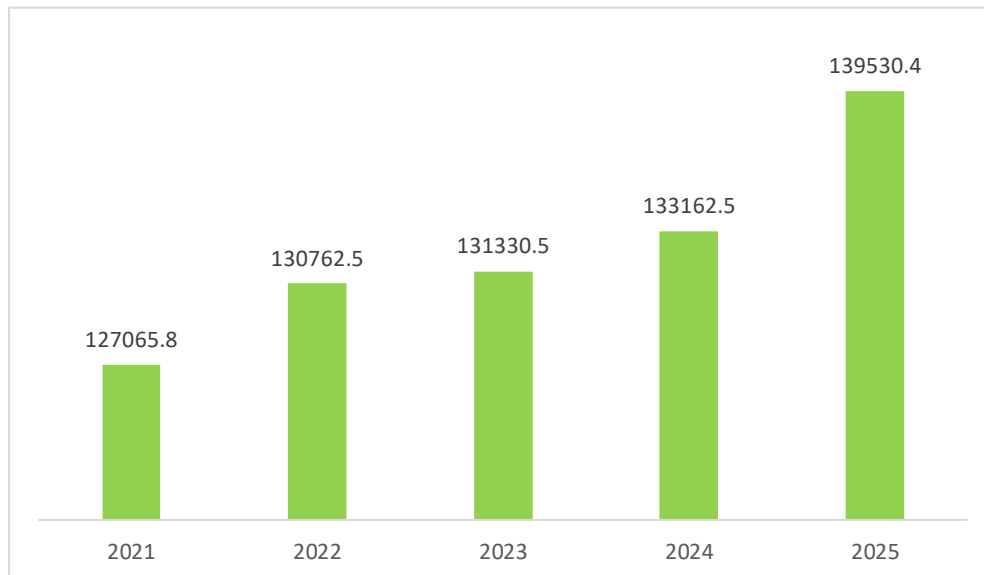
Sumber: Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, KBRI Abu Dhabi, Mubadala Group, Eagle Hills, Nirvana Travel & Tourism, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5.27, investor asal Timur Tengah yang menunjukkan minat pada sektor pariwisata, akomodasi, dan restoran di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan dari **Uni Emirat Arab (UEA)**. Bentuk keterlibatan investasi tersebut sebagian besar masih berada pada tahap penjajakan, business matching, maupun kerja sama strategis, dengan fokus pada pengembangan resort, hotel, kawasan wisata terpadu, serta layanan perjalanan wisata. Murban Energy Limited (Mubadala Group) menjadi salah satu investor yang memiliki komitmen paling konkret melalui penandatanganan nota kesepahaman pengembangan kawasan wisata Pulau Banyak di Aceh Singkil dan penjajakan lanjutan di Sabang. Selain itu, Haliburg Group, Nirvana Travel & Tourism, dan Eagle Hills juga mulai menjajaki peluang investasi di Indonesia melalui fasilitasi pemerintah, khususnya dalam pengembangan destinasi wisata, hospitality, serta kawasan terpadu yang mengintegrasikan fungsi akomodasi, komersial, dan rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai salah satu tujuan potensial bagi pengembangan investasi sektor pariwisata oleh investor Timur Tengah, meskipun sebagian besar masih berada pada tahap awal.

Bagi Provinsi Jawa Tengah, kondisi tersebut membuka peluang untuk menarik investasi Timur Tengah pada sektor akomodasi dan pariwisata dengan memanfaatkan potensi destinasi wisata, pengembangan kawasan strategis, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Keberadaan destinasi wisata budaya, religi, alam, dan kawasan ekonomi khusus yang didukung aksesibilitas transportasi dapat menjadi daya tarik bagi investor yang memiliki pengalaman dalam pengembangan resort, hotel, maupun kawasan mixed-use. Oleh karena itu, diperlukan upaya promosi investasi yang lebih terarah melalui penyusunan proyek investasi siap tawar (*investment project ready to offer*), penguatan kerja sama dengan calon investor Timur Tengah, serta penyelenggaraan forum bisnis internasional guna meningkatkan peluang realisasi investasi pada sektor akomodasi dan pariwisata di Jawa Tengah.

5.6.3 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor strategis yang berperan sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, serta sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Selain memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, sektor ini juga didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam komoditas unggulan.



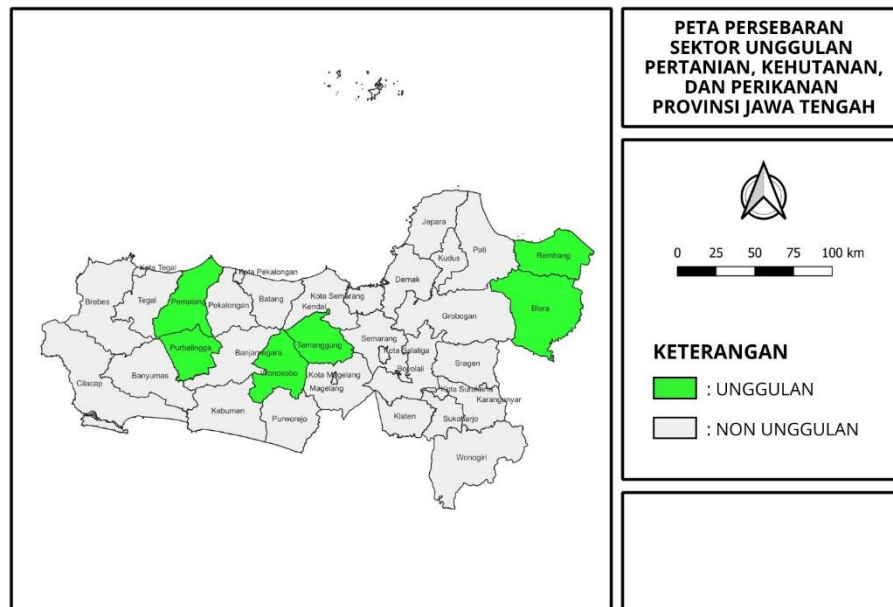
Gambar 5. 9 PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif selama periode 2021-2025. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari **Rp127.065,8 miliar** pada tahun 2021 menjadi **Rp139.530,4 miliar** pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar **9,8%** dalam lima tahun terakhir. Meskipun laju pertumbuhannya cenderung moderat, peningkatan yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa sektor ini tetap memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Provinsi Jawa Tengah serta mendukung ketahanan pangan di tingkat regional, nasional, hingga pasar global. Kondisi tersebut juga memperkuat prospek sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan melalui investasi yang diminati oleh investor asal Timur Tengah.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan komparatif dan daya saing di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Blora, Rembang, Temanggung, dan Pemalang.

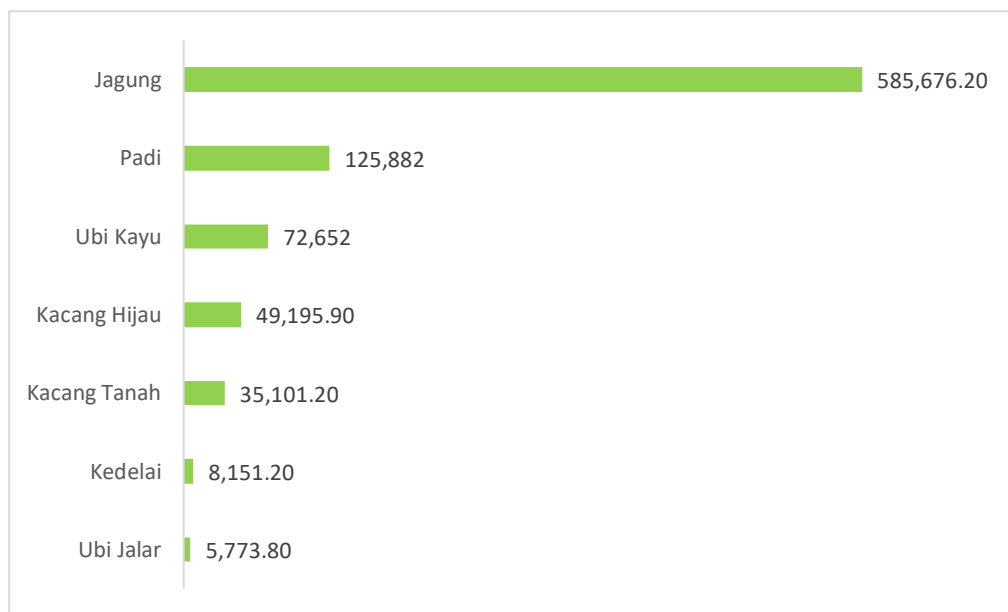
Sementara itu, hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya saing yang baik dan tumbuh secara kompetitif di 17 kabupaten/kota. Sebaran wilayah unggulan dan kompetitif tersebut ditampilkan pada peta berikut sebagai gambaran spasial potensi pengembangan investasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5. 10 Persebaran Sektor Pertanian, Perikanan, Perhutanan di Jawa Tengah

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Komoditas unggulan mencakup padi, hortikultura, peternakan, jamur, serta pupuk pertanian, sebagaimana tercermin dari realisasi investasi PT Ukiq Pro Group (pupuk pertanian) dan PT Eka Timur Raya (budidaya dan pengolahan jamur). Pada subsektor perikanan, komoditas seperti udang, bandeng, dan rumput laut membuka peluang investasi pada industri pengolahan, cold storage, dan cold chain, didorong pula oleh perhatian negara-negara Timur Tengah terhadap ketahanan pangan (*food security*) tercermin dari realisasi investasi UEA pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Sumatera Selatan, serta investor Yaman pada sektor perikanan di Jawa Timur



Gambar 5. 11 Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah (Ha)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah)

Berdasarkan data luas panen tahun 2025, jagung menjadi komoditas dengan luas panen terbesar di Jawa Tengah, mencapai 585.676,20 hektare, diikuti oleh padi seluas 125.882 hektare dan ubi kayu seluas 72.652 hektare. Sementara itu, luas panen kacang hijau mencapai 49.195,90 hektare, kacang tanah 35.101,20 hektare, kedelai 8.151,20 hektare, dan ubi jalar 5.773,80 hektare. Besarnya luas panen jagung dan padi menunjukkan bahwa kedua komoditas tersebut menjadi basis utama produksi tanaman pangan di Jawa Tengah. Kondisi ini mencerminkan potensi investasi pada sektor agribisnis, khususnya pengolahan hasil panen, penyimpanan, logistik, serta industri pangan berbasis jagung dan padi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Tabel 5. 28 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Tengah (Ton)

No	Komoditas	Produksi 2025 (Ton)	Sentra Produksi Utama (2025)
1	Tebu	4.554.342,4	Blora, Sragen, Pati
2	Tembakau	61.105,1	Rembang, Temanggung, Grobogan
3	Kelapa	139.500,2	Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap
4	Kopi	26.785,2	Temanggung, Semarang, Kendal
5	Karet	4.730,3	Cilacap, Purbalingga, Batang
6	Teh	5.136,0	Banjarnegara, Batang, Pekalongan
7	Kakao	1.279,3	Wonogiri, Batang, Kendal
8	Lada	590,8	Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5.28, komoditas perkebunan rakyat di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan potensi yang beragam. Tebu menjadi komoditas dengan produksi terbesar pada tahun 2025 mencapai 4,55 juta ton dan mengalami pertumbuhan sebesar 24,7% dibandingkan tahun 2022, diikuti tembakau yang tumbuh paling tinggi sebesar 33,7%. Sementara itu, komoditas kelapa, teh, kakao, dan lada mengalami penurunan produksi, meskipun masih memiliki sentra produksi yang kuat di beberapa kabupaten. Selain didukung oleh ketersediaan bahan baku, setiap komoditas juga memiliki peluang hilirisasi yang cukup luas, seperti industri gula dan bioetanol, rokok dan cerutu, minyak kelapa dan arang tempurung, *specialty coffee*, hingga cokelat olahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan Jawa Tengah memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan melalui investasi pada industri pengolahan berbasis komoditas unggulan, sejalan dengan minat investor Timur Tengah terhadap industri pangan, produk perkebunan, dan komoditas bernilai tambah.

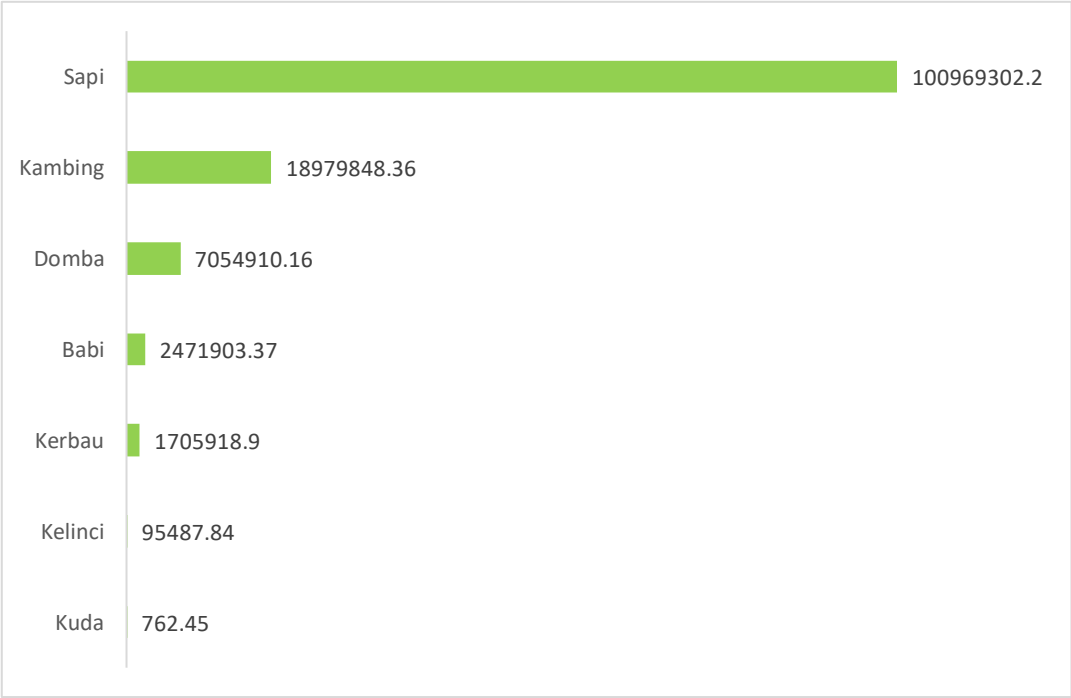
Tabel 5. 29 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Jenis Budidaya	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (2025)	Sentra Kabupaten/Kota	Peluang Investasi
1	Kolam	176.930	Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap	Budidaya ikan air tawar, hatchery, pakan ikan, pengolahan hasil perikanan
2	Tambak	26.023	Pati, Brebes, Demak	Budidaya udang dan bandeng, cold storage, industri pengolahan hasil perikanan
3	Sawah (Mina Padi)	2.395	Magelang, Temanggung, Banjarnegara	Integrasi pertanian perikanan, pengembangan mina padi
4	Jaring Apung	1.142	Sragen, Kabupaten Semarang, Boyolali	Budidaya ikan nila, patin, bawal bernilai ekonomi tinggi
5	Keramba	509	Cilacap, Kabupaten Semarang, Wonosobo	Budidaya ikan air tawar dan pengembangan perikanan darat
6	Budidaya Laut	334	Jepara	Budidaya rumput laut dan komoditas laut bernilai ekspor
7	Jaring Tancap Tawar	68	Kabupaten Pekalongan	Pengembangan budidaya skala lokal

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 5.29, kegiatan budidaya perikanan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 didominasi oleh budidaya kolam dengan jumlah 176.930 rumah tangga atau sekitar 85,3% dari total rumah tangga perikanan budidaya. Selanjutnya, budidaya tambak menempati urutan kedua dengan 26.023 rumah tangga, sedangkan jenis budidaya lainnya seperti mina padi, jaring apung, keramba, budidaya laut, dan jaring tancap memiliki proporsi yang relatif lebih kecil. Sebaran sentra budidaya yang tersebar di Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Pati,

Brebes, Demak, Jepara, dan beberapa kabupaten lainnya menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki basis produksi perikanan yang kuat baik di wilayah daratan maupun pesisir.



Gambar 5. 12 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Tengah (KG)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data produksi daging ternak tahun 2025, produksi daging di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh daging sapi dengan total produksi mencapai 100.969.302,2 kg, jauh melampaui jenis ternak lainnya. Komoditas berikutnya adalah daging kambing sebesar 18.979.848,36 kg, daging domba sebesar 7.054.910,16 kg, daging babi sebesar 2.471.903,37 kg, dan daging kerbau sebesar 1.705.918,9 kg, sedangkan produksi daging kelinci dan kuda masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor peternakan Jawa Tengah memiliki keunggulan pada komoditas sapi serta ruminansia kecil (kambing dan domba), sehingga berpotensi menjadi basis pengembangan investasi pada industri pengolahan daging, rumah potong hewan modern, rantai dingin (cold chain), dan produk pangan halal yang memiliki permintaan tinggi di pasar domestik maupun ekspor.

Tabel 5. 30 Minat Investasi Timur Tengah di Sektor Pertanian & Kehutanan

No	Nama Perusahaan/Entitas	Negara Asal	Sektor	Komoditas	Tahun	Lokasi Investasi
1	Al Ain Farms for Livestock Production	UEA	Peternakan sapi perah dan industri susu	Susu sapi	2025	Indonesia (program pengembangan peternakan sapi dalam RPJMN 2025-2029)

No	Nama Perusahaan/Entitas	Negara Asal	Sektor	Komoditas	Tahun	Lokasi Investasi
2	Abu Dhabi Exports Office (ADEX)	UEA	Pembiayaan ketahanan pangan dan agribisnis	Ketahanan pangan dan agribisnis	2026	Indonesia (dukungan pembiayaan proyek ketahanan pangan dan agribisnis)
3	ICCS Global Industries	UEA	Industri pengolahan hasil perkebunan	Arang briket kelapa	2025	Kota Semarang, Jawa Tengah
4	Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC)	Arab Saudi	Investasi pangan dan perkebunan	Kelapa sawit (CPO)	2023	Indonesia (penjajakan investasi sektor perkebunan dan ketahanan pangan)
5	Eka Timur Raya	Arab Saudi	Pertanian hortikultura dan pengolahan pangan	Jamur dan sayuran olahan	2025	Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Fasilitas Ekspansi/Cabang ke-2)
6	Pemerintah Kerajaan Yordania (Kerja Sama G2G)	Yordania	Teknologi pertanian dan pupuk	Pupuk fosfat dan gandum	2025	Indonesia (rencana uji tanam di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)
7	Java Raya International	Yordania	Industri pengolahan hasil kelapa	Minyak nabati, sabut kelapa, dan arang briket	2025	Kabupaten Pati, Jawa Tengah
8	Taima International Factory	Yordania	Industri pengolahan hasil perkebunan	Arang briket kelapa dan tembakau	2025	Kabupaten Pati, Jawa Tengah
9	Charcoal Black Diamond International	Yordania	Industri pengolahan hasil kelapa	Arang briket kelapa	2025	Kabupaten Pati, Jawa Tengah
10	Ukiq Pro Group	Irak	Industri bahan kimia untuk pertanian	Pupuk pertanian	2025	Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, OSS Indonesia, Kementerian Pertanian RI, Bappenas (RPJMN 2025–2029), Kementerian Luar Negeri RI, 2026 (diolah).

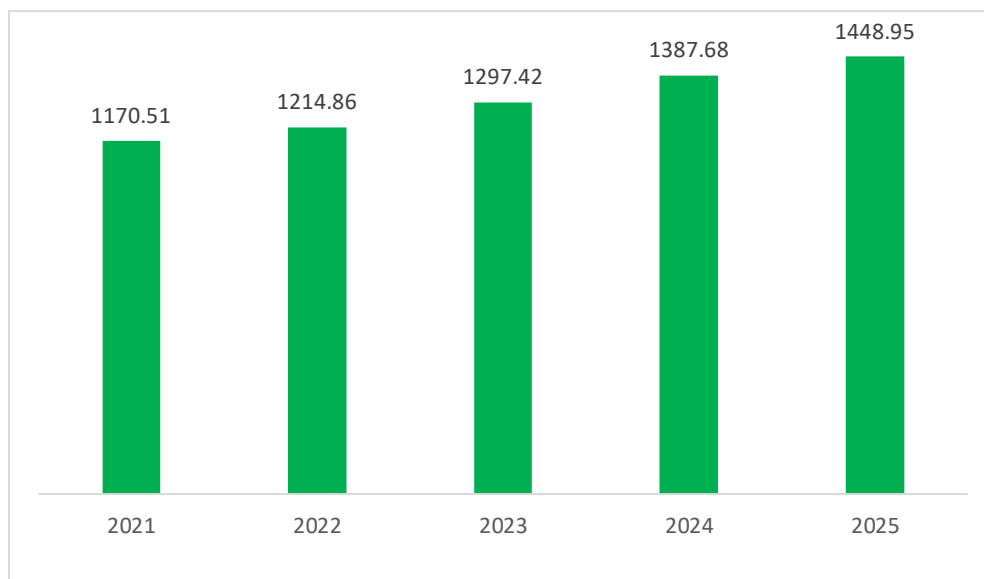
Investasi dan kerja sama investor Timur Tengah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kecenderungan berfokus pada komoditas berbasis sumber daya alam dan agroindustri yang memiliki orientasi ekspor. Hal tersebut tercermin dari investasi pada industri pengolahan hasil kelapa seperti arang briket, minyak nabati, dan sabut kelapa yang dilakukan oleh ICCS Global Industries, Java Raya International, Taima International Factory,

dan Charcoal Black Diamond International di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat investasi pada hortikultura dan pengolahan pangan oleh Eka Timur Raya di Kabupaten Brebes, dukungan terhadap sektor pupuk dan teknologi pertanian melalui kerja sama Pemerintah Kerajaan Yordania serta Ukiq Pro Group, serta peninjauan investasi ketahanan pangan dan perkebunan oleh Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC). Kondisi ini menunjukkan bahwa investor Timur Tengah cenderung tertarik pada sektor yang memiliki keterkaitan dengan ketahanan pangan, pengolahan hasil pertanian, dan komoditas ekspor bernilai tambah.

Bagi Provinsi Jawa Tengah, pola investasi tersebut menunjukkan adanya peluang yang cukup besar untuk menarik investor Timur Tengah melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kelapa, hasil hortikultura, tembakau, serta industri pendukung pertanian. Ketersediaan bahan baku yang melimpah, kawasan industri yang berkembang, serta akses menuju pelabuhan ekspor menjadi keunggulan kompetitif yang dapat ditawarkan kepada calon investor. Oleh karena itu, strategi promosi investasi perlu diarahkan pada proyek-proyek agroindustri yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, sehingga mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian sekaligus memperluas kerja sama investasi dengan negara-negara Timur Tengah.

5.6.4 Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sektor energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki prospek yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Kajian RUPM Jawa Tengah 2025-2045 yang menempatkan pengembangan energi bersih dan infrastruktur hijau sebagai salah satu prioritas investasi daerah. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah juga mulai mengarahkan diversifikasi investasinya ke sektor energi bersih sebagai bagian dari transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas. Dalam kajian ini, potensi sektor EBT direpresentasikan melalui kategori Pengadaan Listrik dan Gas sesuai dengan klasifikasi sektor ekonomi yang digunakan dalam data PDRB.



Gambar 5. 13 PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data PDRB, sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode 2021–2025. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari 1.170,51 pada tahun 2021 menjadi 1.448,95 pada tahun 2025, mencerminkan rata-rata pertumbuhan positif setiap tahunnya. Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih relatif kecil dibandingkan sektor unggulan lainnya, tren peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan aktivitas ekonomi pada sektor ketenagalistrikan dan energi yang dapat menjadi modal awal dalam mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan serta meningkatkan daya tarik investasi di masa mendatang

Berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 12/2018), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target bauran EBT sebesar 21,32% pada tahun 2025. Realisasi bauran EBT tercatat sebesar 18,58% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 22,33% pada tahun 2026 melampaui target RUED. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mencatat total potensi energi listrik dari infrastruktur EBT terbangun hingga tahun 2026 mencapai 517,5 MW

Tabel 5. 31 Potensi dan Sebaran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis EBT	Status	Kapasitas	Lokasi
1	Tenaga Air (PLTA/PLTMH)	Beroperasi, terhubung jaringan (26 lokasi) + off-grid skala desa (29 lokasi)	48.970 kW (on-grid) + 840 kVA (off-grid)	Banjarnegara, Wonogiri, Kebumen, Purwodadi, Pekalongan, Banyumas

No	Jenis EBT	Status	Kapasitas	Lokasi
2	Tenaga Panas Bumi	1 lokasi beroperasi (Dieng); 13 titik masih potensi	60 MW terpasang; potensi tambahan ± 1.981 MW	Wonosobo (Dieng), Semarang (G. Ungaran, G. Umbul Telomoyo, Klepu), Karanganyar (G. Lawu), Banyumas, Cilacap
3	Tenaga Surya (PLTS)	Beroperasi, PLTS terpusat, SHS, dan PJU	235,5 kVA (terpusat) + 262,35 kWp (SHS) + 198,99 kWp (PJU)	Cilacap, Jepara (Karimunjawa), Rembang, Banjarnegara
4	Sampah (PLTSa)	Berupa potensi, sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai pembangkit	17 TPA dengan potensi tekno-ekonomi signifikan	Semarang (Jatibarang), Surakarta (Putri Cempo), dan TPA lain di Jawa Tengah
5	Lainnya (Biomassa, Biogas, Bioethanol/Biofuel)	-	-	Tersebar di sentra pertanian & peternakan Jawa Tengah

Sumber : Rencana Umum Energi Daerah (RUED), 2018 (diolah).

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang beragam dan tersebar di berbagai wilayah, meliputi tenaga air, panas bumi, tenaga surya, pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), serta biomassa dan biogas. Di antara berbagai jenis EBT tersebut, panas bumi memiliki potensi pengembangan terbesar dengan tambahan kapasitas sekitar 1.981 MW, disusul oleh tenaga air yang telah dimanfaatkan melalui pembangkit skala jaringan maupun desa. Selain itu, potensi tenaga surya, PLTSa di 17 TPA, serta biomassa dan biogas yang tersebar di sentra pertanian dan peternakan menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi bersih di Jawa Tengah. Keberagaman potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung transisi energi sekaligus memperkuat daya tarik investasi, terutama bagi investor asal Timur Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mengarahkan investasinya ke sektor energi terbarukan sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi.

Tabel 5. 32 Daftar Perusahaan Timur Tengah di Bidang Energi Terbarukan

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Sektor/Fokus EBT	Lokasi Negara Investasi
1	Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company)	UEA	Surya, panas bumi, angin, hidrogen hijau	Lebih dari 40 negara (termasuk Indonesia, melalui PLTS Terapung Cirata, investasi di Pertamina Geothermal Energy, serta proyek di IKN Nusantara)
2	Mubadala Investment Company	UEA	Investasi energi & infrastruktur global (induk/afiliasi Masdar)	Portofolio global di berbagai kawasan; di Indonesia, melalui anak usaha Mubadala Energy, menjalankan kerja sama pengeboran gas lepas pantai Sumatra Utara (Blok South Andaman, penemuan Layaran-1 dan Tangkulo-1)
3	ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company)	UEA	Migas, mulai diversifikasi ke energi bersih	Sejak Desember 2022 menjadi pemegang saham langsung Masdar (24% di unit energi terbarukan, 43% di unit

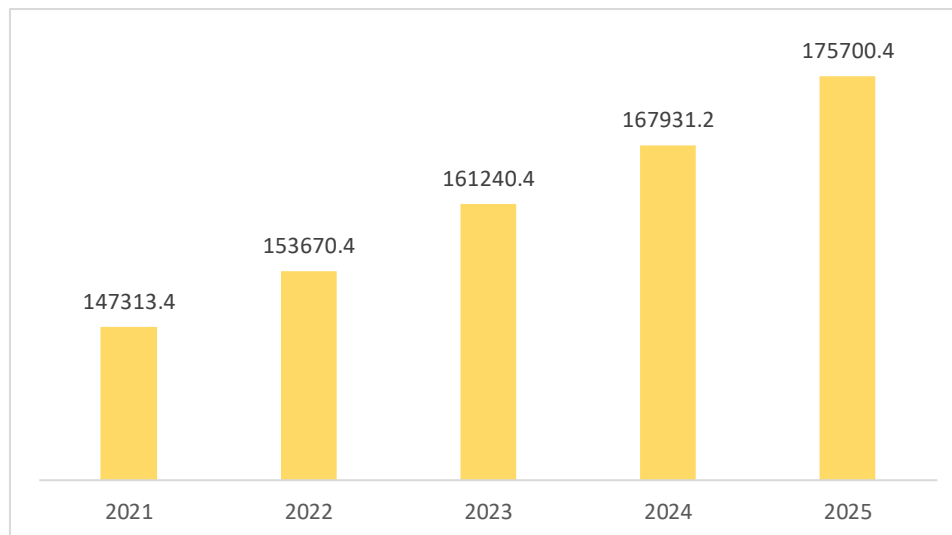
No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Sektor/Fokus EBT	Lokasi Negara Investasi
				hidrogen hijau); melalui kepemilikan ini, ADNOC memiliki eksposur tidak langsung ke proyek-proyek Masdar di Indonesia
4	Emirates Water and Electricity Company (EWEC)	UEA	Surya skala besar & penyimpanan baterai	Fokus domestik UEA (Abu Dhabi)
5	ACWA Power	Arab Saudi	Surya, angin, hidrogen hijau, desalinasi	15 negara (Arab Saudi, Indonesia, Maroko, Afrika Selatan, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, kawasan Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara)
6	Public Investment Fund (PIF)	Arab Saudi	Dana kedaulatan, pemegang saham terbesar/utama ACWA Power	Arab Saudi (domestik, mis. proyek NEOM); jangkauan internasional melalui kepemilikan saham (44–50%, tergantung sumber) di ACWA Power
7	TAQA (Abu Dhabi National Energy Company)	UEA	Surya, angin, transmisi & distribusi energi (melalui kepemilikan 43% di unit energi terbarukan Masdar)	Beroperasi di 11–20 negara (termasuk Kanada, Ghana, India, Maroko, Oman, Arab Saudi, UEA); belum ada proyek investasi langsung di Indonesia.

Sumber : Masdar, Mubadala, ACWA Power, PIF, TAQA, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5.32, perusahaan-perusahaan asal Timur Tengah, khususnya dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, menunjukkan minat yang kuat terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, panas bumi, angin, dan hidrogen hijau. Beberapa perusahaan, seperti Masdar dan ACWA Power, telah berinvestasi di Indonesia melalui berbagai proyek energi bersih. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang bagi Provinsi Jawa Tengah untuk menarik investasi EBT, mengingat daerah ini memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar.

5.6.5 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan investasi dan perdagangan internasional di Provinsi Jawa Tengah. Peran sektor ini tidak hanya sebagai penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi, tetapi juga sebagai penunjang kelancaran distribusi barang, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses pasar.

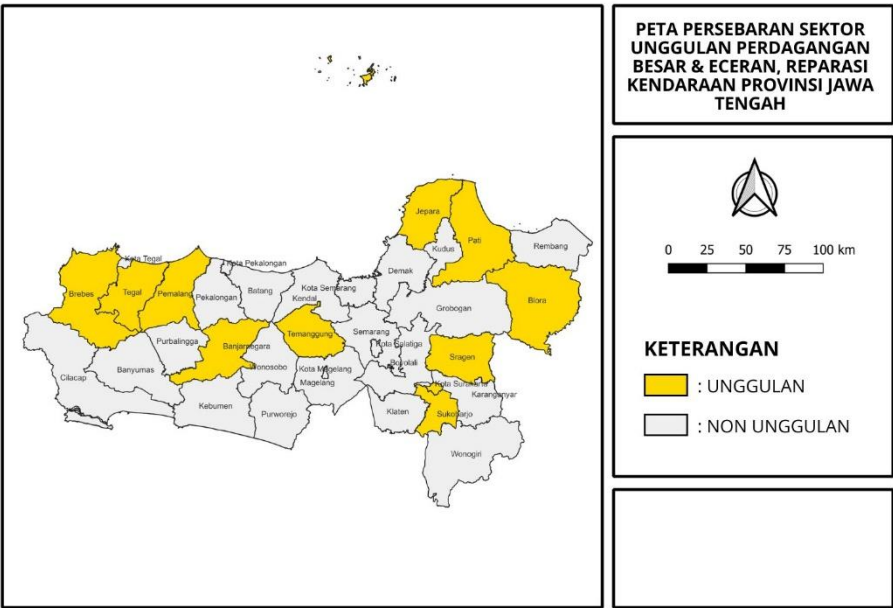


Gambar 5. 14 PDRB Sektor Perdagangan Besar di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode 2021–2025. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari 147.313,4 pada tahun 2021 menjadi 175.700,4 pada tahun 2025, mencerminkan semakin kuatnya aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi faktor pendukung bagi pengembangan investasi, terutama yang berkaitan dengan rantai pasok, distribusi, dan pemasaran produk.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu sektor dengan persebaran keunggulan yang paling luas di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banjarnegara, Sukoharjo, Sragen, Blora, Pati, Jepara, Temanggung, Pemalang, Tegal, dan Brebes, serta Kota Surakarta. Selain memiliki keunggulan komparatif, hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor ini juga tumbuh secara kompetitif di 24 kabupaten/kota, menjadikannya sebagai sektor dengan cakupan daya saing terluas di antara enam sektor prioritas yang dianalisis. Sebaran wilayah unggulan dan kompetitif tersebut disajikan pada peta berikut sebagai gambaran potensi pengembangan investasi sektor perdagangan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5. 15 Persebaran Sektor Perdagangan di Jawa Tengah
Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Persebaran sektor perdagangan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan didukung oleh jaringan pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Selain didukung oleh distribusi kegiatan perdagangan, kinerja sektor ini juga tercermin dari komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional. Oleh karena itu, identifikasi terhadap komoditas ekspor unggulan menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah serta potensi pengembangannya dalam mendukung peningkatan perdagangan internasional.

Tabel 5. 33 Sepuluh Komoditas Ekspor Unggulan Jawa Tengah Menurut Sektor dan Nilai Ekspor (FOB) Tahun 2025

No	Sektor	Komoditas Utama	Nilai Ekspor (FOB) 2025 (Juta US\$)
1	Tekstil dan Garmen	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)	1.899,52
2	Tekstil dan Garmen	Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	1.680,92
3	Alas Kaki	Alas kaki	1.615,79
4	Industri Kayu	Kayu dan barang dari kayu	1.080,26
5	Elektronika	Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya	849,72
6	Produk Kulit	Barang dari kulit samak	833,69
7	Furnitur	Perabotan, lampu, dan alat penerangan	771,81
8	Industri Kimia	Berbagai produk kimia	497,94
9	Mainan	Mainan, permainan, dan keperluan olahraga	283,39
10	Perikanan	Ikan, krustasea, dan moluska	258,15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 5.33, komoditas ekspor Jawa Tengah pada tahun 2025 didominasi oleh produk industri pengolahan, terutama tekstil dan garmen, alas kaki, produk kayu, mesin dan perlengkapan elektrik, serta furnitur. Dominasi komoditas tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekspor daerah melalui distribusi dan pemasaran produk ke pasar internasional. Oleh karena itu, penguatan sektor perdagangan besar perlu diarahkan pada peningkatan akses pasar ekspor, pengembangan jejaring perdagangan internasional, serta fasilitasi kemitraan dengan investor dan pelaku usaha global untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan Jawa Tengah.

Tabel 5. 34 Komoditas Impor dan Negara Asal Impor Utama Negara-Negara Timur Tengah

No	Negara	Komoditas Impor Utama	Negara Asal Impor Utama
1	Arab Saudi	Mesin dan peralatan mekanik, peralatan listrik dan elektronik, kendaraan bermotor, minyak bumi olahan, telepon seluler, emas, obat-obatan, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, produk plastik dan karet, kosmetik, serta produk kimia	China (27,57%), Amerika Serikat (8,16%), Uni Emirat Arab (5,80%)
2	UEA	Batu mulia, logam mulia, dan koin US\$139,44 miliar (terbesar); peralatan listrik dan elektronik US\$60,98 miliar; mesin dan reaktor nuklir/boiler US\$58,76 miliar; kendaraan bermotor US\$37,54 miliar; bahan bakar mineral dan minyak US\$24,09 miliar; besi dan baja US\$6,63 miliar; plastik US\$6,61 miliar; produk farmasi US\$6,42 miliar; barang dari besi/baja US\$6,09 miliar; alat optik, foto, dan medis US\$5,72 miliar; minyak esensial, parfum, dan kosmetik US\$5,07 miliar; tembaga US\$4,88 miliar; pesawat terbang/pesawat luar angkasa US\$4,76 miliar; furnitur US\$3,29 miliar; pakaian rajut US\$3,23 miliar; alas kaki US\$3,16 miliar; jam tangan US\$2,67 miliar; serta produk kimia organik US\$2,62 miliar (total impor UEA 2024: US\$444,65 miliar)	China, India, Amerika Serikat, Jepang, Jerman
3	Irak	Minyak bumi olahan, kendaraan bermotor, mesin dan peralatan transportasi, peralatan penyiaran dan telekomunikasi, emas, perhiasan, barang manufaktur logam, bahan kimia, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, produk kayu, makanan olahan, sabun, dan deterjen	Uni Emirat Arab (32,2%), China (20,4%), Turki (18,3%), India (5,0%), Amerika Serikat (2,0%)
4	Yordania	Bahan bakar mineral dan minyak, batu mulia dan logam mulia, mesin industri, kendaraan bermotor, peralatan listrik dan elektronik, produk pangan dan pertanian, tekstil dan garmen, produk karet, furnitur kayu, serta barang manufaktur lainnya	China (±US\$5,16 miliar), Arab Saudi (±US\$4,10 miliar), Amerika Serikat
5	Yaman	Minyak bumi olahan, gandum, besi dan baja, kendaraan bermotor, obat-obatan, produk susu, kain rajut sintesis, daging unggas, minyak sawit, minyak nabati, serta komoditas pangan lainnya	China (47,74%), Arab Saudi, Turki

Sumber : UN Comtrade (2023–2024), WITS World Bank, ITC Trade Map, Observatory of Economic Complexity (OEC), Trading Economics, dan berbagai sumber lainnya, 2026 (diolah).

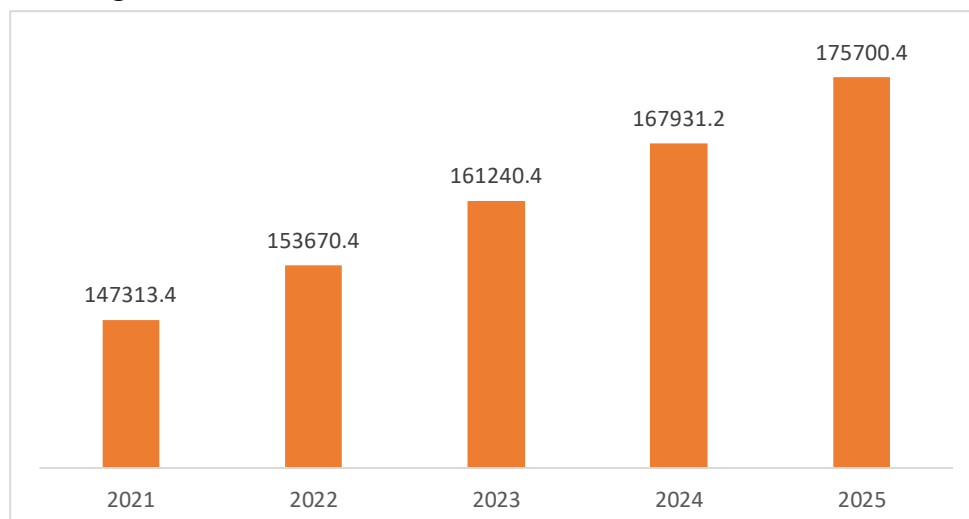
Berdasarkan Tabel 5.34, kebutuhan impor negara-negara Timur Tengah didominasi oleh komoditas industri pengolahan, seperti mesin dan peralatan mekanik, peralatan listrik dan

elektronik, kendaraan bermotor, tekstil dan pakaian jadi, produk kimia, serta berbagai komoditas pangan. Selain itu, sebagian besar kebutuhan impor negara-negara tersebut masih dipasok oleh beberapa negara utama, terutama China, Amerika Serikat, India, Turki, dan Uni Emirat Arab. Kondisi tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik permintaan pasar di kawasan Timur Tengah serta struktur negara pemasok yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi peluang pengembangan perdagangan dan investasi.

Secara keseluruhan, sektor perdagangan besar memiliki peran strategis dalam mendukung hubungan ekonomi antara Jawa Tengah dan negara-negara Timur Tengah, baik melalui aktivitas ekspor maupun pemenuhan kebutuhan impor. Karakteristik komoditas yang diperdagangkan menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara struktur industri, permintaan pasar, dan jaringan perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap profil perdagangan tersebut menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan melalui kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara Timur Tengah.

5.6.6 Sektor Konstruksi

Sektor Konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan dan kompetitif di Provinsi Jawa Tengah, yang ditandai dengan pertumbuhan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional serta memiliki daya saing yang positif. Perkembangan sektor ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur, kawasan industri, kawasan permukiman, serta berbagai fasilitas pendukung investasi di daerah..



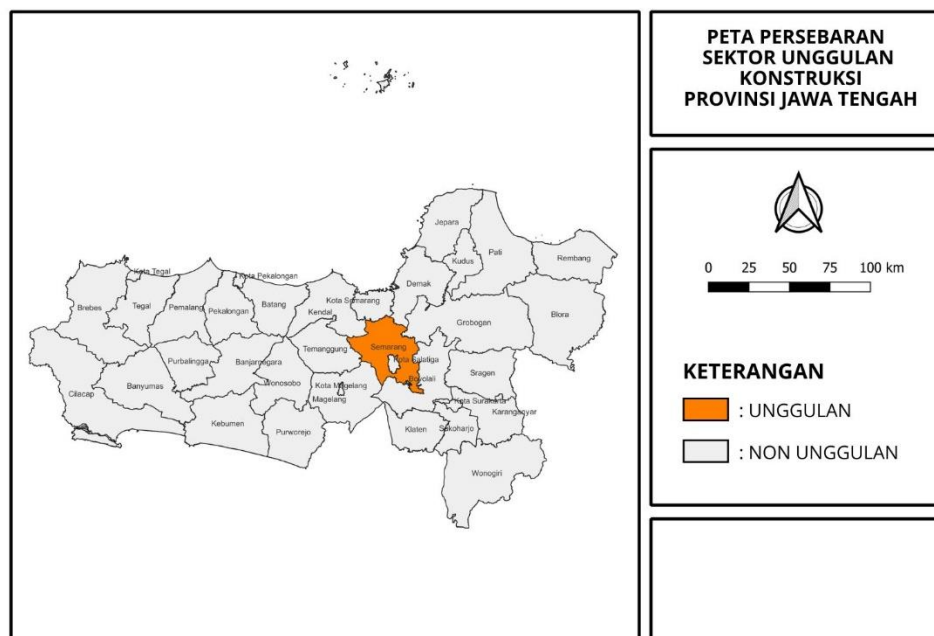
Gambar 5. 16 PDRB ADHK Sektor Konstruksi di Jawa Tengah (Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Nilai PDRB sektor konstruksi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025, dari sebesar 106.701,2 pada tahun

2021 menjadi 132.673,9 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan terus berkembangnya aktivitas pembangunan infrastruktur, kawasan industri, maupun properti yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tren positif ini juga menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki prospek yang baik untuk mendukung masuknya investasi, termasuk investasi dari negara-negara Timur Tengah yang memiliki minat pada pengembangan infrastruktur dan kawasan strategis.

Pada tingkat kabupaten/kota, sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Semarang, dan kompetitif berdasarkan Shift Share di 25 kabupaten/kota, didukung oleh keberadaan KEK Industropolis Batang, KIK Kendal, kawasan industri Semarang, serta pengembangan kawasan perkotaan Solo Raya.



Gambar 5. 17 Persebaran Sektor Konstruksi di Jawa Tengah

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Selain didukung oleh persebaran potensi konstruksi di berbagai wilayah, daya tarik sektor konstruksi dan infrastruktur juga tercermin dari keterlibatan sejumlah perusahaan dan lembaga asal Timur Tengah yang memiliki pengalaman dalam pengembangan proyek berskala besar di berbagai negara. Karakteristik investor tersebut menunjukkan adanya kecenderungan terhadap investasi pada pembangunan kawasan terpadu, infrastruktur perkotaan, transportasi, utilitas, maupun proyek strategis nasional. Oleh karena itu, identifikasi perusahaan dan lembaga yang memiliki rekam jejak pada sektor konstruksi menjadi penting sebagai referensi dalam penyusunan strategi promosi investasi serta pemetaan calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah. Daftar perusahaan dan

lembaga Timur Tengah yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur disajikan pada Tabel 5.35.

Tabel 5. 35 Daftar Perusahaan dan Lembaga Timur Tengah di Bidang Konstruksi dan Infrastruktur

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Negara Asal	Sektor/Fokus Konstruksi & Infrastruktur	Lokasi Negara Investasi
1	DP World	UEA	Infrastruktur pelabuhan, logistik, kawasan industri, dan rantai pasok	Beroperasi di lebih dari 75 negara; di Indonesia bermitra dengan Maspiion Group dalam pengembangan terminal peti kemas internasional dan kawasan logistik di Gresik.
2	Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)	UEA	Investasi infrastruktur transportasi, jalan tol, logistik, dan aset strategis	Portofolio investasi global; di Indonesia berpartisipasi melalui Indonesia Investment Authority (INA) dalam pendanaan berbagai aset infrastruktur, termasuk ruas jalan tol.
3	Mubadala Investment Company	UEA	Investasi infrastruktur, transportasi, utilitas, dan kawasan industri	Portofolio global di berbagai sektor; di Indonesia melalui Mubadala Energy menjalankan investasi pada sektor energi dan berpartisipasi dalam berbagai kerja sama investasi strategis.
4	Saudi Fund for Development (SFD)	Arab Saudi	Infrastruktur pendidikan, kesehatan, utilitas publik, dan jalan	Mendanai proyek infrastruktur di berbagai negara berkembang; di Indonesia mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, termasuk Rumah Sakit UNS di Jawa Tengah.
5	Public Investment Fund (PIF)	Arab Saudi	Dana investasi infrastruktur, transportasi, kawasan perkotaan, dan properti	Portofolio global; investor utama proyek NEOM serta berbagai proyek infrastruktur strategis di Arab Saudi dan kawasan internasional.
6	Emaar Properties	UEA	Properti, mixed-use development, kawasan wisata, dan real estate	Mengembangkan proyek properti di Uni Emirat Arab, Mesir, India, Turki, Arab Saudi, Pakistan, dan beberapa negara lainnya; pernah menunjukkan minat investasi pada sektor pariwisata dan properti di Indonesia.
7	EDGO Group	Yordania	Rekayasa konstruksi (engineering), infrastruktur energi, migas, dan air	Menjalankan proyek EPC dan infrastruktur energi di lebih dari 20 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
8	Raban Al-Safina Group	Irak	Infrastruktur kelistrikan, gardu induk, transmisi, dan sistem kontrol industri	Berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan dan proyek EPC di Irak serta berbagai proyek infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.

Sumber : DP World, INA, SFD, PIF, HSA Group, Edgo Group, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 5.36, negara-negara Timur Tengah memiliki sejumlah perusahaan dan lembaga investasi yang berpengalaman dalam pengembangan infrastruktur strategis, mulai

dari pelabuhan, kawasan industri, transportasi, utilitas publik, hingga properti berskala besar. Kehadiran perusahaan dan lembaga tersebut menunjukkan kapasitas pembiayaan, pengalaman teknis, serta jejaring internasional yang dapat menjadi referensi dalam menjajaki peluang kerja sama investasi di sektor konstruksi dan infrastruktur. Selain itu, rekam jejak investasi beberapa entitas di Indonesia mencerminkan adanya minat terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki prospek ekonomi dan nilai strategis.

Secara keseluruhan, sektor konstruksi dan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan melalui kerja sama investasi dengan negara-negara Timur Tengah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, yang didukung oleh pengembangan kawasan industri, sistem logistik, konektivitas transportasi, serta infrastruktur pendukung pelayanan publik, sejalan dengan pengalaman dan kapasitas perusahaan maupun lembaga investasi asal Timur Tengah dalam membiayai dan mengembangkan proyek-proyek strategis. Dengan dukungan kebijakan, kepastian investasi, serta penyusunan proyek yang layak secara teknis dan finansial, sektor ini berpotensi menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah.

5.7 Analisis SWOT Potensi Investasi dari Negara-Negara Timur Tengah

Sub bab ini menyajikan sintesis analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) atas potensi investasi negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Rumusan SWOT disusun berdasarkan hasil analisis tren dan kinerja investasi, profil dan karakteristik investor, sektor unggulan, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi, kesesuaian investor dengan potensi daerah, serta enam sektor unggulan sesuai minat investor Timur Tengah yang telah dipaparkan pada sub bab 5.1 hingga 5.6. Analisis ini bertujuan memetakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebagai dasar perumusan strategi peningkatan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah pada sub bab berikutnya

5.7.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan faktor internal Provinsi Jawa Tengah yang menjadi modal utama dalam menarik dan mengakomodasi investasi dari negara-negara Timur Tengah. Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan, kesiapan infrastruktur dan proyek investasi, PESTLE, temuan wawancara dan FGD, serta analisis kesesuaian pada sub bab sebelumnya, teridentifikasi delapan kekuatan utama yang dimiliki Jawa Tengah sebagai berikut.

1. Ketersediaan sektor unggulan yang sejalan dengan preferensi investasi Timur Tengah, terutama Industri Pengolahan (SLQ 1,53), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Energi Baru Terbarukan (EBT), Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi (SLQ 1,06).
2. Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama bagi investor Timur Tengah, sebagaimana dikonfirmasi dalam hasil wawancara dan FGD 1 bersama APINDO, di mana kualitas bahan baku menjadi faktor determinan investasi misalnya kualitas batok kelapa asal Sulawesi yang menjadi alasan utama investasi PT ICCS Global Industries.
3. Ketersediaan proyek investasi yang siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO) melalui Central Java Investment Platform (CJIP), terutama pada sektor energi terbarukan, agroindustri, perikanan, dan pengelolaan lingkungan, yang relevan dengan preferensi investasi Timur Tengah pada ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.
4. Kesiapan infrastruktur pendukung investasi yang relatif lengkap, meliputi Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Intan, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, jaringan Jalan Tol Trans Jawa, serta kawasan industri terintegrasi seperti KEK Kendal dan KEK Industri Batang.
5. Kedekatan nilai sosial dan keagamaan dengan investor Timur Tengah, didukung mayoritas penduduk muslim, ekosistem produk halal yang berkembang, serta jaringan tenaga kerja migran Indonesia yang berpengalaman bekerja di kawasan Timur Tengah.
6. Dukungan regulasi investasi yang semakin kondusif, baik di tingkat nasional melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS), maupun di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022.
7. Stabilitas politik domestik dan kondisi makroekonomi Indonesia yang relatif terjaga, didukung ketersediaan tenaga kerja produktif dalam jumlah besar serta pasar domestik yang luas.
8. Posisi geografis strategis Jawa Tengah di tengah Pulau Jawa, diapit oleh dua wilayah aglomerasi dengan akses pelabuhan besar (Tanjung Priok di barat dan Tanjung Perak di timur), sehingga memudahkan distribusi logistik nasional maupun rantai pasok bahan baku dari luar Jawa.

5.7.2 Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan merupakan faktor internal yang masih menjadi hambatan dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan daya tarik investasi dari kawasan Timur Tengah, sebagai berikut.

1. Posisi kompetitif Jawa Tengah dalam penyerapan investasi Timur Tengah masih rendah, yaitu peringkat ketujuh dari 15 provinsi tujuan investasi dengan pangsa hanya 1,54% (setara USD8.353 ribu) dari total realisasi investasi Timur Tengah di Indonesia periode 2021-2025, jauh di bawah Jawa Barat (39,06%), Jawa Timur (27,42%), dan DKI Jakarta (15,89%).
2. Skala investasi Timur Tengah yang terealisasi di Jawa Tengah masih relatif kecil, dengan rata-rata nilai investasi sekitar USD278 ribu per transaksi berdasarkan data BKPM/LKPM Tahun 2025, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata di Jawa Timur (USD8,58 juta), Jawa Barat (USD4,58 juta), maupun DKI Jakarta (USD1,27 juta) per transaksi.
3. Statistik realisasi investasi resmi berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan besarnya keterlibatan modal Timur Tengah, karena sebagian investasi dilakukan melalui special purpose vehicle (SPV) atau entitas di negara ketiga — sebagaimana teridentifikasi pada kepemilikan saham investor Qatar di Indosat Ooredoo Hutchison yang tercatat sebagai investasi asal Singapura.
4. Kompleksitas dan sentralisasi birokrasi perizinan yang masih dirasakan investor, dengan proses pengurusan izin lintas instansi yang pernah memakan waktu tiga hingga empat bulan jauh lebih lama dibandingkan Vietnam (dua hari) maupun China yang telah mendelegasikan kewenangan perizinan hingga tingkat kota.
5. Ketidakkonsistenan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan belum sinkronnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penyediaan lahan investasi.
6. Sistem perpajakan dan insentif fiskal, khususnya tax holiday, dinilai belum transparan dan kurang dipahami secara jelas oleh calon investor sehingga menimbulkan keraguan dalam perencanaan investasi jangka panjang. Selain aspek transparansi, tarif PPh Badan umum sebesar 22% dan PPN sebesar 11% juga berada di atas tarif yang berlaku di sejumlah negara asal investor Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab (PPh Badan

9%, dengan skema 0% pada qualifying free zone), sehingga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap beban investasi total di Indonesia, meskipun temuan lapangan menunjukkan faktor ini belum menjadi penghambat utama dibandingkan faktor ketersediaan sumber daya alam dan posisi geografis.

7. Keterbatasan kapasitas promosi dan layanan investasi yang adaptif terhadap karakteristik investor Timur Tengah, termasuk minimnya materi promosi berbahasa Arab dan sumber daya manusia yang memahami pola komunikasi bisnis kawasan tersebut.
8. Keterbatasan kapasitas pendampingan investasi bagi pelaku usaha lokal serta belum optimalnya pemenuhan standar produk internasional, sehingga menghambat terjalinnya kemitraan strategis dengan investor Timur Tengah.

5.7.3 Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan Jawa Tengah untuk meningkatkan penyerapan investasi dari negara-negara Timur Tengah, sebagai berikut.

1. Aktifnya peran Sovereign Wealth Fund (SWF) Timur Tengah, seperti ADIA, PIF Arab Saudi, QIA, dan KIA, dalam mencari peluang diversifikasi investasi global, yang berpotensi membawa investasi berskala besar dan berjangka panjang ke Jawa Tengah.
2. Program diversifikasi ekonomi negara-negara Teluk, seperti Saudi Vision 2030 dan UEA Centennial 2071, yang mendorong perluasan investasi ke sektor nonmigas, termasuk manufaktur, agroindustri, pariwisata, teknologi digital, energi terbarukan, dan ketahanan pangan yang sejalan dengan sektor unggulan Jawa Tengah.
3. Pertumbuhan industri halal global yang membuka peluang penguatan kerja sama ekonomi, ekspor, dan investasi pada sektor makanan-minuman, tekstil, fesyen muslim, serta kosmetik halal yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Jawa Tengah.
4. Penguatan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi Indonesia–Timur Tengah, seperti Indonesia-Saudi Arabia Joint Commission dan Indonesia–UEA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUEA-CEPA), yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor Timur Tengah untuk berekspansi ke Jawa Tengah.
5. Tren transformasi digital negara-negara Teluk yang membuka peluang investasi pada sektor pusat data, kecerdasan buatan, fintech, dan kota pintar, serta transfer teknologi dan inovasi untuk modernisasi industri di Jawa Tengah.

6. Komitmen ESG dan target net zero negara-negara Timur Tengah yang sejalan dengan arah pengembangan energi baru terbarukan dan ekonomi hijau dalam Kajian RUPM Jawa Tengah 2025-2045, membuka peluang investasi pada energi surya, biomassa, dan panas bumi.
7. Dinamika geopolitik Timur Tengah yang mendorong sebagian investor mencari diversifikasi tujuan investasi yang lebih aman dan stabil, sehingga membuka peluang bagi Indonesia, termasuk Jawa Tengah, untuk menarik aliran investasi tersebut.

5.7.4 Ancaman (Threats)

Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat upaya peningkatan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah, sebagai berikut.

1. Ketidakstabilan geopolitik dan potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat menyebabkan investor menunda atau mengurangi ekspansi investasi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Dampak nyata dari risiko ini pernah dirasakan pada rantai pasok ekspor Jawa Tengah, ketika penutupan Selat Hormuz memaksa pengalihan jalur pengiriman melalui Arab Saudi kemudian Kuwait, sehingga menambah biaya dan waktu tempuh secara signifikan.
2. Fluktuasi harga minyak dunia yang dapat menurunkan kapasitas fiskal dan kemampuan investasi luar negeri negara-negara Timur Tengah yang masih bergantung pada pendapatan sektor migas.
3. Persaingan investasi yang semakin ketat dengan provinsi lain di Indonesia maupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga aktif menawarkan kemudahan dan insentif investasi kepada investor Timur Tengah.
4. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dapat memengaruhi kalkulasi biaya investasi dan tingkat pengembalian investasi (return on investment) bagi investor asing, meskipun bagi perusahaan berorientasi ekspor pelemahan Rupiah justru dapat memberikan tambahan margin dari selisih kurs sebagaimana dialami PT ICCS Global Industries, sehingga dampaknya bersifat dua arah tergantung orientasi pasar investor.
5. Risiko perubahan iklim, khususnya banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, yang dapat mengganggu operasional kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi.

6. Meningkatnya tuntutan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dari investor global yang dapat menjadi hambatan apabila kesiapan tata kelola, transparansi, dan pengelolaan lingkungan di daerah belum memenuhi standar yang diharapkan.

5.7.5 Rumusan Strategi SWOT (SO, ST, WO, WT)

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal pada sub bab 5.7.1 hingga 5.7.4, dirumuskan delapan strategi pengembangan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah yang memadukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah dianalisis sebelumnya. Rumusan strategi SWOT disajikan pada Tabel 5.36 berikut.

Tabel 5. 36 Rumusan Strategi SWOT Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah

Strategi	Rumusan Strategi
SO (Strengths–Opportunities)	Mengoptimalkan promosi enam sektor unggulan Jawa Tengah Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Pertanian/Kehutanan/Perikanan, Energi Baru Terbarukan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi kepada investor Timur Tengah dengan memanfaatkan proyek siap ditawarkan (IPRO) melalui CJIP, keberadaan KEK Kendal dan KEK Industri Batang, serta momentum diversifikasi investasi negara-negara Teluk.
SO (Strengths–Opportunities)	Mengembangkan kerja sama investasi berbasis ekonomi halal dan ketahanan pangan dengan memanfaatkan kedekatan nilai sosial-keagamaan serta meningkatnya kebutuhan diversifikasi investasi nonmigas negara-negara Timur Tengah.
ST (Strengths–Threats)	Memperkuat daya saing investasi Jawa Tengah melalui percepatan pengembangan infrastruktur, kawasan industri, dan proyek investasi strategis guna menghadapi persaingan dengan daerah maupun negara tujuan investasi lainnya.
ST (Strengths–Threats)	Mendorong pengembangan investasi hijau dan berkelanjutan untuk menjawab tuntutan standar ESG dan tren investasi global yang semakin mengutamakan aspek keberlanjutan.
WO (Weaknesses–Opportunities)	Meningkatkan kualitas layanan investasi melalui percepatan reformasi perizinan, memberikan insentif yang lebih menarik dan sesuai minat investor, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta penyediaan lahan siap investasi untuk menangkap tingginya minat investor Timur Tengah.
WO (Weaknesses–Opportunities)	Memperkuat promosi investasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik investor Timur Tengah, melalui penyediaan materi promosi berbahasa Arab, penguatan kapasitas SDM promosi, dan perluasan jejaring investasi internasional.
WT (Weaknesses–Threats)	Meningkatkan pangsa dan skala investasi Timur Tengah di Jawa Tengah melalui pendampingan investasi bagi pelaku usaha lokal, fasilitasi pemenuhan standar produk internasional, serta penguatan kemitraan strategis untuk menangkap minat investor Timur Tengah pada kepastian pasokan dan kualitas bahan baku.

Strategi	Rumusan Strategi
WT <i>(Weaknesses–Threats)</i>	Meningkatkan kepastian regulasi, konsistensi tata ruang, dan transparansi layanan investasi guna memperkuat kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Sumber : Hasil olah Data, 2026

Rumusan strategi SWOT tersebut disusun dengan mempertimbangkan bahwa posisi kompetitif Jawa Tengah dalam penyerapan investasi Timur Tengah saat ini masih relatif rendah peringkat ketujuh dari 15 provinsi tujuan investasi dengan pangsa 1,54% pada periode 2021–2025 sehingga diperlukan langkah strategis yang lebih terarah untuk mempercepat peningkatan daya saing daerah. Secara umum, delapan rumusan strategi tersebut menunjukkan bahwa arah utama peningkatan investasi Timur Tengah di Jawa Tengah bertumpu pada empat hal: (1) penguatan promosi enam sektor unggulan yang selaras dengan preferensi investor Timur Tengah dengan memanfaatkan proyek siap ditawarkan (IPRO) melalui CJIP; (2) percepatan reformasi layanan investasi, mencakup penyederhanaan perizinan, penyelesaian RDTR, dan penyediaan lahan siap investasi; (3) penguatan kapasitas pelaku usaha lokal melalui pendampingan investasi dan pemenuhan standar produk internasional untuk mendorong investasi berskala lebih besar; serta (4) penguatan ketahanan dan keberlanjutan investasi terhadap risiko geopolitik, ekonomi, dan perubahan iklim. Keempat arah strategi ini menjadi dasar dalam perumusan analisis risiko investasi serta rekomendasi strategi peningkatan investasi Timur Tengah yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

5.8 Analisis Risiko Investasi

Analisis risiko investasi dalam kajian ini disusun dari sudut pandang calon investor Timur Tengah yaitu dengan memosisikan diri sebagai investor yang hendak menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang berpotensi diterima atau dihadapi investor tersebut selama proses maupun setelah investasi direalisasikan. Setiap risiko yang diuraikan pada subbab 5.8.1 sampai dengan 5.8.5 dirumuskan sebagai konsekuensi konkret bagi investor (misalnya risiko kendala kesesuaian lokasi dengan RTRW/RDTR, risiko lamanya proses perizinan, atau risiko ketidakpastian kebijakan insentif), bukan sekadar deskripsi kondisi umum daerah. Penyusunan analisis ini tetap mengacu pada hasil analisis SWOT, kajian PESTLE, analisis kesesuaian karakteristik dan preferensi investor, tren perkembangan investasi, serta temuan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang telah dilakukan dalam kajian ini. Selain itu, analisis risiko investasi disusun sebagai bagian dari pemenuhan ruang lingkup kajian sebagaimana tercantum

dalam KAK angka X.3.h terkait identifikasi risiko investasi dan penyusunan rekomendasi mitigasi.

Untuk memperoleh gambaran tingkat risiko secara sistematis, setiap risiko yang teridentifikasi dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak terhadap keberlanjutan investasi, kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat risiko, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penilaian tersebut merupakan sintesis kualitatif dari hasil analisis sebelumnya, termasuk analisis SWOT dan PESTLE, tren investasi, serta hasil diskusi dan wawancara, sehingga tidak berdiri sebagai penilaian tunggal. Risiko dikategorikan **Tinggi** apabila secara konsisten teridentifikasi sebagai faktor kritis yang berpengaruh langsung terhadap keputusan investor, sedangkan risiko **Sedang** dan **Rendah** merupakan faktor yang memiliki dampak lebih terbatas atau relatif dapat dikelola melalui kebijakan dan intervensi pemerintah daerah. Pendekatan ini mengacu pada prinsip pengelolaan risiko dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, risiko investasi dikelompokkan ke dalam enam aspek utama, yaitu risiko ekonomi dan nilai tukar, risiko politik dan geopolitik, risiko regulasi dan kepastian hukum, risiko lingkungan dan infrastruktur, risiko sosial budaya, serta risiko rantai pasok dan logistik.

5.8.1 Risiko Ekonomi dan Nilai Tukar

Risiko ekonomi dan nilai tukar merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh investor Timur Tengah dalam merealisasikan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Risiko tersebut meliputi potensi menurunnya kapasitas pendanaan investasi akibat penurunan harga minyak dunia, mengingat sebagian besar sumber pembiayaan investor Timur Tengah masih bergantung pada penerimaan sektor migas di negara asal. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang transaksi investor berpotensi meningkatkan kebutuhan modal dan biaya operasional sekaligus menurunkan proyeksi tingkat pengembalian investasi. Dari sisi daya saing wilayah, Jawa Tengah juga menghadapi risiko persaingan dengan provinsi lain di Indonesia maupun negara-negara ASEAN yang menawarkan insentif investasi dan dukungan infrastruktur yang lebih kompetitif. Risiko lainnya adalah peningkatan biaya pembiayaan (*cost of capital*) akibat kenaikan inflasi atau suku bunga acuan yang dapat memengaruhi kelayakan investasi.

Berdasarkan tingkat dampaknya, risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga minyak dunia, nilai tukar, dan persaingan antarwilayah dikategorikan sebagai risiko tinggi karena

berpengaruh langsung terhadap kapasitas pendanaan dan daya saing investasi. Sementara itu, risiko yang berasal dari perubahan inflasi dan suku bunga dikategorikan sebagai risiko sedang karena dampaknya relatif lebih mudah diproyeksikan dan dapat dikelola melalui strategi mitigasi keuangan yang tepat.

5.8.2 Risiko Politik dan Geopolitik

Risiko politik dan geopolitik merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan serta keberlanjutan investasi investor Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Risiko tersebut mencakup potensi tertundanya, berkurangnya, atau dialihkannya rencana investasi apabila terjadi eskalasi konflik maupun ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah yang mendorong negara asal investor untuk memprioritaskan stabilitas ekonomi domestik. Selain itu, perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di negara asal investor juga dapat memengaruhi strategi ekspansi dan alokasi investasi yang telah direncanakan. Dari sisi daerah tujuan investasi, dinamika politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berpotensi memengaruhi konsistensi implementasi kebijakan dan keberlanjutan proyek investasi yang telah disepakati.

Berdasarkan tingkat dampaknya, risiko yang berkaitan dengan eskalasi konflik dan ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah dikategorikan sebagai risiko tinggi karena berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dan kapasitas investasi. Sementara itu, risiko yang berasal dari perubahan prioritas pembangunan di negara asal investor maupun dinamika kebijakan di tingkat daerah dikategorikan sebagai risiko sedang karena dampaknya relatif masih dapat diminimalkan melalui penguatan kerja sama kelembagaan, komunikasi yang berkelanjutan, serta konsistensi kebijakan investasi.

5.8.3 Risiko Regulasi dan Kepastian Hukum

Risiko regulasi dan kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung kelancaran realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah. Risiko tersebut meliputi potensi kurang sinkronnya peraturan daerah dengan pusat. Seperti contoh dalam peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang dapat menghambat proses perolehan lahan dan penetapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, proses perizinan berusaha berpotensi memerlukan waktu lebih lama apabila koordinasi antarinstansi dalam implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) belum berjalan secara optimal. Risiko lainnya berkaitan dengan kepastian pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal, seperti *tax holiday* dan

tax allowance, terutama apabila mekanisme, persyaratan, dan implementasinya belum disampaikan secara konsisten dan transparan kepada calon investor.

Berdasarkan tingkat dampaknya, risiko yang berkaitan dengan kesesuaian tata ruang dan proses perizinan dikategorikan sebagai risiko tinggi karena berpotensi menghambat kepastian lokasi serta memperlambat realisasi investasi. Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan kepastian pemberian insentif dikategorikan sebagai risiko sedang karena dampaknya masih dapat diminimalkan melalui penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan informasi kebijakan yang lebih transparan dan konsisten.

5.8.4 Risiko Lingkungan dan Infrastruktur

Risiko lingkungan dan infrastruktur merupakan faktor yang dapat memengaruhi kelayakan serta keberlanjutan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Risiko tersebut meliputi potensi meningkatnya kebutuhan investasi untuk penyediaan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, pasokan listrik, dan air bersih, terutama apabila lokasi investasi berada di luar kawasan industri yang telah memiliki infrastruktur memadai. Selain itu, lokasi investasi di kawasan pesisir utara memiliki potensi menghadapi gangguan operasional akibat banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang dapat meningkatkan kebutuhan biaya mitigasi. Risiko lainnya berkaitan dengan pemenuhan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang semakin menjadi perhatian investor dan mitra bisnis internasional. Apabila aspek tersebut belum diintegrasikan sejak tahap perencanaan, investor berpotensi menghadapi tambahan biaya penyesuaian pada tahap implementasi maupun operasional.

Berdasarkan tingkat dampaknya, risiko yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dikategorikan sebagai risiko tinggi karena berpengaruh langsung terhadap pemilihan lokasi dan kelayakan investasi. Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di wilayah tertentu serta pemenuhan standar ESG dikategorikan sebagai risiko sedang karena dampaknya bersifat lebih spesifik sesuai karakteristik lokasi investasi dan kebutuhan masing-masing investor.

5.8.5 Risiko Sosial Budaya

Risiko sosial budaya merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun kerja sama investasi antara investor Timur Tengah dan para pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah. Risiko tersebut meliputi potensi perbedaan pola komunikasi dan praktik bisnis yang dapat memengaruhi kelancaran proses negosiasi maupun pengambilan keputusan kerja sama. Selain itu, keterbatasan penyediaan informasi investasi dan layanan pendampingan dalam

bahasa Arab berpotensi mengurangi kemudahan akses informasi bagi calon investor. Risiko lainnya berkaitan dengan perbedaan ekspektasi mengenai standar ketenagakerjaan dan tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi kelancaran operasional apabila tidak dikomunikasikan serta disepakati sejak tahap awal investasi.

Berdasarkan tingkat dampaknya, seluruh risiko sosial budaya tersebut dikategorikan sebagai risiko rendah karena pada umumnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan investasi dan relatif mudah dikelola melalui penguatan layanan pendampingan investor, penyediaan materi promosi yang lebih adaptif, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan kesamaan nilai sosial dan budaya sebagai dasar penguatan hubungan kerja sama.

5.8.6 Risiko Rantai Pasok dan Logistik

Risiko rantai pasok dan logistik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran operasional investasi, khususnya bagi investor Timur Tengah yang bergerak pada sektor perdagangan, industri berorientasi ekspor, maupun sektor yang bergantung pada bahan baku impor. Risiko tersebut meliputi potensi terganggunya distribusi barang dan meningkatnya biaya logistik akibat eskalasi konflik geopolitik yang memengaruhi jalur pelayaran internasional. Kondisi ini pernah terjadi ketika gangguan pada jalur pelayaran di kawasan Timur Tengah mengharuskan pengalihan rute pengiriman ekspor dari Jawa Tengah melalui pelabuhan di Arab Saudi dan Kuwait, sehingga meningkatkan biaya logistik dan waktu pengiriman. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap Pelabuhan Tanjung Emas sebagai simpul utama distribusi ekspor-impor di Jawa Tengah berpotensi menimbulkan hambatan apabila terjadi lonjakan volume, keterbatasan kapasitas pelayanan, maupun gangguan operasional pelabuhan. Risiko lainnya adalah potensi keterlambatan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur dan industri pengolahan yang memiliki ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Berdasarkan tingkat dampaknya, risiko yang berkaitan dengan gangguan jalur pelayaran internasional dikategorikan sebagai risiko tinggi karena telah terbukti memberikan dampak langsung terhadap biaya dan waktu distribusi. Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan ketergantungan pada infrastruktur pelabuhan serta potensi gangguan pasokan bahan baku dikategorikan sebagai risiko sedang karena dampaknya masih dapat diminimalkan melalui diversifikasi jalur distribusi, optimalisasi pemanfaatan pelabuhan alternatif, serta penguatan koordinasi dan manajemen rantai pasok.

5.8.7 Rekapitulasi Risiko Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko pada Subbab 5.8.1 sampai dengan 5.8.6, teridentifikasi sebanyak **19 risiko spesifik** yang dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, yaitu risiko ekonomi dan nilai tukar, risiko politik dan geopolitik, risiko regulasi dan kepastian hukum, risiko lingkungan dan infrastruktur, risiko sosial budaya, serta risiko rantai pasok dan logistik. Setiap risiko dinilai secara kualitatif dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap realisasi maupun keberlanjutan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian tersebut menghasilkan klasifikasi tingkat risiko yang terdiri atas risiko tinggi, sedang, dan rendah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan serta penyusunan strategi mitigasi risiko investasi. Rekapitulasi hasil identifikasi dan penilaian risiko investasi disajikan pada Tabel 5.37.

Tabel 5. 37 Rekapitulasi Risiko Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah

No	Kategori	Risiko Spesifik	Kemungkinan Terjadi	Tingkat Risiko	Justifikasi
1	Ekonomi & Nilai Tukar	Penurunan harga minyak dunia yang mengurangi kapasitas pendanaan investor Timur Tengah	Mungkin	Tinggi	Sebagian besar kapasitas investasi negara-negara Timur Tengah masih dipengaruhi oleh penerimaan sektor migas sehingga penurunan harga minyak dapat memengaruhi kemampuan investasi.
2	Ekonomi & Nilai Tukar	Pelemahan nilai tukar Rupiah yang meningkatkan biaya investasi dan menurunkan tingkat pengembalian investasi	Sangat Mungkin	Tinggi	Fluktuasi nilai tukar merupakan risiko yang umum terjadi dan berdampak langsung terhadap biaya investasi serta proyeksi keuntungan.
3	Ekonomi & Nilai Tukar	Persaingan dengan provinsi lain di Indonesia maupun negara ASEAN dalam menarik investasi	Mungkin	Tinggi	Persaingan antarwilayah dalam pemberian insentif, kemudahan berusaha, dan kualitas infrastruktur terus meningkat.
4	Ekonomi & Nilai Tukar	Kenaikan inflasi dan suku bunga yang meningkatkan biaya pembiayaan investasi	Mungkin	Sedang	Perubahan kondisi makroekonomi dapat meningkatkan biaya modal, namun masih dapat diproyeksikan dan dimitigasi.
5	Politik & Geopolitik	Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi keputusan investasi	Mungkin	Tinggi	Konflik geopolitik dapat mengurangi kapasitas investasi dan menggeser prioritas investasi negara asal.
6	Politik & Geopolitik	Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan di negara asal investor	Cukup Mungkin	Sedang	Perubahan strategi pembangunan dapat memengaruhi arah ekspansi investasi luar negeri.
7	Politik & Geopolitik	Dinamika kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	Mungkin	Sedang	Perubahan kebijakan daerah dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan investasi namun relatif dapat dikelola.
8	Regulasi & Kepastian Hukum	Ketidaksinkronan RTRW/RDTR dengan kebutuhan investasi	Mungkin	Tinggi	Berpotensi menghambat kepastian lokasi investasi dan proses perolehan lahan.
9	Regulasi & Kepastian Hukum	Keterlambatan proses perizinan akibat koordinasi OSS-RBA yang belum optimal	Cukup Mungkin	Tinggi	Berpengaruh langsung terhadap percepatan realisasi investasi.
10	Regulasi & Kepastian Hukum	Ketidakpastian pemberian insentif fiskal dan nonfiskal	Mungkin	Sedang	Dapat diminimalkan melalui regulasi teknis yang jelas dan transparansi informasi.
11	Lingkungan & Infrastruktur	Keterbatasan infrastruktur pendukung di luar kawasan industri	Cukup Mungkin	Tinggi	Berpengaruh langsung terhadap biaya investasi dan pemilihan lokasi usaha.
12	Lingkungan & Infrastruktur	Risiko banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir	Mungkin	Sedang	Dampaknya bersifat spesifik pada lokasi tertentu dan dapat diminimalkan melalui mitigasi teknis.
13	Lingkungan & Infrastruktur	Tambahan biaya pemenuhan standar ESG	Cukup Mungkin	Sedang	Tuntutan ESG semakin meningkat, namun dapat dipersiapkan sejak tahap perencanaan investasi.

No	Kategori	Risiko Spesifik	Kemungkinan Terjadi	Tingkat Risiko	Justifikasi
14	Sosial Budaya	Perbedaan pola komunikasi dan praktik bisnis	Mungkin	Rendah	Dapat diatasi melalui pendampingan dan komunikasi yang efektif.
15	Sosial Budaya	Keterbatasan materi promosi dan layanan investasi berbahasa Arab	Cukup Mungkin	Rendah	Berpengaruh terhadap kenyamanan investor, namun mudah diperbaiki melalui peningkatan layanan.
16	Sosial Budaya	Perbedaan ekspektasi mengenai ketenagakerjaan dan tata kelola perusahaan	Mungkin	Rendah	Dapat diminimalkan melalui penyamaan persepsi sejak awal kerja sama.
17	Rantai Pasok & Logistik	Gangguan jalur pelayaran internasional akibat konflik geopolitik	Mungkin	Tinggi	Pernah terjadi dan terbukti meningkatkan biaya logistik serta memperpanjang waktu distribusi.
18	Rantai Pasok & Logistik	Ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Emas sebagai simpul utama distribusi	Mungkin	Sedang	Berpotensi menimbulkan bottleneck apabila terjadi lonjakan volume atau gangguan operasional.
19	Rantai Pasok & Logistik	Keterlambatan pasokan bahan baku akibat disrupsi rantai pasok global	Mungkin	Sedang	Bergantung pada kondisi perdagangan internasional dan dapat dikurangi melalui diversifikasi pemasok.

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Secara keseluruhan, hasil rekapitulasi analisis risiko investasi Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi berbagai risiko yang dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, yaitu risiko ekonomi dan nilai tukar, politik dan geopolitik, regulasi dan kepastian hukum, lingkungan dan infrastruktur, sosial budaya, serta rantai pasok dan logistik. Berdasarkan hasil penilaian, risiko yang termasuk kategori tinggi terutama berasal dari aspek ekonomi dan nilai tukar, politik dan geopolitik, regulasi dan kepastian hukum, lingkungan dan infrastruktur, serta rantai pasok dan logistik karena berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kapasitas investasi, kepastian berusaha, kelancaran operasional, dan daya saing Jawa Tengah sebagai tujuan investasi. Sementara itu, risiko dengan tingkat sedang dan rendah pada umumnya masih dapat diminimalkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan investasi, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan investor. Hasil pemetaan risiko ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi mitigasi dan perumusan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan daya tarik investasi dari negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah.

5.8.8 Analisis Mitigasi Risiko Investasi

Analisis mitigasi risiko dalam kajian ini disusun dengan mengacu pada kerangka manajemen risiko **ISO 31000:2018**, yang mengelompokkan strategi penanganan risiko ke dalam empat pendekatan, yaitu penghindaran (*avoidance*), pengurangan (*reduction*), pengalihan (*transfer*), dan penerimaan risiko secara terkendali (*retention*) (Badan Standardisasi Nasional, 2018). Penyusunan strategi mitigasi tersebut dipadukan dengan pendekatan *risk severity matrix* yang menilai tingkat risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan besarnya dampak (*impact*), sebagaimana digunakan pada Tabel 5.37. Selain itu, penentuan strategi mitigasi juga mempertimbangkan paradigma eklektik (*OLI Paradigm*) sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1.1, dengan menempatkan mitigasi risiko sebagai upaya memperkuat keunggulan lokasi (*location advantages*) Provinsi Jawa Tengah sehingga tingkat risiko yang dihadapi investor tetap berada dalam batas yang sebanding dengan potensi keuntungan (*risk-return trade off*), sekaligus meningkatkan daya tarik investasi bagi investor asal Timur Tengah. Berdasarkan tingkat risiko yang telah diidentifikasi pada Tabel 5.37, strategi mitigasi dirumuskan per kategori sebagai berikut.

1. Mitigasi Risiko Ekonomi dan Nilai Tukar

Risiko pada aspek ekonomi didominasi oleh kategori **Tinggi**, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga minyak dunia, volatilitas nilai tukar Rupiah, serta persaingan daya saing investasi antarwilayah. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang direkomendasikan diarahkan pada pendekatan *transfer* melalui penerapan skema lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko nilai tukar serta pendekatan *reduction* melalui penguatan daya saing daerah. Implementasi strategi tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan informasi dan proyeksi kondisi makroekonomi serta pergerakan nilai tukar secara berkala bekerja sama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah, mendorong pemanfaatan skema *hedging* maupun alternatif pembiayaan dan transaksi dalam mata uang lokal, serta meningkatkan kemudahan berusaha dan kualitas pelayanan investasi agar daya saing Provinsi Jawa Tengah tetap kompetitif dibandingkan daerah tujuan investasi lainnya. Rekomendasi ini sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, serta teori keunggulan kompetitif wilayah yang menempatkan stabilitas biaya, efisiensi, dan kepastian sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya saing suatu lokasi investasi..

2. Mitigasi Risiko Politik dan Geopolitik

Risiko yang bersumber dari konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah merupakan risiko eksternal (*eksogen*) yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan lebih tepat dikelola melalui pendekatan *retention*. Meskipun demikian, potensi dampaknya dapat diminimalkan melalui strategi *reduction*, antara lain dengan memperluas kerja sama investasi ke negara-negara Timur Tengah yang memiliki stabilitas politik dan ekonomi relatif lebih baik, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait, sehingga ketergantungan terhadap satu negara sumber investasi dapat dikurangi. Selain itu, konsistensi kebijakan penanaman modal lintas periode kepemimpinan serta penguatan citra stabilitas politik nasional dan daerah dalam kegiatan promosi investasi perlu terus dijaga untuk meningkatkan kepercayaan investor. Strategi tersebut sejalan dengan penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk melalui Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUEA-CEPA) dan Indonesia-Saudi Arabia Joint Commission sebagaimana diuraikan pada Subbab 5.7.3, serta didukung oleh kerangka hukum hubungan luar negeri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori *country risk assessment* yang menempatkan diversifikasi sumber investasi sebagai salah satu strategi utama dalam memitigasi risiko politik dan geopolitik.

3. Mitigasi Risiko Regulasi dan Kepastian Hukum

Risiko pada aspek regulasi dan kelembagaan didominasi oleh kategori **Tinggi**, terutama yang berkaitan dengan belum optimalnya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta koordinasi pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Mengingat karakteristiknya yang bersifat struktural, strategi mitigasi diarahkan pada pendekatan *reduction* melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas instansi. Upaya yang direkomendasikan meliputi percepatan sinkronisasi RTRW Provinsi dengan RDTR kabupaten/kota guna meningkatkan kepastian lokasi investasi, penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan kementerian/lembaga dalam implementasi OSS berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan, serta penyusunan pedoman pemberian insentif fiskal, termasuk *tax holiday* dan *tax allowance*, yang transparan, terukur, dan mudah diakses oleh calon investor. Strategi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menekankan pentingnya kepastian tata ruang, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan iklim investasi daerah.

4. Mitigasi Risiko Lingkungan dan Infrastruktur

Risiko pada aspek infrastruktur dan lingkungan perlu dimitigasi melalui pendekatan *reduction* dengan memperkuat kesiapan infrastruktur dasar, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya yang direkomendasikan meliputi percepatan pemerataan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, energi, dan air bersih, khususnya pada kabupaten/kota di luar kawasan industri utama sebagaimana hasil pemetaan pada Subbab 5.3.3, penguatan adaptasi infrastruktur di wilayah pesisir utara Jawa Tengah terhadap ancaman banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah, serta penyediaan pendampingan bagi kawasan industri dan pelaku usaha dalam memenuhi standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang semakin menjadi pertimbangan investor global. Strategi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta arah kebijakan pengembangan energi baru terbarukan dan ekonomi hijau yang tertuang dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

5. Mitigasi Risiko Sosial Budaya

Risiko pada aspek sosial dan budaya dapat diminimalkan melalui pendekatan *reduction* dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membangun komunikasi yang lebih efektif antara investor dengan pemangku kepentingan di daerah. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas aparatur serta pelaku usaha lokal dalam memahami karakteristik dan pola komunikasi bisnis investor asal Timur Tengah, penyediaan layanan serta materi promosi investasi dalam bahasa Arab untuk meningkatkan kemudahan akses informasi, serta pelibatan masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi investasi sejak tahap perencanaan guna memperkuat penerimaan sosial dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih inklusif. Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

mengatur penyelenggaraan hubungan kerja yang adil dan profesional, serta konsep *cross-cultural business communication* sebagai bagian dari keunggulan internalisasi (*internalization advantages*) dalam paradigma eklektik (*OLI*), yang menekankan bahwa efisiensi transaksi dan keberhasilan investasi turut dipengaruhi oleh kesesuaian budaya kerja dan efektivitas komunikasi antara investor dengan mitra lokal.

6. Mitigasi Risiko Rantai Pasok dan Logistik

Risiko pada aspek rantai pasok dan logistik didominasi oleh gangguan jalur pelayaran internasional akibat eskalasi konflik geopolitik (tinggi), serta ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Emas dan potensi keterlambatan pasokan bahan baku lintas negara (sedang). Mengingat gangguan jalur pelayaran merupakan risiko eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, strategi mitigasi difokuskan pada pendekatan *retention* yang dikombinasikan dengan *reduction*, melalui diversifikasi jalur distribusi dan rute pelayaran alternatif, serta penyusunan rencana kontinjensi bersama pengelola pelabuhan dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, risiko ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Emas dimitigasi melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi pelayanan pelabuhan serta penguatan konektivitas dengan pelabuhan dan simpul logistik lainnya sebagai jalur alternatif. Adapun risiko keterlambatan pasokan bahan baku dimitigasi melalui penguatan kerja sama rantai pasok jangka panjang, diversifikasi pemasok, dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pergudangan berikat (*bonded warehouse*) guna menjaga keberlanjutan pasokan. Strategi tersebut sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran distribusi dan logistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip *supply chain resilience* yang menekankan pentingnya diversifikasi jalur distribusi dan penguatan ketahanan rantai pasok.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, hasil analisis mitigasi risiko selanjutnya dirangkum dalam bentuk matriks yang memuat kategori risiko, tingkat prioritas, strategi mitigasi, pendekatan penanganan berdasarkan ISO 31000:2018, serta perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang berperan dalam implementasinya beserta indikator keberhasilan. Matriks tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengoordinasikan pelaksanaan mitigasi risiko secara terintegrasi guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya tarik investasi dari negara-negara Timur Tengah.

Tabel 5. 38 Matriks Mitigasi Risiko Investasi Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah

Kategori Risiko	Risiko Prioritas	Strategi Mitigasi	Pendekatan Penanganan	Pemangku Kepentingan	Peran
Ekonomi & Nilai Tukar	Penurunan harga minyak dunia	Diversifikasi negara sumber investasi dan penyediaan informasi ekonomi global	Reduction	DPMPTSP, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP: menyusun strategi promosi dan diversifikasi investor. Bank Indonesia: menyediakan informasi ekonomi makro dan proyeksi nilai tukar. Biro Perekonomian: sinkronisasi kebijakan ekonomi daerah.
	Pelemahan nilai tukar Rupiah	Mendorong pemanfaatan <i>hedging</i> dan transaksi mata uang lokal	Transfer + Reduction	DPMPTSP, Bank Indonesia, OJK	DPMPTSP: memfasilitasi kebutuhan investor. Bank Indonesia: edukasi instrumen lindung nilai. OJK: meningkatkan literasi dan akses pembiayaan.
	Persaingan daya saing investasi antarwilayah	Meningkatkan kemudahan berusaha dan kualitas pelayanan investasi	Reduction	DPMPTSP, Bappeda, DPMPTSP Kab/Kota	DPMPTSP: meningkatkan kualitas pelayanan investasi. Bappeda: sinkronisasi program peningkatan daya saing. Kab/Kota: percepatan pelayanan perizinan.
	Kenaikan inflasi dan suku bunga	Penyediaan informasi ekonomi dan alternatif pembiayaan	Reduction	DPMPTSP, Bank Indonesia, OJK	DPMPTSP: pendampingan investor. Bank Indonesia: penyediaan informasi makroekonomi. OJK: fasilitasi akses pembiayaan.
Politik & Geopolitik	Konflik geopolitik Timur Tengah	Diversifikasi negara target investasi	Retention + Reduction	DPMPTSP, Biro Kerja Sama Setda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Luar Negeri	DPMPTSP: promosi investasi. Biro Kerja Sama: penguatan kerja sama luar negeri. BKPM: fasilitasi promosi internasional. Kementerian Luar Negeri: dukungan diplomasi ekonomi.
	Perubahan kebijakan negara asal investor	Memperluas jejaring kerja sama investasi	Reduction	DPMPTSP, BKPM, KBRI/KJRI	DPMPTSP: menjaga komunikasi dengan investor. BKPM: fasilitasi investasi. KBRI/KJRI: penyampaian informasi negara mitra.
	Dinamika kebijakan daerah	Menjaga konsistensi kebijakan investasi	Reduction	DPMPTSP, Bappeda, Biro Hukum	DPMPTSP: koordinasi kebijakan investasi. Bappeda: sinkronisasi lintas OPD.

Kategori Risiko	Risiko Prioritas	Strategi Mitigasi	Pendekatan Penanganan	Pemangku Kepentingan	Peran
					Biro Hukum: harmonisasi regulasi daerah.
Regulasi & Kepastian Hukum	Ketidaksinkronan RTRW dan RDTR	Percepatan sinkronisasi RTRW dan RDTR	Reduction	DPMPTSP, Bappeda, ATR/BPN, Dinas PUPR	DPMPTSP: koordinasi investasi. Bappeda: koordinasi lintas OPD. ATR/BPN: penataan ruang. PUPR: penyusunan dan implementasi RDTR.
	Keterlambatan OSS-RBA	Penguatan koordinasi OSS berbasis risiko	Reduction	DPMPTSP, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, DPMPTSP Kab/Kota	DPMPTSP: optimalisasi pelayanan OSS. BKPM: pembinaan sistem OSS. Kab/Kota: percepatan pelayanan perizinan.
	Ketidakpastian insentif investasi	Penyusunan pedoman insentif yang transparan	Reduction	DPMPTSP, BPKAD, Biro Hukum	DPMPTSP: penyusunan usulan kebijakan insentif. BPKAD: analisis kemampuan fiskal. Biro Hukum: harmonisasi regulasi.
Lingkungan & Infrastruktur	Keterbatasan infrastruktur dasar	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	Reduction	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas ESDM, PDAM	Bappeda: koordinasi perencanaan. PUPR: pembangunan infrastruktur. ESDM: penyediaan energi. PDAM: penyediaan air bersih.
	Banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah	Penguatan adaptasi kawasan pesisir	Reduction	Dinas PUPR, DLHK, BPBD	PUPR: pembangunan infrastruktur pengendali. DLHK: pengelolaan lingkungan. BPBD: mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
	Pemenuhan standar ESG	Pendampingan penerapan ESG	Reduction	DPMPTSP, DLHK, Pengelola Kawasan Industri	DPMPTSP: fasilitasi investor. DLHK: pembinaan aspek lingkungan. Pengelola Kawasan Industri: pendampingan implementasi ESG.
Sosial Budaya	Perbedaan budaya bisnis	Pelatihan komunikasi lintas budaya	Reduction	DPMPTSP, Disnakertrans, Perguruan Tinggi	DPMPTSP: pembinaan investor. Disnakertrans: peningkatan kompetensi SDM. Perguruan Tinggi: penyusunan materi pelatihan.
	Keterbatasan layanan berbahasa Arab	Penyediaan materi promosi dan layanan berbahasa Arab	Reduction	DPMPTSP, Diskominfo	DPMPTSP: penyusunan materi promosi. Diskominfo: pengembangan media informasi digital.

Kategori Risiko	Risiko Prioritas	Strategi Mitigasi	Pendekatan Penanganan	Pemangku Kepentingan	Peran
	Perbedaan ekspektasi ketenagakerjaan	Penguatan komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha	Reduction	Disnakertrans, DPMPTSP, APINDO	Disnakertrans: pembinaan hubungan industrial. DPMPTSP: fasilitasi investor. APINDO: sosialisasi praktik ketenagakerjaan.
Rantai Pasok & Logistik	Gangguan jalur pelayaran internasional	Diversifikasi jalur distribusi dan penyusunan rencana kontinjensi	Retention + Reduction	Dinas Perhubungan, Pelindo, KSOP, DPMPTSP	Dishub: koordinasi sistem logistik daerah. Pelindo: peningkatan pelayanan pelabuhan. KSOP: pengawasan keselamatan pelayaran. DPMPTSP: fasilitasi kebutuhan investor.
	Ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Emas	Peningkatan kapasitas pelabuhan dan konektivitas logistik	Reduction	Dinas Perhubungan, Pelindo, Kementerian Perhubungan	Dishub: pengembangan konektivitas transportasi. Pelindo: peningkatan kapasitas bongkar muat. Kementerian Perhubungan: dukungan kebijakan transportasi.
	Keterlambatan pasokan bahan baku	Diversifikasi pemasok dan pemanfaatan <i>bonded warehouse</i>	Reduction	DPMPTSP, Bea Cukai, Pelindo, KADIN	DPMPTSP: fasilitasi kemitraan rantai pasok. Bea Cukai: fasilitasi pergudangan berikat. Pelindo: kelancaran distribusi. KADIN: penguatan jejaring pemasok.

Sumber : Tim Penyusun, 2026

Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi mitigasi risiko investasi di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi investor sekaligus meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penguatan kepastian regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, perbaikan pelayanan investasi, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Implementasi strategi mitigasi secara terintegrasi diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan kepercayaan investor asal Timur Tengah, serta mendorong peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan

5.9 Analisis Regulasi, Kebijakan, dan Iklim Investasi

Keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas regulasi, kebijakan pemerintah, serta iklim investasi yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor. Bagi investor asal Timur Tengah, aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi investasi karena berkaitan dengan kepastian hukum, efisiensi proses perizinan, ketersediaan insentif, serta stabilitas kebijakan yang mendukung keberlangsungan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, selain memiliki potensi sektor unggulan, Provinsi Jawa Tengah perlu didukung oleh kerangka regulasi dan kelembagaan yang kondusif agar mampu meningkatkan daya saing investasi di tingkat nasional maupun internasional.

Analisis pada bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi regulasi, kebijakan, dan iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh terhadap minat investasi dari kawasan Timur Tengah. Pembahasan mencakup strategi dan media promosi investasi, kebijakan nasional dan daerah terkait penanaman modal, kemudahan perizinan dan kepastian hukum, fasilitas dan insentif investasi, serta berbagai hambatan regulasi dan kelembagaan yang berpotensi memengaruhi realisasi investasi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan daya tarik investasi Jawa Tengah agar lebih sesuai dengan karakteristik dan preferensi investor Timur Tengah.

5.9.1 Kebijakan Nasional dan Daerah Terkait Penanaman Modal

Penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan daya saing nasional. Pada tingkat nasional, landasan utama penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur hak, kewajiban, perlindungan investor, pemberian fasilitas penanaman modal, serta perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Selanjutnya, reformasi regulasi investasi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menitikberatkan pada penyederhanaan regulasi, kemudahan berusaha, penerapan perizinan berbasis risiko (Risk-Based Approach), serta percepatan realisasi investasi.

Pelaksanaan sistem perizinan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi dasar penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur pembagian kewenangan pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam aspek penataan ruang sebagai prasyarat investasi, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperkuat melalui berbagai ketentuan dalam UU Cipta Kerja untuk mempercepat penyusunan RTRW dan RDTR sebagai dasar kepastian lokasi investasi.

Di sisi pemberian insentif, pemerintah memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal melalui ketentuan perpajakan, kepabeanan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi investor berupa insentif perpajakan, kemudahan kepabeanan, serta penyederhanaan perizinan pada kawasan tertentu.

5.9.2 Kemudahan Perizinan dan Kepastian Hukum

Kemudahan perizinan dan kepastian hukum merupakan aspek yang sangat menentukan dalam keputusan investasi, terutama bagi investor asing yang memerlukan kepastian mengenai proses administrasi, hak kepemilikan, serta keberlanjutan usaha. Reformasi sistem perizinan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan efisiensi pelayanan investasi melalui digitalisasi proses perizinan dan penyederhanaan birokrasi. Penerapan sistem OSS-RBA memungkinkan proses perizinan dilakukan secara terintegrasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sehingga waktu penyelesaian perizinan menjadi lebih singkat dibandingkan mekanisme sebelumnya. Melalui pendekatan berbasis risiko, kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah memperoleh proses perizinan yang lebih sederhana, sedangkan kegiatan usaha berisiko tinggi tetap memperoleh pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini memberikan kepastian prosedur sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan investasi.

Di tingkat daerah, pelayanan investasi di Jawa Tengah dilaksanakan melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain memberikan pelayanan perizinan, DPMPTSP juga menyediakan fasilitasi konsultasi investasi,

pendampingan realisasi investasi (*investment aftercare*), penyelesaian hambatan investasi (*investment troubleshooting*), serta promosi peluang investasi melalui berbagai platform, termasuk Central Java Investment Platform (CJIP) dan penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO). Upaya tersebut memberikan nilai tambah bagi investor karena tidak hanya memperoleh kemudahan pada tahap perizinan, tetapi juga pendampingan selama proses realisasi investasi.

Meskipun demikian, kepastian hukum investasi masih dipengaruhi oleh kesiapan dokumen tata ruang di tingkat kabupaten/kota. Sinkronisasi antara RTRW, RDTR, dan perizinan sektoral masih menjadi tantangan pada beberapa wilayah sehingga berpotensi memperpanjang proses penetapan lokasi investasi. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian RDTR dan peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting untuk semakin memperkuat kepastian hukum bagi investor.

5.9.3 Fasilitas dan Insentif Investasi

Selain kemudahan perizinan, pemberian fasilitas dan insentif investasi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas fiskal maupun nonfiskal sebagai bentuk dukungan terhadap investasi yang memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tingkat nasional, investor dapat memperoleh berbagai fasilitas berupa Tax Holiday, Tax Allowance, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, fasilitas kepabeanan, serta berbagai insentif lain sesuai sektor prioritas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kawasan yang menawarkan kemudahan perizinan, insentif perpajakan, kemudahan kepabeanan, serta dukungan infrastruktur yang lebih kompetitif dibandingkan kawasan lainnya.

Di tingkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melengkapi kebijakan nasional melalui pemberian kemudahan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Bentuk dukungan tersebut meliputi percepatan pelayanan perizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi melalui **CJIP**, penyusunan **IPRO**, serta pendampingan proyek strategis. Selain itu, keberadaan **KEK Kendal**

dan **KEK Industropolis Batang**, didukung kawasan industri lain di Jawa Tengah, memberikan alternatif lokasi investasi yang telah dilengkapi infrastruktur dasar, utilitas, serta kemudahan pelayanan bagi investor.

Bagi investor asal Timur Tengah, berbagai fasilitas tersebut menjadi faktor pendukung yang meningkatkan daya tarik Jawa Tengah sebagai tujuan investasi. Ketersediaan proyek siap investasi, kemudahan memperoleh informasi, serta dukungan pemerintah daerah dalam proses realisasi investasi dapat mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan kepastian pelaksanaan investasi.

5.9.4 Hambatan Regulasi dan Kelembagaan

Meskipun berbagai reformasi regulasi telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi keputusan investasi, khususnya bagi investor asing yang umumnya mempertimbangkan efisiensi birokrasi, kepastian regulasi, dan kesiapan proyek investasi sebelum melakukan realisasi investasi.

Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya penyelesaian **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)** pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepastian lokasi investasi karena proses penetapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang masih memerlukan koordinasi lintas instansi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat daerah teknis dalam beberapa kasus masih memerlukan penyelarasan agar proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Dari sisi kelembagaan, kesiapan proyek investasi juga masih menjadi tantangan. Tidak seluruh peluang investasi telah memiliki dokumen pendukung yang lengkap, seperti studi kelayakan, kesiapan lahan, maupun informasi teknis yang dibutuhkan investor. Padahal, berdasarkan hasil analisis dan wawancara dalam kajian ini, investor Timur Tengah cenderung lebih tertarik pada proyek yang telah memiliki tingkat kesiapan tinggi (*investment ready project*) sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Selain itu, promosi investasi yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik investor Timur Tengah masih perlu diperkuat. Penyediaan materi promosi berbahasa Arab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami karakteristik bisnis negara-negara Timur Tengah, serta penguatan jejaring dengan lembaga investasi dan kamar dagang di kawasan tersebut masih menjadi ruang perbaikan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan, percepatan penyelesaian RDTR, peningkatan kualitas proyek investasi, serta

pembentukan **Middle East Investment Desk** sebagaimana direkomendasikan dalam kajian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing investasi Jawa Tengah di pasar Timur Tengah.

5.10 Strategi Peningkatan Investasi Timur Tengah di Jawa Tengah

Berdasarkan sintesis dari analisis struktur perekonomian daerah, evaluasi keunggulan komparatif sektoral, karakteristik penanaman modal dari kawasan Timur Tengah, serta hasil analisis risiko pada sub-bab sebelumnya, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah untuk mengakselerasi penyerapan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Timur Tengah. Mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan ini, rekomendasi strategis disusun untuk menjawab tiga unsur utama, yaitu: (1) metode dan media promosi investasi; (2) penguatan jejaring diplomatik; dan (3) peningkatan daya saing daerah yang mencakup regulasi, layanan perizinan/non-perizinan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Ketiga unsur tersebut dijabarkan pada sub-bagian 5.9.1 sampai dengan 5.9.4, dilengkapi dengan pemetaan proyek investasi siap ditawarkan (IPRO) pada sub-bagian 5.9.5 dan peta jalan (roadmap) implementasi berjangka waktu pada sub-bagian 5.9.6.

5.10.1 Strategi dan Media Promosi Investasi

Strategi promosi dirancang agar informasi investasi Jawa Tengah dapat menjangkau investor Timur Tengah secara tepat sasaran, melalui kanal dan format yang sesuai dengan kebiasaan pengambilan keputusan investor di kawasan tersebut.

1. Penyusunan Materi Promosi Multibahasa dan Digital

Mengembangkan Investment Project Ready to Offer (IPRO), investment teaser, serta profil investasi daerah dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, dilengkapi microsite atau landing page khusus investor Timur Tengah pada laman resmi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Mengingat investor Timur Tengah sensitif terhadap sentralisasi birokrasi, seluruh materi promosi digital tersebut perlu ditautkan langsung dengan sistem perizinan satu pintu (OSS) agar calon investor memperoleh gambaran proses investasi secara transparan sejak tahap awal.

2. Partisipasi pada Forum dan Pameran Investasi Internasional

Berpartisipasi secara rutin pada forum dan pameran bertaraf internasional yang menjadi titik temu investor Timur Tengah, antara lain GITEX, Cityscape Global, dan forum investasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di

kawasan Teluk, serta melaksanakan misi dagang langsung ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sebagaimana dijabarkan pada roadmap sub-bagian 5.9.6.

3. Pendekatan Pemasaran Berbasis Relasi (*Relationship-Based Marketing*) Menggeser pendekatan pemasaran dari penyampaian informasi satu arah menuju relationship-based investment yang mengutamakan pembangunan relasi dan kepercayaan personal jangka panjang, antara lain melalui kunjungan balasan (*courtesy visit*), pertemuan tatap muka berkelanjutan dengan calon investor dan sovereign wealth fund (SWF), serta penunjukan account manager khusus bagi investor prioritas di lingkungan DPMPTSP.

4. Pemanfaatan Media Digital dan Jaringan Bisnis Berbahasa Arab

Memperluas jangkauan promosi melalui kanal digital berbahasa Arab (media sosial profesional dan platform bisnis) serta menjalin kerja sama pemberitaan dengan media bisnis yang banyak diakses oleh investor Timur Tengah, guna memperkuat citra Jawa Tengah sebagai destinasi investasi yang kredibel di kawasan tersebut

5.10.2 Penguatan Jejaring Diplomatik dan Kerja Sama Kelembagaan

Investor Timur Tengah, khususnya yang berbasis sovereign wealth fund, cenderung mengedepankan kepastian dan legitimasi kelembagaan dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, penguatan jejaring diplomatik menjadi prasyarat penting yang melengkapi strategi promosi.

1. Sinergi dengan Perwakilan Diplomatik dan Lembaga Pusat

Membangun koordinasi aktif dengan Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) di negara-negara Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Indonesia Investment Authority (INA) untuk membuka akses komunikasi langsung dengan otoritas investasi dan SWF di kawasan Timur Tengah, termasuk kemungkinan skema co-investment.

2. Kerja Sama Sister-Province dan Kelembagaan Bilateral

Merintis dan menindaklanjuti kerja sama resmi sister-province dengan wilayah di Uni Emirat Arab atau Arab Saudi sebagai jalur diplomasi bisnis langsung antarpemerintah daerah, sejalan dengan arah kebijakan kerja sama penanaman modal internasional dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah.

3. Pelibatan Kamar Dagang dan Asosiasi Pengusaha

Memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah dalam membangun hubungan business-to-business dengan kamar dagang dan asosiasi

pengusaha di negara-negara Timur Tengah, sebagai jembatan komunikasi yang melengkapi pendekatan formal antarpemerintah.

4. Pendekatan Diplomasi Ekonomi Berbasis Sovereign Wealth Fund

Melakukan pendekatan khusus kepada otoritas investasi Timur Tengah, antara lain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Public Investment Fund (PIF), Qatar Investment Authority (QIA), dan Kuwait Investment Authority (KIA), yang disusun mengikuti standar due diligence institusional sebagaimana lazim diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut.

5.10.3 Peningkatan Daya Saing Daerah: Regulasi, Perizinan, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia

1. Kepastian Tata Ruang dan Transparansi Insentif

Mempercepat sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota guna menjamin ketersediaan lahan kawasan industri secara legal dan pasti, serta menerbitkan panduan investasi (*investment guide*) yang memuat skema tax holiday, tax allowance, dan insentif investasi lainnya secara eksplisit dan mudah dipahami oleh investor asing.

2. Reformasi dan Percepatan Layanan Perizinan

Mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPSTSP dengan skema pendampingan prioritas (*fast-track*) dan penetapan service level agreement (SLA) khusus bagi investor Timur Tengah, dengan target penyelesaian perizinan investasi paling lama 30 hari kerja.

3. Penguatan Infrastruktur Pendukung Investasi

Meningkatkan konektivitas antara kawasan industri prioritas dengan simpul logistik utama (pelabuhan dan jalan tol), serta menyiapkan infrastruktur pendukung sistem logistik yang memadai, sejalan dengan sektor unggulan yang menjadi minat investor Timur Tengah.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Tenaga Kerja

Menyelenggarakan pelatihan kemampuan berbahasa Arab dan pemahaman budaya bisnis Timur Tengah bagi aparatur DPMPSTSP dan pelaku usaha lokal, serta mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada sektor-sektor berbasis ekonomi halal dan industri pengolahan berorientasi ekspor, agar Jawa Tengah memiliki kesiapan sumber daya manusia yang mendukung layanan investasi Timur Tengah secara berkelanjutan

5.10.4 Pengembangan Model Kemitraan dan Keselarasan dengan Standar Global

1. Model Kemitraan Berbasis Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Mendorong pembentukan Joint Venture dan skema off-taker antara investor Timur Tengah dengan BUMD atau UMKM lokal, khususnya pada sektor industri pengolahan komoditas unggulan seperti arang briket, tekstil, dan olahan kayu yang saat ini menjadi basis ketertarikan investor dari Yaman, Yordania, dan Irak.

2. Penyelarasan dengan Standar ESG dan Transisi Energi

Mengemas penawaran investasi daerah agar sejalan dengan program diversifikasi ekonomi negara-negara Teluk, seperti Saudi Vision 2030 dan UAE Centennial 2071, yang memprioritaskan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transisi ke energi bersih.

5.10.5 Rekomendasi Promosi IPRO Berdasarkan Profil Investor Timur Tengah

Berdasarkan hasil analisis potensi investasi, karakteristik sektor unggulan Jawa Tengah, serta profil investor negara-negara Timur Tengah, diperlukan strategi promosi investasi yang lebih terarah melalui pemetaan proyek *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berdasarkan sektor prioritas, negara target, dan karakteristik investor. Pendekatan ini bertujuan agar penawaran proyek lebih tepat sasaran dan sesuai dengan preferensi calon investor. Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 5.39 sebagai acuan dalam penyusunan strategi promosi investasi Provinsi Jawa Tengah kepada investor Timur Tengah

Tabel 5. 39 Pemetaan Penawaran IPRO Berdasarkan Negara Target dan Entitas Timur Tengah

No	Nama Proyek IPRO	Sektor	Target Negara	Alasan Negara Target	Contoh Entitas Investor Potensial
I. Sektor Energi & Pertambangan					
1	PLTM Logawa 3	Energi Terbarukan (EBT)	Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi	Komitmen tinggi terhadap Net Zero dan EBT global, didukung modal besar untuk proyek infrastruktur hijau.	Masdar (Abu Dhabi Future Energy Co.), TAQA, ACWA Power
2	PLTP Candi Umbul Telomoyo	Energi Panas Bumi (Geothermal)	UEA, Arab Saudi	Fokus ekspansi pada portofolio clean energy dan ekosistem geothermal jangka panjang.	Masdar, ACWA Power
3	Proyek Geothermal (Geo Dipa)	Energi Panas Bumi (Geothermal)	UEA, Arab Saudi	Mebutuhkan proyek EBT skala besar (mega-project) dengan skema imbal hasil yang stabil.	Masdar, ACWA Power
4	Ekstraksi Mineral Dieng (Silika & Litium)	Pertambangan & Energi	UEA, Arab Saudi, Yordania	Mendorong diversifikasi sektor pertambangan strategis, industri kimia, dan rantai pasok teknologi masa depan.	Mubadala Investment Company, Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden),

No	Nama Proyek IPRO	Sektor	Target Negara	Alasan Negara Target	Contoh Entitas Investor Potensial
					Public Investment Fund (PIF)
5	RDF Demak	Waste to Energy / Pengelolaan Lingkungan	UEA, Arab Saudi	Fokus pada investasi berorientasi ESG, pengolahan sampah modern, dan sustainability.	Bee'ah Group, Masdar, Saudi Investment Recycling Company (SIRC)
6	RDF Pati	Waste to Energy / Pengelolaan Lingkungan	UEA, Arab Saudi	Memiliki portofolio kuat dalam pengembangan teknologi waste-to-energy dan pengelolaan lingkungan perkotaan.	Bee'ah Group, SIRC
II. Sektor Agroindustri & Logistik Pertanian					
7	Industri Kelapa Terpadu	Agroindustri	Yaman, UEA, Yordania	Tingginya permintaan olahan kelapa dan briket di pasar lokal serta minat memperkuat rantai pasok bahan baku.	Agregator Importir Produk Kelapa, Mats International Dubai, Charcoal Black Diamond Int.
8	Industri Tepung Singkong Modifikasi (MOCAF)	Agroindustri	Arab Saudi, UEA, Yordania	Prioritas tinggi pada program ketahanan pangan (food security) dan substitusi bahan pangan olahan.	Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC), Savola Group, Fine Hygienic Holding
9	Sistem Resi Gudang & Subterminal Agribisnis	Logistik Pertanian	Arab Saudi, UEA, Irak	Kebutuhan efisiensi rantai pasok agribisnis, pergudangan, dan penguatan hub logistik pangan.	DP World, SALIC, Al-Raban Group
III. Sektor Perikanan & Kelautan					
10	Industri Udang Terpadu	Perikanan	Arab Saudi, UEA, Yaman	Kebutuhan impor komoditas perikanan/seafood yang tinggi guna menunjang ketahanan pangan nasional.	SALIC, Almarai, National Aquaculture Group (NAQUA)
IV. Sektor Pariwisata					
11	Ecopark Taman Kyai Langgeng	Pariwisata	UEA, Arab Saudi, Yordania	Minat besar pada investasi kawasan wisata terpadu, pengembangan hospitality, dan taman rekreasi.	Al Hokair Group, Shaza Hotels, Rotana Hotel Management
12	Pengembangan Pulau Panjang	Pariwisata (Wisata Bahari)	UEA, Arab Saudi, Yordania	Tren investasi pada resort eksklusif, pariwisata ramah Muslim, dan properti destinasi bahari.	Rotana Hotel Management, Dur Hospitality, Abu Dhabi National Hotels

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, OSS Indonesia, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Pertanian RI, Bappenas, Geo Dipa Energi, Masdar, ACWA Power, Mubadala Investment Company, Eagle Hills, dan berbagai sumber resmi lainnya, 2026

Berdasarkan Tabel 5.39, setiap proyek investasi (*Investment Project Ready to Offer/IPRO*) dipetakan berdasarkan sektor prioritas, negara target, serta contoh entitas investor potensial yang memiliki karakteristik dan rekam jejak investasi sesuai dengan kebutuhan proyek. Pemetaan ini menunjukkan bahwa proyek energi baru terbarukan lebih sesuai

ditawarkan kepada investor besar dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang memiliki pengalaman pada sektor transisi energi, sedangkan proyek agroindustri, pertanian, dan perikanan lebih relevan ditawarkan kepada investor yang memiliki fokus pada ketahanan pangan dan pengolahan hasil pertanian. Sementara itu, proyek pariwisata dan hospitality memiliki kesesuaian dengan investor yang berpengalaman dalam pengembangan resort, kawasan wisata terpadu, dan industri perhotelan.

Contoh entitas investor potensial yang disajikan pada tabel tersebut tidak dimaksudkan sebagai daftar target resmi maupun pihak yang telah memiliki komitmen investasi di Provinsi Jawa Tengah. Entitas tersebut dipilih sebagai **benchmark** berdasarkan kesesuaian sektor usaha, rekam jejak investasi global, serta aktivitas investasi yang telah dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, pemetaan ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun strategi promosi investasi, melakukan identifikasi calon mitra yang relevan, serta menentukan pendekatan promosi yang lebih terarah sesuai karakteristik masing-masing proyek IPRO.

5.10.6 Matriks Strategi Peningkatan PMA Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah

Matriks strategi peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dari negara-negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah disusun dalam empat tahap yang selaras dengan periodisasi dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045. Sesuai dengan ketentuan KAK yang mensyaratkan rekomendasi mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang, keempat tahap tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Matriks Roadmap Strategi Peningkatan PMA Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2045

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
Promosi Investasi	Tahap I (2026–2029): Penguatan Materi & Media Promosi Investasi	Menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): menyusun dan menerjemahkan dokumen IPRO ke tiga bahasa. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): memberi masukan substansi kebijakan ekonomi daerah pada dokumen IPRO.
		Mengembangkan investment teaser, profil investasi, dan microsite khusus investor Timur Tengah pada portal DPMPTSP.	DPMPTSP, Diskominfo	DPMPTSP (Pelaksana utama): menyusun materi teaser/profil investasi dan mengelola microsite. Diskominfo (Pendukung): dukungan teknis infrastruktur portal/digital dan standar publikasi.
		Mengikuti forum investasi internasional (GITEX, Cityscape Global, AIM Congress, forum BKPM).	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): delegasi dan penyaji materi promosi pada forum internasional. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): mendampingi dan menyelaraskan agenda promosi dengan kebijakan ekonomi daerah.
		Melaksanakan misi dagang dan promosi investasi ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda, BI Kanwil Jateng	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyusun agenda dan materi misi dagang/promosi. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): koordinasi kebijakan dan keterlibatan pelaku usaha daerah. BI Kanwil Jateng (Pendukung): data/analisis ekonomi-moneter dan fasilitasi transaksi lintas negara.
	Tahap II (2030–2034): Perluasan Forum & Promosi Digital	Menyelenggarakan Central Java–Middle East Investment Forum secara berkala.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda, Diskominfo	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyelenggara forum. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): narasumber dan koordinasi kebijakan ekonomi daerah. Diskominfo (Pendukung): publikasi dan dokumentasi forum.
		Melaksanakan business matching antara proyek IPRO dengan calon investor Timur Tengah.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): mempertemukan proyek IPRO dengan calon investor.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
				Biro Perekonomian Setda (Pendukung): masukan kelayakan ekonomi proyek.
		Memperluas promosi digital melalui media dan platform bisnis berbahasa Arab.	DPMPTSP, Diskominfo,	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyusun konten promosi berbahasa Arab. Diskominfo (Pendukung): pengelolaan kanal media dan platform digital.
	Tahap III (2035–2039): Ekspansi Promosi ke Kawasan Timur Tengah Lainnya	Memperbarui IPRO secara berkala sesuai perkembangan proyek strategis Jawa Tengah.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): pemutakhir dokumen IPRO. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): validasi data perkembangan proyek strategis.
		Memperluas promosi ke negara Timur Tengah lainnya: Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Yordania.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda, BI Kanwil Jateng	DPMPTSP (Pelaksana utama): pelaksana promosi ke negara tambahan. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): koordinasi kebijakan ekonomi lintas negara. BI Kanwil Jateng (Pendukung): data ekonomi negara tujuan.
		Menjadikan forum investasi sebagai agenda internasional tahunan.	DPMPTSP, Diskominfo	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyelenggara dan pengelola keberlanjutan forum. Diskominfo (Pendukung): publikasi/branding forum sebagai agenda internasional.
	Tahap IV (2040–2045): Pemantapan Branding Investasi Jawa Tengah	Membangun citra (branding) Jawa Tengah sebagai destinasi investasi utama Timur Tengah di Indonesia.	DPMPTSP, Diskominfo, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): perancang strategi branding investasi. Diskominfo (Pendukung): pelaksana kampanye komunikasi/branding. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): penyelarasan narasi branding dengan kebijakan ekonomi daerah.
		Memantapkan Central Java–Middle East Investment Forum sebagai forum unggulan tingkat nasional.	DPMPTSP, Biro Perekonomian Setda, BI Kanwil Jateng	DPMPTSP (Pelaksana utama): pengelola forum. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): dukungan kebijakan dan legitimasi forum di tingkat provinsi. BI Kanwil Jateng (Pendukung): dukungan narasumber/analisis ekonomi.
Penguatan Jejaring	Tahap I (2026–2029): Konsolidasi	Membentuk Middle East Investment Desk di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.	DPMPTSP	DPMPTSP (Pelaksana utama): pembentuk dan pengelola desk.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
Diplomatik dan Kelembagaan	Koordinasi Kelembagaan Pusat	Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Luar Negeri, KBRI/KJRI, Indonesia Investment Authority (INA), dan KADIN.	BKPM, Kemenlu/KBRI-KJRI, INA, KADIN Jateng	DPMPTSP (Pelaksana utama): inisiator dan koordinator komunikasi. BKPM (Pendukung): sinkronisasi kebijakan investasi nasional dan data investor. Kemenlu/KBRI-KJRI (Pendukung): akses jaringan diplomatik dan informasi negara tujuan. INA (Pendukung): akses jaringan sovereign wealth fund. KADIN Jateng (Pendukung): penghubung dengan pelaku usaha.
		Menyusun basis data calon investor prioritas dan sovereign wealth fund (SWF).	DPMPTSP, Biro Kerja Sama Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyusun basis data. Biro Kerja Sama Setda (Pendukung): dukungan administrasi kerja sama luar negeri.
	Tahap II (2030–2034): Kerja Sama Sister-Province & Forum Bisnis	Mengembangkan kerja sama Sister Province dengan pemerintah daerah di Uni Emirat Arab atau Arab Saudi.	DPMPTSP, Biro Kerja Sama Setda, Kemenlu/KBRI-KJRI	DPMPTSP (Pelaksana utama): inisiator kerja sama investasi dalam skema sister province. Biro Kerja Sama Setda (Pendukung): administrasi/protokol kerja sama antardaerah. Kemenlu/KBRI-KJRI (Pendukung): fasilitasi diplomatik dengan pemerintah daerah mitra.
		Menyelenggarakan forum bisnis bersama kamar dagang dan asosiasi pengusaha Timur Tengah.	DPMPTSP, KADIN Jateng	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyelenggara forum. KADIN Jateng (Pendukung): penghubung dengan kamar dagang/asosiasi pengusaha.
		Mengembangkan layanan aftercare investment dan account manager bagi investor strategis.	DPMPTSP, Bappeda	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyedia layanan aftercare/account manager. Bappeda (Pendukung): masukan keselarasan dengan perencanaan pembangunan daerah.
	Tahap III (2035–2039): Kemitraan Strategis dengan SWF & Perluasan Jejaring)	Merintis kemitraan investasi jangka panjang dengan SWF dan investor institusional Timur Tengah.	DPMPTSP, INA, Biro Kerja Sama Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): inisiator kemitraan. INA (Pendukung): fasilitasi hubungan dengan SWF/investor institusional. Biro Kerja Sama Setda (Pendukung): dukungan administrasi kerja sama.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
		Memperluas jejaring Sister Province ke negara Timur Tengah lainnya.	DPMPTSP, Biro Kerja Sama Setda, Kemenlu/KBRI-KJRI	DPMPTSP (Pelaksana utama): pengelola perluasan jejaring. Biro Kerja Sama Setda (Pendukung): administrasi kerja sama antardaerah. Kemenlu/KBRI-KJRI (Pendukung): fasilitasi diplomatik.
	T Tahap IV (2040–2045): Pemantapan Kemitraan Strategis Internasional tahap IV (2040–2045)	Mengembangkan jaringan kerja sama investasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga internasional.	DPMPTSP, Biro Kerja Sama Setda, Bappeda	DPMPTSP (Pelaksana utama): koordinator jaringan. Biro Kerja Sama Setda (Pendukung): dukungan administrasi kerja sama. Bappeda (Pendukung): keselarasan dengan arah pembangunan daerah.
		Memantapkan kemitraan strategis dengan SWF dan investor institusional Timur Tengah.	DPMPTSP, INA	DPMPTSP (Pelaksana utama): pengelola kemitraan strategis. INA (Pendukung): fasilitasi hubungan kelembagaan dengan SWF.
Regulasi, Perizinan, dan Kemudahan Investasi	Tahap I (2026–2029): Kepastian Tata Ruang & Transparansi Layanan	Mempercepat penyelesaian RDTR pada wilayah prioritas investasi.	Bappeda, ATR/BPN, DPMPTSP	Bappeda (Pelaksana utama): penyusun dan pengesah RDTR. ATR/BPN (Pendukung): dukungan teknis pertanahan dan tata ruang. DPMPTSP (Pendukung): masukan kebutuhan investasi pada wilayah prioritas.
		Menyusun Investment Guide memuat prosedur investasi, insentif fiskal, dan nonfiskal secara transparan.	DPMPTSP, Bapenda, Biro Perekonomian Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyusun Investment Guide. Bapenda (Pendukung): data dan kebijakan insentif fiskal daerah. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): penyalarsan kebijakan ekonomi daerah.
		Menetapkan Service Level Agreement (SLA) pelayanan investasi.	DPMPTSP	DPMPTSP (Pelaksana utama): penetap dan pelaksana SLA.
		Mengoptimalkan layanan OSS dan pendampingan investasi.	DPMPTSP	DPMPTSP (Pelaksana utama): pengelola layanan OSS dan pendampingan.
	Tahap II (2030–2034): Penyederhanaan Proses & Evaluasi Insentif	Mengembangkan mekanisme Fast Track Investment Services bagi investor prioritas.	DPMPTSP	DPMPTSP (Pelaksana utama): pengembang dan pelaksana mekanisme fast track.
		Menyederhanakan proses koordinasi lintas perangkat daerah.	DPMPTSP, Biro Hukum Setda	DPMPTSP (Pelaksana utama): inisiator penyederhanaan proses.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
				Biro Hukum Setda (Pendukung): kajian aspek legal proses perizinan.
		Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan investasi dan skema insentif, termasuk insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah berjalan.	DPMPTSP, Bapenda	DPMPTSP (Pelaksana utama): pelaksana evaluasi pelayanan investasi. Bapenda (Pendukung): evaluasi kebijakan insentif fiskal (BBNKB).
	Tahap III (2035–2039): Harmonisasi Regulasi & Perluasan Insentif Daerah	Menyesuaikan regulasi investasi dengan dinamika kebijakan nasional dan global.	Biro Hukum Setda, DPMPTSP	Biro Hukum Setda (Pelaksana utama): pengkaji dan penyusun harmonisasi regulasi. DPMPTSP (Pendukung): masukan kebutuhan operasional pelayanan investasi.
		Memperluas cakupan insentif daerah berdasarkan hasil kajian dampak PPh dan PPN terhadap daya tarik investasi.	Bapenda, Biro Perekonomian Setda, DPMPTSP	Bapenda (Pelaksana utama): penyusun kebijakan insentif fiskal daerah. Biro Perekonomian Setda (Pendukung): kajian dampak ekonomi. DPMPTSP (Pendukung): masukan kebutuhan investor.
	Tahap IV (2040–2045): Integrasi Layanan Investasi Digital Berdaya Saing Internasional			DPMPTSP (Pelaksana utama): pengembang sistem pelayanan investasi.
		Mewujudkan sistem pelayanan investasi yang terintegrasi, digital, cepat, dan berdaya saing internasional.	DPMPTSP, Biro Hukum Setda, Bappeda, ATR/BPN	Biro Hukum Setda (Pendukung): dasar hukum sistem pelayanan. Bappeda (Pendukung): keselarasan dengan perencanaan daerah. ATR/BPN (Pendukung): dukungan data pertanahan/tata ruang.
Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Investasi	Tahap I (2026–2029): Penyiapan Konektivitas & Proyek Strategis Siap Tawar	Menyiapkan kawasan industri prioritas beserta infrastruktur pendukung investasi.	Disperindag, Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	Disperindag (Pelaksana utama): perencana kawasan industri prioritas. Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (Pendukung): pembangunan infrastruktur pendukung.
		Memperkuat konektivitas pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri menuju lokasi proyek IPRO.	Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang, Bappeda, DPMPTSP	Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (Pelaksana utama): pembangun konektivitas infrastruktur. Bappeda (Pendukung): perencanaan pembangunan infrastruktur strategis.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
				DPMPTSP (Pendukung): masukan kebutuhan investor pada lokasi proyek IPRO.
		Menyiapkan proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor.	DPMPTSP, Disperindag	DPMPTSP (Pelaksana utama): penyiap dan pengemas proyek strategis. Disperindag (Pendukung): masukan aspek industri/perdagangan.
		Mendukung pemetaan Kawasan Industri Halal sejalan dengan target implementasi mulai 2027, termasuk tindak lanjut usulan Kawasan Industri Halal Kabupaten Pemalang sebagai proyek percontohan.	Disperindag, DPMPTSP Kab. Pemalang, Bappeda	Disperindag (Pelaksana utama): perencana kawasan industri halal. DPMPTSP Kab. Pemalang (Pendukung): pelaksana teknis di tingkat kabupaten. Bappeda (Pendukung): keselarasan dengan perencanaan tata ruang wilayah.
	Tahap II (2030–2034): Pengembangan Kawasan Industri & Proyek Sesuai Prioritas RUPM	Mengembangkan Kawasan Industri Halal Terintegrasi dan sistem logistik halal.	Disperindag, Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	Disperindag (Pelaksana utama): pengembang kawasan dan sistem logistik halal. Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (Pendukung): dukungan infrastruktur fisik.
		Mendorong pengembangan proyek energi baru terbarukan, agroindustri, dan pariwisata sesuai prioritas RUPM.	Dinas ESDM, Distanbun, DKP, Bappeda	Dinas ESDM (Pelaksana utama): pengembang proyek energi baru terbarukan. Distanbun (Pendukung): pengembang proyek agroindustri. DKP (Pendukung): pengembang proyek berbasis kelautan/perikanan. Bappeda (Pendukung): keselarasan dengan prioritas RUPM.
		Memperluas investasi ke wilayah potensial di luar koridor Pantura.	Bappeda, DPMPTSP	Bappeda (Pelaksana utama): perencana pengembangan wilayah baru. DPMPTSP (Pendukung): promosi investasi ke wilayah baru.
	Tahap III (2035–2039): Ekosistem Kawasan Industri & Rantai Pasok Global	Mewujudkan ekosistem kawasan industri yang terintegrasi dengan rantai pasok global.	Disperindag, Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang, Bappeda	Disperindag (Pelaksana utama): pengembang ekosistem kawasan industri. Dinas PUPR/Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (Pendukung): dukungan infrastruktur. Bappeda (Pendukung): perencanaan keterpaduan wilayah.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
		Memperkuat kesiapan bahan baku lokal untuk industri berbasis sumber daya alam.	Distanbun, DKP, Dinas ESDM	Distanbun (Pelaksana utama): penyedia data/kebijakan bahan baku pertanian-perkebunan. DKP (Pendukung): penyedia data/kebijakan bahan baku perikanan. Dinas ESDM (Pendukung): penyedia data/kebijakan bahan baku sumber daya mineral/energi.
	Tahap IV (2040–2045): Kawasan Investasi Hijau & Rendah Karbon	Mengembangkan kawasan investasi berbasis ekonomi hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.	Dinas ESDM, Disperindag, Bappeda, DPMPTSP	Dinas ESDM (Pelaksana utama): pengarah kebijakan energi hijau/rendah karbon. Disperindag (Pendukung): penyelarasan dengan kawasan industri. Bappeda (Pendukung): perencanaan keberlanjutan wilayah. DPMPTSP (Pendukung): promosi kawasan investasi hijau.
Pengembangan SDM dan Kemitraan Usaha	Tahap I (2026–2029): Peningkatan Kapasitas Aparatur & Pelaku Usaha Lokal	Melaksanakan pelatihan bahasa Arab dan pemahaman budaya bisnis Timur Tengah bagi aparatur DPMPTSP.	DPMPTSP, Disnakertrans	DPMPTSP (Pelaksana utama): peserta dan pengelola pelatihan. Disnakertrans (Pendukung): penyelenggara teknis pelatihan/sertifikasi.
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal dalam penyusunan proposal investasi dan promosi internasional.	Dinas Koperasi & UKM, DPMPTSP	Dinas Koperasi & UKM (Pelaksana utama): pembina pelaku usaha lokal/UMKM. DPMPTSP (Pendukung): materi teknis investasi dan promosi.
		Mendorong kemitraan awal antara investor dengan UMKM dan BUMD.	Dinas Koperasi & UKM, DPMPTSP	Dinas Koperasi & UKM (Pelaksana utama): fasilitator kemitraan UMKM. DPMPTSP (Pendukung): penghubung dengan investor.
	Tahap II (2030–2034): Penguatan Kemitraan Rantai Pasok & Kolaborasi Riset	Mengembangkan sertifikasi tenaga kerja pada sektor prioritas.	Disnakertrans	Disnakertrans (Pelaksana utama): penyelenggara sertifikasi tenaga kerja.
		Memperkuat kemitraan rantai pasok antara investor, industri besar, dan UMKM lokal.	Dinas Koperasi & UKM, DPMPTSP	Dinas Koperasi & UKM (Pelaksana utama): fasilitator kemitraan rantai pasok UMKM. DPMPTSP (Pendukung): penghubung dengan investor/industri besar.

Prioritas Strategi	Tahap	Rekomendasi	Pemangku Kepentingan	Peran OPD
		Mengembangkan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.	Akademisi/Perguruan Tinggi Mitra, DPMPTSP	Akademisi/Perguruan Tinggi Mitra (Pelaksana utama): pelaksana riset dan kolaborasi keilmuan. DPMPTSP (Pendukung): penghubung kebutuhan riset dengan kebutuhan investasi.
	Tahap III (2035–2039): Inovasi Daerah & Sertifikasi Kompetensi Sektor Baru	Memperkuat inovasi daerah berbasis riset, teknologi, dan transfer pengetahuan dari investor Timur Tengah.	Akademisi/Perguruan Tinggi Mitra, DPMPTSP, Disnakertrans	Akademisi/Perguruan Tinggi Mitra (Pelaksana utama): pelaksana riset dan pengembangan inovasi. DPMPTSP (Pendukung): fasilitasi transfer pengetahuan dari investor. Disnakertrans (Pendukung): penyelarasan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
		Memperluas program sertifikasi kompetensi ke sektor prioritas baru sesuai perkembangan investasi.	Disnakertrans	Disnakertrans (Pelaksana utama): penyelenggara sertifikasi kompetensi.
	Tahap IV (2040–2045): SDM Investasi Berdaya Saing Global	Mewujudkan SDM investasi yang berdaya saing global.	Disnakertrans, DPMPTSP, Dinas Koperasi & UKM, Akademisi/Perguruan Tinggi Mitra	Disnakertrans (Pelaksana utama): pengarah kebijakan pengembangan SDM. DPMPTSP (Pendukung): masukan kebutuhan SDM sektor investasi. Dinas Koperasi & UKM (Pendukung): penguatan SDM pelaku usaha/UMKM. Akademisi/Perguruan Tinggi Mitra (Pendukung): dukungan riset dan pendidikan.

Sumber : Tim Penyusun, 2026

Matriks Roadmap Strategi Peningkatan PMA Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 disusun sebagai tahapan implementasi yang bersifat bertahap dan berkelanjutan. Strategi jangka pendek difokuskan pada penguatan fondasi kelembagaan, promosi investasi, dan peningkatan kesiapan proyek. Selanjutnya, pada jangka menengah diarahkan pada percepatan realisasi investasi melalui penguatan jejaring kerja sama, pengembangan kawasan investasi, dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pada jangka panjang, strategi difokuskan pada penguatan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi utama investasi Timur Tengah di Indonesia melalui pengembangan ekosistem investasi yang berkelanjutan dan berdaya saing global

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kajian Potensi Investasi Negara-Negara Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai upaya untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA), khususnya yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Kesimpulan berikut disusun mengikuti urutan tujuan penyusunan kajian sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) butir II.b, dan diselaraskan dengan capaian visi, misi, serta arah kebijakandalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

1. Karakteristik dan pola investasi investor Timur Tengah

Investor Timur Tengah memiliki karakteristik dan preferensi investasi yang beragam, mulai dari investasi berorientasi pemanfaatan sumber daya dan industri berbasis ekspor, hingga investasi yang tumbuh dari hubungan perdagangan dan kemitraan bisnis jangka panjang. Skala investasi yang terealisasi masih relatif kecil, dengan rata-rata nilai investasi sekitar USD278 ribu per transaksi (data BKPM/LKPM 2025), jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata di Jawa Timur (USD8,58 juta), Jawa Barat (USD4,58 juta), maupun DKI Jakarta (USD1,27 juta) per transaksi, sehingga pendekatan promosi investasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara dan skala investor yang disasar.

2. Profil investor strategis Timur Tengah

Teridentifikasi sejumlah entitas investor strategis dengan rekam jejak global yang relevan dengan sektor unggulan Jawa Tengah, antara lain Masdar, ACWA Power, dan Mubadala Investment Company pada sektor energi baru terbarukan; SALIC dan Al Ain Farms pada sektor ketahanan pangan; serta ADIA dan PIF sebagai investor institusional berskala besar pada sektor kawasan industri dan properti, sebagaimana dipetakan pada profil perusahaan Timur Tengah di sub-bab 5.2 dan 5.6

3. Sektor unggulan dan proyek potensial Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki enam sektor unggulan yang sesuai dengan preferensi investasi Timur Tengah, yaitu Industri Pengolahan (SLQ 1,53), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Pertanian/Kehutanan/Perikanan, Energi Baru Terbarukan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi (SLQ 1,06). Tujuh proyek investasi siap

ditawarkan (IPRO) yang dihimpun melalui Central Java Investment Platform (CJIP) mencakup energi baru terbarukan, ketahanan pangan, pertambangan strategis, agroindustri hilir, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan minat dan karakteristik investor Timur Tengah menjadi bukti kesiapan proyek yang dapat langsung ditawarkan kepada investor Timur Tengah.

4. Kesiapan Jawa Tengah sebagai tujuan investasi

Jawa Tengah didukung oleh infrastruktur strategis (Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Intan, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Jalan Tol Trans Jawa, KEK Kendal, dan KEK Industri Batang) serta regulasi investasi yang kondusif (Undang-Undang Cipta Kerja, sistem OSS, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022). Namun demikian, posisi kompetitif Jawa Tengah dalam penyerapan investasi Timur Tengah masih rendah, yaitu peringkat ketujuh dari 15 provinsi tujuan investasi dengan pangsa hanya 1,54% (setara USD8.353 ribu) dari total realisasi investasi Timur Tengah di Indonesia periode 2021-2025 jauh di bawah Jawa Barat (39,06%), Jawa Timur (27,42%), dan DKI Jakarta (15,89%). Tantangan lain yang teridentifikasi meliputi belum sinkronnya RDTR kabupaten/kota, kurang transparannya mekanisme insentif fiskal, serta proses perizinan yang memerlukan waktu tiga hingga empat bulan, jauh lebih lama dibandingkan Vietnam (dua hari kerja).

5. Faktor yang memengaruhi keputusan investasi Timur Tengah

Faktor politik, ekonomi, sosial budaya, regulasi, dan lingkungan (PESTLE) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi Timur Tengah. Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, program diversifikasi ekonomi negara-negara Teluk (Saudi Vision 2030, UAE Centennial 2071), kedekatan nilai sosial-keagamaan, serta meningkatnya perhatian terhadap investasi berkelanjutan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan, sementara ketidakstabilan geopolitik kawasan dan fluktuasi harga minyak dunia tetap perlu diwaspadai dan dimitigasi sebagaimana dijabarkan pada sub-bab 5.8

6. Kesesuaian potensi daerah dengan kebutuhan investor serta rekomendasi strategi promosi

Hasil analisis kesesuaian menunjukkan kecocokan yang kuat antara potensi ekonomi Jawa Tengah dengan preferensi investor Timur Tengah, terutama pada sektor industri pengolahan, pariwisata, agroindustri, energi terbarukan, ekonomi halal, serta kawasan industri dan properti komersial. Delapan rumusan strategi SWOT (Tabel 5.36) dan

rekomendasi strategis pada sub-bab 5.9 dirumuskan untuk merespons temuan tersebut, mencakup empat arah utama: (1) penguatan promosi enam sektor unggulan berbasis IPRO melalui CJIP; (2) percepatan reformasi layanan investasi; (3) penguatan kapasitas pelaku usaha lokal dan UMKM; serta (4) penguatan ketahanan investasi terhadap risiko geopolitik, ekonomi, dan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi dan kesiapan yang memadai untuk menjadi salah satu tujuan investasi utama bagi negara-negara Timur Tengah. Kesimpulan ini sejalan dengan Visi dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, yaitu “Penanaman Modal yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan melalui Perbaikan Iklim Investasi untuk Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional”, serta Misi ke-2 yang mendorong penanaman modal pada sektor-sektor dengan efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar terhadap perekonomian daerah. Dengan dukungan strategi promosi yang lebih tersegmentasi, penguatan layanan investasi, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait sebagaimana diarahkan dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, investasi dari kawasan Timur Tengah berpotensi meningkat secara bertahap dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan promosi investasi yang lebih efektif untuk menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi unggulan di Indonesia.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) angka IX tentang Ruang Lingkup Pekerjaan, kajian ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam meningkatkan realisasi investasi dari negara-negara Timur Tengah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis potensi sektor unggulan, profil dan karakteristik investor, kesesuaian peluang investasi, serta identifikasi risiko investasi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan diselaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan, tahapan pelaksanaan, serta

pendekatan Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diarahkan dalam Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, penguatan promosi investasi, serta pengembangan strategi peningkatan investasi Timur Tengah di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

1. Mengembangkan strategi promosi investasi yang lebih tersegmentasi dan berorientasi pada pembangunan hubungan.

Upaya promosi perlu disesuaikan dengan karakteristik investor dari negara-negara Timur Tengah, baik sovereign wealth fund, korporasi swasta, maupun investor keluarga, melalui penyusunan materi promosi yang lebih spesifik, pemanfaatan bahasa Arab, serta optimalisasi proyek-proyek investasi prioritas (IPRO) sebagai media penawaran kepada calon investor. Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan ke-7 RUPM 2025-2045 mengenai Promosi Penanaman Modal, khususnya penguatan narasi promosi berbasis klaster industri dan investment branding daerah.

2. Memperkuat jejaring diplomatik dan kelembagaan sebagai bagian dari strategi peningkatan investasi.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Kementerian Luar Negeri, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Indonesia Investment Authority (INA), serta mitra strategis lainnya perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperluas akses promosi, dan membuka peluang kerja sama investasi yang lebih berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa arah kebijakan ke-8 RUPM 2025-2045 mengenai Kerjasama Penanaman Modal saat ini baru mencantumkan rencana sister province cooperation dengan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Belanda, dan Australia, tanpa secara eksplisit memasukkan negara-negara Timur Tengah. DPMPTSP perlu mengusulkan penambahan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar ke dalam daftar mitra sister province serta memperluas kerja sama dengan foreign chambers of commerce Timur Tengah, agar arah RUPM Provinsi selaras dengan temuan kajian ini.

3. Meningkatkan kualitas layanan investasi serta memperkuat kepastian regulasi.

Penyempurnaan tata kelola investasi melalui percepatan sinkronisasi dokumen tata ruang, peningkatan efektivitas layanan perizinan berbasis OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), transparansi pemberian insentif investasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi perlu menjadi prioritas guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan

kompetitif, sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan pertama RUPM 2025-2045 tentang penguatan iklim usaha daerah

4. Mengintegrasikan pengelolaan risiko investasi ke dalam kebijakan pengembangan investasi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperkuat sistem pemantauan dan mitigasi risiko investasi, khususnya terhadap risiko yang bersumber dari dinamika ekonomi global, perubahan nilai tukar, serta kondisi geopolitik, sehingga kebijakan promosi dan pelayanan investasi dapat lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

5. Mengarahkan promosi investasi Timur Tengah secara spasial sesuai kerangka Wilayah Pengembangan (WP) RUPM 2025-2045.

Sektor unggulan yang diminati investor Timur Tengah perlu dipetakan pada WP yang relevan, antara lain WP Kedungsepur (Kendal, Demak, Grobogan, Kota Semarang, Kota Salatiga) untuk energi baru terbarukan, kawasan industri ekspor, dan logistik; WP Cibalingmas (Cilacap, Purbalingga, Banyumas) untuk energi dan industri berat; serta WP Keburejo dan WP Gelangmanggung untuk agroindustri dan pariwisata. Pendekatan spasial ini memperkuat keterkaitan antara sektor unggulan hasil analisis kesesuaian pada sub-bab 5.5-5.6 dengan kawasan industri dan peruntukan industri (KI/KPI) yang telah dipetakan dalam RUPM

6. Melaksanakan strategi peningkatan investasi secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan mengikuti empat tahap RUPM 2025-2045.

Implementasi rekomendasi diselaraskan dengan tahapan pembangunan daerah sebagai berikut: Tahap I (2025-2029) memprioritaskan penguatan promosi tersegmentasi dan perbaikan layanan investasi dasar; Tahap II (2030-2034) mendorong akselerasi realisasi investasi Timur Tengah pada sektor energi baru terbarukan dan agroindustri hilir; Tahap III (2035-2039) memperluas kerja sama investasi internasional dan integrasi ke rantai nilai global; serta Tahap IV (2040-2045) memantapkan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi utama investasi Timur Tengah di Indonesia. Dengan pentahapan ini, pelaksanaan program, pencapaian target, serta evaluasi kinerja peningkatan investasi dari negara-negara Timur Tengah dapat dilakukan secara terukur.

Keenam rekomendasi strategis tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan perlu diimplementasikan secara sinergis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya DPMPTSP, bersama perangkat daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaannya perlu disertai dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan serta menyesuaikan strategi dengan dinamika

investasi yang berkembang. Dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan Provinsi Jawa Tengah mampu meningkatkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari negara-negara Timur Tengah, memperkuat daya saing investasi daerah, serta semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi unggulan di Indonesia.

GLOSARIUM

Penanaman Modal Asing (PMA)

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing, baik individu, badan usaha, maupun pemerintah asing, untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik.

Investasi

Kegiatan penanaman modal pada suatu sektor ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

PESTLE Analysis

Metode analisis untuk mengkaji faktor eksternal makro yang memengaruhi keputusan investasi, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan.

SWOT Analysis

Metode analisis untuk menilai kondisi internal dan eksternal suatu wilayah melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

TrendAnalysis

Analisis yang digunakan untuk melihat perkembangan dan pola investasi dalam periode waktu tertentu.

Profil Investor

Karakteristik investor yang mencakup perilaku investasi, preferensi sektor, toleransi risiko, serta pola pengambilan keputusan.

Analisis Kesesuaian

Analisis untuk mencocokkan kebutuhan dan preferensi investor dengan potensi serta proyek investasi yang tersedia di daerah.

Analisis Risiko

Proses identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan investasi, baik dari sisi investor maupun daerah tujuan investasi.

IPRO (*Investment Project Ready to Offer*)

Proyek investasi yang telah siap ditawarkan kepada investor karena telah memenuhi aspek kelayakan teknis, ekonomi, dan regulasi.

Iklm Investasi

Kondisi yang memengaruhi daya tarik suatu wilayah bagi investor, termasuk regulasi, stabilitas ekonomi, infrastruktur, dan kemudahan perizinan.

Sektor Unggulan

Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta berpotensi tinggi untuk dikembangkan dan menarik investasi.

Keunggulan Kompetitif

Kemampuan suatu daerah dalam menawarkan nilai lebih dibanding wilayah lain dalam menarik investasi, seperti efisiensi biaya, kualitas infrastruktur, dan kemudahan usaha.

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Prinsip investasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi

Return on Investment (ROI)

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi*. 3, 8010–8025.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, (2021).
- Badan Standardisasi Nasional (Bsn). (2018). *Manajemen Risiko — Pedoman*.
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). Institutions And The Oli Paradigm Of The Multinational Enterprise. *Asia Pacific J Manage*, 573–593.
[Https://Doi.Org/10.1007/S10490-007-9074-Z](https://doi.org/10.1007/S10490-007-9074-Z)
- ‘ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, (2022).
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, (2023).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, (2017).
- Mahri, J. W., Nur, C. M., Al, R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam (Pertama)*. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Malhotra, N., & Hinings, C. R. B. (2015). Unpacking Continuity And Change As A Process Of Organizational Transformation. *Long Range Planning*, 48(1), 1–22.
[Https://Doi.Org/10.1016/J.Lrp.2013.08.012](https://doi.org/10.1016/J.Lrp.2013.08.012)
- Maulana, H., Hafifah, D., & Agustin, A. P. (2024). Menggali Keunggulan Kompetitif Umkm, Analisis Swot Dan Implikasi Strategis Pada Kota Bandar Lampung. *Ecoma*, 2(3), 136–146.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Energi Daerah, (2018).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, (2022).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 Dengan, (2024).

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2025 Tentang Rpjmd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, (2025).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, (2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pub. L. No. Pp No. 38 Tahun 2007 (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (2025).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (2014).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, 1 (2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, (2025).

Putri, J. K., Fhon, T., Arifin, N., Syavira, R., Nur, Z. R., Nasution, M., Qolbiah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(3), 201–212.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications: Design And Methods* (6th Ed., Vol. 11, Nomor 1). Sage Publication, Inc.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JAWA TENGAH

JL. MGR SUGIYOPRANOTO NO.1, PENDRIKAN KIDUL,
KEC. SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50131